



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 *AUDITED*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 *AUDITED*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BUPATI GUNUNGKIDUL

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul berbasis akrual untuk Tahun Anggaran 2020 dapat kami selesaikan tepat waktu.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015.

Tujuan umum dari penyusunan LKPD menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 15 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 disusun dengan cara menggabungkan 47 (empat puluh tujuh) Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020, secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp1.942.667.892.829,77 realisasinya mencapai sebesar Rp1.792.377.765.120,73 atau sebesar 92,26%.
- b. Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp2.077.860.821.316,05 realisasinya mencapai sebesar Rp1.775.056.482.992,33 atau sebesar 85,43%.
- c. Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan defisit sebesar (Rp135.192.928.486,28) dengan realisasi surplus sebesar Rp17.321.282.128,40.
- d. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp135.192.928.486,28 dengan realisasi sebesar Rp135.377.061.711,28.
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp152.698.343.839,68.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL merupakan akumulasi SILPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp172.696.710.995,63.
- b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp172.696.710.995,63.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp152.698.343.839,68.
- d. Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Pendapatan, Beban Operasi dan Beban Transfer serta Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendapatan – LO sebesar Rp1.850.996.902.133,06 terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp212.629.358.508,01;
 - 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp1.492.168.419.071,21; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp146.235.026.631,46.
- b. Beban – LO sebesar Rp1.638.773.003.107,80 terdiri dari :
 - 1) Beban Pegawai sebesar Rp865.240.727.351,00;
 - 2) Beban Persediaan sebesar Rp113.112.262.885,43;
 - 3) Beban Jasa sebesar Rp259.920.980.121,78;
 - 4) Beban Pemeliharaan sebesar Rp28.480.914.639,42;
 - 5) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp18.426.261.244,00;
 - 6) Beban Bunga sebesar Rp 0,00;
 - 7) Beban Hibah sebesar Rp56.831.342.158,00;

- 8) Beban Bantuan Sosial Rp3.587.432.500;
- 9) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp173.200.583.618;
- 10) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp2.519.641.641,54; dan
- 11) Beban Transfer sebesar Rp117.918.753.390,00;
- c. Surplus dari Operasi sebesar Rp211.793.904.661,13.
- d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp6.121.547.393,00.
- e. Pos Luar Biasa sebesar Rp42.432.246.212,80.
- f. Surplus LO sebesar Rp175.483.187.841,33.

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2020 mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2020.

- a. Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.205.450.194.236,38 yang terdiri dari :
 - 1) Aset Lancar sebesar Rp253.902.013.132,44;
 - 2) Investasi Jangka Panjang sebesar Rp304.620.148.429,08;
 - 3) Aset Tetap sebesar Rp2.476.028.497.588,77;
 - 4) Dana Cadangan sebesar Rp 0,00; dan
 - 5) Aset Lainnya sebesar Rp170.731.173.685,44.
- b. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.098.423.244,65 yang terdiri dari :
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp12.098.423.244,65; dan
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0,00.
- c. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.193.183.409.591,08.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp3.193.183.409.591,08.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara selama Tahun Anggaran 2020. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp152.698.343.839,68 dan saldo kas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp173.987.461.939,63.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

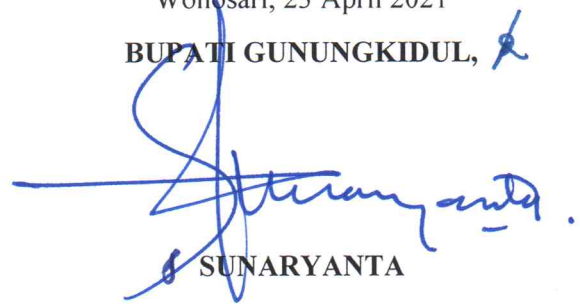
CaLK berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos keuangan dan informasi non keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

CaLK meliputi penjelasan atau rincian angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas.

Demikian, LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 berbasis akrual ini disusun, agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya.

Wonosari, 23 April 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



SUNARYANTA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	ix
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	x
OPINI BPK	xv
 LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	xvii
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	xix
3. Neraca	xx
4. Laporan Operasional.....	xxii
5. Laporan Perubahan Ekuitas	xxiv
6. Laporan Arus Kas	xxv
7. Catatan atas Laporan Keuangan	1
- Bab I Pendahuluan	1
- Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD	6
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	53
- Bab IV Kebijakan Akuntansi	91
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	111
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	111
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih	140
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca	141
D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	192
E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	216
F. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	221
- Bab VI Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan	226
- Bab VII Penutup	247
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekening Koran
2. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
 - a. PDAM Tirta Handayani
 - b. PD BPR Bank Daerah Gunungkidul
3. Ikhtisar Laporan APBDes
4. Daftar Saldo Piutang Ekstrakomtabel
5. Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD
6. Daftar Aset Lainnya
7. Daftar Kewajiban Jangka Pendek
8. Aset Tak Berwujud

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	10
Tabel 2.2	Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020	11
Tabel 2.3	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)	15
Tabel 2.4	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	16
Tabel 2.5	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	17
Tabel 2.6	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Persen)	18
Tabel 2.7	Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2019	21
Tabel 2.8	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019	23
Tabel 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019	24
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan RKPD 2020	24
Tabel 2.11	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019	25
Tabel 2.12	Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019	25
Tabel 2.13	Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan RKPD 2020	26
Tabel 2.14	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan RKPD 2020	27
Tabel 2.15	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2020	27
Tabel 2.16	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	35
Tabel 2.17	Perubahan Belanja pada APBD Tahun 2020	42
Tabel 2.18	Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Tahun 2020	43
Tabel 2.19	Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020	45
Tabel 2.20	Matrik Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2020	48

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	PDRB Kabupaten Gunungkidul 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2020	10
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul dan DIY Tahun 2019	11
Gambar 2.3	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta rupiah)	13
Gambar 2.4	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta rupiah)	14
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Deflator Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2015-2019	19
Gambar 2.6	Perkembangan ICOR Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019	20
Gambar 2.7	PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)	22
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2019	25
Gambar 2.9	Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul 2015-2019	27



BUPATI GUNUNGKIDUL

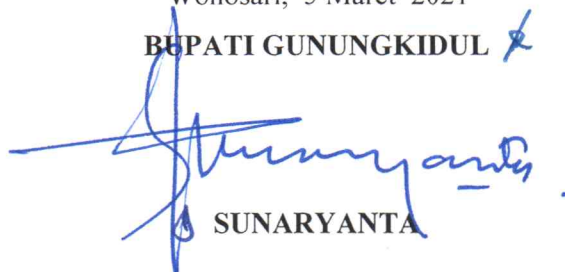
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca (d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonosari, 5 Maret 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Taman Bhakti Nomor 2B, Telp. (0274) 391539 Wonosari 55812
Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, ***tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.***

Wonosari, 3 Maret 2021



INSPEKTUR,

Drs. SUJARWO, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660425 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Taman Bhakti Nomor 2B, Telp. (0274) 391539 Wonosari 55812
Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id. Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Nomor : 700/095
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : **Hasil Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun
Anggaran 2020**

Wonosari, 3 Maret 2021

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
Di

Wonosari

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul *unaudited* berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;

6. Surat Perintah Bupati Gunungkidul Nomor 903/0760 tentang Reviu LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
7. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/Rev.LKPD-ITDA/2021.

B. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD serta memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sasaran reviu adalah Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 22 Februari sampai dengan 3 Maret 2021.

D. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPD dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

E. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua! dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, *tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.*

F. Simpulan dan Rekomendasi

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai antara lain pengendalian atas Pengeluaran dan Penerimaan Kas, Persediaan, Aset Tetap dan lain-lain. Penyelenggaraan proses akuntansi untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu dalam rangka membuat laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Terhadap masing-masing pos dalam

komponen laporan keuangan tersebut telah dilakukan analisis vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu juga dilakukan analisis horizontal antara LRA dan Neraca, analisis horizontal antara LRA dan LAK, analisis horizontal antara Neraca dan LAK, analisis horizontal antara LRA dan LPSAL, analisis horizontal antara LO, LPE dan Neraca, analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca. Simpulan dan rekomendasi atas penyajian LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu terlampir.

G. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Rekomendasi atas Laporan Hasil Reviu tahun lalu Nomor 700/T.143/Rev.Keu/2020 tanggal 26 Maret 2020 telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.


INSPEKTUR
Drs. SUJARWO, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660425 199102 1 001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKASAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengajuan bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/04/2021 tanggal 28 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 28 April 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA
Register Negara Akuntan No. D-15.279



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI APBD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019 (Audited)
PENDAPATAN	5.1.				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1	218.659.195.459,92	228.208.528.545,52	104,37	254.810.945.072,62
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a	48.409.308.262,47	53.496.629.854,00	110,51	57.963.265.056,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.b	17.427.643.670,00	18.734.711.662,87	107,50	35.553.531.281,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.c	16.874.256.511,00	16.874.256.511,63	100,00	15.068.840.811,36
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.d	135.947.987.016,45	139.102.930.517,02	102,32	146.225.307.924,01
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</i>		218.659.195.459,92	228.208.528.545,52	104,37	254.810.945.072,62
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.2.1	1.254.486.746.954,00	1.233.106.659.264,00	98,30	1.323.197.557.079,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.a	29.045.414.398,00	21.251.266.005,00	73,17	13.056.875.869,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.2.1.b	3.274.226.556,00	2.160.688.954,00	65,99	2.513.027.639,00
Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.c	887.858.891.000,00	882.566.083.000,00	99,40	965.080.463.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.d	334.308.215.000,00	327.128.621.305,00	97,85	342.547.190.571,00
<i>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan</i>		1.254.486.746.954,00	1.233.106.659.264,00	98,30	1.323.197.557.079,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.2.2	206.260.699.000,00	65.794.904.000,00	31,90	195.111.184.000,00
Dana Otonomi Khusus	5.1.2.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	5.1.2.2.b	206.260.699.000,00	65.794.904.000,00	31,90	195.111.184.000,00
<i>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>		206.260.699.000,00	65.794.904.000,00	31,90	195.111.184.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.2.3	94.140.905.135,85	102.149.130.231,00	108,51	102.025.720.182,72
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.3.a	94.140.905.135,85	102.149.130.231,00	108,51	102.025.720.182,72
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</i>		94.140.905.135,85	102.149.130.231,00	108,51	102.025.720.182,72
Bantuan Keuangan Provinsi	5.1.2.4	94.623.523.660,00	91.005.025.848,21	96,18	173.379.713.904,00
Bantuan Keuangan khusus	5.1.2.4.a	94.623.523.660,00	91.005.025.848,21	96,18	173.379.713.904,00
<i>Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi</i>		94.623.523.660,00	91.005.025.848,21	96,18	173.379.713.904,00
<i>Jumlah Pendapatan Transfer</i>		1.649.511.874.749,85	1.492.055.719.343,21	90,45	1.793.714.175.165,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.3.1.	74.496.822.620,00	72.113.517.232,00	96,80	64.535.304.701,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>		74.496.822.620,00	72.113.517.232,00	96,80	64.535.304.701,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.942.667.892.829,77	1.792.377.765.120,73	92,26	2.113.060.424.939,34
BELANJA	5.2.				
BELANJA OPERASI	5.2.1.				
Belanja Pegawai	5.2.1.a.	889.231.709.100,68	864.158.776.586,00	97,18	880.858.227.337,00
Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.b.	454.487.527.256,03	405.655.775.960,50	89,26	459.764.784.618,55
Bunga	5.2.1.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	5.2.1.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	5.2.1.e.	56.892.468.691,00	56.831.342.158,00	99,89	24.455.795.000,00
Bantuan Sosial	5.2.1.f.	5.454.500.000,00	3.587.432.500,00	65,77	1.050.000.000,00
Bantuan Keuangan	5.2.1.g.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jumlah Belanja Operasi</i>		1.406.066.205.047,71	1.330.233.327.204,50	94,61	1.366.128.806.955,55

Uraian	Catatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (Audited)	%	Realisasi 2019 (Audited)
BELANJA MODAL	5.2.2.				
Belanja Tanah	5.2.2.a.	5.327.453.700,00	5.223.253.120,00	98,04	123.999.928.350,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.b.	61.307.972.866,00	57.107.076.802,75	93,15	88.224.734.163,90
Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.c.	151.646.967.683,00	140.574.735.393,01	92,70	158.352.591.834,18
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.d.	49.484.562.036,00	48.086.398.631,07	97,17	106.091.380.314,24
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.e.	164.875.600,00	145.296.800,00	88,13	8.140.304.746,00
Belanja Aset Lainnya	5.2.2.f.	3.940.921.600,00	3.757.694.740,00	95,35	8.975.749.990,00
Jumlah Belanja Modal		271.872.753.485,00	254.894.455.486,83	93,76	493.784.689.398,32
BELANJA TAK TERDUGA	5.2.3.				
Belanja Tak Terduga	5.2.3.a.	139.954.542.018,34	70.873.337.876,00	50,64	1.098.249.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		139.954.542.018,34	70.873.337.876,00	50,64	1.098.249.000,00
JUMLAH BELANJA		1.817.893.500.551,05	1.656.001.120.567,33	91,09	1.861.011.745.353,87
TRANSFER	5.3.				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.3.1				
Bagi Hasil Pajak	5.3.1.a.	5.801.490.500,00	5.801.490.500,00	100,00	5.166.966.500,00
Bagi Hasil Retribusi	5.3.1.b.	3.521.691.465,00	3.285.528.125,00	93,29	5.842.697.435,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.3.1.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil ke Desa		9.323.181.965,00	9.087.018.625,00	97,47	11.009.663.935,00
Transfer Bantuan Keuangan	5.3.2.				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2.a.	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.3.2.b.	250.434.138.800,00	109.968.343.800,00	43,91	258.917.289.300,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.3.2.c.	0,00	0,00	0,00	1.073.593.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		250.644.138.800,00	109.968.343.800,00	43,87	260.200.882.300,00
Jumlah Transfer		259.967.320.765,00	119.055.362.425,00	45,80	271.210.546.235,00
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN BELANJA TRANSFER		2.077.860.821.316,05	1.775.056.482.992,33	85,43	2.132.222.291.588,87
SURPLUS/DEFISIT		(135.192.928.486,28)	17.321.282.128,40	-12,81	-19.161.866.649,53
PEMBIAYAAN	5.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.4.1				
Penggunaan SiLPA	5.4.1.a.	172.696.710.995,63	172.696.710.995,63	100,00	225.467.603.263,16
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.4.1.b.	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.4.1.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan		172.696.710.995,63	172.696.710.995,63	100,00	225.467.603.263,16
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.4.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.4.2.a.	37.319.649.284,35	37.319.649.284,35	100,00	33.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	5.4.2.b.	184.133.225,00	0,00	0,00	109.025.618,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.4.2.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran		37.503.782.509,35	37.319.649.284,35	99,51	33.609.025.618,00
PEMBIAYAAN NETTO		135.192.928.486,28	135.377.061.711,28	100,14	191.858.577.645,16
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.5.		152.698.343.839,68		172.696.710.995,63

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Wonosari, 4 Maret 2021

 BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

No.	Uraian	Catatan	Tahun 2020 <i>Audited</i>	Tahun 2019 <i>Audited</i>
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		172.696.710.995,63	225.467.603.263,16
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		172.696.710.995,63	225.467.603.263,16
	Sub Total		0,00	0,00
3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		152.698.343.839,68	172.696.710.995,63
	Sub Total		152.698.343.839,68	172.696.710.995,63
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
5	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir		152.698.343.839,68	172.696.710.995,63



Wonosari, 23 April 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL

[Signature]
SUNARYANTA

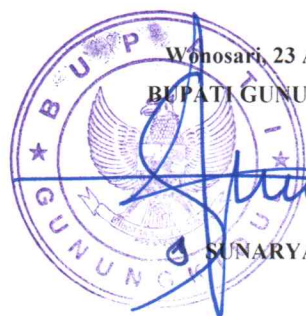


PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2020 AUDITED DAN AUDITED 2019

Uraian	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019 Audited
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah	115.272.989.376,84	140.071.297.570,31
Kas di Bendahara Penerimaan	339.798.844,12	285.210.185,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	559.130.035,00	6.520.840,00
Kas di BLUD	27.904.236.540,89	28.189.595.013,32
Kas Dana BOS	6.948.219.635,00	5.435.049.331,00
Kas Lainnya	163.830.516,00	-
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	17.395.930.686,00	19.540.376.629,00
<i>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</i>	<i>(6.815.325.773,61)</i>	<i>(10.101.796.556,92)</i>
Piutang Pajak Netto	10.580.604.912,39	9.438.580.072,08
Piutang Retribusi	824.156.434,00	439.859.376,00
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	<i>(195.276.883,10)</i>	<i>(110.624.777,80)</i>
Piutang Retribusi Netto	628.879.550,90	329.234.598,20
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.207.331.734,83	16.874.166.149,90
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<i>(66.036.658,67)</i>	<i>(84.370.830,75)</i>
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	13.141.295.076,16	16.789.795.319,15
Piutang Lain-lain PAD yang sah	1.053.769.109,00	5.113.860.867,00
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah</i>	<i>(5.268.845,55)</i>	<i>(25.569.304,34)</i>
Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto	1.048.500.263,45	5.088.291.562,66
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.783.042.594,00	3.670.342.866,00
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	<i>(18.915.212,97)</i>	<i>(18.351.714,33)</i>
Piutang Transfer Netto	3.764.127.381,03	3.651.991.151,67
Piutang Lainnya	-	-
<i>Penyisihan Piutang Lainnya</i>	-	-
Piutang Lainnya Netto	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	73.550.401.000,66	54.006.298.008,58
Jumlah Aset Lancar	253.902.013.132,44	263.291.863.651,97
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	304.620.148.429,08	262.721.098.311,34
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	304.620.148.429,08	262.721.098.311,34
Jumlah Investasi Jangka Panjang	304.620.148.429,08	262.721.098.311,34
ASET TETAP		
Tanah	651.748.142.052,00	633.523.669.052,00
Peralatan dan Mesin	578.367.665.238,46	500.275.520.488,19
Gedung dan Bangunan	1.077.203.399.495,33	1.017.600.966.763,75
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.250.493.150.442,39	1.189.455.918.454,63
Aset Tetap Lainnya	74.336.963.706,90	48.008.889.388,14
Konstruksi Dalam Pengerjaan	136.005.637.084,74	55.026.013.591,97
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(1.292.126.460.431,05)</i>	<i>(1.109.434.009.100,66)</i>
Jumlah Aset Tetap	2.476.028.497.588,77	2.334.456.968.638,02

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019 Audited
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	-	-
<i>Jumlah Dana Cadangan</i>	-	-
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.071.075.160,00	188.750.000,00
Aset Tidak Berwujud	43.885.772.860,76	37.540.568.962,76
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(18.891.247.676,02)	(15.367.878.633,16)
Aset Tidak Berwujud Netto	24.994.525.184,74	22.172.690.329,60
Aset Lain-lain	143.665.573.340,70	148.434.930.223,39
<i>Jumlah Aset Lainnya</i>	170.731.173.685,44	170.796.370.552,99
JUMLAH ASET	3.205.281.832.835,73	3.031.266.301.154,32
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	1.290.750.944,00
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.228.573.726,74	1.258.346.129,03
Utang Belanja	10.633.686.177,91	14.435.402.367,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	236.163.340,00	1.372.772.375,00
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	12.098.423.244,65	18.357.271.815,03
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	12.098.423.244,65	18.357.271.815,03
EKUITAS		
Ekuitas	3.193.183.409.591,08	3.012.909.029.339,29
JUMLAH EKUITAS	3.193.183.409.591,08	3.012.909.029.339,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.205.281.832.835,73	3.031.266.301.154,32

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Wonosari, 23 April 2021
 BUPATI GUNUNGKIDUL, ✕

 SUNARYANTA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4	Pendapatan Pajak Daerah	51.285.056.746,00	59.317.330.124,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	19.188.790.551,54	35.419.475.605,77
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.207.331.734,83	16.874.166.149,90
7	Lain-lain PAD Yang Sah	128.948.179.475,64	146.936.478.507,01
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 S.D 7)	212.629.358.508,01	258.547.450.386,68
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	21.251.266.005,00	13.056.875.869,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.160.688.954,00	2.513.027.639,00
13	Dana Alokasi Umum	882.566.083.000,00	965.080.463.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	327.128.621.305,00	342.547.190.571,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	1.233.106.659.264,00	1.323.197.557.079,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		
17	Dana Penyesuaian	0,00	136.052.137.000,00
18	Dana Insentif Daerah	65.794.904.000,00	59.059.047.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17 + 18)	65.794.904.000,00	195.111.184.000,00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	102.261.829.959,00	105.696.063.048,72
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	91.005.025.848,21	173.379.713.904,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21 + 23)	193.266.855.807,21	279.075.776.952,72
25	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 19 + 24)	1.492.168.419.071,21	1.797.384.518.031,72
26	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
27	Pendapatan Hibah	146.235.026.631,46	116.244.827.464,55
28	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 S.D 29)	146.235.026.631,46	116.244.827.464,55
31	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 25 + 30)	1.851.032.804.210,68	2.172.176.795.882,95
32	BEBAN		
33	Beban Pegawai	865.240.727.351,00	844.934.518.564,00
34	Beban Persediaan	113.112.262.885,43	148.413.623.212,81
35	Beban Jasa	259.920.980.121,78	307.922.044.163,20
36	Beban Pemeliharaan	28.480.914.639,42	27.064.491.099,27
37	Beban Perjalanan Dinas	18.426.261.244,00	42.597.013.669,00
38	Beban Bunga	0,00	0,00
39	Beban Subsidi	0,00	0,00
40	Beban Hibah	56.831.342.158,00	30.896.785.650,00
41	Beban Bantuan Sosial	3.587.432.500,00	1.050.000.000,00
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi	173.200.583.618,38	167.982.211.673,63
43	Beban Penyisihan Piutang	2.519.641.641,54	2.004.334.967,89
44	Beban Transfer	117.918.753.390,00	272.008.828.185,00
45	Beban Lain-lain	0,00	0,00
46	JUMLAH BEBAN (33 sd 45)	1.639.238.899.549,55	1.844.873.851.184,80
47	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (31 - 46)	211.793.904.661,13	327.302.944.698,15

No	Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
48	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
49	Surplus Penjualan Aset Non lancar	6.121.547.393,00	391.243.198,00
50	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
51	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
53	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
54	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (49 S.D 53)	6.121.547.393,00	391.243.198,00
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47 - 54)	217.915.452.054,13	327.694.187.896,15
56	POS LUAR BIASA		
57	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
58	Beban Luar Biasa	42.432.264.212,80	1.098.249.000,00
59	JUMLAH POS LUAR BIASA (57 sd 58)	(42.432.264.212,80)	(1.098.249.000,00)
60	SURPLUS/DEFISIT- LO (55-60)	175.483.187.841,33	326.595.938.896,15

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Wonosari, 23 April 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL

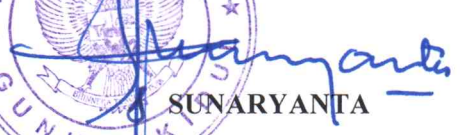
SUNARYANTA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	2020 (Audited)	2019 (Audited)
EKUITAS AWAL	3.012.909.029.339,29	2.828.381.626.607,56
Surplus/Defisit - LO	175.483.187.841,33	326.595.938.896,15
Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar	4.791.192.410,46	(142.068.536.164,42)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	3.193.183.409.591,08	3.012.909.029.339,29

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Wonosari, 23 April 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
METODE LANGSUNG

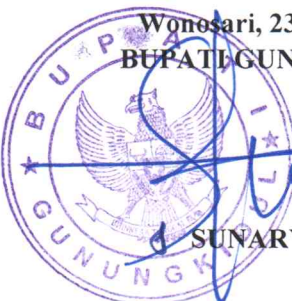
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2020 <i>Audited</i>	Tahun 2019 <i>Audited</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Pajak Daerah		53.300.849.183,00	57.819.154.055,00
Penerimaan Retribusi Daerah		18.626.595.567,37	35.421.575.141,25
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.874.256.511,63	15.068.840.811,36
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		132.981.383.124,04	145.824.921.682,01
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		21.251.266.005,00	13.056.875.869,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.160.688.954,00	2.513.027.639,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		882.566.083.000,00	965.080.463.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		327.128.621.305,00	342.547.190.571,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	136.052.137.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		102.149.130.231,00	102.025.720.182,72
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		91.005.025.848,21	173.379.713.904,00
Penerimaan Hibah		72.113.517.232,00	64.535.304.701,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		65.794.904.000,00	59.059.047.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.785.952.320.961,25	2.112.383.971.556,34
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pegawai		864.289.809.086,00	880.858.227.337,00
Pembayaran Barang dan Jasa		405.524.743.460,50	459.764.784.618,55
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		56.831.342.158,00	24.455.795.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		3.587.432.500,00	1.050.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		109.968.343.800,00	260.200.882.300,00
Pembayaran Tak Terduga		70.873.337.876,00	1.098.249.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.801.490.500,00	5.166.966.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.285.528.125,00	5.842.697.435,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.520.162.027.505,50	1.638.437.602.190,55
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		265.790.293.455,75	473.946.369.365,79

Uraian	Catatan	Tahun 2020 Audited	Tahun 2019 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas :			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		286.436.665,00	80.205.698,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		5.835.110.728,00	311.037.500,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		6.121.547.393,00	391.243.198,00
Arus Keluar Kas :			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		5.223.253.120,00	123.999.928.350,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		57.107.076.802,75	88.224.734.163,90
Perolehan Gedung dan Bangunan		140.574.735.393,01	158.352.591.834,18
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		48.086.398.631,07	106.091.380.314,24
Perolehan Aset Tetap Lainnya		145.296.800,00	8.140.304.746,00
Perolehan Aset Lainnya		3.757.694.740,00	8.975.749.990,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		37.319.649.284,35	33.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		292.214.104.771,18	527.284.689.398,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(286.092.557.378,18)	(526.893.446.200,32)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas :			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	109.025.618,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pengembalian Dana Transfer kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	109.025.618,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(109.025.618,00)

Uraian	Catatan	Tahun 2020 Audited	Tahun 2019 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		133.842.139.263,00	132.866.416.718,43
BOSNAS		0,00	0,00
BOSNAS Sekolah Swasta dan SLB		0,00	0,00
Hibah Pihak Ketiga (CSR)		0,00	0,00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta		0,00	0,00
Uang Persediaan		10.495.000.000,00	7.395.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		144.337.139.263,00	140.261.416.718,43
Arus Keluar Kas :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		135.132.890.207,00	132.866.416.718,43
BOSNAS		0,00	0,00
BOSNAS Sekolah Swasta dan SLB		0,00	0,00
Hibah Pihak Ketiga (CSR)		0,00	0,00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta		0,00	0,00
Uang Persediaan		10.495.000.000,00	7.395.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		145.627.890.207,00	140.261.416.718,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(1.290.750.944,00)	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		(21.593.014.866,43)	(53.056.102.452,5)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		173.987.461.939,63	226.758.354.207,16
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		150.684.734.587,73	173.702.251.754,63
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		339.798.844,12	285.210.185,00
Saldo Akhir Kas		151.024.533.431,85	173.987.461.939,63

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Wonosari, 23 April 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL, 

SUNARYANTA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sudah selesai disusun. Laporan keuangan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Permendagri tersebut telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul telah disusun sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama satu periode Tahun Anggaran 2020.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang transparan dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, berupa posisi keuangan dan aset daerah dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan di Tahun Anggaran 2020 yaitu membandingkan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, dengan anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 1 Januari 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah diganti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) baik dalam penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban selama kurang lebih 6 tahun. Disamping hal itu untuk pengelolaan aset dan persediaan telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Sistem Informasi Manajemen Persediaan sejak tahun 2018.

Laporan keuangan kadangkala mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyusun laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang diperlukan untuk melakukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Catatan atas Laporan Keuangan perlu dibuat dengan menyajikan penjelasan dan informasi atas seluruh akun dan sub akun pada pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk memudahkan pengguna terutama Lembaga Pemeriksa dalam memahami laporan keuangan dapat dengan jelas dan tidak multi tafsir. Penyajian laporan keuangan dengan *full disclosure* sehingga akan membantu fungsi konsolidasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- r. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015;
- s. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;

- u. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020; dan
- v. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2020 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menjelaskan tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, dan pos komponen Laporan Arus Kas.
- Bab VI Informasi Tambahan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Bab VII Penutup.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN APBD

2.1 Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak $\pm$ 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan, 144 Desa dan 1.431 Padukuhan.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm$ 90 %) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berupa batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa.

Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai garis pantai yang cukup panjang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan.

Kabupaten Gunungkidul masuk kedalam situs Geopark Gunung Sewu yang terletak antara Yogyakarta dan Pacitan. Kawasan ini memanjang arah barat - timur melintasi 3 wilayah Kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri dan Pacitan) dan 3 wilayah Provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan luas 1.802 km². Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global yang didukung oleh UNESCO pada tanggal 19 September 2015 di Tottori, Jepang. Pada bulan Nopember 2015 Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Geopark Gunung Sewu terdiri dari 33 situs yang tersebar di 3 Geo Area, yaitu Geo Area Gunungkidul sebanyak 13 geo tapak, Geo Area Wonogiri sebanyak 7 geo tapak, dan Geo Area Pacitan sebanyak 13 geo tapak.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melanjutkan pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Gunungkidul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021. Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”.

Untuk mencapai visi Tahun 2021, ditetapkan Misi pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- 3) Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional;
- 4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;
- 5) Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif; dan
- 6) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul sudah sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi yaitu serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun sektor tersier.

2.2 Ekonomi Makro

Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya guna mengikuti perkembangan dinamika kondisi ekonomi global dan nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada terkait dengan adanya perubahan kebijakan serta regulasi yang telah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DIY yang perlu disikapi sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan yang diharapkan. Kondisi keuangan daerah tahun 2020 juga terkoreksi akibat pandemi COVID-19, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Mendasarkan perkembangan yang terjadi sehubungan dengan adanya kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat dan memperhatikan rencana dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TA 2020 serta adanya perubahan asumsi pendapatan, kebijakan belanja dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian untuk dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik berupa perubahan kebijakan maupun perubahan perencanaan dan pelaksanaan serta perubahan pendanaan yang akan dituangkan melalui perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020.

Mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, maka dipandang perlu untuk memformulasikan kembali kebijakan pembangunan daerah sebagaimana telah termuat dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor 903/33875 dan Nomor 10/KPTS/2019 dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor: 903/3876 dan Nomor: 11/KPTS/2019. Perubahan formulasi kebijakan dan rencana pelaksanaan akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah memberi arah dan pedoman terhadap program, kegiatan yang perlu disesuaikan dan perlu didanai melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 merupakan tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan untuk meneruskan upaya pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengamankan kesiapan anggaran dalam rangka penanganan COVID-19.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.3. Gambaran Umum Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul

2.3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Di masa pandemi COVID-19 yang menuju pada tahapam *New Normal* perlu menerbitkan kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan tersebut diterbitkan juga pada sektor-sektor yang mendukung pada pariwisata seperti memberikan keringanan pajak hotel dan restoran. Pembangunan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan juga telah dilakukan guna memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada pengunjung bahwa obyek tersebut telah menerapkan protokol kesehatan. Berkembangnya sektor pariwisata akan memberikan mendorong produktivitas pada sektor yang lain khususnya sektor industri pengolahan dan manufaktur yang merupakan penunjang dalam pencapaian visi daerah yang menitikberatkan pada pariwisata daerah. Industri pengolahan yang bergerak adalah industri makanan dan minuman yaitu sebagian besar bergerak pada industri pengolahan rumah tangga untuk menunjang kepariwisataan, dan industri kayu dan barang anyaman.

Sektor pariwisata yang mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19, terlihat pada obyek wisata yang dilakukan penutupan selama hampir 4 bulan yang berakibat pada sektor Industri pengolahan, jasa dan yang lainnya.. Pembukaan sektor wisata yang secara bertahap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan diharapkan akan memberikan efek positif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

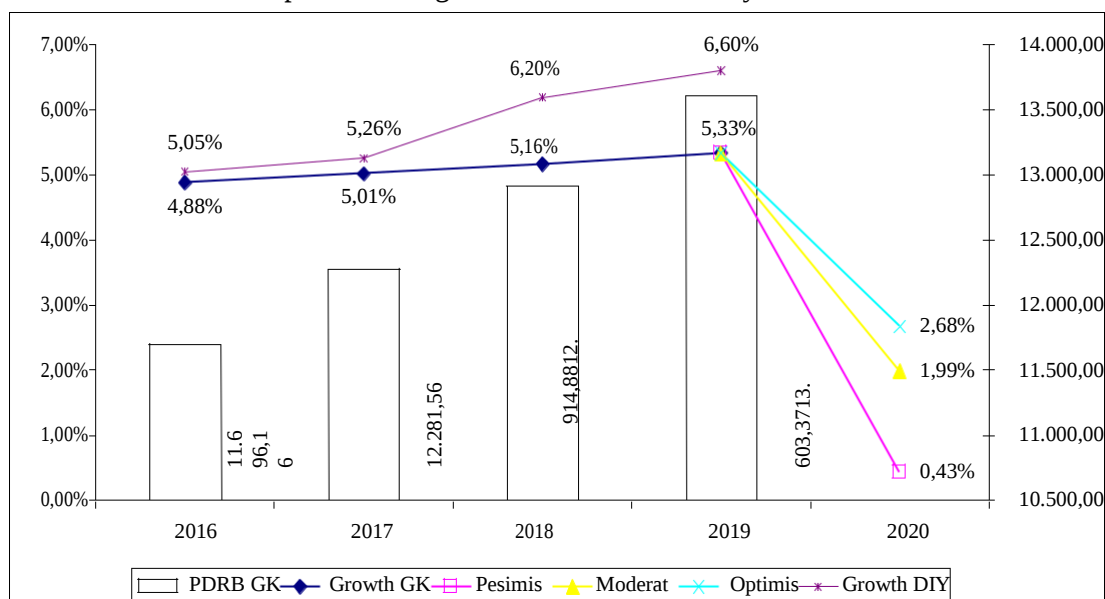
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di DIY di tahun 2020 ditunjukkan pada gambar 2.1. Proyeksi ini berdasarkan pada 3 (tiga) skenario yang ditetapkan oleh Bappeda DIY, yaitu: pesimis perekonomian DIY akan tumbuh 0,5%; moderat sebesar 2,3% dan optimis 3,1%. Hasil proyeksi pertumbuhan perekonomian Gunungkidul didapat dengan “mendistribusikan” proyeksi DIY pada tiap kabupaten/kota berdasarkan bobot pertumbuhan tiap kabupaten/kota. Pada skenario pesimis, perekonomian daerah Gunungkidul akan tumbuh sebesar 0,43%; moderatnya sebesar 1,99%; dan pada optimis perekonomian daerah Gunungkidul tumbuh sebesar 2,68%. Dengan adanya wabah Covid-19 pada tahun 2020 berdampak pada pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gunungkidul dengan skenario moderat dengan tumbuh 1,99%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar 2.1
PDRB Kabupaten Gunungkidul 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2020



Sumber: BPS DIY, 2020, diolah

Tabel 2.1
Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No.	Indikator Makro	Satuan	Asumsi Tahun 2019 Murni	Asumsi Perubahan Tahun 2019
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (jutaan rupiah)	Rp	13.595.824,35	13.603.375,00
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (jutaan rupiah)	Rp	19.103506,33	18.889.873,00
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan	%	5,29	5,33
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	14,30	16,61
5.	Inflasi Gunungkidul	%	1,88	2,24*

Sumber: BPS, 2019; *Inflasi dengan Proksi Laju Deflator PDRB



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.2

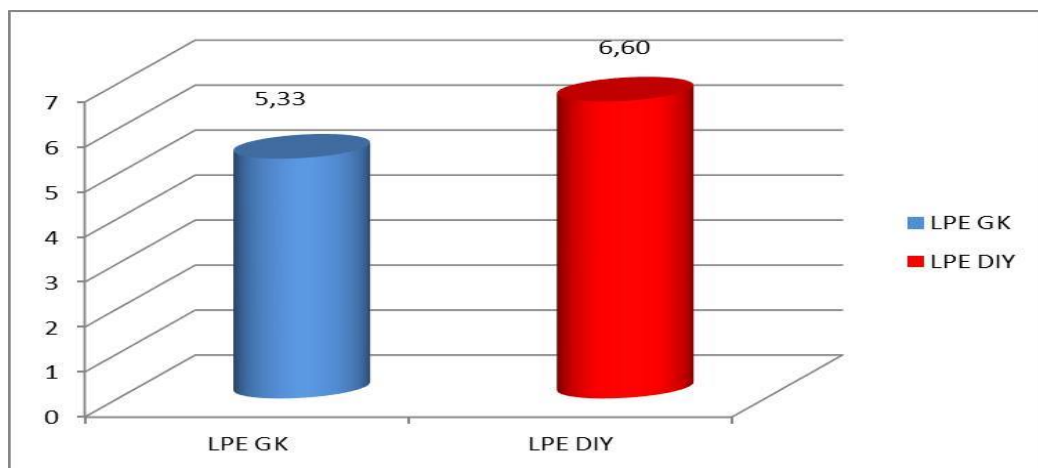
Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No.	Indikator Makro	Satuan	Asumsi Tahun 2019 Murni	Asumsi Perubahan Tahun 2019
1	2	3	4	5
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (jutaan rupiah)	Rp	14.333.266,13	13.874.082,00
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (jutaan rupiah)	Rp	20.704.521,15	19.265.782,00
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan	%	5,42	1,99
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	12,56	17,56
5.	Inflasi Gunungkidul	%	1,20	2,65

Sumber: Bappeda, 2020

Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,33%, dan pertumbuhan ekonomi DIY berdasarkan laporan BPS DIY sebesar 6,6%.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul dan DIY Tahun 2019



Sumber: BPS, 2019

Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun merupakan cerminan dari nilai PDRB dalam satu tahun, pembangunan sektor publik selalu terencana secara kontinyu dari tahun ke tahun. Pembangunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sehingga tema yang diangkat telah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pariwisata sebagai *leading* sektor pembangunan ekonomi di Gunungkidul, diharapkan mampu membangun usaha-usaha masyarakat sesuai dengan potensi daerah melalui peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tanpa meninggalkan budaya lokal sesuai ciri khas Gunungkidul. *Multiplayer effects* kepada sektor lain guna meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata tanpa meninggalkan budaya lokal akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Gunungkidul. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sektor pariwisata mengalami dampak penurunan yang cukup besar.

2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk menyusun kebijakan ekonomi makro daerah tahun 2019 perlu dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan tema pembangunan nasional 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema pembangunan Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Disamping itu, perlu juga dilakukan analisis terhadap kondisi perekonomian terkini sebagai pijakan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk, serta diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan inflasi.

Perkembangan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu mengalami peningkatan. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang dihasilkan dalam perekonomian Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 mencapai 101,44 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2016 mampu mencapai 109,96 triliun rupiah. Pada tahun 2019 nilai tambah ini kembali meningkat mencapai 141,40 triliun rupiah.

Meskipun titik berat pembangunan dalam perencanaan tahun 2020 bertumpu pada sektor pariwisata, namun demikian dengan adanya dampak COVID tersebut, tidak hanya sektor pariwisata yang terdampak, namun juga hampir seluruh sektor mengalami keterpurukan. Dengan adanya kebijakan *refocussing* anggaran ke penanganan bantuan COVID menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana.

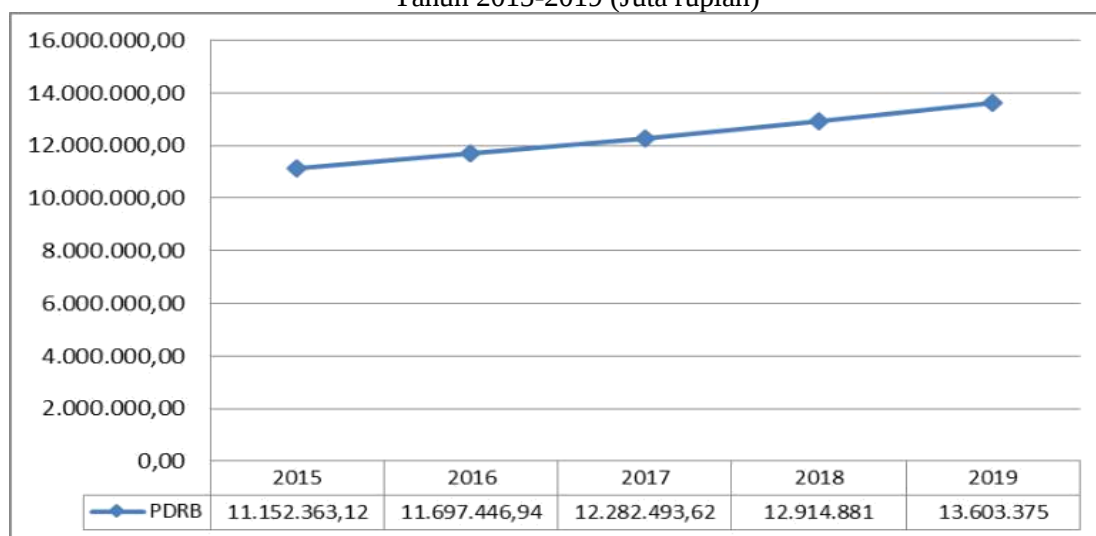


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian atau kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. Selama periode tahun 2015-2019, kondisi perekonomian Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kondisi yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Gunungkidul yang meningkat dari 12,914 miliar rupiah menjadi 13,603 miliar rupiah dengan peningkatan sebesar 5,33%.

Gambar 2.3
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2019 (Juta rupiah)



Sumber: BPS, 2020 (diolah)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil daerah dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu satu tahun. Besaran nilai PDRB suatu wilayah yang tercermin melalui perputaran perekonomian dalam satu tahun melalui pencapaian tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai nilai PDRB ADHK dalam pembangunan pada kurun waktu satu tahun yang tercermin dalam perekonomian pada Tahun 2019 lebih besar dari proyeksi di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Gunungkidul melebihi asumsi yang telah di proyeksikan pada tahun berjalan.

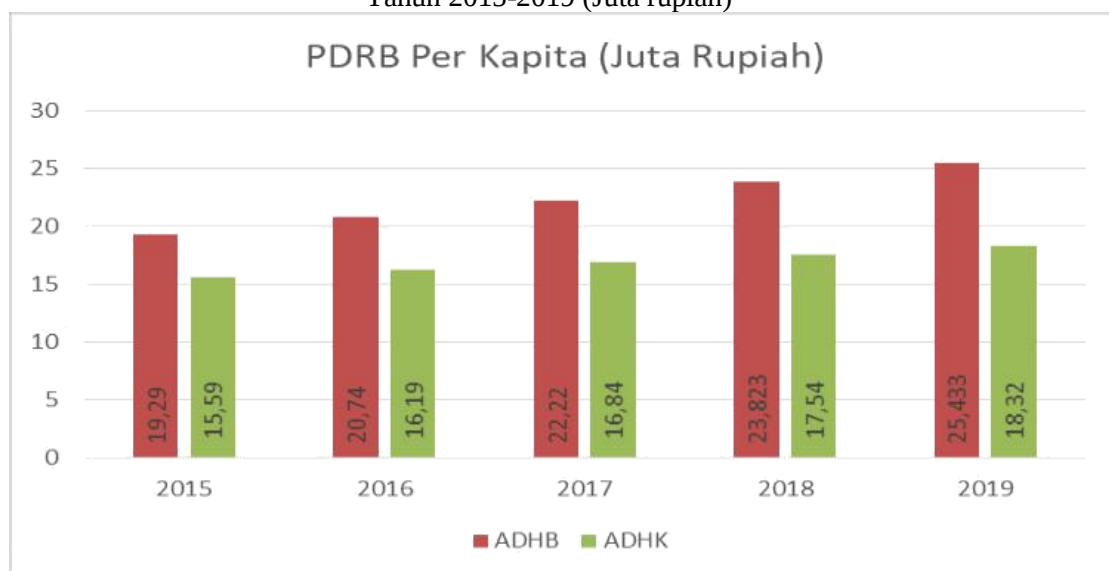
PDRB ADHB Per Kapita Tahun 2019 naik menjadi 25,433 juta rupiah dari tahun sebelumnya 23,823 juta rupiah. Selama periode tahun 2015-2019, kondisi perekonomian Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kondisi yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Gunungkidul yang meningkat dari 12,914 miliar rupiah menjadi 13,603 miliar rupiah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar 2.4
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2019 (Juta rupiah)



Sumber: BPS, 2020 (diolah)

Distribusi PDRB ADHK menurut lapangan usaha, selama tahun 2015-2019 kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Gunungkidul masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai lebih dari 20% nilai PDRB. Adapun sektor lain penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan informasi komunikasi, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan. Sektor pertanian masih menjadi unggulan di Kabupaten Gunungkidul, karena masih tingginya masyarakat di wilayah ini yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah yang mendukung misi kelima dalam RPJMD 2016-2021 dengan tujuan memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju ke unggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian semakin menurun dengan penurunan rata-rata 0,64% per tahun selama Tahun 2015-2019 yang dikarenakan mulai adanya transformasi sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi informasi dan komunikasi, Real Estat, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda serta konstruksi dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,21%, 0,05%, 0,11% , dan 0,15% per tahunnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sedangkan tiga sektor pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2015-2019 yang terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta sektor jasa perusahaan yang masing-masing rata-rata sebesar 0,11%, 0,16%, dan 0,51%.

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)

No,	LAPANGAN USAHA	TAHUN									
		2015		2016		2017		2018*		2019**	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,93	25,62	22,34	25,28	21,7	24,48	21,10	24,21	20,24	23,48
B	Pertambangan dan Penggalan	1,45	1,37	1,39	1,31	1,36	1,25	1,35	1,22	1,32	1,19
C	Industri Pengolahan	9,28	9,31	9,32	9,38	9,47	9,47	9,49	9,45	9,54	9,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,08	0,11	0,08	0,11	0,1	0,11	0,10	0,11	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,3	9,41	9,34	9,4	9,58	9,65	9,82	10,03	10,07	10,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,31	8,83	9,5	9,22	9,6	9,38	9,68	9,46	9,67	9,41
H	Transportasi dan Pergudangan	5,22	5,13	5,16	5,04	5,1	4,97	5,06	4,90	5,09	5,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,7	5,9	5,73	5,9	5,77	5,92	5,79	5,84	5,93	5,91
J	Informasi dan Komunikasi	9,07	6,98	9,4	7,02	9,56	7,14	9,74	7,14	10,06	7,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	2,34	2,15	2,32	2,06	2,23	2,11	2,31	2,19	2,39
L	Real Estat	3,53	3,44	3,59	3,53	3,6	3,57	3,65	3,60	3,70	3,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,51	0,44	0,51	0,43	0,51	0,43	0,51	0,43	0,52	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8,87	9,34	8,9	9,38	8,87	9,65	8,79	9,57	8,63	9,45



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Jaminan Sosial Wajib										
P	Jasa Pendidikan	6,68	6,35	6,59	6,2	6,65	6,16	6,67	6,14	6,72	6,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,01	2,14	2	2,17	2	2,17	1,98	2,19	2,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,6	3,28	3,69	3,35	3,74	3,43	3,74	3,46	3,85	3,5
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, 2020 (diolah)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Naiknya PDRB Kabupaten Gunungkidul berdasarkan ADHB dan ADHK dari Tahun 2015-2019 masih di dominasi kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Potensi penyumbang PDRB sektor pertanian yang mengalami penurunan setiap tahunnya dari Tahun 2015-2019, dengan rata-rata penurunana setiap tahunnya sebesar 0,64%. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan informasi komunikasi yang mengalami kenaikan secara berkala setiap tahunnya perlu mendapatkan perhatian lebih sehingga bisa terus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Gunungkidul.

Proses pembangunan ekonomi dalam periode tertentu akan berdampak pada perubahan struktur ekonomi. Perubahan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Pembangunan ekonomi akan berdampak pada permintaan domestik yang berupa pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga (LNPR), pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pembentukan inventori, ekspor dan impor suatu daerah merupakan PDRB menurut pengeluaran. Secara rinci perkembangan PDRB ADHB dan ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	JENIS PENGELUARAN	Atas Dasar Harga Berlaku				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumat Tangga	9.894.797,22	10.706.210,13	11.578.171,99	12.342.224,89	13.166.382,22
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	187.765,67	183.706,04	206.612,07	225.031,87	253.976,69
3	Pengeluaran	2.374.594,74	2.514.472,96	2.686.379,99	2.936.266,93	3.086.861,33



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Konsumsi Pemerintah					
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.683.453,20	4.020.561,32	4.439.014,44	5.023.833,28	5.671.141,64
5	Perubahan Inventori	154.799,99	170.630,87	180.407,08	188.907,64	197.011,18
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.496.753,92	-2.615.300,40	-2.890.743,71	-3.176.115,26	-3.485.499,73
7	PDRB	13.798.656,90	14.980.280,92	16.199.841,86	17.540.149,35	18.889.873,33

Sumber: BPS, 2020

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.5
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	JENIS PENGELUARAN	Atas Dasar Harga Konstan 2010				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.992.867,31	7.297.845,82	7.624.842,24	7.921.887,84	8.222.502,98
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	141.442,03	135.573,44	143.632,97	147.194,89	161.578,46
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.740.453,89	1.771.398,29	1.801.570,48	1.862.810,41	1.919.736,62
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.706.368,13	2.881.809,89	3.011.909,48	3.223.866,03	3.481.251,28
5	Perubahan Inventori	127.799,32	135.801,22	139.139,86	143.498,43	147.468,70
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-556.568	-526.273	-439.537	-384.377	-329.163
7	PDRB	11.152.363,12	11.696.155,83	12.281.557,81	12.914.880,79	13.603.374,83

Sumber: BPS, 2020

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran selama periode Tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Untuk melihat distribusi PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2019, disajikan dalam tabel sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.6

Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Persen)

No	JENIS PENGELUARAN	Distribusi PDRB ADHB				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumat Tangga	71,71	71,47	71,47	70,37	69,70
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,36	1,23	1,28	1,28	1,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17,21	16,79	16,58	16,74	16,34
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,69	26,84	27,4	28,64	30,02
5	Perubahan Inventori	1,12	1,14	1,11	1,08	1,04
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-18,09	-17,47	-17,84	-18,11	-18,44
7	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2020

Pembentukan PDRB ADHB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran rumah tangga, diikuti oleh pembentukan PMTB. Selama periode 2015-2019 PMTB menunjukkan kenaikan yang positif, hal ini menunjukkan adanya positif pasar terhadap penanaman modal yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Net Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena selama periode 2015-2019 terjadi penurunan net ekspor, hal ini menunjukkan bahwa transaksi perdagangan dari bukan penduduk Gunungkidul kepada penduduk Gunungkidul lebih besar dibandingkan dengan hak kepemilikan barang antara penduduk Gunungkidul dengan bukan penduduk Gunungkidul.

2.3.3. Inflasi

Pertumbuhan PDRB atau lebih populer dengan istilah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) beberapa tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Pada gambar di bawah ditunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul yang disandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut menunjukkan dinamika perekonomian Kabupaten Gunungkidul cukup baik. Sejak Tahun 2015, LPE Kabupaten Gunungkidul naik secara gradual mulai dari 4,82% di tahun 2015 hingga menjadi 5,33% di tahun 2019. Dari gambar di bawah juga terlihat bahwa LPE Kabupaten Gunungkidul yang cukup stabil tersebut dibarengi dengan penurunan PDRB Deflator yang dapat menjadi proksi bagi laju inflasi (kenaikan harga-harga). Dari data terlihat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 laju inflasi yang diproksi dengan PDRB Deflator cenderung menurun. Artinya, LPE



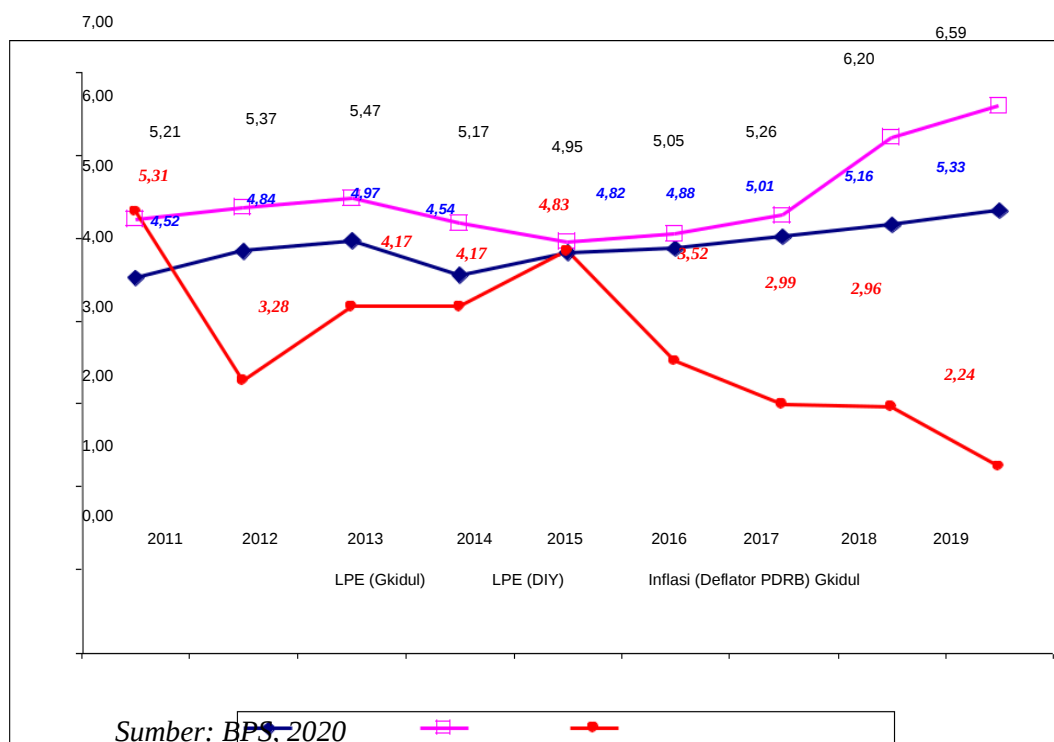
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

yang stabil tersebut menunjukkan adanya penambahan riil barang dan jasa yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul.

LPE yang naik secara stabil dan laju inflasi yang cenderung menurun merupakan prasyarat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Deflator
Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2015-2019





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.3.4. ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

Salah satu komponen pembentukan PDRB adalah investasi, dalam teori menurut Harold Domar investasi bahwa semakin tinggi investasi yang diperoleh, maka semakin besar PDRB yang didapat sehingga berakibat tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan stok bisa dikatakan investasi, sehingga kolerasi antara PDRB dengan investasi/PMTB dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), berikut ini data ICOR Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.6
Perkembangan ICOR Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS , 2020 *Angka Proyeksi Bappeda

Nilai ICOR tahunan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan semakin menurun. Dengan naiknya angka PMTB Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2019 diharapkan angka ICOR Gunungkidul mengalami kenaikan seperti halnya yang diproyeksikan oleh Bappeda di Tahun 2019 menjadi 5,41.



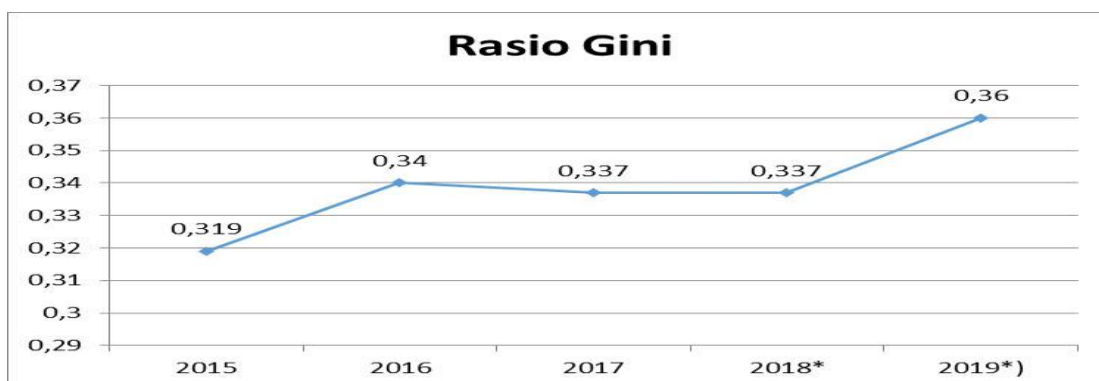
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.3.5. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan penduduk di kabupaten Gunungkidul bisa memakai satu indikator yaitu indikator Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran, adapun Gini Rasio Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS, 2019 (*Angka Sementara; *)Angka proyeksi)

Selama periode 2015-2019, gini ratio Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan naik. Meskipun demikian, ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY, tingkat ketimpangan di Kabupaten Gunungkidul masih belum mengkhawatirkan seperti halnya kabupaten lain, distribusi pendapatan masih terbilang merata dibandingkan kabupaten lain walaupun semuanya masih dalam kategori moderat. Posisi ketimpangan pada 2020 (angka proyeksi) diperkirakan masih berkisar pada titik moderat di angka 0,34.

2.3.6. Pendapatan Per Kapita

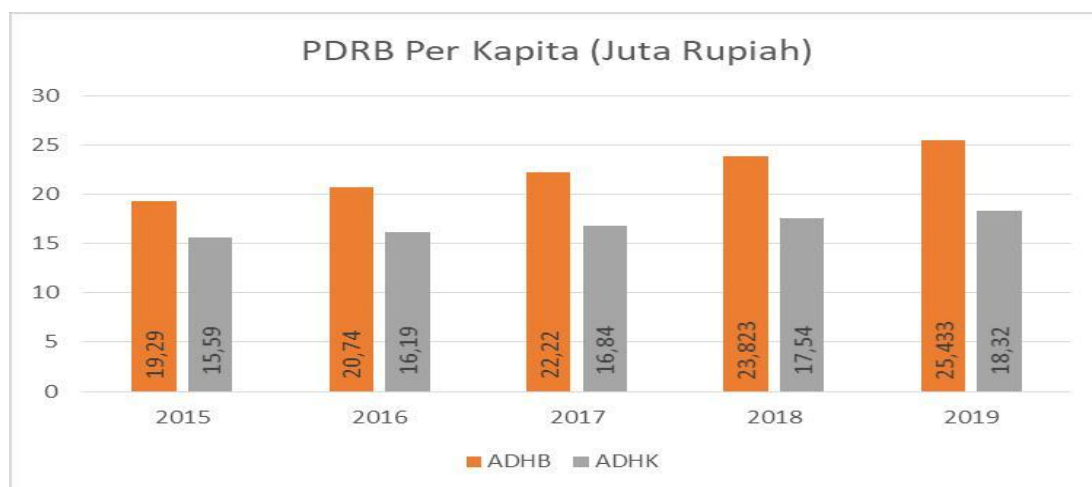
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara/daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional/daerah suatu negara/daerah dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara/daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara/daerah tersebut. Berikut ini adalah pendapatan per kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gambar 2.7
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2015 - 2019



Sumber: BPS Gunungkidul, 2020, (diolah)

Peningkatan PDRB di Kabupaten Gunungkidul mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang diukur dengan PDRB ADHK dan ADHB Perkapita. Pada Tahun 2015, nilai PDRB ADHK Perkapita adalah sebesar 15,59 juta rupiah per kepala per tahun. Sedangkan di Tahun 2019, nilainya sudah mencapai 18,32 juta rupiah per kepala per tahun. Pendapatan per kapita ADHB mengalami kenaikan setiap tahunnya dari Tahun 2015 sebesar 19,29 juta rupiah, Tahun 2016 sebesar 20,74 juta rupiah, Tahun 2017 sebesar 22,22 juta rupiah, Tahun 2018 sebesar 23,825 juta rupiah, dan Tahun 2019 meningkat menjadi 25,433 juta rupiah.

2.3.7. Ketenagakerjaan

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam pembahasan ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.8

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019

No	Ketenagakerjaan	Tahun					satuan
		2015	2015	2015	2015	2015	
1	Penduduk 15 Tahun keatas	613.931	566.258	576.508	639.803	640.861	Orang
2	Angkatan Kerja	397.984	440.324	429.476	446.487	448.155	Orang
3	Kesempatan Kerja (dalam %)	97,10	97,10	98,35	97,93	98,08	%
4	Pengangguran Terbuka	4,731	10,106	7,085	9.249	8.591	Orang
5	Penempatan TKI	67	52	79	120	131	Orang
6	PHK pada tahun yang bersangkutan	3	3	2	1	0	Kasus
	Jumlah TK PHK	3	3	7	18	0	Orang
7	Rata2 Kebutuhan Hdp Min/Keb,Hdp Layak(KHL)	920,000	951,449	n/a	1.333.794,21	1.571.502	Rupiah
8	Rata2 Upah Min,Reg,/Upah Min Kab(UMK)	1,235,700	1,337,650	1,337,650	1.454.200	1.705.000	Rupiah
9	Pencari Kerja (yang ditempatkan)	741	663	873	2.551	1.495	Orang
10	Setengah Pengangguran*	12.015	n/a	14.345	26.249	25.644	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, 2019, * BPS Kabupaten Gunungkidul 2015-2020 (Diolah)

Terkait pengangguran, target menurunnya angka pengangguran di Tahun 2019 sebesar 1,22% baru tercapai 1,92%.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan gambaran belum terwadahnya jumlah angkatan kerja bagi usia kerja suatu daerah, baik yang belum siap kerja maupun sudah siap kerja dengan kriteria minimal umur angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka bila terwadahi maka akan terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari masing-masing sektor. Keseimbangan dalam menciptakan lapangan kerja akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada angkatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka bagi daerah tersebut, tabel berikut ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
TPT	2,78	1,42	1,65	2,07	1,92

Sumber : Bappeda, 2019

Tabel 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunungkidul
pada Perubahan RKPD 2020

No	Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun)	Asumsi Murni (%)	Asumsi Perubahan (%)
1.	2019	1,22	1,92
2.	2020	1,20	4,40)*

Sumber: Bappeda, 2019, (diolah)

*Angka Proyeksi

Peningkatan jumlah penduduk miskin terkait langsung dengan tingkat pengangguran terbuka. Dinamika perubahan tingkat pengangguran terbuka ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Dari informasi tabel 2.9 di atas terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul relatif rendah. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul ada sebanyak 1,92%. Dampak adanya pandemi Covid-19 TPT diproyeksikan secara moderat 4,40% pada tahun 2020, seperti terlihat pada tabel 2.10.

2.3.7. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8 di bawah ini. Sejak Tahun 2015 hingga 2019 capaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul cenderung meningkat secara perlahan. Pada Tahun 2015, capaian pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM adalah sebesar 67,41 dan di Tahun 2019, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul telah mencapai angka 69,96.

Namun demikian, kerja keras masih dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul karena kondisi di Kabupaten Gunungkidul lebih rendah daripada di seluruh Kab/Kota yang ada di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Data pada gambar 2.8 di bawah menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Gunungkidul berada di bawah rerata capaian IPM kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat

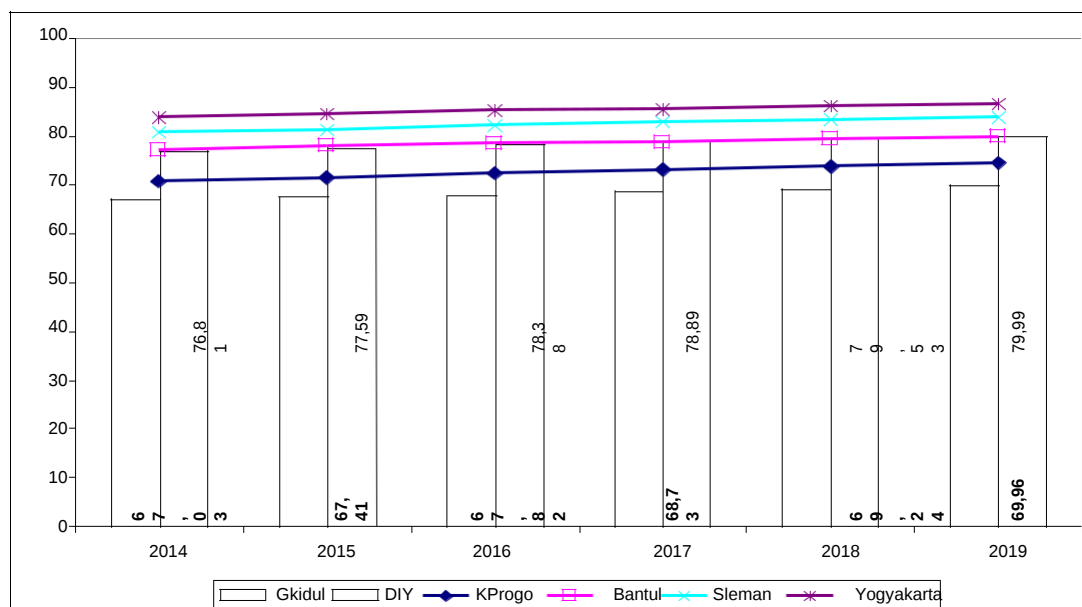


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dari komponen IPM, aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah pada aspek pendidikan dan aspek ekonomi.

Gambar 2.8
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2019



Sumber: BPS DIY, 2020, diolah

Tabel 2.11
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,69	73,75	73,82	73,92	74,03
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,46	6,62	6,99	7,00	7,79
4	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000)	8,336	8,467	8,788	9,163	643,88

Sumber: BPS DIY, 2020

Tabel 2.12
Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	IPM	67,03	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96
2	Pertumbuhan IPM (%)	1,09	0,57	0,61	1,34	0,74	1,04

Sumber: BPS DIY, 2019



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dengan menggunakan perhitungan rerata kenaikan IPM di seluruh Kabupaten/Kota di DIY selama 2014 hingga 2019, maka dalam keadaan normal, nilai IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dan tahun 2021 diperkirakan akan sebesar 70,59 dan 71,21. Namun karena adanya pandemi COVID-19, maka angka capaian IPM tersebut akan lebih rendah.

Tabel 2.13
Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan RKPD 2020

No	IPM	Asumsi Tahu Murni	Asumsi Perubahan
1.	2019	70,79	69,96
2.	2020	71,39	70,59

Sumber: Bappeda, 2019(diolah)

Proyeksi penurunan ini seiring dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Gunungkidul.

2.3.8 Kemiskinan

Perkembangan perekonomian harus bermanfaat bagi masyarakat miskin. Karena itu orientasi pada peningkatan kualitas pertumbuhan harus semakin ditingkatkan. Dinamika jumlah penduduk miskin adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9.

Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Gunungkidul sudah menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Gunungkidul ada sebanyak 152 ribu jiwa atau 21,73%. Walaupun garis kemiskinan sudah meningkat menjadi 301.125 jiwa, tetapi jumlah penduduk miskin di tahun 2019 telah menurun menjadi 123,08 ribu jiwa atau 16,61%. Konsistensi penurunan kemiskinan tersebut terlihat dari fakta bahwa antara tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin selalu menurun.

Namun demikian, pandemi COVID-19 diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin akibat adanya kontraksi perekonomian. Gambar 2.9 menunjukkan perkiraan jumlah penduduk miskin Tahun 2020. Nilai proyeksi tersebut didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk miskin di DIY dikalikan bobot proporsi penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada skenario pesimis, di Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul akan meningkat menjadi 142,16 ribu jiwa. Sedangkan pada skenario moderat, proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2020 ada sebanyak 135,18 ribu jiwa. Sedangkan pada skenario optimis, proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2020 ada sebanyak 132,07 ribu jiwa. Banyaknya penduduk yang pulang kampung dari kota ke Gunungkidul dan tidak kembali ke kota dengan adanya pemutusan hubungan kerja dampak Covid-19 akan berpeluang bertambahnya penduduk

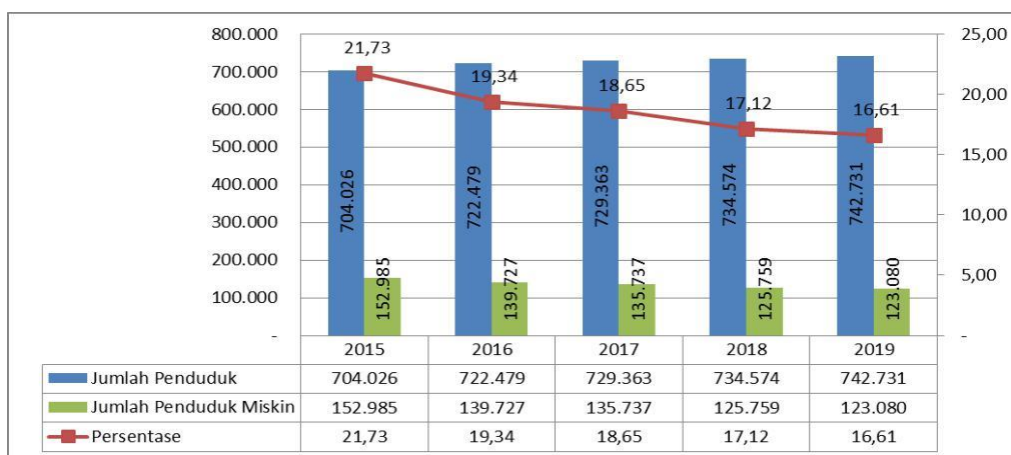


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

miskin dadakan, berdampak penurunan penduduk miskin di Tahun 2020 diambil secara moderat meningkat 135,18 ribu jiwa.

Gambar 2.9
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul 2015-2019



Sumber: BPS DIY, 2020, diolah

Tabel 2.14
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul
pada Perubahan RKPD 2020

No	Tingkat Kemiskinan (Tahun)	Asumsi Tahun 2019 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2019 (%)
1.	2019	17,91	16,61
2.	2020	17,24	17,56

Sumber: Bappeda, 2020 (diolah)

Pandemi COVID-19 yang sampai dengan akhir Tahun 2020 belum berakhir, menyebabkan kondisi perekonomian di Gunungkidul terdampak pada seluruh aspek indikator makro yang ada. Berikut ini gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 serta proyeksi makro Tahun 2020.

Tabel 2.15
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul
Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2020

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2019	2020*
1	2	3	4	5
1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta)	Rp	13.603.374,83	13.874.081,99
2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta)	Rp	18.889.873,33	19.265.781,81
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,33	1,99
4	Tingkat Inflasi	%	2,24	2,65



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah, ADHB)	Rp	25,433	22,050
6	Angka Kemiskinan	%	16,61	17,56
7	ICOR (<i>Incremental Capital Output Ratio</i>)	%	5,41	4,75
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	7,75
9	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,96	70,59
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,92	4,4

Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya guna mengikuti perkembangan dinamika kondisi ekonomi global dan nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada terkait dengan adanya perubahan kebijakan serta regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DIY yang perlu disikapi sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan yang diharapkan.

Berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020, secara umum terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah yang menjadi dasar perlunya dilaksanakan perubahan antara lain.

1. Terjadinya pandemi COVID-19.
2. Terbitnya Permendagri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
4. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5. Telah dilaksanakannya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA. 2019 oleh BPK RI dan telah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang memerlukan tindak lanjut.
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. Penyesuaian target Rencana Kerja Perangkat Daerah;
16. Adanya penyesuaian Pendapatan Asli Daerah serta penyesuaian terhadap target pendapatan daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

17. Penyesuaian Belanja Tidak Langsung antara lain:
 - a. Penambahan belanja PPU BPJS;
 - 1) Penyesuaian Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Penyesuaian Belanja Hibah;
 - 3) Penambahan Belanja Bantuan Sosial;
 - 4) Penyesuaian Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;
 - 5) Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. Penambahan Belanja Tidak Langsung untuk penanganan COVID-19;
18. Penyesuaian Belanja Langsung antara lain:
 - a. Penambahan belanja PBI BPJS;
 - b. Penambahan belanja pembayaran PJU;
 - c. Pemanfaatan SILPA BLUD pada RSUD Wonosari dan Puskesmas;
 - d. Penambahan Insentif bagi Tenaga Kesehatan untuk Penanganan COVID-19;
 - e. Penambahan kekurangan gaji ke-13 bagi tenaga kontrak pada BLUD Puskesmas.
 - f. Penambahan untuk penyusunan dokumen analisis investasi penyertaan modal daerah pada PD. Bank Daerah Gunungkidul;
 - g. Penambahan anggaran belanja obat;
 - h. Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
 - i. Dukungan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan;
 - j. Penambahan untuk kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
 - k. Penambahan untuk dukungan sarana prasarana Pasar Ngenep, Dadapayu, Semanu;
 - l. Penambahan untuk penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah;
 - m. Penambahan untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada;
 - n. Penambahan untuk penyusunan buku biografi Bupati dan Wakil Bupati;
 - o. Penambahan untuk pisungsung pemanfaatan tanah *Sultan Ground*;
 - p. Penambahan anggaran kesiapsiagaan bencana;
 - q. Redesign kegiatan dana keistimewaan;
 - r. Penambahan dukungan anggaran kegiatan bagi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
 - s. Penambahan untuk pemeliharaan kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, Swakelola pemeliharaan gedung kantor Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kapanewon Wonosari, Kapanewon, Gedangsari dan Kapanewon Purwosari;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- t. Penambahan untuk pemeliharaan Terminal Semin; dan
 - u. Penambahan untuk kegiatan *land clearing* atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tawang-Ngalang.
19. Penyesuaian pembiayaan meliputi:
- a. Penyesuaian SILPA TA. 2019;
 - b. Penambahan penyertaan modal PT. Bank BPD DIY; dan
 - c. Penambahan anggaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah;
20. Penyesuaian program/kegiatan untuk menindaklanjuti amanat regulasi/kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan di daerah yang muncul setelah APBD ditetapkan.

2.4. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah antara lain didasarkan pada beberapa penyesuaian terhadap kebijakan pusat yang harus ditindaklanjuti dan juga penurunan Pendapatan Asli Daerah yang diakibatkan oleh beberapa hal termasuk dampak COVID-19. Penyesuaian pendapatan daerah tersebut sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Sebagai akibat dari Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan beberapa kebijakan dengan maksud membantu mengurangi beban masyarakat, sebagai berikut.

a. Pajak

- 1) Terbitnya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2020 Akibat Pandemi COVID-19. Kebijakan ini berupa pengurangan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran sebesar 100% mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Juli 2020.
- 2) Terbitnya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Akibat Pandemi COVID-19. Kebijakan ini berupa pengurangan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir sebesar 100%. Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Juli 2020, sedangkan pengurangan Pajak Hiburan dan Parkir mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2020.
- 3) Terbitnya Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 201/KPTS/2020 tentang Pengunduran Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020 Akibat Pandemi COVID-19. Kebijakan ini berupa pengunduran tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dari semula maksimal



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

tanggal 30 September 2020 menjadi maksimal tanggal 30 November 2020, pengunduran batas waktu pengajuan permohonan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari semula maksimal tanggal 30 Juni 2020 menjadi maksimal tanggal 31 Juli 2020.

Terbitnya 3 (tiga) regulasi ini pada satu sisi diharapkan memberikan keringanan beban kepada masyarakat terdampak, namun pada sisi lain kebijakan ini berdampak pada penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak. Adapun hal lain yang juga mempengaruhi penurunan pendapatan daerah adalah kebijakan pembatasan pergerakan penduduk dan penutupan obyek wisata demi mengurangi mata rantai penyebaran virus COVID-19.

b. Retribusi

Terbitnya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Akibat Pandemi COVID-19. Kebijakan ini berupa pemberian pengurangan pembayaran retribusi sebesar 100% dari tariff yang ditetapkan atas pemakaian rusunawa dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Sebagai akibat dari kebijakan refocusing belanja, berdampak terhadap minimnya penerimaan retribusi penyewaan alat berat. Kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan penduduk berdampak pada menurunnya penerimaan retribusi daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi terminal, retribusi pemanfaatan aset daerah, retribusi penjualan produk usaha daerah, retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat khusus parkir. Adapun dampak dari menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat berdampak pada menurunnya retribusi pemakaian rusunawa, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Terdapat kenaikan pendapatan dari bagian laba Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang didapat dari Bank BPD DIY.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penurunan target pendapatan bunga deposito dilakukan dengan mempertimbangkan aliran masuk-keluar uang pada kas daerah. Selain itu karena kebijakan pembatasan pergerakan penduduk dan penurunan kondisi ekonomi masyarakat terjadi penurunan pendapatan kerjasama pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, kerjasama pemungutan retribusi parkir dan sewa atas kios dan los pasar.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Atas terjadinya Pandemi COVID-19 maka terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dampak dari ditetapkannya regulasi tersebut beberapa komponen pendapatan daerah dari dana transfer pemerintah pusat mengalami penurunan, diantaranya pagu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghapusan beberapa pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain yang dikecualikan oleh regulasi yakni DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan serta DAK Fisik yang telah disetujui dan masuk dalam *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* DAK Fisik. Namun demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 ada 5 (lima) bidang yang memperoleh pengaktifan kembali DAK Fisik 2020, meliputi Bidang Pariwisata, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Sanitasi, Bidang Irigasi dan Bidang Perumahan dan Pemukiman. Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) gelombang III Tahun Anggaran 2020 memberikan tambahan pendapatan dari pagu Alokasi DAK Non Fisik yang diperuntukkan bagi insentif tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penurunan pada Dana Penyesuaian yakni pagu Dana Desa (DD) dan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Penurunan juga terjadi pada pagu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada sisi Dana Keistimewaan. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan *reward* berupa Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan atas penghargaan lomba inovasi daerah, selain itu juga mendapatkan tambahan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah antara lain berdasarkan pada beberapa penyesuaian terhadap kebijakan pusat yang harus ditindaklanjuti dan juga penyesuaian Pendapatan Asli Daerah yang pencapaian targetnya telah diupayakan selama tahun berjalan, sebagai berikut:

1. Proyeksi Kenaikan/Penurunan Pendapatan Daerah

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kenaikan/penurunan pendapatan, dikarenakan beberapa penyesuaian sebagai berikut.

- a. Penurunan PAD dari rencana sebesar Rp245.880.405.737,18 turun menjadi Rp211.962.528.829,92 atau mengalami penurunan sebesar Rp33.917.876.907,26 atau turun sebesar 13,79% yang berasal dari:
 - 1) Penurunan proyeksi Pajak Daerah dari Rp58.923.350.000,00 menjadi Rp46.359.308.262,47 atau mengalami penurunan sebesar Rp12.564.041.737,53;
 - 2) Penurunan proyeksi Retribusi Daerah dari Rp29.643.296.636,00 menjadi Rp16.389.996.290,00 atau turun sebesar Rp13.253.300.346,00;
 - 3) Kenaikan proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Rp16.044.464.904,02 menjadi Rp16.874.256.511,00 atau naik sebesar Rp829.791.606,98; dan
 - 4) Penurunan proyeksi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Rp141.269.294.197,16 menjadi Rp132.338.967.766,45 atau turun sebesar Rp8.930.326.430,71.
- b. Penurunan Dana Perimbangan dari rencana sebesar Rp1.376.965.341.000,00 menjadi Rp1.239.194.046.624,00 turun sebesar Rp137.771.294.376,00 atau turun sebesar 10,01%, yang berasal dari:
 - 1) Kenaikan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp20.920.172.000,00 naik menjadi sebesar Rp26.764.440.624,00 atau naik sebesar Rp5.844.268.624,00;
 - 2) Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rp976.430.315.000,00 turun menjadi sebesar Rp887.858.891.000,00 atau turun sebesar Rp88.571.424.000,00; dan
 - 3) Penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) semula sebesar Rp379.614.854.000,00 turun menjadi sebesar Rp324.570.715.000,00 atau turun sebesar Rp55.044.139.000,00.
- c. Penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari rencana sebesar Rp410.749.862.975,93 menjadi sebesar Rp389.235.034.694,93 turun sebesar Rp21.514.828.281,00 atau turun sebesar 5,24% yang berasal dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- 1) Kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Rp87.521.058.475,93,00 menjadi sebesar Rp92.196.396.034,93,00 atau naik sebesar Rp4.675.337.559,00;
- 2) Penurunan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari Rp203.046.660.000,00 menjadisebesar Rp197.224.615.000,00 atau turun sebesar Rp5.822.045.000,00;
- 3) Penurunan Bantuan Keuangan dari Provinsi semula sebesar Rp115.182.144.500,00 turun menjadi sebesar Rp94.814.023.660,00 atau turun sebesar Rp20.368.120.840,00.

Tabel 2.16
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

No Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
4.	PENDAPATAN	2.033.595.609.713,11	1.840.391.610.148,85	(193.203.999.564,26)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	245.880.405.737,18	211.962.528.829,92	(33.917.876.907,26)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	58.923.350.000,00	46.359.308.262,47	(12.564.014.737,53)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	29.643.296.636,00	16.389.996.290,00	(13.253.300.346,00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.044.464.904,02	16.874.256.511,00	829.791.606,98
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.269.294.197,16	132.338.967.766,45	(8.930.326.430,71)
4.2.	Dana Perimbangan	1.376.965.341.000,00	1.239.194.046.624,00	(137.771.294.376,00)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.920.172.000,00	26.764.440.624,00	5.844.268.624,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	976.430.315.000,00	887.858.891.000,00	(88.571.424.000,00)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	379.614.854.000,00	324.570.715.000,00	(55.044.139.000,00)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	410.749.862.975,93	389.235.034.694,93	(21.514.828.281,00)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
4.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	87.521.058.475,93	92.196.396.034,93	4.675.337.559,00
4.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	203.046.660.000,00	197.224.615.000,00	(5.822.045.000,00)
4.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	115.182.144.500,00	94.814.023.660,00	(20.368.120.840,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut beberapa upaya yang telah dan akan ditempuh antara lain:

- a. Peningkatan kualitas basis data pajak daerah, retribusi daerah, maupun kekayaan/ aset daerah sebagai komponen penting untuk menentukan potensi pendapatan yang lebih realistis dan terukur;
- b. Melakukan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan yang bersangkutan terhadap ketentuan perundangan perpajakan daerah yang berlaku;
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kesejahteraan SDM pengelola;
- d. Mendayagunakan aset/kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- e. Mempermudah dan menyederhanakan administrasi pelayanan, pembayaran, dan pelaporan baik pajak maupun retribusi daerah;
- f. Memaksimalkan peran Teknologi Informasi untuk peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam mengakses informasi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi maupun pelaporannya sehingga lebih mudah dan efisien, antara lain dengan :
 - 1) Mencantumkan QR-Code pada SPPT PBB-P2 yaitu salah satu cara menangkap data dalam bentuk caption sehingga wajib pajak dapat mengetahui subyek/obyek pajak dan status pembayaran;
 - 2) BPHTB yang berfungsi untuk mempermudah pendaftaran validasi BPHTB secara online dan integrasi data dengan BPN; dan
 - 3) Pemasangan perangkat sistem online yaitu sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi, pelaporan dan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak secara online.
- g. Peningkatan infrastruktur yang menunjang pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- h. Meningkatkan intensitas, cakupan, dan kualitas sosialisasi/promosi;
- i. Meningkatkan jaringan kerja/network dan koordinasi PD yang terkait;
- j. Membuka diri terhadap kemungkinan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
- k. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah DIY, kabupaten/kota, dan instansi terkait; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- m. Memaksimalkan kapasitas dan peran BUMD sebagai institusi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

2.5. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 secara umum tetap diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dimana dengan memperhatikan visi dan misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, serta substansi tema pembangunan nasional dan DIY tersebut. Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah *“Menguatkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”*.

Tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan dengan berdasarkan atas hasil data, Permasalahan, serta isu strategis yang ada meliputi:

1. Pariwisata sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat menjadi pemacu perkembangan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Berbagai potensi pariwisata yang dimiliki akan dikembangkan seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan DIY terutama potensi pengembangan Pantai Selatan dan Kawasan Geopark.
2. Pendidikan yang baik merupakan syarat mutlak guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk Kabupaten Gunungkidul pendidikan masih merupakan pekerjaan rumah terbesar karena berdasarkan angka IPM Tahun 2019, diantara kabupaten/kota yang ada di DIY masih menempati urutan terbawah dengan indeks sebesar 69,96. Sesuai dengan kewenangan maka fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi arah tujuan yang mesti dilakukan disamping upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan informal.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Kesehatan menjadi pelayanan dasar yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten, karena hanya dengan kondisi sehat maka seseorang dapat beraktivitas dan berproduksi. Pelayanan kesehatan ini diupayakan dengan memberikan jaminan sosial kesehatan terhadap seluruh warga yang berkategori miskin serta dengan upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan baik dari sisi peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, alat penunjang kesehatan, obat-obatan maupun pembangunan infrastruktur kesehatan.
4. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keniscayaan suatu daerah dalam upaya membangun wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kabupaten Gunungkidul dari kabupaten/kota di DIY masih menempati urutan terbawah dalam angka pertumbuhan ekonomi, meskipun di beberapa wilayah/kawasan terutama di kawasan wisata unggulan telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan, namun secara rerata penyebaran masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diartikan masih terdapat ketimpangan pertumbuhan antar wilayah/kawasan sehingga upaya yang dilakukan ke depan adalah bagaimana melibatkan seluruh masyarakat di semua wilayah untuk mengambil peran pada sektor pariwisata yang dalam beberapa tahun ini menjadi komoditi unggulan penggerak roda pertumbuhan.
5. Infrastruktur wilayah yang baik merupakan syarat suatu daerah menjadi tumbuh berkembang, meski secara umum kondisi infrastruktur wilayah terutama jalan di Kabupaten Gunungkidul dapat dikategorikan baik, namun sesuai dengan perkembangan terkini, kondisi yang telah baik tersebut belum cukup untuk mendukung laju pembangunan. Sehingga diperlukan pembangunan jalan-jalan baru seperti pembangunan jalan lintas selatan, pembangunan jalan alternative penghubung kawasan wisata, peningkatan kualitas jalan dan sarana prasarana lain yang berfungsi sebagai pendukung wajib upaya pengembangan pariwisata yang diharapkan akan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Prioritas-prioritas pembangunan daerah selanjutnya diterjemahkan dalam sasaran daerah yang lebih operasional dan dapat diukur. Sasaran daerah tahun 2020 juga selaras dengan sasaran dalam rancangan RPJMD Tahun 2016-2021, serta disinkronkan dengan sasaran nasional dan DIY. Dari hasil proses tersebut ditetapkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
5. Jumlah penduduk miskin menurun
6. Angka Pengangguran menurun
7. Daya saing pariwisata meningkat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

8. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat
9. Infrastruktur publik wilayah meningkat
10. Pertumbuhan Ekonomi daerah meningkat
11. Pendapatan Masyarakat Meningkat
12. Ketahanan Pangan meningkat
13. Kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup meningkat
14. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja dan target yang terukur. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Perencanaan belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2020, serta menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Proses ini tentunya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa publik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja juga diupayakan agar dapat mendorong dan memberikan stimulasi pada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pembangunan.

Selanjutnya untuk merespon terjadinya Pandemi COVID-19, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 177/KMK.07/2020 dan Nomor 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 serta pengamanan daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka dilakukan refocusing dan realokasi anggaran belanja kegiatan Perangkat Daerah pada Belanja Tidak Terduga guna penanganan pandemi COVID-19.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada tahun 2020 diarahkan penggunaannya untuk:

1. Perubahan Belanja Tidak Langsung.

Perubahan belanja tidak langsung ini untuk mengakomodir beberapa penyesuaian antara lain Penambahan belanja PPU BPJS, Penyesuaian Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil, Penyesuaian Belanja Hibah, Penambahan Belanja Bantuan Sosial, Penyesuaian Belanja Bagi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hasil kepada Pemerintah Desa, dan Penambahan Belanja Tidak Langsung untuk penanganan COVID-19.

Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan yang signifikan semula dari Rp1.198.757.586.804,00 bertambah menjadi Rp1.285.297.089.406,10 atau naik sebesar Rp86.539.502.602,10 (7,22%). Perubahan belanja tidak langsung ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Belanja Pegawai karena ada rasionalisasi gaji pegawai menyesuaikan perubahan jumlah pegawai karena pensiun, belum selesainya proses rekrutmen CPNS, penurunan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, kenaikan iuran jaminan kesehatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. Sehingga Belanja Pegawai semula dari Rp854.992.362.413,00 berkurang menjadi sebesar Rp840.788.048.912,68 atau turun sebesar Rp14.204.313.500,32.
 - b. Penyesuaian Belanja Hibah kepada beberapa lembaga dalam rangka refocusing anggaran guna penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Pilkada antara kepada Pramuka, KPU dan Bawaslu, sehingga semula dari Rp58.021.882.191,00 berkurang menjadi sebesar Rp56.892.468.691,00 atau turun sebesar Rp1.129.413.500,00
 - c. Perubahan anggaran Belanja Bantuan Sosial karena dikembalikannya Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan, sehingga semula dari Rp2.637.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp5.454.500.000,00 atau naik sebesar Rp2.817.500.000,00.
 - d. Perubahan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, disesuaikan dengan target pajak dan retribusi daerah, sehingga semula dari Rp11.766.755.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp8.727.681.325,00 atau turun sebesar Rp3.039.073.675,00.
 - e. Perubahan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa karena penurunan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam refocusing anggaran guna penanganan COVID-19, sehingga semula dari Rp267.339.587.200,00 berkurang menjadi sebesar Rp248.994.138.800,00 atau turun sebesar Rp18.345.448.400,00.
 - f. Penambahan Belanja Tidak Terduga untuk cadangan penanganan COVID-19, sehingga semula dari Rp4.000.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp124.440.251.677,42 atau naik sebesar Rp120.440.251.677,42.
2. Perubahan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, antara lain:
- a. Penambahan belanja PBI BPJS;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- b. Penambahan belanja pembayaran PJU;
- c. Pemanfaatan SILPA BLUD pada RSUD Wonosari dan Puskesmas;
- d. Penambahan Insentif bagi Tenaga Kesehatan untuk Penanganan COVID-19;
- e. Penambahan kekurangan gaji ke-13 bagi tenaga kontrak pada BLUD Puskesmas;
- f. Penambahan untuk penyusunan dokumen analisis investasi penyertaan modal daerah pada PD. Bank Darah Gunungkidul;
- g. Penambahan anggaran belanja obat;
- h. Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- i. Dukungan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan;
- j. Penambahan untuk kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
- k. Penambahan untuk dukungan sarana prasarana Pasar Ngenep, Dadapayu, Semanu;
- l. Penambahan untuk penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah;
- m. Penambahan untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada;
- n. Penambahan untuk penyusunan buku biografi Bupati dan Wakil Bupati;
- o. Penambahan untuk pisungsung pemanfaatan tanah *Sultan Ground*;
- p. Penambahan anggaran kesiapsiagaan bencana;
- q. Redesign kegiatan dana keistimewaan;
- r. Penambahan dukungan anggaran kegiatan bagi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
- s. Penambahan untuk pemeliharaan kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, Swakelola pemeliharaan gedung kantor Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kapanewon Wonosari, Kapanewon, Gedangsari dan Kapanewon Purwosari;
- t. Penambahan untuk pemeliharaan Terminal Semin; dan
- u. Penambahan untuk kegiatan *land clearing* atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tawang-Ngalang.

Belanja Langsung dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dalam masa pandemi COVID-19, pemenuhan kebutuhan mendesak dan kebutuhan wajib mengikat untuk dilaksanakan. Perubahan besaran Belanja Langsung, baik pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal dilakukan untuk memenuhi ketentuan refocusing belanja yang akan digunakan dalam



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

penanganan COVID-19 dan adanya kebijakan pemerintah tentang pengembalian beberapa kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik serta beberapa kebutuhan belanja wajib serta mengikat yang mesti dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun 2020.

Rencana perubahan pada Belanja Langsung dalam APBD Perubahan Tahun 2020 semula dari Rp993.034.887.536,00 berkurang menjadi sebesar Rp690.417.480.989,03 atau turun sebesar Rp302.617.406.546,97 (30,47%), dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai semula dari Rp49.200.707.600,00 berkurang menjadi sebesar Rp41.182.758.974,00 atau turun sebesar Rp8.017.948.626,00;
2. Belanja Barang dan Jasa semula dari Rp493.622.640.574,00 berkurang menjadi sebesar Rp399.520.331.520,03 atau turun sebesar Rp94.102.309.053,97,00; dan
3. Belanja Modal semula dari Rp450.211.539.362,00 berkurang menjadi sebesar Rp249.714.390.495,00 atau turun sebesar Rp200.497.148.867,00;

Adapun perubahan diatas dapat disajikan dalam tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Perubahan Belanja pada APBD Tahun 2020

No Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
5.	BELANJA DAERAH	2.191.792.474.340,00	1.975.714.570.395,13	(216.077.903.944,87)
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.198.757.586.804,00	1.285.297.089.406,10	86.539.502.602,10
5.1.1.	Belanja Pegawai	854.992.362.413,00	840.788.048.912,68	(14.204.313.500,32)
5.1.2.	Belanja Hibah	58.021.882.191,00	56.892.468.691,00	(1.129.413.500,00)
5.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	2.637.000.000,00	5.454.500.000,00	2.817.500.000,00
5.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	11.766.755.000,00	8.727.681.325,00	(3.039.073.675,00)
5.1.5.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	124.440.251.677,42	120.440.251.677,42
5.2.	Belanja Langsung	993.034.887.536,00	690.417.480.989,03	(302.617.406.546,97)
5.2.1.	Belanja Pegawai	49.200.707.600,00	41.182.758.974,00	(8.017.948.626,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.622.640.574,00	399.520.331.520,03	(94.102.309.053,97)
5.2.3.	Belanja Modal	450.211.539.362,00	249.714.390.495,00	(200.497.148.867,00)
	JUMLAH BELANJA	2.191.792.474.340,00	1.975.714.570.395,13	(216.077.903.944,87)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(158.196.864.626,89)	(135.322.960.246,28)	22.873.904.380,61

2.6. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

terbitnya LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2019 maka kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD diarahkan pada penyesuaian nilai atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI.

Adapun kebijakan pembiayaan terdiri dari:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang semula dalam APBD TA 2020 diproyeksikan sebesar Rp178.119.200.811,24 realisasinya sebesar Rp172.696.710.995,63 atau turun sebesar Rp5.422.489.815,61.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan dari semula dianggarkan sebesar Rp19.922.336.184,35 menjadi sebesar Rp37.373.750.749,35 atau mengalami kenaikan sebesar Rp17.451.414.565,00. Kenaikan pengeluaran pembiayaan untuk penambahan pembayaran kelebihan atas penerimaan daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD DIY).

Secara perangkaan dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Tahun 2020

No Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	158.196.864.626,89	135.322.960.246,28	(22.873.904.380,61)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	178.119.200.811,24	172.696.710.995,63	(5.422.489.815,61)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	178.119.200.811,24	172.696.710.995,63	(5.422.489.815,61)
		178.119.200.811,24	172.696.710.995,63	(5.422.489.815,61)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19.922.336.184,35	37.373.750.749,35	17.451.414.565,00
6.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.919.649.284,35	37.319.649.284,35	(17.400.000.000,00)
6.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	2.686.900,00	54.101.465,00	51.414.565,00
		19.922.336.184,35	37.373.750.749,35	17.451.414.565,00
	Pembiayaan Netto	158.196.864.626,89	135.322.960.246,28	(22.873.904.380,61)
6.3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2020

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dan menjadi sangat penting mengingat beberapa kondisi dan kebijakan yang berkonsekuensi pada penyesuaian anggaran tahun berjalan, terutama akibat terjadinya pandemi COVID-19 pada awal Tahun 2020. Berdasarkan perubahan kebijakan umum sebagaimana termuat dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan agar perubahan program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan perubahan anggaran, maka diperlukan perubahan besaran plafon anggaran sementara untuk masing-masing perangkat daerah berdasarkan skala prioritas dan belanja daerah yang harus didanai sesuai dengan ketersediaan dana dan kemampuan keuangan daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyesuaikan rencana penganggaran dalam hal pendapatan, belanja, serta pembiayaan dengan perkembangan kondisi di tahun berjalan. Perkembangan dimaksud meliputi perubahan dan penyesuaian kebijakan pendapatan, kebijakan belanja maupun kebijakan penyesuaian pembiayaan daerah serta penyesuaian/pergeseran belanja pada perangkat daerah yang sudah diuraikan pada bagian 2.4 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2020, 2.5 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah, dan 2.6 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan pagu indikatif jumlah anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan pemerintah daerah dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Adapun tujuan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
2. Sebagai pedoman mengenai perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan PD yang akan dibiayai melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan pilihan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Urusan	Belanja Langsung		
		Murni	Perubahan	Tambah/ (Kurang)
1	2	3	4	5=4-3
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	590.853.269.592,00	410.372.663.773,00	(180,480,605,819.00)
1.01	PENDIDIKAN	127.868.674.542,00	105.521.542.400,00	(22,347,132,142.00)
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	127.868.674.542,00	105.521.542.400,00	(22,347,132,142.00)
1.02	KESEHATAN	249.098.512.809,00	261.926.329.958,00	12,827,817,149.00
1.02.01	Dinas Kesehatan	179.152.768.809,00	179.590.585.958,00	437,817,149.00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Darah	69.945.744.000,00	82.335.744.000,00	12,390,000,000.00
1.03	PEKERJAAN UMUM	194.530.300.241,00	35.163.404.450,00	(159,366,895,791.00)
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	194.530.300.241,00	35.163.404.450,00	(159,366,895,791.00)
1.04	PERUMAHAN RAKYAT	6.080.757.000,00	277.594.200,00	(5,803,162,800.00)
1.04.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.080.757.000,00	277.594.200,00	(5,803,162,800.00)
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.424.850.000,00	5.134.602.488,00	(4,290,247,512.00)
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	9.424.850.000,00	5.134.602.488,00	(4,290,247,512.00)
1.06	SOSIAL	3.850.175.000,00	2.349.190.277,00	(1,500,984,723.00)
1.06.01	Dinas Sosial	3.850.175.000,00	2.349.190.277,00	(1,500,984,723.00)
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	208.990.026.059,00	150.703.094.687,03	
2.01	TENAGA KERJA	1.990.121.000,00	1.232.852.250,00	
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.990.121.000,00	1.232.852.250,00	

1	2	3	4	5=4-3
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.771.657.879,00	826.117.370,00	(945,540,509.00)
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.771.657.879,00	826.117.370,00	(945,540,509.00)
2.03	PANGAN	833.460.000,00	636.869.000,00	(196,591,000.00)
1.01.01.	Dinas Pertanian dan Pangan	833.460.000,00	636.869.000,00	(196,591,000.00)
2.04	PERTANAHAN	33.757.149.000,00	11.134.863.578,00	(22,622,285,422.00)
2.04.01	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	33.757.149.000,00	11.134.863.578,00	(22,622,285,422.00)
2.05	LINGKUNGAN	6.781.384.670,00	6.118.968.184,00	(662,416,486.00)
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	6.781.384.670,00	6.118.968.184,00	(662,416,486.00)
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	5.448.577.500,00	4.490.309.089,00	(958,268,411.00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	PENCATATAN SIPIL			
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.448.577.500,00	4.490.309.089,00	(958,268,411.00)
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.673.017.000,00	519.408.705,00	(958,268,411.00)
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.673.017.000,00	519.408.705,00	(1,153,608,295.00)
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.045.603.000,00	5.843.886.000,00	(201,717,000.00)
2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.045.603.000,00	5.843.886.000,00	(201,717,000.00)
2.09	PERHUBUNGAN	19.399.030.000,00	16.621.651.950,00	(2,777,378,050.00)
2.09.01	Dinas Perhubungan	19.399.030.000,00	16.621.651.950,00	(2,777,378,050.00)
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.099.834.600,00	15.615.016.100,03	(3,484,818,499.97)
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.099.834.600,00	15.615.016.100,03	(3,484,818,499.97)
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.416.029.000,00	1.219.145.000,00	(1,196,884,000.00)
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.416.029.000,00	1.219.145.000,00	(1,196,884,000.00)
2.12	PENANAMAN MODAL	2.214.159.850,00	1.559.731.150,00	(654,428,700.00)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	2.214.159.850,00	1.559.731.150,00	(654,428,700.00)
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	6.788.500.460,00	1.353.201.860,00	(5,435,298,600.00)
2.13.01	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	6.788.500.460,00	1.353.201.860,00	(5,435,298,600.00)
2.14	STATISTIK	194.595.000,00	7.810.000,00	(186,785,000.00)
2.14.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	194.595.000,00	7.810.000,00	(186,785,000.00)
2.15	PERSANDIAN	254.080.000,00	100.947.825,00	(153,132,175.00)
2.15.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	254.080.000,00	100.947.825,00	(153,132,175.00)
2.16	KEBUDAYAAN	88.203.940.500,00	82.070.465.750,00	(6,133,474,750.00)
2.16.01	Dinas Kebudayaan	88.203.940.500,00	82.070.465.750,00	(6,133,474,750.00)
2.17	PERPUSTAKAAN	11.704.545.440,00	1.147.240.476,00	(10,557,304,964.00)
2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11.704.545.440,00	1.147.240.476,00	(10,557,304,964.00)
2.18	KEARSIPAN	414.341.160,00	204.610.400,00	(209,730,760.00)
2.18.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	414.341.160,00	204.610.400,00	(209,730,760.00)
3	URUSAN PILIHAN	42.021.362.550,00	21.328.556.840,00	(20,692,805,710.00)
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.109.448.000,00	2.889.936.122,00	(2,219,511,878.00)
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.109.448.000,00	2.889.936.122,00	(2,219,511,878.00)
3.02	PARIWISATA	14.087.441.800,00	5.461.393.750,00	(8,626,048,050.00)
3.02.01	Dinas Pariwisata	14.087.441.800,00	5.461.393.750,00	(8,626,048,050.00)
3.03	PERTANIAN	10.568.907.000,00	6.530.708.862,00	(4,038,198,138.00)
3.03.01	Dinas Pertanian Dan Pangan	10.568.907.000,00	6.530.708.862,00	(4,038,198,138.00)
3.04	KEHUTANAN	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-
3.06.	PERDAGANGAN	11.208.285.000,00	6.031.436.906,00	(5,176,848,094.00)
3.06.01.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	11.208.285.000,00	6.031.436.906,00	(5,176,848,094.00)
3.07.	PERINDUSTRIAN	629.470.750,00	228.593.000,00	(400,877,750.00)
3.07.01.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	629.470.750,00	228.593.000,00	(400,877,750.00)
3.08.	TRANSMIGRASI	417.810.000,00	186.488.200,00	(231,321,800.00)
3.08.01.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	417.810.000,00	186.488.200,00	(231,321,800.00)
4	PENUNJANG URUSAN	82.645.054.900,00	67.276.632.370,00	(15,368,422,530.00)
4.01.	INSPEKTORAT	5.365.260.000,00	3.477.404.220,00	(1,887,855,780.00)
4.01.01.	Inspektorat Daerah	5.365.260.000,00	3.477.404.220,00	(1,887,855,780.00)
4.02.	PERENCANAAN	4.487.516.000,00	1.504.900.200,00	(2,982,615,800.00)
4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.487.516.000,00	1.504.900.200,00	(2,982,615,800.00)
4.03.	KEUANGAN	16.260.357.000,00	11.957.572.700,00	(4,302,784,300.00)
4.03.00.	PPKD	-	-	-
4.03.01.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	16.260.357.000,00	11.957.572.700,00	(4,302,784,300.00)
4.04.	KEPEGAWAIAN	7.611.083.000,00	2.129.478.300,00	(5,481,604,700.00)
4.04.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	7.611.083.000,00	2.129.478.300,00	(5,481,604,700.00)
4.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-
4.05.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	-	-	-
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	413.705.000,00	249.390.000,00	(164,315,000.00)
4.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	413.705.000,00	249.390.000,00	(164,315,000.00)
4.07.	BENCANA	48.507.133.900,00	47.957.886.950,00	(549,246,950.00)
4.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.507.133.900,00	47.957.886.950,00	(549,246,950.00)
5	PENDUKUNG	51.659.795.210,00	31.366.097.326,00	(20,293,697,884.00)
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH	14.785.783.210,00	9.188.490.326,00	(5,597,292,884.00)
5.01.01.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
5.01.02.	Sekretariat Daerah	14.785.783.210,00	9.188.490.326,00	(5,597,292,884.00)
5.02.	SEKRETARIAT DPRD	36.874.012.000,00	22.177.607.000,00	(14,696,405,000.00)
5.02.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-
5.02.02.	Sekretariat DPRD	36.874.012.000,00	22.177.607.000,00	(14,696,405,000.00)
6	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.867.633.000,00	1.876.306.900,00	(991,326,100.00)
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.867.633.000,00	1.876.306.900,00	(991,326,100.00)
6.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.867.633.000,00	1.876.306.900,00	(991,326,100.00)
7		13.997.746.225,00	7.494.129.093,00	(6,503,617,132.00)
7.01.		13.997.746.225,00	7.494.129.093,00	(6,503,617,132.00)
7.01.01.	Kecamatan Wonosari	720.400.000,00	360.681.000,00	(359,719,000.00)
7.01.02.	Kecamatan Paliyan	682.645.000,00	320.955.500,00	(361,689,500.00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.03.	Kecamatan Panggang	902.451.000,00	624.199.500,00	(278,251,500.00)
7.01.04.	Kecamatan Tepus	801.759.000,00	383.823.300,00	(417,935,700.00)
7.01.05.	Kecamatan Rongkop	657.510.000,00	366.489.500,00	(291,020,500.00)
7.01.06.	Kecamatan Semanu	939.316.000,00	335.112.200,00	(604,203,800.00)
7.01.07.	Kecamatan Ponjong	747.892.100,00	548.794.593,00	(199,097,507.00)
7.01.08.	Kecamatan Karangmojo	945.699.000,00	381.550.000,00	(564,149,000.00)
7.01.09.	Kecamatan Playen	779.084.000,00	609.374.200,00	(169,709,800.00)
7.01.10.	Kecamatan Nglipar	536.368.000,00	326.927.800,00	(209,440,200.00)
7.01.11.	Kecamatan Ngawen	872.455.000,00	626.412.000,00	(246,043,000.00)
7.01.12.	Kecamatan Semin	572.112.000,00	393.113.500,00	(178,998,500.00)
7.01.13.	Kecamatan Patuk	567.322.000,00	322.025.000,00	(245,297,000.00)
7.01.14.	Kecamatan Saptosari	721.820.000,00	305.244.000,00	(416,576,000.00)
7.01.15.	Kecamatan Gedangsari	1.338.844.900,00	449.945.800,00	(888,899,100.00)
7.01.16.	Kecamatan Girisubo	681.882.425,00	460.513.500,00	(221,368,925.00)
7.01.17.	Kecamatan Tanjungsari	567.662.800,00	341.234.200,00	(226,428,600.00)
7.01.18.	Kecamatan Purwosari	962.523.000,00	337.733.500,00	(624,789,500.00)
8	KEISTIMEWAAN	-	-	-
8.01.	TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS...(KEISTIMEWAAN)	-	-	-
8.02.	KELEMBAGAAN (KEISTIMEWAAN)	-	-	-
8.03.	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	-	-	-
8.04.	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	-	-	-
8.05.	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	-	-	-
TOTAL		993.034.887.536,00	690.417.480.989,03	(302.617.406.546,97)

2.8. Matrik Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2020

Adapun urutan prioritas penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan di PD sebagai berikut.

Tabel 2.20
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS	SASARAN DAERAH	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Pendidikan dan kesehatan	Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat	Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	DINKES
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
		Program Kesehatan Keluarga	DINKES
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES
		Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES
		Pencegahan Penyakit	DINKES
		Program Pembangunan & Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan	DINKES
		Program Pelayanan Jaminan Kesehatan	DINKES



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

		Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS NGLIPAR I
		Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	UPT LABKES
		Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	RSUD
		Peningkatan peran serta kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda	DISDIKPORA
		Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	UPT SKB
		Program Pendidikan Dasar SD	UPT WONOSARI
		Program Pendidikan Dasar SMP	SMP 1 WONOSARI
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan	DISDIKPORA
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	DPK
		Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender	DPPPAKBPM
		Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera	DPPPAKBPM
		Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	DISDIKPORA
Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan	Angka Pengangguran menurun	Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja	DISNAKERTRAN
		Pengembangan Transmigrasi	DISNAKERTRAN
		Peningkatan Kesempatan Kerja	DISNAKERTRAN
		Perlindungan Ketenagakerjaan	DISNAKERTRAN
	Jumlah Penduduk Miskin Menurun	Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	DPPPAKBPM
		Peningkatan Kesejahteraan Sosial	DINSOS
		Peningkatan Rehabilitasi Sosial	DINSOS
	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi	DISBUD
		Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra	DISBUD
		Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan & Nilai Budaya	DISBUD
Ekonomi dan Pariwisata	Daya saing pariwisata Meningkat	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata	DISPAR
		Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	DISPAR
		Peningkatan dan pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata	DISPAR
	Pendapatan masyarakat meningkat	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan	DPP
		Peningkatan Agribisnis Pertanian	DPP
		Pengembangan Agribisnis Perikanan	DKP
		Pemberdayaan Nelayan	DKP
	Pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Kapasitas Koperasi	DINKOPUKM



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	daerah meningkat	Peningkatan kualitas pengelolaan UMKM	DINKOPUKM
		Program Analisis Kebijakan Pembangunan	SETDA
		Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SETDA
		Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	DPMPT
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	DISPERINDAG
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan	DISPERINDAG
		Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	DISPERINDAG
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika	DISKOMINFO
		Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (KEISTIMEWAAN)	DISPERTARU
		Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	DISPERTARU
		Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (KEISTIMEWAAN)	DISPERTARU
		Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang	DISPERTARU
		Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan	DPUPRKP
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	DPUPRKP
		Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPUPRKP
		Penyehatan Lingkungan Permukiman	DPUPRKP
		Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun	DPUPRKP
		Penyelenggaraan Pembangunan Gedung	DPUPRKP
		Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat	DPUPRKP
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	DISHUB
		Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	DISHUB
		Uji Kelayakan Sarana Transportasi	DISHUB
		Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran	DISHUB
Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana		Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	BPBD
		Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bahaya Kebakaran	BPBD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Ketahanan Pangan Meningkat	Peningkatan Ketahanan Pangan	DPP
		Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura	DPP
		Peningkatan produksi peternakan	DPP
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	DKP
		Peningkatan produksi Tanaman Pangan	DPP
	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	DINAS LH
		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	DINAS LH
		Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	DINAS LH
		Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DINAS LH
		Pengendalian Pencemaran dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup	DINAS LH
		Pengelolaan Sampah Mandiri	DINAS LH
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Pembinaan dan kesejahteraan aparatur	BKPPD
		Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai	BKPPD
		Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS	BKPPD
		Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan	SETDA
		Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	SETDA
		Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	BAPPEDA
		Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya	BAPPEDA
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	BAPPEDA
		Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Peningkatan Pelayanan Kearsipan	DPK
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	SETWAN
		Program Pengembangan Statistik Daerah	DISKOMINFO
		Persandian dan Pengamanan Informasi	DISKOMINFO
		Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DISKOMINFO
		Peningkatan Pelayanan Terpadu	DPMPT
		Pengendalian Perizinan dan PM	DPMPT
		Program Pengembangan Otonomi Desa	DPPPAKBPM
		Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	WONOSARI
		Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemda	SETDA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

		Penataan Peraturan Perundang-undangan	SETDA
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	SETDA
		Peningkatan Kerjasama Antar Pemda	SETDA
		Pembinaan Wilayah	SETDA
		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan	DISPERTARU
		Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (KEISTIMEWAAN)	DISPERTARU
		Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (KEISTIMEWAAN)	DISPERTARU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SETDA
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
		Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
		Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	DISDUKCAPIL
		Pemanfaatan Data dan Inovasi	DISDUKCAPIL
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	BKAD
		Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BKAD
		Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	BKAD
		Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	BKAD
		Program Pengelolaan pendapatan pajak daerah	BKAD
		Program Pengembangan Pendapatan Daerah	BKAD
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	IRDA
	Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat	Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
		Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan ORMAS dan LSM	BAKESBANGPOL
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	SATPOL PP
		Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal	SATPOL PP
		Penegakan Peraturan Daerah	SATPOL PP



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diklasifikasikan menurut urusan wajib serta urusan pilihan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020, ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas sebagai berikut.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Capaian
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	114.791.258.191,24	115.247.366.044,00	100,40
1.01.	PENDIDIKAN			
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.	KESEHATAN			
1.02.01.	Dinas Kesehatan	50.617.183.191,24	47.781.772.721,00	94,40
1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	63.890.000.000,00	67.220.054.323,00	105,21
1.03.	PEKERJAAN UMUM			
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	284.075.000,00	245.539.000,00	86,43
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	4.731.752.360,00	5.394.368.216,00	114,00
2.01.	LINGKUNGAN			
2.01.01.	Dinas Lingkungan Hidup	594.545.200,00	636.361.442,00	107,03
2.02.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL			
2.02.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	293.710.000,00	291.695.000,00	99,31
2.03.	PERHUBUNGAN			
2.03.01.	Dinas Perhubungan	1.643.497.160,00	1.678.513.280,00	102,13



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Capaian
2.04.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.04.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	406.961.590,00	81,39
2.05.	PENANAMAN MODAL			
2.05.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.700.000.000,00	2.380.836.904,00	140,05
3.	URUSAN PILIHAN	18.235.416.220,00	19.040.839.796,87	104,41
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.01.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	820.000.000,00	1.181.418.747,25	144,08
3.02.	PARIWISATA			
3.02.01	Dinas Pariwisata	13.972.171.120,00	14.224.235.459,62	101,80
3.03.	PERTANIAN			
3.03.01.	Dinas Pertanian Dan Pangan	244.100.000,00	332.953.390,00	136,40
3.04.	PERDAGANGAN			
3.04.01.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.199.145.100,00	3.302.232.200,00	103,22
4.	PENUNJANG URUSAN	1.804.909.466.059,53	1.652.695.191.063,86	91,57
4.03.	KEUANGAN	1.804.909.466.059,53	1.652.695.191.063,86	91,57
4.03.01.	PPKD	1.724.008.697.369,85	1.564.169.236.575,21	90,73
4.03.02.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	80.900.768.688,68	88.525.954.488,65	109,43
JUMLAH		1.942.667.892.829,77	1.792.377.765.120,73	92,26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang memiliki prosentase realisasi pendapatan terbesar berturut turut adalah urusan wajib.

1. Rumah Sakit Umum Daerah ditargetkan sebesar Rp63.890.000.000 realisasi sebesar Rp67.220.054.323 atau mencapai sebesar 105,21%.
2. Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp50.617.183.191 realisasi sebesar Rp47.781.772.721 atau mencapai sebesar 94,40%.
3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditargetkan sebesar Rp284.075.000 realisasi sebesar Rp245.539.000 atau mencapai sebesar 86,43%.

Untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang memiliki prosentase realisasi pendapatan terbesar berturut turut adalah:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ditargetkan sebesar Rp1.700.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.380.836.904 atau mencapai sebesar 140,05%;
2. Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar Rp594.545.200 realisasi sebesar Rp636.361.442 atau mencapai sebesar 107,03%;
3. Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp1.643.497.160 realisasi sebesar Rp1.678.513.280 atau mencapai sebesar 102,13 %;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditargetkan sebesar Rp293.710.000 realisasi sebesar Rp291.695.000 atau mencapai sebesar 99,31% ; dan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika ditargetkan sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp406.961.590 atau mencapai sebesar 81,39%.

Urusan Pilihan yang pendapatannya melebihi target berturut turut adalah Urusan Pilihan:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan ditargetkan sebesar Rp820.000.000 realisasi sebesar Rp1.181.418.747 atau mencapai sebesar 144,08%;
2. Dinas Pertanian dan Pangan ditargetkan sebesar Rp244.100.000 realisasi sebesar Rp332.953.390 atau mencapai sebesar 136,40%;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditargetkan sebesar Rp3.199.145.100 realisasi sebesar Rp3.302.232.200 atau mencapai sebesar 103,22%; dan
4. Dinas Pariwisata ditargetkan sebesar Rp13.972.171.120 realisasi sebesar Rp14.223.849.410 atau mencapai sebesar 101,80%.

Penunjang Urusan yang pendapatannya melebihi target adalah Penunjang Urusan Keuangan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah ditargetkan sebesar Rp80.900.768.689 realisasi sebesar Rp88.490.407.413 atau mencapai sebesar 109,38%.

Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Capaian
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	114.791.258.191,24	115.247.366.044,00	100,40
1.01.	PENDIDIKAN			
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.	KESEHATAN			
1.02.01.	Dinas Kesehatan	50.617.183.191,24	47.781.772.721,00	94,40
1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	63.890.000.000,00	67.220.054.323,00	105,21
1.03.	PEKERJAAN UMUM			
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	284.075.000,00	245.539.000,00	86,43
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	4.731.752.360,00	5.394.368.216,00	114,00
2.01.	LINGKUNGAN			
2.01.01.	Dinas Lingkungan Hidup	594.545.200,00	636.361.442,00	107,03
2.02.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL			
2.02.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	293.710.000,00	291.695.000,00	99,31
2.03.	PERHUBUNGAN			
2.03.01.	Dinas Perhubungan	1.643.497.160,00	1.678.513.280,00	102,13
2.04.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.04.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	406.961.590,00	81,39
2.05.	PENANAMAN MODAL			
2.05.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1.700.000.000,00	2.380.836.904,00	140,05
3.	URUSAN PILIHAN	18.235.416.220,00	19.040.839.796,87	104,41
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.01.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	820.000.000,00	1.181.418.747,25	144,08
3.02.	PARIWISATA			
3.02.01.	Dinas Pariwisata	13.972.171.120,00	14.224.235.459,62	101,80
3.03.	PERTANIAN			
3.03.01.	Dinas Pertanian Dan Pangan	244.100.000,00	332.953.390,00	136,40
3.04.	PERDAGANGAN			
3.04.01.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.199.145.100,00	3.302.232.200,00	103,22



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Capaian
4.	PENUNJANG URUSAN	1.804.909.466.059,53	1.652.695.191.063,86	91,57
4.03.	KEUANGAN	1.804.909.466.059,53	1.652.695.191.063,86	91,57
4.03.01.	PPKD	1.724.008.697.369,85	1.564.169.236.575,21	90,73
4.03.02.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	80.900.768.688,68	88.525.954.488,65	109,43
JUMLAH		1.942.667.892.829,77	1.792.377.765.120,73	92,26

Adapun realisasi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA MENURUT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2020

No	Urusan/SKPD	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	699.703.276.989	673.837.978.495	25.865.298.494	96,30
2	Dinas Kesehatan	253.123.995.782	224.827.310.738	28.296.685.044	88,82
3	Rumah Sakit Umum Daerah	104.937.744.114	101.147.554.242	3.790.189.872	96,39
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	42.162.806.257	39.276.828.885	2.885.977.372	93,16
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.715.553.897	7.214.684.780	500.869.117	93,51
6	Dinas Sosial	3.889.634.005	3.772.222.453	117.411.552	96,98
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.017.294.344	3.860.573.383	156.720.961	96,10
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat & Desa	11.981.555.973	11.021.314.650	960.241.323	91,99
9	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	13.273.693.204	12.047.701.560	1.225.991.644	90,76
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.221.803.189	8.679.433.243	542.369.946	94,12
11	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	8.118.348.089	7.471.021.596	647.326.493	92,03
12	Dinas Perhubungan	19.505.302.275	19.003.025.818	502.276.457	97,42



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	17.968.653.689	17.294.925.990	673.727.699	96,25
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.072.865.448	1.985.204.080	87.661.368	95,77
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	3.288.584.444	3.177.651.134	110.933.310	96,63
16	Dinas Kebudayaan	83.466.489.417	81.999.942.862	1.466.546.555	98,24
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.694.387.964	3.564.728.511	129.659.453	96,49
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.881.247.575	4.641.724.681	239.522.894	95,09
19	Dinas Pariwisata	9.061.802.520	8.657.730.117	404.072.403	95,54
20	Dinas Pertanian Dan Pangan	19.291.983.326	18.809.984.108	481.999.218	97,50
21	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	12.180.535.460	11.641.096.523	539.438.937	95,57
22	Inspektorat Daerah	7.112.718.805	6.586.988.548	525.730.257	92,61
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.851.416.172	4.746.074.273	105.341.899	97,83
24	Ppkd	462.268.831.474	250.347.474.959	211.921.356.515	54,16
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	54.409.434.919	51.633.730.250	2.775.704.669	94,90
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	74.385.326.838	74.181.737.218	203.589.620	99,73
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.034.759.436	40.581.561.906	8.453.197.530	82,76
28	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	760.344.376	736.518.396	23.825.980	96,87
29	Sekretariat Daerah	17.518.843.880	16.261.674.060	1.257.169.820	92,82
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.181.534.700	17.361.802.344	819.732.356	95,49
31	Sekretariat Dprd	25.197.544.210	19.588.883.976	5.608.660.234	77,74
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.227.667.116	2.751.297.976	476.369.140	85,24
33	Kecamatan Wonosari	1.488.893.549	1.226.848.932	262.044.617	82,40
34	Kecamatan Paliyan	1.306.523.261	1.259.096.968	47.426.293	96,37
35	Kecamatan Panggang	1.576.934.670	1.551.409.363	25.525.307	98,38
36	Kecamatan Tepus	1.409.545.478	1.403.386.964	6.158.514	99,56
37	Kecamatan Rongkop	1.476.777.940	1.369.775.737	107.002.203	92,75
38	Kecamatan Semanu	1.750.130.342	1.644.011.508	106.118.834	93,94
39	Kecamatan Ponjong	1.727.328.742	1.706.275.090	21.053.652	98,78



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

40	Kecamatan Karangmojo	1.411.516.107	1.371.957.518	39.558.589	97,20
41	Kecamatan Playen	1.857.925.815	1.827.474.160	30.451.655	98,36
42	Kecamatan Nglipar	1.376.483.176	1.258.963.491	117.519.685	91,46
43	Kecamatan Ngawen	1.683.162.036	1.661.674.564	21.487.472	98,72
44	Kecamatan Semin	1.464.703.459	1.434.587.316	30.116.143	97,94
45	Kecamatan Patuk	1.442.625.980	1.432.349.200	10.276.780	99,29
46	Kecamatan Saptosari	1.567.720.406	1.520.178.976	47.541.430	96,97
47	Kecamatan Gedangsari	1.700.684.702	1.699.430.417	1.254.285	99,93
48	Kecamatan Girisubo	1.362.546.483	1.294.582.277	67.964.206	95,01
49	Kecamatan Tanjungsari	1.354.665.731	1.333.624.515	21.041.216	98,45
50	Kecamatan Purwosari	1.396.673.551	1.350.474.241	46.199.310	96,69
JUMLAH		2.077.860.821.316	1.775.056.482.992	302.804.338.324	85,43

Apabila merujuk pada optimalisasi kinerja belanja maka berturut-turut dari Organisasi Perangkat Daerah.

1. Kecamatan Gedangsari yang ditargetkan sebesar Rp1.700.684.702,00 realisasi sebesar Rp1.699.430.417,00 atau mencapai sebesar 99,93%;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp74.385.326.838,00 realisasi sebesar Rp74.181.737.218,00 atau mencapai sebesar 99,73%;
3. Kecamatan Tepus yang ditargetkan sebesar Rp1.409.545.478,00 realisasi sebesar Rp1.403.386.964,00 atau mencapai sebesar 99,56%;
4. Kecamatan Patuk yang ditargetkan sebesar Rp1.442.625.980,00 realisasi sebesar Rp1.432.349.200,00 atau mencapai sebesar 99,29%;
5. Kecamatan Ponjong yang ditargetkan sebesar Rp1.727.328.742,00 realisasi sebesar Rp1.706.275.090,00 atau mencapai sebesar 98,78%;
6. Kecamatan Ngawen yang ditargetkan sebesar Rp1.683.162.036,00 realisasi sebesar Rp1.661.674.564,00 atau mencapai sebesar 98,72%;
7. Kecamatan Tanjungsari yang ditargetkan sebesar Rp1.354.665.731,00 realisasi sebesar Rp1.333.624.515,00 atau mencapai sebesar 98,45%;
8. Kecamatan Panggang yang ditargetkan sebesar Rp1.576.934.670,00 realisasi sebesar Rp1.551.409.363,20 atau mencapai sebesar 98,38%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9. Kecamatan Playen yang ditargetkan sebesar Rp1.857.925.815,00 realisasi sebesar Rp1.827.474.160,00 atau mencapai sebesar 98,36%;
10. Dinas Kebudayaan yang ditargetkan sebesar Rp83.466.489.417,00 realisasi sebesar Rp81.999.942.862,00 atau mencapai sebesar 98,24%;
11. Kecamatan Semin yang ditargetkan sebesar Rp1.464.703.459,00 realisasi sebesar Rp1.434.587.316,00 atau mencapai sebesar 97,94%;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditargetkan sebesar Rp4.017.294.344,00 realisasi sebesar Rp3.932.078.301,00 atau mencapai sebesar 97,88%;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp4.851.416.172,00 realisasi sebesar Rp4.746.074.273,00 atau mencapai sebesar 97,83%;
14. Dinas Pertanian dan Pangan yang ditargetkan sebesar Rp19.291.983.326,00 realisasi sebesar Rp18.809.984.108,00 atau mencapai sebesar 97,50%;
15. Dinas Perhubungan yang ditargetkan sebesar Rp19.505.302.275,00 realisasi sebesar Rp19.003.025.817,68 atau mencapai sebesar 97,42%;
16. Kecamatan Karangmojo yang ditargetkan sebesar Rp1.411.516.107,00 realisasi sebesar Rp1.371.957.518,00 atau mencapai sebesar 97,20%;
17. Dinas Sosial yang ditargetkan sebesar Rp3.889.634.005,00 realisasi sebesar Rp3.772.222.453,00 atau mencapai sebesar 96,98%;
18. Kecamatan Saptosari yang ditargetkan sebesar Rp1.567.720.406,00 realisasi sebesar Rp1.520.178.976,00 atau mencapai sebesar 96,97%;
19. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditargetkan sebesar Rp760.344.376,00 realisasi sebesar Rp736.518.396,00 atau mencapai sebesar 96,87%;
20. Kecamatan Purwosari yang ditargetkan sebesar Rp1.396.673.551,00 realisasi sebesar Rp1.350.474.241,00 atau mencapai sebesar 96,69%;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang ditargetkan sebesar Rp3.288.584.444,00 realisasi sebesar Rp3.177.651.134,00 atau mencapai sebesar 96,63%;
22. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditargetkan sebesar Rp699.703.276.989,00 realisasi sebesar Rp673.837.978.495 atau mencapai sebesar 96,53%;
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ditargetkan sebesar Rp3.694.387.964,00 realisasi sebesar Rp3.564.728.511,00 atau mencapai sebesar 96,49%;
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang ditargetkan sebesar Rp104.937.744.114,00 realisasi sebesar Rp101.147.554.242,00 atau mencapai sebesar 96,39%;
25. Kecamatan Paliyan yang ditargetkan sebesar Rp1.306.523.261,00 realisasi sebesar Rp1.259.096.968,00 atau mencapai sebesar 96,37%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

26. Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditargetkan sebesar Rp17.968.653.689,03 realisasi sebesar Rp17.294.925.990,00 atau mencapai sebesar 96,25%;
27. Dinas Pariwisata yang ditargetkan sebesar Rp9.061.802.520,00 realisasi sebesar Rp8.657.730.117 atau mencapai sebesar 95,54%;
28. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditargetkan sebesar Rp2.072.865.448,00 realisasi sebesar Rp1.985.204.080,00 atau mencapai sebesar 95,77%;
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditargetkan sebesar Rp12.180.535.460,00 realisasi sebesar Rp11.641.096.523,05 atau mencapai sebesar 95,57%;
30. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditargetkan sebesar Rp18.181.534.700,00 realisasi sebesar Rp17.361.802.344,00 atau mencapai sebesar 95,49%;
31. Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditargetkan sebesar Rp4.881.247.575,00 realisasi sebesar Rp4.641.724.681,00 atau mencapai sebesar 95,09%;
32. Kecamatan Girisubo yang ditargetkan sebesar Rp1.362.546.483,00 realisasi sebesar Rp1.294.582.277,00 atau mencapai sebesar 95,01%;
33. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditargetkan sebesar Rp54.409.434.919,00 realisasi sebesar Rp51.633.730.250,26 atau mencapai sebesar 94,90%;
34. Dinas Lingkungan Hidup yang ditargetkan sebesar Rp9.221.803.189,00 realisasi sebesar Rp8.679.433.243,46 atau mencapai sebesar 94,12%;
35. Kecamatan Semanu yang ditargetkan sebesar Rp1.750.130.342,00 realisasi sebesar Rp1.644.011.508,00 atau mencapai sebesar 93,94%;
36. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditargetkan sebesar Rp7.715.553.897,00 realisasi sebesar Rp7.214.684.780,00 atau mencapai sebesar 93,51%;
37. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan yang ditargetkan sebesar Rp42.162.806.257,00 realisasi sebesar Rp39.276.828.885 atau mencapai sebesar 93,16%;
38. Sekretariat Daerah yang ditargetkan sebesar Rp17.518.843.880,00 realisasi sebesar Rp16.261.674.060 atau mencapai sebesar 92,96%;
39. Kecamatan Rongkop yang ditargetkan sebesar Rp1.476.777.940,00 realisasi sebesar Rp1.369.775.737,00 atau mencapai sebesar 92,75%;
40. Inspektorat Daerah yang ditargetkan sebesar Rp7.112.718.805,00 realisasi sebesar Rp6.586.988.548,00 atau mencapai sebesar 92,61%;
41. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditargetkan sebesar Rp8.118.348.089,00 realisasi sebesar Rp7.471.021.596,00 atau mencapai sebesar 92,03%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

42. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditargetkan sebesar Rp11.981.555.973,00 realisasi sebesar Rp11.021.314.650,00 atau mencapai sebesar 91,99%;
43. Kecamatan Nglipar yang ditargetkan sebesar Rp1.376.483.176,20 realisasi sebesar Rp1.258.963.491,00 atau mencapai sebesar 91,46 %;
44. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang ditargetkan sebesar Rp13.273.693.204,00 realisasi sebesar Rp12.047.701.560,21 atau mencapai sebesar 90,76%;
45. Dinas Kesehatan yang ditargetkan sebesar Rp253.123.995.782,00 realisasi sebesar Rp224.827.310.738,14 atau mencapai sebesar 88,82%;
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditargetkan sebesar Rp3.227.667.116,00 realisasi sebesar Rp2.751.297.976,00 atau mencapai sebesar 85,24%;
47. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditargetkan sebesar Rp49.034.759.436,00 realisasi sebesar Rp40.581.561.905,53 atau mencapai sebesar 82,76%;
48. Kecamatan Wonosari yang ditargetkan sebesar Rp1.488.893.549,00 realisasi sebesar Rp1.226.848.932,00 atau mencapai sebesar 82,40%;
49. Sekretariat DPRD yang ditargetkan sebesar Rp25.197.544.210,48 realisasi sebesar Rp19.588.883.976,00 atau mencapai sebesar 77,47%; dan
50. PPKD yang ditargetkan sebesar Rp202.301.510.709,34 realisasi sebesar Rp131.241.297.969,00 atau mencapai sebesar 64,87%.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d. TW IV/2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020			Keterangan
			Target		Realisasi	
			RPJMD	RKPD-P		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	kategori	BB (75,86)	BB (75,86)	BB (74,49)	
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	opini	WTP	WTP	*)	
3	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	indeks	20,22	20,22	21,51	
4	Indeks pembangunan manusia	indeks	71,39	70,59	69,98	
5	Angka kemiskinan	persen	17,24	17,56	17,07	
6	Angka pengangguran	persen	1,20	4,4	2,16	Sakernas, Agustus 2020
7	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	orang	3.706.263	1.577.866	1.981.599	Penutupan Objek Wisata karena covid-19



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	hari	1,57	1,48	0,91	LOS turun karena di TW II : Pandemi covid berdampak penutupan sejumlah penginapan
8	Indeks pelestarian budaya	indeks	98,64	98,64	99,35	
9	Indeks infrastruktur wilayah	indeks	70,22	70,22	68,03	
10	Angka pertumbuhan ekonomi	persen	5,17	1,99	-0,68**)	
11	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	22,05	22,05	25,32**)	
12	Jumlah desa rawan pangan	desa	5	1	1	Kalurahan Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari
13	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	54,47	54,47	64,16	
14	Persentase desa tangguh bencana	persen	84,78	73,91	73,91	Bulan Januari 2020 tambah 1 Desa tangguh bencana tanah longsong sehingga secara akumulasi berjumlah 34 Destana dari target 39 Destana

*) Menunggu hasil dari BPK

**) Angka sangat sementara, BPS 2020

Sesuai dengan RKPD Perubahan tahun 2020 dilakukan penyesuaian beberapa target IKU.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA MENURUT SKPD DAN KEGIATAN

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	492.955.147.114,00	447.705.029.579,25
1.01.	PENDIDIKAN	175.169.765.020,00	162.745.068.438,00
1.01.1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	175.169.765.020,00	162.745.068.438,00
1.01.1.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	19.166.821.270,00	16.736.568.735,00
1.01.1.01.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	235.547.500,00	172.989.718,00
1.01.1.01.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	5.177.734.800,00	5.028.742.675,00
1.01.1.01.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	490.294.800,00	478.556.846,00
1.01.1.01.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	32.242.500,00	16.992.500,00
1.01.1.01.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	1.438.780.000,00	1.227.995.000,00
1.01.1.01.01.03.04.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah	12.011.100,00	12.011.100,00
1.01.1.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	147.386.900,00	147.178.900,00
1.01.1.01.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	206.081.300,00	180.600.900,00
1.01.1.01.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	985.151.500,00	558.933.000,00
1.01.1.01.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	2.047.932.900,00	1.932.955.764,00
1.01.1.01.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	306.307.000,00	293.682.000,00
1.01.1.01.01.06.02.	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	142.257.500,00	121.922.500,00
1.01.1.01.01.15.01.	Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas	1.215.661.675,00	1.038.019.023,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1.01.1.01.01.15.03.	Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1.879.770.400,00	1.846.907.090,00
1.01.1.01.01.15.05.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD	1.294.163.325,00	1.293.031.649,00
1.01.1.01.01.15.06.	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	1.398.940.800,00	1.376.650.150,00
1.01.1.01.01.15.07.	Penyelenggaraan Kecakapan Hidup	34.771.000,00	34.771.000,00
1.01.1.01.01.15.08.	Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Institusional	266.392.500,00	213.335.000,00
1.01.1.01.01.16.01.	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	42.491.139.000,00	41.898.518.009,00
1.01.1.01.01.16.03.	Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD	138.812.700,00	138.812.700,00
1.01.1.01.01.16.04.	Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD	879.015.000,00	693.298.492,00
1.01.1.01.01.16.05.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SD	43.899.864.878,00	41.644.894.752,00
1.01.1.01.01.17.01.	Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP	21.159.626.000,00	21.090.332.469,00
1.01.1.01.01.17.02.	Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP	49.199.500,00	48.817.000,00
1.01.1.01.01.17.03.	Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP	624.513.800,00	492.347.100,00
1.01.1.01.01.17.04.	Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP	932.261.880,00	853.317.800,00
1.01.1.01.01.17.05.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SMP	25.627.707.742,00	20.971.687.676,00
1.01.1.01.01.19.01.	Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal	660.227.500,00	498.175.000,00
1.01.1.01.01.19.02.	Pembinaan Tenaga Kependidikan SD	1.786.546.250,00	1.361.093.490,00
1.01.1.01.01.19.03.	Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP	442.602.000,00	341.930.400,00
1.02.	KESEHATAN	273.741.792.679,00	243.670.607.421,14
1.02.1.02.01.	DINAS KESEHATAN	191.406.048.679,00	164.537.794.192,14
1.02.1.02.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	580.195.000,00	549.590.500,00
1.02.1.02.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	59.362.200,00	32.079.700,00
1.02.1.02.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	304.700.000,00	295.165.163,00
1.02.1.02.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.375.000,00	1.375.000,00
1.02.1.02.01.03.04.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah	7.500.000,00	4.900.000,00
1.02.1.02.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	119.905.850,00	109.167.500,00
1.02.1.02.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	14.742.415.500,00	14.568.555.468,00
1.02.1.02.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.630.000,00
1.02.1.02.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	3.450.000,00	3.050.000,00
1.02.1.02.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.500.000,00	2.500.000,00
1.02.1.02.01.06.02.	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	7.585.000,00	7.147.500,00
1.02.1.02.01.15.01.	Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan	5.448.282.526,00	4.588.261.025,00
1.02.1.02.01.15.02.	Pembinaan dan Pelayanan Lisensi Sumberdaya Kesehatan	11.600.000,00	11.460.000,00
1.02.1.02.01.15.03.	Peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan	47.310.000,00	47.135.000,00
1.02.1.02.01.16.01.	Pelayanan Medis dan Kegawatdaruratan	215.760.000,00	209.945.000,00
1.02.1.02.01.16.02.	Pelayanan Kesehatan Perorangan	15.820.000,00	15.820.000,00
1.02.1.02.01.16.03.	Pembinaan BLUD dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.133.460.000,00	525.801.400,00
1.02.1.02.01.16.04.	Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Tradisional	23.285.000,00	22.457.500,00
1.02.1.02.01.17.01.	Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja dan Usia Lanjut	1.989.168.000,00	1.977.241.350,00
1.02.1.02.01.17.02.	Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak	63.950.000,00	63.079.935,00
1.02.1.02.01.18.01.	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	165.313.000,00	163.580.000,00
1.02.1.02.01.18.02.	Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	265.805.000,00	248.654.500,00
1.02.1.02.01.18.03.	Pengembangan Lingkungan Sehat	312.295.000,00	277.813.000,00
1.02.1.02.01.19.01.	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi	2.620.238.000,00	2.269.925.122,00
1.02.1.02.01.19.02.	Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	22.665.000,00	14.015.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1.02.1.02.01.20.01.	Pengendalian Penyakit Menular	1.826.139.000,00	1.676.094.000,00
1.02.1.02.01.20.02.	Pencegahan Penyakit Tidak Menular	203.400.000,00	202.085.000,00
1.02.1.02.01.20.04.	Surveilans dan Imunisasi	151.465.000,00	113.024.500,00
1.02.1.02.01.21.01.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kesehatan	229.920.000,00	224.232.509,96
1.02.1.02.01.21.02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	2.675.891.326,00	2.623.514.500,00
1.02.1.02.01.22.01.	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	11.140.000,00	11.100.000,00
1.02.1.02.01.22.02.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	64.096.045.500,00	63.412.501.500,00
1.02.1.02.01.23.01.	Pelayanan BLUD Puskesmas	74.761.390.777,00	57.261.701.025,43
1.02.1.02.01.24.01.	Pelayanan BLUD RSUD	19.113.717.000,00	12.850.304.173,75
1.02.1.02.01.25.01.	Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	169.000.000,00	150.887.320,00
1.02.1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	82.335.744.000,00	79.132.813.229,00
1.02.1.02.02.24.01.	Pelayanan BLUD RSUD	82.335.744.000,00	79.132.813.229,00
1.03.	PEKERJAAN UMUM	36.093.972.450,00	33.792.357.398,11
1.03.1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36.093.972.450,00	33.792.357.398,11
1.03.1.03.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	655.340.000,00	574.227.589,00
1.03.1.03.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	30.985.000,00	29.745.175,00
1.03.1.03.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	191.600.000,00	135.170.237,00
1.03.1.03.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.198.200,00
1.03.1.03.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	800.000,00	800.000,00
1.03.1.03.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.691.000,00
1.03.1.03.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	16.100.000,00	15.592.500,00
1.03.1.03.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	34.445.100,00	33.219.500,00
1.03.1.03.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	4.617.500,00	3.575.000,00
1.03.1.03.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.487.500,00	2.357.700,00
1.03.1.03.01.15.01.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	7.213.000.000,00	7.081.943.500,00
1.03.1.03.01.15.02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.410.282.318,00	6.077.305.225,00
1.03.1.03.01.15.03.	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	484.700.000,00	471.124.000,00
1.03.1.03.01.16.01.	Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	7.366.201.000,00	6.477.405.400,00
1.03.1.03.01.16.02.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air Permukaan dan Irigasi	335.575.000,00	334.854.000,00
1.03.1.03.01.16.03.	Pembinaan Kelembagaan dan Pemanfaatan Irigasi	332.705.000,00	332.312.000,00
1.03.1.03.01.18.01.	Pengendalian, Pendirian, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	137.042.500,00	123.875.269,00
1.03.1.03.01.18.02.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	8.320.389.832,00	7.837.162.831,88
1.03.1.03.01.18.03.	Bina Konstruksi	11.572.200,00	11.572.200,00
1.03.1.03.01.19.01.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air limbah	2.705.250.000,00	2.532.405.002,23
1.03.1.03.01.19.03.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Bantaran, Tanggul dan Sungai	675.000.000,00	664.467.500,00
1.03.1.03.01.20.01.	Pengelolaan, Persewaan Alat Berat dan Laboratorium	212.318.000,00	211.015.000,00
1.03.1.03.01.21.01.	Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum, dan Prasarana Lingkungan	935.561.500,00	825.338.569,00
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT	452.594.200,00	447.965.100,00
1.04.1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	452.594.200,00	447.965.100,00
1.04.1.03.01.15.01.	Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya	252.167.000,00	248.533.000,00
1.04.1.03.01.15.02.	Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal	22.817.200,00	22.367.200,00
1.04.1.03.01.15.03.	Pembinaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Permukiman	3.100.000,00	3.077.000,00
1.04.1.03.01.15.04.	Penanganan Kawasan Kumuh	174.510.000,00	173.987.900,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.147.832.488,00	4.807.372.646,00
1.05.1.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.147.832.488,00	4.807.372.646,00
1.05.1.05.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	173.151.000,00	141.476.220,00
1.05.1.05.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	67.880.100,00	50.805.100,00
1.05.1.05.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	114.742.308,00	112.581.276,00
1.05.1.05.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.650.000,00	2.650.000,00
1.05.1.05.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	18.300.000,00	18.135.000,00
1.05.1.05.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	75.086.000,00	68.773.000,00
1.05.1.05.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	750.000,00	750.000,00
1.05.1.05.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	750.000,00	750.000,00
1.05.1.05.01.15.02.	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	12.095.000,00	12.095.000,00
1.05.1.05.01.15.03.	Pengarahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	1.192.966.000,00	1.188.646.000,00
1.05.1.05.01.16.01.	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.269.132.080,00	2.020.456.050,00
1.05.1.05.01.16.03.	Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawalan, Penjagaan, dan Patroli	1.166.120.000,00	1.139.885.000,00
1.05.1.05.01.17.01.	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	15.660.000,00	15.660.000,00
1.05.1.05.01.17.02.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00
1.05.1.05.01.17.03.	Penertiban Cukai Ilegal	19.050.000,00	15.210.000,00
1.06.	SOSIAL	2.349.190.277,00	2.241.658.576,00
1.06.1.06.01.	DINAS SOSIAL	2.349.190.277,00	2.241.658.576,00
1.06.1.06.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	168.825.000,00	161.189.574,00
1.06.1.06.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	50.740.000,00	42.747.454,00
1.06.1.06.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	97.965.000,00	95.799.300,00
1.06.1.06.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.475.000,00	1.475.000,00
1.06.1.06.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	1.000.000,00	1.000.000,00
1.06.1.06.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5.950.000,00	5.927.300,00
1.06.1.06.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	40.740.000,00	36.637.500,00
1.06.1.06.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.375.000,00	3.322.500,00
1.06.1.06.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	3.610.000,00	3.527.500,00
1.06.1.06.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6.000.000,00	5.957.500,00
1.06.1.06.01.06.02.	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	300.000,00	300.000,00
1.06.1.06.01.15.01.	Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS	213.725.000,00	209.614.821,00
1.06.1.06.01.15.02.	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.093.430.277,00	1.054.628.127,00
1.06.1.06.01.16.01.	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial	408.565.000,00	392.091.000,00
1.06.1.06.01.16.02.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas	253.490.000,00	227.441.000,00
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	150.919.990.527,00	145.661.251.192,35
2.01.	TENAGA KERJA	1.375.852.250,00	1.369.572.300,00
2.01.2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.375.852.250,00	1.369.572.300,00
2.01.2.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	183.324.750,00	181.279.800,00
2.01.2.01.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	2.200.000,00	1.880.000,00
2.01.2.01.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	93.300.000,00	93.300.000,00
2.01.2.01.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.250.000,00	695.000,00
2.01.2.01.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	1.000.000,00	1.000.000,00
2.01.2.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	29.290.000,00	29.284.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.01.2.01.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	16.130.000,00	16.066.000,00
2.01.2.01.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	885.000,00	885.000,00
2.01.2.01.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	2.030.000,00	2.030.000,00
2.01.2.01.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.557.500,00	972.500,00
2.01.2.01.01.15.01.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan Pencari Kerja	222.680.000,00	221.712.000,00
2.01.2.01.01.15.02.	Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan	1.000.000,00	995.000,00
2.01.2.01.01.16.01.	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja	612.820.000,00	611.172.500,00
2.01.2.01.01.16.02.	Kerjasama Pendidikan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	186.715.000,00	186.630.000,00
2.01.2.01.01.17.01.	Pendampingan Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan	10.230.000,00	10.230.000,00
2.01.2.01.01.17.02.	Pengawasan Perlindungan dan Pengupahan Ketenagakerjaan	11.440.000,00	11.440.000,00
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	826.117.370,00	762.354.435,00
2.02.2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	826.117.370,00	762.354.435,00
2.02.2.02.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	267.061.374,00	213.961.639,00
2.02.2.02.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	26.966.505,00	26.821.505,00
2.02.2.02.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	118.905.691,00	118.905.691,00
2.02.2.02.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	122.078.000,00	119.432.300,00
2.02.2.02.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.625.000,00	2.625.000,00
2.02.2.02.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	820.000,00	420.000,00
2.02.2.02.01.03.04.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah	1.190.000,00	1.190.000,00
2.02.2.02.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17.762.500,00	17.500.000,00
2.02.2.02.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	34.980.000,00	34.545.000,00
2.02.2.02.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2.042.000,00	2.042.000,00
2.02.2.02.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	3.350.000,00	3.330.000,00
2.02.2.02.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.050.000,00	1.050.000,00
2.02.2.02.01.15.01.	Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	172.206.300,00	167.166.300,00
2.02.2.02.01.15.02.	Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	55.080.000,00	53.365.000,00
2.03.	PANGAN	629.869.000,00	593.771.900,00
2.03.3.03.01.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	629.869.000,00	593.771.900,00
2.03.3.03.01.15.01.	Penguatan Penyediaan dan Akses pangan	360.444.500,00	328.412.500,00
2.03.3.03.01.15.02.	Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan	36.917.500,00	36.911.500,00
2.03.3.03.01.15.03.	Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat	232.507.000,00	228.447.900,00
2.04.	PERTANAHAN	11.366.859.418,00	10.175.005.912,21
2.04.2.04.01.	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG / KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	11.366.859.418,00	10.175.005.912,21
2.04.2.04.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	223.881.200,00	162.210.377,00
2.04.2.04.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	40.079.500,00	40.022.400,00
2.04.2.04.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	69.450.000,00	69.349.630,00
2.04.2.04.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.450.000,00	2.450.000,00
2.04.2.04.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	31.257.550,00	31.181.500,00
2.04.2.04.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	32.220.000,00	32.140.000,00
2.04.2.04.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	4.218.000,00	4.209.500,00
2.04.2.04.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	1.750.000,00	1.739.000,00
2.04.2.04.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	700.000,00	700.000,00
2.04.2.04.01.15.01.	Perencanaan Pengadaan Tanah	30.783.000,00	28.783.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.04.2.04.01.15.03.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	5.059.327.700,00	4.966.760.120,00
2.04.2.04.01.15.04.	Penataan dan Pemanfaatan Tanah	20.585.000,00	20.210.000,00
2.04.2.04.01.15.05.	Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah	4.535.000,00	4.535.000,00
2.04.2.04.01.15.06.	Pendaftaran Tanah	62.915.000,00	46.354.040,00
2.04.2.04.01.15.10.	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.049.775.000,00	3.287.295.777,21
2.04.2.04.01.15.11.	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	565.696.000,00	352.889.500,00
2.04.2.04.01.15.12.	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	153.900.000,00	152.525.000,00
2.04.2.04.01.15.14.	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	20.000.000,00	19.580.000,00
2.04.2.04.01.16.01.	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	49.057.573,00	48.757.573,00
2.04.2.04.01.16.03.	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	27.933.645,00	27.933.645,00
2.04.2.04.01.16.04.	Pembinaan Tata Ruang	50.494.000,00	46.669.000,00
2.04.2.04.01.17.02.	Pengendalian Pertanahan	55.461.500,00	50.661.500,00
2.04.2.04.01.17.03.	Pemanfaatan Ruang	134.703.500,00	115.461.500,00
2.04.2.04.01.17.04.	Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6.130.000,00	6.130.000,00
2.04.2.04.01.17.05.	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang	35.233.750,00	34.933.750,00
2.04.2.04.01.17.10.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	634.322.500,00	621.524.100,00
2.05.	LINGKUNGAN	6.168.968.184,00	5.745.660.006,46
2.05.2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.168.968.184,00	5.745.660.006,46
2.05.2.05.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	188.880.000,00	183.044.858,00
2.05.2.05.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	33.625.000,00	26.522.800,00
2.05.2.05.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	82.000.000,00	71.678.332,00
2.05.2.05.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00
2.05.2.05.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	6.000.000,00	6.000.000,00
2.05.2.05.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	29.895.000,00	29.555.000,00
2.05.2.05.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	24.395.000,00	24.055.000,00
2.05.2.05.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00
2.05.2.05.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00
2.05.2.05.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.000.000,00	1.000.000,00
2.05.2.05.01.15.01.	Penyelenggaraan pengelolaan persampahan	4.512.723.184,00	4.179.736.207,46
2.05.2.05.01.15.02.	Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan	794.850.000,00	734.792.709,00
2.05.2.05.01.16.01.	Penyelenggaraan Penyusunan AMDAL dan Rekomendasi Penerbitan Ijin Gangguan	17.050.000,00	16.980.000,00
2.05.2.05.01.16.02.	Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Daerah	2.925.000,00	2.919.000,00
2.05.2.05.01.16.03.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	36.085.000,00	36.082.500,00
2.05.2.05.01.17.01.	Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau	51.770.000,00	51.550.000,00
2.05.2.05.01.18.03.	Pengelolaan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati	11.580.000,00	11.580.000,00
2.05.2.05.01.19.01.	Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	163.760.000,00	159.031.100,00
2.05.2.05.01.19.02.	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	66.310.000,00	66.310.000,00
2.05.2.05.01.19.03.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	6.260.000,00	6.260.000,00
2.05.2.05.01.20.01.	Penyelenggaraan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	133.860.000,00	132.562.500,00
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.490.309.089,00	3.926.362.776,00
2.06.2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.490.309.089,00	3.926.362.776,00
2.06.2.06.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.341.156.000,00	1.269.529.315,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.06.2.06.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	146.043.000,00	67.035.823,00
2.06.2.06.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	103.947.500,00	89.556.299,00
2.06.2.06.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	31.542.000,00	31.542.000,00
2.06.2.06.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5.875.000,00	5.875.000,00
2.06.2.06.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	11.546.000,00	11.117.250,00
2.06.2.06.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.024.000,00	1.024.000,00
2.06.2.06.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	559.690.000,00	515.613.500,00
2.06.2.06.01.15.01.	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk	1.695.547.989,00	1.368.732.789,00
2.06.2.06.01.15.02.	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan	50.905.000,00	49.410.000,00
2.06.2.06.01.16.01.	Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	119.470.000,00	114.580.000,00
2.06.2.06.01.16.02.	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	53.165.000,00	51.143.000,00
2.06.2.06.01.17.01.	Pengelolaan data dan Informasi Administrasi Kependudukan	162.344.500,00	160.324.500,00
2.06.2.06.01.17.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	20.638.100,00	20.624.300,00
2.06.2.06.01.18.01.	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	161.770.000,00	148.860.000,00
2.06.2.06.01.18.02.	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	25.645.000,00	21.395.000,00
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	562.108.705,00	541.446.205,00
2.07.2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	562.108.705,00	541.446.205,00
2.07.2.02.01.15.01.	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	14.160.000,00	9.960.000,00
2.07.2.02.01.15.02.	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	346.355.000,00	335.382.500,00
2.07.2.02.01.15.03.	Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	19.193.300,00	19.193.300,00
2.07.2.02.01.16.01.	Pembinaan Pengelolaan Kekayaan	11.750.000,00	11.680.000,00
2.07.2.02.01.16.02.	Pembinaan Administrasi dan Perangkat Desa	140.593.405,00	136.998.405,00
2.07.2.02.01.16.03.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	30.057.000,00	28.232.000,00
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.843.886.000,00	5.619.678.500,00
2.08.2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.843.886.000,00	5.619.678.500,00
2.08.2.02.01.15.01.	Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera	4.656.816.000,00	4.543.988.500,00
2.08.2.02.01.15.02.	Promosi, Konseling, dan Pelayanan Keluarga Berencana	1.187.070.000,00	1.075.690.000,00
2.09.	PERHUBUNGAN	16.621.351.950,00	16.138.042.426,68
2.09.2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	16.621.351.950,00	16.138.042.426,68
2.09.2.09.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	491.170.850,00	417.013.870,00
2.09.2.09.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	75.310.000,00	64.328.700,00
2.09.2.09.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	383.480.500,00	376.759.527,00
2.09.2.09.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00
2.09.2.09.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	550.000,00	550.000,00
2.09.2.09.01.03.04.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah	800.000,00	800.000,00
2.09.2.09.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	11.900.000,00	11.900.000,00
2.09.2.09.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	51.287.000,00	49.432.000,00
2.09.2.09.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	5.275.000,00	5.275.000,00
2.09.2.09.01.15.01.	Pengelolaan Terminal Angkutan	53.905.000,00	52.592.500,00
2.09.2.09.01.15.02.	Pembangunan Gedung Terminal dan Halte	411.012.000,00	409.460.481,71
2.09.2.09.01.16.01.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang	135.405.000,00	134.320.000,00
2.09.2.09.01.16.02.	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Trayek Angkutan	4.408.000,00	4.408.000,00
2.09.2.09.01.16.03.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	125.975.000,00	121.443.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.09.2.09.01.16.04.	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	378.298.500,00	373.216.000,00
2.09.2.09.01.16.05.	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	365.635.000,00	345.661.038,00
2.09.2.09.01.17.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor	465.806.100,00	453.796.200,00
2.09.2.09.01.18.01.	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	13.103.487.500,00	12.819.678.859,97
2.09.2.09.01.18.02.	Pengelolaan Perparkiran	554.246.500,00	494.007.250,00
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.615.016.100,00	15.041.252.793,00
2.10.2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.615.016.100,00	15.041.252.793,00
2.10.2.10.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	780.164.500,00	636.605.937,00
2.10.2.10.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	41.860.000,00	13.900.200,00
2.10.2.10.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	97.400.000,00	87.588.352,00
2.10.2.10.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00
2.10.2.10.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	40.183.852,00	40.183.852,00
2.10.2.10.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6.400.000,00	5.799.500,00
2.10.2.10.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	4.240.000,00	4.120.000,00
2.10.2.10.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.600.000,00	1.475.000,00
2.10.2.10.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	250.000,00	250.000,00
2.10.2.10.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	480.000,00	480.000,00
2.10.2.10.01.15.01.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	11.936.680.000,00	11.693.037.867,00
2.10.2.10.01.15.02.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK	75.771.400,00	72.634.772,00
2.10.2.10.01.15.03.	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi	1.677.929.000,00	1.557.514.400,00
2.10.2.10.01.15.04.	Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi	13.944.800,00	10.904.000,00
2.10.2.10.01.16.01.	Penyelenggaraan Kehumasan	234.195.000,00	223.730.003,00
2.10.2.10.01.16.02.	Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi	504.555.000,00	499.185.000,00
2.10.2.10.01.16.03.	Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi	198.862.548,00	193.343.910,00
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.219.145.000,00	1.160.781.619,00
2.11.2.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.219.145.000,00	1.160.781.619,00
2.11.2.11.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	266.036.000,00	230.767.321,00
2.11.2.11.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	28.270.000,00	24.397.500,00
2.11.2.11.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	69.450.000,00	69.450.000,00
2.11.2.11.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	42.337.000,00	35.307.098,00
2.11.2.11.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.815.000,00	1.815.000,00
2.11.2.11.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	35.077.000,00	31.547.800,00
2.11.2.11.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	47.300.000,00	47.264.100,00
2.11.2.11.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	630.000,00	622.800,00
2.11.2.11.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	500.000,00	499.900,00
2.11.2.11.01.15.01.	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	278.485.000,00	274.245.000,00
2.11.2.11.01.15.02.	Pembinaan Usaha Koperasi	117.265.000,00	116.322.500,00
2.11.2.11.01.16.01.	Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM	302.445.000,00	299.247.600,00
2.11.2.11.01.16.02.	Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM	29.535.000,00	29.295.000,00
2.12.	PENANAMAN MODAL	1.559.731.150,00	1.450.980.420,00
2.12.2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	1.559.731.150,00	1.450.980.420,00
2.12.2.12.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	724.577.000,00	637.374.678,00
2.12.2.12.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	128.105.000,00	118.032.300,00
2.12.2.12.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	206.000.000,00	204.341.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.12.2.12.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	70.700.000,00	70.686.592,00
2.12.2.12.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.125.000,00	1.125.000,00
2.12.2.12.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	8.460.000,00	8.419.500,00
2.12.2.12.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	46.125.000,00	44.224.500,00
2.12.2.12.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2.150.000,00	2.097.500,00
2.12.2.12.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	11.410.000,00	11.410.000,00
2.12.2.12.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.450.000,00	1.450.000,00
2.12.2.12.01.15.01.	Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan	182.898.000,00	179.427.700,00
2.12.2.12.01.15.02.	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	120.866.150,00	116.716.150,00
2.12.2.12.01.16.01.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	12.170.000,00	12.170.000,00
2.12.2.12.01.16.02.	Pengembangan Penanaman Modal	4.885.000,00	4.885.000,00
2.12.2.12.01.17.01.	Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perijinan	5.660.000,00	5.660.000,00
2.12.2.12.01.17.02.	Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan dan Penanaman Modal	33.150.000,00	32.960.000,00
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.353.201.860,00	1.236.418.890,00
2.13.1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.353.201.860,00	1.236.418.890,00
2.13.1.01.01.15.01.	Pembinaan Generasi Muda	280.653.000,00	250.541.130,00
2.13.1.01.01.15.02.	Pembinaan Paskibraka	346.810.000,00	345.326.900,00
2.13.1.01.01.16.01.	Pembinaan, Pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga	455.688.860,00	373.870.860,00
2.13.1.01.01.16.02.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga	270.050.000,00	266.680.000,00
2.14.	STATISTIK	7.810.000,00	6.400.000,00
2.14.2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.810.000,00	6.400.000,00
2.14.2.10.01.15.01.	Pengelolaan Data dan Statistik Daerah	7.810.000,00	6.400.000,00
2.15.	PERSANDIAN	100.947.825,00	96.073.825,00
2.15.2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.947.825,00	96.073.825,00
2.15.2.10.01.15.01.	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	100.947.825,00	96.073.825,00
2.16.	KEBUDAYAAN	81.736.965.750,00	80.437.437.957,00
2.16.2.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN / KUNDHA KABUDAYAN	81.736.965.750,00	80.437.437.957,00
2.16.2.16.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	173.955.000,00	162.943.207,00
2.16.2.16.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	140.743.500,00	53.195.300,00
2.16.2.16.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	59.000.000,00	54.465.000,00
2.16.2.16.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00
2.16.2.16.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	45.410.000,00	44.707.250,00
2.16.2.16.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	36.685.750,00	35.828.250,00
2.16.2.16.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.320.000,00
2.16.2.16.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.000.000,00	1.725.000,00
2.16.2.16.01.15.03.	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.576.500.000,00	1.420.713.000,00
2.16.2.16.01.15.04.	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	268.000.000,00	240.283.000,00
2.16.2.16.01.15.05.	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Kebudayaan	23.300.000,00	21.771.300,00
2.16.2.16.01.15.06.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	63.700.000,00	52.850.000,00
2.16.2.16.01.15.07.	Gelar Budaya Jogja	1.371.233.000,00	1.341.803.000,00
2.16.2.16.01.15.08.	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	590.520.000,00	573.723.000,00
2.16.2.16.01.15.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten	70.470.733.000,00	70.258.031.050,00
2.16.2.16.01.16.03.	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	517.425.000,00	493.369.000,00
2.16.2.16.01.16.04.	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	385.965.000,00	333.919.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.16.2.16.01.17.04.	Pengembangan dan Pengelolaan Permuseuman	132.568.000,00	100.478.000,00
2.16.2.16.01.17.05.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.000.000.000,00	1.831.176.000,00
2.16.2.16.01.17.06.	Penghargaan Seniman dan Budayawan	330.000.000,00	324.415.000,00
2.16.2.16.01.17.07.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	211.227.500,00	180.727.000,00
2.16.2.16.01.17.08.	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	2.980.000.000,00	2.744.080.600,00
2.16.2.16.01.17.09.	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	352.000.000,00	162.415.000,00
2.17.	PERPUSTAKAAN	1.237.240.476,00	1.170.265.827,00
2.17.2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.237.240.476,00	1.170.265.827,00
2.17.2.17.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	376.690.100,00	333.634.303,00
2.17.2.17.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	26.724.475,00	18.981.543,00
2.17.2.17.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	155.050.000,00	148.831.000,00
2.17.2.17.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	127.992.500,00	127.440.080,00
2.17.2.17.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	749.900,00	749.900,00
2.17.2.17.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	6.723.601,00	6.723.601,00
2.17.2.17.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	33.800.000,00	33.375.000,00
2.17.2.17.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	33.469.800,00	33.189.800,00
2.17.2.17.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.670.000,00	1.670.000,00
2.17.2.17.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.300.000,00	1.150.000,00
2.17.2.17.01.15.01.	Pembinaan dan pengembangan minat dan budaya baca	80.812.100,00	78.812.000,00
2.17.2.17.01.15.02.	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	282.200.000,00	279.275.600,00
2.17.2.17.01.15.03.	Pengelolaan informasi dan layanan perpustakaan	109.058.000,00	106.433.000,00
2.18.	KEARSIPAN	204.610.400,00	189.745.400,00
2.18.2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	204.610.400,00	189.745.400,00
2.18.2.17.01.15.01.	Pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis	76.545.400,00	73.165.400,00
2.18.2.17.01.15.02.	Pembinaan dan pengelolaan arsip statis	64.330.000,00	58.295.000,00
2.18.2.17.01.15.03.	Pengelolaan informasi dan layanan kearsipan	63.735.000,00	58.285.000,00
3.	URUSAN PILIHAN	21.513.917.061,00	20.295.924.462,93
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.889.936.122,00	2.676.957.103,00
3.01.3.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.889.936.122,00	2.676.957.103,00
3.01.3.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	640.243.645,00	608.665.172,00
3.01.3.01.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	71.246.555,00	62.217.005,00
3.01.3.01.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	163.588.400,00	163.485.497,00
3.01.3.01.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	4.490.000,00	4.470.000,00
3.01.3.01.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	5.217.500,00	5.200.000,00
3.01.3.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	11.510.000,00	11.495.000,00
3.01.3.01.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	14.343.000,00	14.265.000,00
3.01.3.01.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	12.650.000,00	12.633.000,00
3.01.3.01.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	13.030.000,00	13.015.000,00
3.01.3.01.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.750.000,00	3.674.000,00
3.01.3.01.01.15.01.	Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	1.188.489.842,00	1.052.221.500,00
3.01.3.01.01.15.02.	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	274.317.500,00	268.832.500,00
3.01.3.01.01.15.03.	Pembinaan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	55.675.000,00	55.625.000,00
3.01.3.01.01.16.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	1.150.000,00	1.150.000,00
3.01.3.01.01.16.02.	Pencegahan dan pengendalian penyakit ikan	26.050.000,00	26.050.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.01.3.01.01.16.03.	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	232.379.680,00	205.491.680,00
3.01.3.01.01.16.04.	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Budidaya Ikan	49.965.000,00	49.961.750,00
3.01.3.01.01.17.01.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Perikanan	5.190.000,00	4.690.000,00
3.01.3.01.01.17.02.	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	49.560.000,00	47.184.999,00
3.01.3.01.01.17.03.	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	67.090.000,00	66.630.000,00
3.02.	PARIWISATA	5.461.393.750,00	5.131.213.377,88
3.02.3.02.01.	DINAS PARIWISATA	5.461.393.750,00	5.131.213.377,88
3.02.3.02.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	461.960.950,00	418.086.026,00
3.02.3.02.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	123.710.000,00	66.184.395,00
3.02.3.02.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	145.394.000,00	144.528.086,00
3.02.3.02.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	850.000,00	850.000,00
3.02.3.02.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	71.135.000,00	69.598.000,00
3.02.3.02.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	28.740.000,00	28.328.500,00
3.02.3.02.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	5.651.000,00	5.651.000,00
3.02.3.02.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	2.745.000,00	2.745.000,00
3.02.3.02.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	780.000,00	776.000,00
3.02.3.02.01.15.01.	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata	308.360.000,00	304.180.000,00
3.02.3.02.01.15.02.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata	430.040.000,00	425.115.000,00
3.02.3.02.01.16.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	1.650.873.750,00	1.628.595.750,00
3.02.3.02.01.16.03.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Destinasi Pariwisata	1.792.189.050,00	1.601.630.620,88
3.02.3.02.01.17.01.	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	380.500.000,00	378.020.000,00
3.02.3.02.01.17.03.	Pengembangan Industri Pariwisata	58.465.000,00	56.925.000,00
3.03.	PERTANIAN	6.494.108.862,00	6.256.019.773,00
3.03.3.03.01.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6.494.108.862,00	6.256.019.773,00
3.03.3.03.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.348.674.500,00	1.301.791.098,00
3.03.3.03.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	110.040.000,00	75.818.927,00
3.03.3.03.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	177.600.000,00	177.242.000,00
3.03.3.03.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	12.465.000,00	12.465.000,00
3.03.3.03.01.03.04.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah	7.145.000,00	7.140.500,00
3.03.3.03.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	74.845.000,00	68.967.000,00
3.03.3.03.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	13.090.000,00	13.090.000,00
3.03.3.03.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	7.160.000,00	7.160.000,00
3.03.3.03.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00
3.03.3.03.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.800.000,00	3.795.000,00
3.03.3.03.01.15.01.	Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan	101.725.000,00	99.325.000,00
3.03.3.03.01.15.02.	Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan	16.880.000,00	16.250.000,00
3.03.3.03.01.15.03.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan	7.740.000,00	7.740.000,00
3.03.3.03.01.15.04.	Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana produksi pertanian	74.730.000,00	74.442.500,00
3.03.3.03.01.15.05.	Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian	140.570.000,00	140.570.000,00
3.03.3.03.01.15.07.	Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana dan sumber daya air	1.004.029.000,00	897.087.250,00
3.03.3.03.01.17.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	200.720.000,00	198.605.000,00
3.03.3.03.01.17.02.	Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian	141.120.000,00	140.524.000,00
3.03.3.03.01.17.03.	Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	505.378.627,00	503.480.625,00
3.03.3.03.01.21.01.	Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan	119.158.250,00	117.138.250,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.03.3.03.01.21.02.	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Lahan	659.417.260,00	659.417.250,00
3.03.3.03.01.21.03.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	2.125.000,00	2.125.000,00
3.03.3.03.01.21.05.	Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura	95.920.000,00	95.520.000,00
3.03.3.03.01.21.06.	Pengendalian Organisme Pengganggu Hortikultura	2.240.000,00	2.240.000,00
3.03.3.03.01.22.02.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	48.054.375,00	47.618.475,00
3.03.3.03.01.22.03.	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.036.183.150,00	1.015.734.010,00
3.03.3.03.01.22.04.	Pembinaan Budidaya Ternak	172.885.000,00	162.149.000,00
3.03.3.03.01.22.05.	Pembinaan Perbibitan ternak	25.660.000,00	25.530.000,00
3.03.3.03.01.22.06.	Pelayanan Puskesmas	208.331.000,00	207.376.188,00
3.03.3.03.01.22.07.	Pengembangan Teknologi Peternakan	26.985.000,00	26.965.000,00
3.03.3.03.01.22.08.	Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana peternakan	60.387.700,00	60.247.700,00
3.03.3.03.01.25.01.	Pembinaan Mutu Hasil Pertanian	18.040.000,00	18.040.000,00
3.03.3.03.01.25.02.	Pengolahan Hasil Pertanian	55.890.000,00	55.310.000,00
3.03.3.03.01.25.03.	Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	12.120.000,00	12.115.000,00
3.06.	PERDAGANGAN	6.253.397.127,00	5.819.316.509,05
3.06.3.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.253.397.127,00	5.819.316.509,05
3.06.3.06.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	767.066.500,00	656.069.021,00
3.06.3.06.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	18.145.200,00	18.137.200,00
3.06.3.06.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	141.000.000,00	134.414.531,00
3.06.3.06.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.890.000,00	1.890.000,00
3.06.3.06.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	28.105.000,00	27.765.000,00
3.06.3.06.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	55.567.000,00	54.887.000,00
3.06.3.06.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.020.000,00	1.020.000,00
3.06.3.06.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	580.000,00	580.000,00
3.06.3.06.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	625.000,00	619.000,00
3.06.3.06.01.15.01.	Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar, Kaki Lima dan Asongan	261.530.000,00	250.880.000,00
3.06.3.06.01.15.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	2.328.784.700,00	2.296.262.516,05
3.06.3.06.01.15.04.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Pasar	2.394.392.727,00	2.133.365.464,00
3.06.3.06.01.16.01.	Pengembangan Pasar dan Promosi Produk Daerah	39.270.000,00	38.850.000,00
3.06.3.06.01.16.03.	Pembinaan dan Pengawasan Legalitas Usaha	32.872.500,00	32.652.500,00
3.06.3.06.01.16.04.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	47.877.500,00	47.207.500,00
3.06.3.06.01.16.05.	Pengawasan Peredaran Barang /Jasa dan Cukai Rokok	5.140.000,00	5.140.000,00
3.06.3.06.01.16.06.	Penyelenggaraan Kemetorologian Daerah	129.531.000,00	119.576.777,00
3.07.	PERINDUSTRIAN	228.593.000,00	226.089.500,00
3.07.3.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	228.593.000,00	226.089.500,00
3.07.3.06.01.15.01.	Pembinaan dan Pendampingan Industri Makanan Minuman dan Kimia	118.307.500,00	117.064.000,00
3.07.3.06.01.15.02.	Pembinaan dan Pendampingan Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka	48.685.000,00	48.045.000,00
3.07.3.06.01.15.03.	Pembinaan dan Pendampingan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	61.600.500,00	60.980.500,00
3.08.	TRANSMIGRASI	186.488.200,00	186.328.200,00
3.08.2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	186.488.200,00	186.328.200,00
3.08.2.01.01.15.01.	Penyiapan dan Pengerahan Calon Transmigran	5.000.000,00	5.000.000,00
3.08.2.01.01.15.02.	Penguatan Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi	181.488.200,00	181.328.200,00
4.	PENUNJANG URUSAN	67.451.227.370,00	57.927.869.039,79
4.01.	INSPEKTORAT	3.555.104.220,00	3.170.387.515,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.01.4.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	3.555.104.220,00	3.170.387.515,00
4.01.4.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	428.969.220,00	380.685.029,00
4.01.4.01.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	41.940.000,00	21.075.000,00
4.01.4.01.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	201.200.000,00	158.562.486,00
4.01.4.01.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	105.135.000,00	22.730.000,00
4.01.4.01.01.03.04.	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah	2.490.000,00	2.490.000,00
4.01.4.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.4.01.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00
4.01.4.01.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00
4.01.4.01.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8.000.000,00	8.000.000,00
4.01.4.01.01.15.01.	Review Kinerja Pemerintah Daerah	309.475.000,00	260.775.000,00
4.01.4.01.01.15.02.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala	163.440.000,00	143.980.000,00
4.01.4.01.01.15.03.	Reviu Laporan Keuangan Daerah	27.875.000,00	27.875.000,00
4.01.4.01.01.15.04.	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.271.360.000,00	1.206.145.000,00
4.01.4.01.01.15.05.	Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah	11.895.000,00	11.895.000,00
4.01.4.01.01.15.06.	Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal	6.025.000,00	5.875.000,00
4.01.4.01.01.15.07.	Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah	74.600.000,00	74.600.000,00
4.01.4.01.01.15.08.	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	490.500.000,00	472.450.000,00
4.01.4.01.01.15.09.	Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah	8.050.000,00	8.050.000,00
4.01.4.01.01.15.10.	Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	386.150.000,00	347.200.000,00
4.02.	PERENCANAAN	1.504.900.200,00	1.443.142.316,00
4.02.4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.504.900.200,00	1.443.142.316,00
4.02.4.02.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	310.155.000,00	280.931.872,00
4.02.4.02.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	34.575.000,00	26.875.600,00
4.02.4.02.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	154.300.000,00	145.202.894,00
4.02.4.02.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.985.000,00
4.02.4.02.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	28.290.000,00	27.880.000,00
4.02.4.02.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	31.195.000,00	29.155.000,00
4.02.4.02.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.000.000,00	999.000,00
4.02.4.02.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00
4.02.4.02.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.200.000,00	2.200.000,00
4.02.4.02.01.15.01.	Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum	71.644.800,00	69.962.050,00
4.02.4.02.01.15.02.	Perencanaan Pembangunan perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.600.000,00	8.575.000,00
4.02.4.02.01.15.03.	Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan	37.060.000,00	36.620.000,00
4.02.4.02.01.16.01.	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	36.135.000,00	35.522.500,00
4.02.4.02.01.16.02.	Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	14.405.000,00	14.112.500,00
4.02.4.02.01.16.03.	Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan	46.545.000,00	45.144.000,00
4.02.4.02.01.17.01.	Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan	11.900.000,00	11.742.100,00
4.02.4.02.01.17.02.	Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, dan Koperasi	11.385.000,00	11.082.500,00
4.02.4.02.01.17.03.	Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman Modal	32.570.000,00	32.037.300,00
4.02.4.02.01.18.01.	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	391.813.950,00	389.513.150,00
4.02.4.02.01.18.02.	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	101.995.000,00	101.302.500,00
4.02.4.02.01.18.03.	Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan	17.311.450,00	16.763.950,00
4.02.4.02.01.18.04.	Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah	40.770.000,00	38.132.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.02.4.02.01.18.05.	Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah	15.965.000,00	15.800.000,00
4.02.4.02.01.19.01.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	64.495.000,00	63.508.400,00
4.02.4.02.01.19.02.	Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah	35.890.000,00	35.395.000,00
4.03.	KEUANGAN	12.054.467.700,00	11.553.919.106,26
4.03.4.03.01.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.054.467.700,00	11.553.919.106,26
4.03.4.03.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	679.385.000,00	593.637.709,00
4.03.4.03.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	130.795.000,00	67.827.535,00
4.03.4.03.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	636.320.000,00	624.466.525,49
4.03.4.03.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.970.000,00
4.03.4.03.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	2.000.000,00	0,00
4.03.4.03.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	115.277.000,00	109.615.500,00
4.03.4.03.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	45.495.000,00	43.200.000,00
4.03.4.03.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00
4.03.4.03.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	26.090.000,00	25.785.000,00
4.03.4.03.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	7.650.000,00	7.650.000,00
4.03.4.03.01.15.01.	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	347.290.000,00	320.554.250,00
4.03.4.03.01.15.02.	Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban Belanja	212.685.000,00	192.965.000,00
4.03.4.03.01.15.03.	Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten	57.075.000,00	56.333.100,00
4.03.4.03.01.15.04.	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah dan Sistem Prosedur Akuntansi	11.800.000,00	11.788.450,00
4.03.4.03.01.15.05.	Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban Pendapatan	18.468.200,00	15.543.200,00
4.03.4.03.01.15.06.	Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban Aset dan Selain Kas	9.280.000,00	9.250.000,00
4.03.4.03.01.16.01.	Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Juknis Pelaksanaan APBD	784.575.000,00	728.226.344,00
4.03.4.03.01.16.02.	Penyusunan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	380.425.000,00	361.205.000,00
4.03.4.03.01.16.03.	Pengendalian dan Pengelolaan APBD	16.375.000,00	13.154.000,00
4.03.4.03.01.16.04.	Penelitian dan Pengesahan DPA-PD dan DPPA-PD	226.150.000,00	208.902.200,00
4.03.4.03.01.16.06.	Penyusunan Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	29.710.000,00	24.895.000,00
4.03.4.03.01.17.01.	Penyediaan dan Pelaporan Sarana Pemungutan Pendapatan Daerah	42.800.000,00	42.545.000,00
4.03.4.03.01.17.02.	Pengelolaan dan Manajemen Kas Daerah	29.360.000,00	29.360.000,00
4.03.4.03.01.17.04.	Penyusunan Anggaran Kas, Penerbitan SPD dan SP2D Non Gaji	65.935.000,00	65.384.794,00
4.03.4.03.01.17.05.	Pengelolaan Gaji PNS	63.215.000,00	62.840.000,00
4.03.4.03.01.18.01.	Perencanaan dan Pengadaan Barang Daerah	4.016.039.000,00	4.008.549.100,00
4.03.4.03.01.18.02.	Penyusunan Standar Satuan Harga dan Sarana Prasarana	134.985.000,00	131.936.800,00
4.03.4.03.01.18.03.	Penghapusan, Penjualan dan Pengamanan Barang Aset Daerah	470.945.000,00	414.291.418,77
4.03.4.03.01.18.04.	Penyelenggaraan Penuntutan Ganti Kerugian Aset Daerah	5.900.000,00	5.550.000,00
4.03.4.03.01.18.05.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	306.815.000,00	293.680.000,00
4.03.4.03.01.18.06.	Inventarisasi dan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	148.505.000,00	146.957.000,00
4.03.4.03.01.19.01.	Pelayanan Pajak Daerah	93.652.000,00	75.748.500,00
4.03.4.03.01.19.02.	Pemungutan, Penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah	2.272.380.500,00	2.237.702.070,00
4.03.4.03.01.19.04.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	86.625.000,00	81.900.000,00
4.03.4.03.01.20.02.	Penyusunan Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah	74.265.000,00	71.112.900,00
4.03.4.03.01.20.03.	Penyusunan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah	132.336.000,00	113.913.500,00
4.03.4.03.01.20.04.	Pelayanan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	366.165.000,00	349.779.210,00
4.04.	KEPEGAWAIAN	2.129.478.300,00	1.992.499.548,00
4.04.4.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	2.129.478.300,00	1.992.499.548,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.04.4.04.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	364.264.400,00	330.163.680,00
4.04.4.04.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	37.762.400,00	36.842.470,00
4.04.4.04.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	63.200.000,00	59.666.663,00
4.04.4.04.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000,00	699.500,00
4.04.4.04.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	9.100.000,00	9.002.900,00
4.04.4.04.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	9.300.000,00	9.299.400,00
4.04.4.04.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.450.000,00	3.449.950,00
4.04.4.04.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	700.000,00	700.000,00
4.04.4.04.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	850.000,00	840.000,00
4.04.4.04.01.15.01.	Pembinaan disiplin Pegawai, pelaporan, dan Pemenuhan Identitas Pegawai	15.587.500,00	15.293.750,00
4.04.4.04.01.15.02.	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Penghargaan Pegawai	19.799.500,00	19.683.500,00
4.04.4.04.01.15.03.	Pembinaan Fasilitas Penilaian Prestasi Kerja PNS	12.640.000,00	12.364.000,00
4.04.4.04.01.16.01.	Pengembangan Kompetensi Pegawai	856.420.400,00	842.118.400,00
4.04.4.04.01.16.02.	Pengadaan Pegawai	379.284.000,00	319.381.100,00
4.04.4.04.01.16.03.	Pengelolaan data ASN	5.135.900,00	4.930.500,00
4.04.4.04.01.16.04.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	188.474.000,00	188.159.000,00
4.04.4.04.01.17.01.	Pengangkatan dan Penempatan jabatan administrasi	36.785.000,00	23.725.035,00
4.04.4.04.01.17.02.	Seleksi terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Pratama	49.060.000,00	47.460.000,00
4.04.4.04.01.17.03.	Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS	19.261.200,00	17.368.700,00
4.04.4.04.01.17.04.	Mutasi dan kenaikan pangkat dan Jabatan PNS	57.704.000,00	51.351.000,00
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	249.390.000,00	246.740.000,00
4.06.4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	249.390.000,00	246.740.000,00
4.06.4.02.01.15.01.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	157.180.000,00	156.705.000,00
4.06.4.02.01.15.02.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	92.210.000,00	90.035.000,00
4.07.	BENCANA	47.957.886.950,00	39.521.180.554,53
4.07.4.07.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	47.957.886.950,00	39.521.180.554,53
4.07.4.07.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	268.233.000,00	224.852.085,00
4.07.4.07.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	52.395.750,00	35.801.409,00
4.07.4.07.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	139.499.300,00	128.872.052,00
4.07.4.07.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	675.000,00	675.000,00
4.07.4.07.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	5.150.000,00	5.150.000,00
4.07.4.07.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	14.380.000,00	13.512.700,00
4.07.4.07.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	6.050.000,00	5.929.250,00
4.07.4.07.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.160.000,00	300.000,00
4.07.4.07.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	700.000,00	700.000,00
4.07.4.07.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.460.000,00	600.000,00
4.07.4.07.01.06.02.	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2.000.000,00	1.180.000,00
4.07.4.07.01.15.01.	Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	193.955.000,00	189.145.000,00
4.07.4.07.01.15.02.	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	507.920.000,00	418.099.500,00
4.07.4.07.01.15.03.	Penanganan Darurat Bencana Kekeringan	743.620.000,00	394.195.000,00
4.07.4.07.01.15.04.	Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana	45.538.988.900,00	37.621.478.558,53
4.07.4.07.01.16.01.	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	480.700.000,00	480.690.000,00
5.	PENDUKUNG	31.594.627.626,00	24.993.287.897,64
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH	9.367.026.726,00	8.244.033.286,64



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.01.5.01.02.	SEKRETARIAT DAERAH	9.367.026.726,00	8.244.033.286,64
5.01.5.01.02.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	1.593.340.000,00	1.215.662.762,00
5.01.5.01.02.01.03.	Penyelenggaraan Kesekretariatan Sekretariat Daerah	84.095.000,00	84.002.000,00
5.01.5.01.02.01.04.	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.430.739.000,00	2.159.747.079,00
5.01.5.01.02.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	809.697.500,00	682.977.262,64
5.01.5.01.02.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus	111.192.500,00	111.192.500,00
5.01.5.01.02.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	29.500.000,00	29.482.600,00
5.01.5.01.02.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	22.545.000,00	22.545.000,00
5.01.5.01.02.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	82.660.000,00	82.068.600,00
5.01.5.01.02.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	51.232.200,00	51.232.200,00
5.01.5.01.02.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.985.000,00
5.01.5.01.02.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.330.000,00
5.01.5.01.02.05.04.	Perumusan Kebijakan Umum Strategis Daerah	248.005.000,00	244.007.845,00
5.01.5.01.02.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6.050.000,00	5.956.000,00
5.01.5.01.02.15.01.	Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	256.443.150,00	241.317.300,00
5.01.5.01.02.15.02.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	272.049.725,00	264.727.600,00
5.01.5.01.02.16.01.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	57.394.400,00	54.966.900,00
5.01.5.01.02.16.02.	Perumusan Kebijakan dan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	11.267.800,00	10.080.300,00
5.01.5.01.02.16.10.	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul	106.541.000,00	102.293.000,00
5.01.5.01.02.17.01.	Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah	16.591.455,00	16.484.657,00
5.01.5.01.02.17.02.	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	14.520.300,00	14.520.300,00
5.01.5.01.02.17.03.	Perumusan kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan	7.371.000,00	7.362.250,00
5.01.5.01.02.17.10.	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Gunungkidul	159.474.000,00	146.534.421,00
5.01.5.01.02.17.11.	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan	658.265.000,00	555.390.500,00
5.01.5.01.02.17.12.	Pengawasan Rancangan Produk Hukum Dan Produk Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Kesetimewaan	215.575.400,00	190.958.600,00
5.01.5.01.02.17.13.	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli Gunungkidul	73.335.500,00	69.881.000,00
5.01.5.01.02.18.01.	Perumusan kebijakan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90.458.800,00	87.184.627,00
5.01.5.01.02.18.02.	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	21.065.000,00	18.091.250,00
5.01.5.01.02.19.01.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	60.315.000,00	58.419.940,00
5.01.5.01.02.19.02.	Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	58.341.000,00	57.868.400,00
5.01.5.01.02.19.03.	Konsultasi dan Bantuan Hukum	111.959.250,00	81.538.600,00
5.01.5.01.02.20.01.	Audiensi dan Penerimaan Tamu Daerah	99.320.000,00	96.494.250,00
5.01.5.01.02.20.02.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	297.435.000,00	188.939.700,00
5.01.5.01.02.20.03.	Pendampingan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	59.014.000,00	55.843.892,00
5.01.5.01.02.21.01.	Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan kerjasama Wajib	45.915.000,00	45.590.000,00
5.01.5.01.02.21.02.	Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Kerjasama Sukarela	17.046.350,00	16.934.950,00
5.01.5.01.02.22.01.	Perumusan Kebijakan dan Penanganan Permasalahan Perbatasan	250.685.000,00	247.716.000,00
5.01.5.01.02.22.02.	Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Toponimi dan Pemetaan Wilayah	9.025.000,00	8.970.000,00
5.01.5.01.02.23.01.	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	36.980.000,00	36.531.800,00
5.01.5.01.02.23.03.	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	71.029.200,00	70.508.200,00
5.01.5.01.02.23.04.	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	24.713.500,00	24.546.455,00
5.01.5.01.02.23.05.	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	51.538.800,00	51.498.800,00
5.01.5.01.02.23.06.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12.880.000,00	12.870.000,00
5.01.5.01.02.24.01.	Perumusan Kebijakan di Bidang Industri dan Jasa serta Pengendalian Inflasi Daerah	42.385.000,00	42.382.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.01.5.01.02.24.02.	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pengelolaan BUMD dan BUKP	143.234.200,00	143.199.200,00
5.01.5.01.02.24.03.	Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam	14.036.846,00	14.001.846,00
5.01.5.01.02.24.04.	Perumusan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Kelautan	11.694.500,00	11.634.500,00
5.01.5.01.02.24.05.	Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	82.917.900,00	82.472.900,00
5.01.5.01.02.25.01.	Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	198.158.050,00	197.357.800,00
5.01.5.01.02.25.02.	Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Agama dan Kebudayaan	134.048.500,00	129.881.000,00
5.01.5.01.02.25.03.	Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98.545.900,00	93.851.000,00
5.02.	SEKRETARIAT DPRD	22.227.600.900,00	16.749.254.611,00
5.02.5.02.02.	SEKRETARIAT DPRD	22.227.600.900,00	16.749.254.611,00
5.02.5.02.02.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.319.960.400,00	1.215.052.137,00
5.02.5.02.02.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	596.705.000,00	551.244.826,00
5.02.5.02.02.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	60.000.000,00	58.895.000,00
5.02.5.02.02.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	404.225.000,00	376.021.411,00
5.02.5.02.02.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus	272.880.000,00	270.524.400,00
5.02.5.02.02.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.822.500,00	1.750.000,00
5.02.5.02.02.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	73.912.000,00	69.429.300,00
5.02.5.02.02.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	27.325.000,00	25.920.200,00
5.02.5.02.02.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	8.325.000,00	6.279.000,00
5.02.5.02.02.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5.485.500,00	5.396.000,00
5.02.5.02.02.15.01.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.329.435.500,00	2.422.306.807,00
5.02.5.02.02.15.02.	Rapat-Rapat Paripurna	41.000.000,00	7.500.000,00
5.02.5.02.02.15.03.	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	368.695.000,00	243.283.864,00
5.02.5.02.02.15.04.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	275.400.000,00	190.781.500,00
5.02.5.02.02.15.05.	Reses Penjaringan Aspirasi Masyarakat	2.296.620.000,00	2.173.177.250,00
5.02.5.02.02.15.06.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	13.010.440.000,00	9.007.082.316,00
5.02.5.02.02.15.08.	Penyusunan Risalah Rapat-Rapat DPRD	135.370.000,00	124.610.600,00
6.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.876.306.900,00	1.566.498.449,00
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.876.306.900,00	1.566.498.449,00
6.01.6.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.876.306.900,00	1.566.498.449,00
6.01.6.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	162.163.500,00	141.334.689,00
6.01.6.01.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	52.680.000,00	18.829.900,00
6.01.6.01.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	32.500.000,00	32.480.130,00
6.01.6.01.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	325.000,00	325.000,00
6.01.6.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	15.310.000,00	15.310.000,00
6.01.6.01.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	50.190.000,00	49.709.000,00
6.01.6.01.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.375.000,00	1.350.000,00
6.01.6.01.01.15.01.	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	1.125.635.000,00	913.194.800,00
6.01.6.01.01.15.02.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	15.820.000,00	15.374.000,00
6.01.6.01.01.15.03.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	29.320.000,00	29.095.000,00
6.01.6.01.01.15.04.	Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala	18.450.000,00	18.450.000,00
6.01.6.01.01.16.01.	Pembinaan Politik Masyarakat	331.898.400,00	290.775.930,00
6.01.6.01.01.16.02.	Penguatan Kapasitas Organisasi Politik	1.835.000,00	1.815.000,00
6.01.6.01.01.16.03.	Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	38.805.000,00	38.455.000,00
7.	KEWILAYAHAN	7.489.744.093,00	7.337.721.402,20



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.	KECAMATAN / KAPANEWON	7.489.744.093,00	7.337.721.402,20
7.01.7.01.01.	KECAMATAN / KAPANEWON WONOSARI	360.681.000,00	335.977.183,00
7.01.7.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	162.712.000,00	154.668.683,00
7.01.7.01.01.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	4.165.000,00	4.165.000,00
7.01.7.01.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.7.01.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	44.950.000,00	44.539.500,00
7.01.7.01.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.025.000,00	2.025.000,00
7.01.7.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00
7.01.7.01.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	15.250.000,00	15.250.000,00
7.01.7.01.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.450.000,00	1.450.000,00
7.01.7.01.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	767.000,00	767.000,00
7.01.7.01.01.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.975.000,00	6.975.000,00
7.01.7.01.01.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	3.317.000,00	3.317.000,00
7.01.7.01.01.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	285.000,00	285.000,00
7.01.7.01.01.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	11.125.000,00	9.925.000,00
7.01.7.01.01.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	61.650.000,00	46.600.000,00
7.01.7.01.01.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.840.000,00	21.840.000,00
7.01.7.01.01.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	2.770.000,00	2.770.000,00
7.01.7.01.02.	KECAMATAN / KAPANEWON PALIYAN	320.955.500,00	319.840.305,00
7.01.7.01.02.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	93.180.000,00	92.905.305,00
7.01.7.01.02.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	4.875.000,00	4.875.000,00
7.01.7.01.02.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	17.500.000,00	17.500.000,00
7.01.7.01.02.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	54.600.000,00	54.600.000,00
7.01.7.01.02.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.958.000,00	1.958.000,00
7.01.7.01.02.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3.310.000,00	3.310.000,00
7.01.7.01.02.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	22.420.000,00	22.345.000,00
7.01.7.01.02.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.030.000,00	1.030.000,00
7.01.7.01.02.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	300.000,00	300.000,00
7.01.7.01.02.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7.290.000,00	7.290.000,00
7.01.7.01.02.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	59.210.000,00	58.447.000,00
7.01.7.01.02.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	1.957.500,00	1.955.000,00
7.01.7.01.02.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	9.585.000,00	9.585.000,00
7.01.7.01.02.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	8.950.000,00	8.950.000,00
7.01.7.01.02.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	27.440.000,00	27.440.000,00
7.01.7.01.02.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	2.800.000,00	2.800.000,00
7.01.7.01.02.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	4.550.000,00	4.550.000,00
7.01.7.01.03.	KECAMATAN / KAPANEWON PANGGANG	623.049.500,00	614.670.458,20
7.01.7.01.03.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	104.405.500,00	99.308.656,00
7.01.7.01.03.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	4.150.000,00	4.135.000,00
7.01.7.01.03.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.7.01.03.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	33.675.000,00	33.675.000,00
7.01.7.01.03.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00
7.01.7.01.03.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6.659.000,00	6.659.000,00
7.01.7.01.03.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	2.440.000,00	2.410.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.7.01.03.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	920.000,00	920.000,00
7.01.7.01.03.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	945.000,00	945.000,00
7.01.7.01.03.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	19.185.000,00	19.022.500,00
7.01.7.01.03.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	384.925.000,00	382.118.802,20
7.01.7.01.03.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	4.005.000,00	4.005.000,00
7.01.7.01.03.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	5.605.000,00	5.466.500,00
7.01.7.01.03.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	9.830.000,00	9.830.000,00
7.01.7.01.03.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.110.000,00	10.110.000,00
7.01.7.01.03.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	1.195.000,00	1.195.000,00
7.01.7.01.03.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	20.500.000,00	20.370.000,00
7.01.7.01.04.	KECAMATAN / KAPANEWON TEPUS	383.823.300,00	378.669.679,00
7.01.7.01.04.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	94.010.000,00	89.911.379,00
7.01.7.01.04.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	5.820.000,00	5.740.000,00
7.01.7.01.04.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	8.000.000,00	8.000.000,00
7.01.7.01.04.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	31.677.500,00	31.677.500,00
7.01.7.01.04.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	9.393.000,00	9.393.000,00
7.01.7.01.04.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	25.875.800,00	25.595.800,00
7.01.7.01.04.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.620.000,00	2.620.000,00
7.01.7.01.04.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	28.860.000,00	28.520.000,00
7.01.7.01.04.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	117.110.000,00	117.010.000,00
7.01.7.01.04.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	2.915.000,00	2.915.000,00
7.01.7.01.04.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	5.727.000,00	5.727.000,00
7.01.7.01.04.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	18.275.000,00	18.170.000,00
7.01.7.01.04.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	26.797.000,00	26.797.000,00
7.01.7.01.04.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.7.01.04.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	5.543.000,00	5.393.000,00
7.01.7.01.05.	KECAMATAN / KAPANEWON RONGKOP	362.689.500,00	355.733.100,00
7.01.7.01.05.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	116.862.000,00	112.562.600,00
7.01.7.01.05.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	15.880.000,00	15.880.000,00
7.01.7.01.05.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	34.800.000,00	33.880.500,00
7.01.7.01.05.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.070.000,00	1.070.000,00
7.01.7.01.05.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	8.195.000,00	8.195.000,00
7.01.7.01.05.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	22.615.000,00	22.475.000,00
7.01.7.01.05.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.950.000,00	3.780.000,00
7.01.7.01.05.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.000.000,00	1.995.000,00
7.01.7.01.05.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8.900.000,00	8.900.000,00
7.01.7.01.05.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	79.745.000,00	78.322.500,00
7.01.7.01.05.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	3.510.000,00	3.510.000,00
7.01.7.01.05.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	7.530.000,00	7.530.000,00
7.01.7.01.05.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	33.550.000,00	33.550.000,00
7.01.7.01.05.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.125.000,00	18.125.000,00
7.01.7.01.05.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	5.957.500,00	5.957.500,00
7.01.7.01.06.	KECAMATAN / KAPANEWON SEMANU	335.112.200,00	326.574.628,00
7.01.7.01.06.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	132.068.000,00	123.785.928,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.7.01.06.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	10.395.000,00	10.395.000,00
7.01.7.01.06.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	35.700.000,00	35.700.000,00
7.01.7.01.06.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	32.600.000,00	32.600.000,00
7.01.7.01.06.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.240.000,00	2.240.000,00
7.01.7.01.06.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	18.890.000,00	18.890.000,00
7.01.7.01.06.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	33.768.300,00	33.512.800,00
7.01.7.01.06.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.333.000,00	3.333.000,00
7.01.7.01.06.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.230.000,00	1.230.000,00
7.01.7.01.06.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12.015.200,00	12.015.200,00
7.01.7.01.06.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	790.000,00	790.000,00
7.01.7.01.06.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	1.560.000,00	1.560.000,00
7.01.7.01.06.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	7.510.700,00	7.510.700,00
7.01.7.01.06.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	15.859.000,00	15.859.000,00
7.01.7.01.06.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.253.000,00	16.253.000,00
7.01.7.01.06.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	10.900.000,00	10.900.000,00
7.01.7.01.07.	KECAMATAN / KAPANEWON PONJONG	548.794.593,00	545.417.894,00
7.01.7.01.07.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	127.433.593,00	124.976.144,00
7.01.7.01.07.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	2.910.000,00	2.910.000,00
7.01.7.01.07.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	31.800.000,00	31.800.000,00
7.01.7.01.07.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.720.000,00	1.720.000,00
7.01.7.01.07.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	27.025.000,00	26.785.000,00
7.01.7.01.07.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	22.185.000,00	21.945.000,00
7.01.7.01.07.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	850.000,00	850.000,00
7.01.7.01.07.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.225.000,00	2.225.000,00
7.01.7.01.07.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26.418.900,00	26.418.900,00
7.01.7.01.07.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	207.675.000,00	207.235.750,00
7.01.7.01.07.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	1.380.000,00	1.380.000,00
7.01.7.01.07.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	3.830.000,00	3.830.000,00
7.01.7.01.07.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	52.813.000,00	52.813.000,00
7.01.7.01.07.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	26.171.100,00	26.171.100,00
7.01.7.01.07.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.7.01.07.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	11.358.000,00	11.358.000,00
7.01.7.01.08.	KECAMATAN / KAPANEWON KARANGMOJO	381.550.000,00	379.599.662,00
7.01.7.01.08.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	114.367.000,00	113.119.415,00
7.01.7.01.08.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	7.770.000,00	7.660.500,00
7.01.7.01.08.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	39.500.000,00	39.500.000,00
7.01.7.01.08.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	48.950.000,00	48.908.247,00
7.01.7.01.08.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00
7.01.7.01.08.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	25.965.000,00	25.740.000,00
7.01.7.01.08.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	11.070.000,00	11.070.000,00
7.01.7.01.08.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.910.000,00	1.910.000,00
7.01.7.01.08.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.564.000,00	1.564.000,00
7.01.7.01.08.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	19.626.000,00	19.557.000,00
7.01.7.01.08.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	32.600.000,00	32.342.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.7.01.08.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	695.000,00	695.000,00
7.01.7.01.08.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	15.363.000,00	15.363.000,00
7.01.7.01.08.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	27.775.000,00	27.775.000,00
7.01.7.01.08.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.810.000,00	16.810.000,00
7.01.7.01.08.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	15.335.000,00	15.335.000,00
7.01.7.01.09.	KECAMATAN / KAPANEWON PLAYEN	609.374.200,00	603.354.130,00
7.01.7.01.09.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	158.014.800,00	154.635.977,00
7.01.7.01.09.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	13.850.000,00	13.850.000,00
7.01.7.01.09.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	34.000.000,00	34.000.000,00
7.01.7.01.09.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	83.230.000,00	83.220.753,00
7.01.7.01.09.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	425.000,00	425.000,00
7.01.7.01.09.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	29.485.000,00	29.111.000,00
7.01.7.01.09.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	5.839.300,00	5.839.300,00
7.01.7.01.09.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.380.000,00	1.380.000,00
7.01.7.01.09.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.919.900,00	481.900,00
7.01.7.01.09.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18.319.900,00	18.319.900,00
7.01.7.01.09.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	201.140.000,00	200.320.000,00
7.01.7.01.09.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	4.350.000,00	4.350.000,00
7.01.7.01.09.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	16.575.400,00	16.575.400,00
7.01.7.01.09.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	11.450.000,00	11.450.000,00
7.01.7.01.09.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.104.900,00	22.104.900,00
7.01.7.01.09.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	3.620.000,00	3.620.000,00
7.01.7.01.09.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	3.670.000,00	3.670.000,00
7.01.7.01.10.	KECAMATAN / KAPANEWON NGLIPAR	326.927.800,00	315.951.330,00
7.01.7.01.10.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	109.984.000,00	109.409.280,00
7.01.7.01.10.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	8.125.000,00	8.125.000,00
7.01.7.01.10.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	40.646.000,00	40.646.000,00
7.01.7.01.10.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	44.012.500,00	44.012.500,00
7.01.7.01.10.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.686.200,00	1.685.000,00
7.01.7.01.10.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.799.800,00	10.794.800,00
7.01.7.01.10.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	8.343.000,00	8.342.500,00
7.01.7.01.10.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2.169.000,00	2.194.000,00
7.01.7.01.10.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.954.050,00	2.954.000,00
7.01.7.01.10.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	14.396.250,00	14.396.250,00
7.01.7.01.10.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	9.965.000,00	4.565.000,00
7.01.7.01.10.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	3.803.750,00	3.803.750,00
7.01.7.01.10.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	11.191.250,00	11.171.250,00
7.01.7.01.10.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	19.575.000,00	19.575.000,00
7.01.7.01.10.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.782.000,00	20.782.000,00
7.01.7.01.10.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	500.000,00	500.000,00
7.01.7.01.10.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	12.995.000,00	12.995.000,00
7.01.7.01.11.	KECAMATAN / KAPANEWON NGAWEN	626.422.000,00	623.036.055,00
7.01.7.01.11.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	91.474.000,00	91.095.947,00
7.01.7.01.11.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	9.080.000,00	9.080.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.7.01.11.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	72.250.000,00	71.900.808,00
7.01.7.01.11.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	52.550.000,00	52.550.000,00
7.01.7.01.11.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000,00	130.000,00
7.01.7.01.11.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19.413.000,00	19.407.800,00
7.01.7.01.11.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	30.975.000,00	30.695.000,00
7.01.7.01.11.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.384.000,00	3.384.000,00
7.01.7.01.11.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.760.000,00	2.760.000,00
7.01.7.01.11.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.140.000,00	49.860.000,00
7.01.7.01.11.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	206.975.000,00	205.161.500,00
7.01.7.01.11.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	7.240.000,00	7.240.000,00
7.01.7.01.11.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	11.410.000,00	11.410.000,00
7.01.7.01.11.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	14.335.000,00	14.335.000,00
7.01.7.01.11.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	46.865.000,00	46.585.000,00
7.01.7.01.11.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	7.441.000,00	7.441.000,00
7.01.7.01.12.	KECAMATAN / KAPANEWON SEMIN	393.113.500,00	387.230.702,00
7.01.7.01.12.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	127.541.000,00	123.598.702,00
7.01.7.01.12.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	7.450.000,00	7.328.000,00
7.01.7.01.12.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	41.050.000,00	40.474.000,00
7.01.7.01.12.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	30.700.000,00	30.575.000,00
7.01.7.01.12.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.680.000,00	1.680.000,00
7.01.7.01.12.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	480.000,00	480.000,00
7.01.7.01.12.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6.450.000,00	6.450.000,00
7.01.7.01.12.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	4.275.000,00	4.275.000,00
7.01.7.01.12.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	20.390.000,00	20.070.000,00
7.01.7.01.12.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.790.000,00	2.682.500,00
7.01.7.01.12.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16.690.000,00	16.577.500,00
7.01.7.01.12.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	12.786.000,00	12.593.500,00
7.01.7.01.12.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	3.490.000,00	3.490.000,00
7.01.7.01.12.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	17.019.500,00	17.019.500,00
7.01.7.01.12.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	47.525.000,00	47.525.000,00
7.01.7.01.12.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.805.000,00	20.805.000,00
7.01.7.01.12.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	5.350.000,00	5.350.000,00
7.01.7.01.12.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	26.642.000,00	26.257.000,00
7.01.7.01.13.	KECAMATAN / KAPANEWON PATUK	322.025.000,00	315.142.212,00
7.01.7.01.13.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	118.560.000,00	114.063.412,00
7.01.7.01.13.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	6.870.000,00	6.815.000,00
7.01.7.01.13.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	15.500.000,00	13.773.800,00
7.01.7.01.13.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	37.090.000,00	37.090.000,00
7.01.7.01.13.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	580.000,00	580.000,00
7.01.7.01.13.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00
7.01.7.01.13.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	3.020.000,00	3.020.000,00
7.01.7.01.13.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	180.000,00	180.000,00
7.01.7.01.13.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	990.000,00	990.000,00
7.01.7.01.13.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16.370.000,00	16.370.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.7.01.13.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	37.130.000,00	36.675.000,00
7.01.7.01.13.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	1.545.000,00	1.545.000,00
7.01.7.01.13.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	12.430.000,00	12.280.000,00
7.01.7.01.13.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	34.755.000,00	34.755.000,00
7.01.7.01.13.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.565.000,00	19.565.000,00
7.01.7.01.13.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.7.01.14.	KECAMATAN / KAPANEWON SAPTOSARI	305.244.000,00	293.122.250,00
7.01.7.01.14.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	108.675.000,00	102.817.750,00
7.01.7.01.14.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	7.030.000,00	7.030.000,00
7.01.7.01.14.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	60.000.000,00	59.495.500,00
7.01.7.01.14.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	37.735.000,00	37.735.000,00
7.01.7.01.14.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.545.000,00	1.545.000,00
7.01.7.01.14.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	15.595.000,00	15.595.000,00
7.01.7.01.14.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	11.375.000,00	11.375.000,00
7.01.7.01.14.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	4.635.000,00	4.635.000,00
7.01.7.01.14.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.470.000,00	1.470.000,00
7.01.7.01.14.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8.106.000,00	8.106.000,00
7.01.7.01.14.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	2.878.000,00	2.878.000,00
7.01.7.01.14.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	1.252.500,00	1.252.500,00
7.01.7.01.14.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	5.695.000,00	5.695.000,00
7.01.7.01.14.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	12.880.000,00	7.120.000,00
7.01.7.01.14.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.145.000,00	19.145.000,00
7.01.7.01.14.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	2.220.000,00	2.220.000,00
7.01.7.01.14.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	5.007.500,00	5.007.500,00
7.01.7.01.15.	KECAMATAN / KAPANEWON GEDANGSARI	449.875.800,00	448.935.300,00
7.01.7.01.15.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	107.521.300,00	107.083.300,00
7.01.7.01.15.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	9.460.000,00	9.314.000,00
7.01.7.01.15.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	50.250.000,00	50.250.000,00
7.01.7.01.15.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	43.927.500,00	43.927.500,00
7.01.7.01.15.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00
7.01.7.01.15.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5.736.000,00	5.716.000,00
7.01.7.01.15.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	4.527.000,00	4.460.500,00
7.01.7.01.15.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.266.900,00	1.266.900,00
7.01.7.01.15.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4.120.000,00	4.120.000,00
7.01.7.01.15.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	14.689.000,00	14.689.000,00
7.01.7.01.15.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	125.426.000,00	125.361.000,00
7.01.7.01.15.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	4.322.100,00	4.322.100,00
7.01.7.01.15.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	6.440.000,00	6.440.000,00
7.01.7.01.15.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	41.345.000,00	41.345.000,00
7.01.7.01.15.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.400.000,00	19.370.000,00
7.01.7.01.15.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	1.725.000,00	1.690.000,00
7.01.7.01.15.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	9.220.000,00	9.080.000,00
7.01.7.01.16.	KECAMATAN / KAPANEWON GIRISUBO	461.138.500,00	435.784.766,00
7.01.7.01.16.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	91.211.000,00	77.446.051,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.7.01.16.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	3.860.000,00	3.860.000,00
7.01.7.01.16.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	46.200.000,00	46.063.715,00
7.01.7.01.16.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	37.950.000,00	35.367.500,00
7.01.7.01.16.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.288.000,00	1.288.000,00
7.01.7.01.16.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.078.000,00	10.078.000,00
7.01.7.01.16.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	40.947.000,00	40.247.000,00
7.01.7.01.16.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.353.000,00	1.353.000,00
7.01.7.01.16.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.052.500,00	1.052.500,00
7.01.7.01.16.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9.625.000,00	9.625.000,00
7.01.7.01.16.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	118.174.000,00	112.583.000,00
7.01.7.01.16.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	6.940.000,00	4.740.000,00
7.01.7.01.16.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	2.920.000,00	2.920.000,00
7.01.7.01.16.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	36.476.000,00	36.476.000,00
7.01.7.01.16.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.059.000,00	25.055.000,00
7.01.7.01.16.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	3.725.000,00	3.725.000,00
7.01.7.01.16.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	24.280.000,00	23.905.000,00
7.01.7.01.17.	KECAMATAN / KAPANEWON TANJUNGSARI	341.234.200,00	325.089.220,00
7.01.7.01.17.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	96.871.000,00	91.695.520,00
7.01.7.01.17.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	21.850.000,00	21.260.000,00
7.01.7.01.17.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	27.700.000,00	27.698.000,00
7.01.7.01.17.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.995.000,00	1.995.000,00
7.01.7.01.17.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	30.241.000,00	29.900.500,00
7.01.7.01.17.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	22.590.000,00	22.250.500,00
7.01.7.01.17.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	2.540.000,00	2.470.000,00
7.01.7.01.17.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.230.000,00	3.230.000,00
7.01.7.01.17.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	27.249.500,00	27.162.000,00
7.01.7.01.17.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	56.672.200,00	56.357.200,00
7.01.7.01.17.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	5.490.000,00	5.350.000,00
7.01.7.01.17.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	7.275.000,00	7.275.000,00
7.01.7.01.17.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	13.550.000,00	4.675.000,00
7.01.7.01.17.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.372.500,00	17.162.500,00
7.01.7.01.17.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	6.608.000,00	6.608.000,00
7.01.7.01.18.	KECAMATAN / KAPANEWON PURWOSARI	337.733.500,00	333.592.528,00
7.01.7.01.18.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	122.056.000,00	118.959.328,00
7.01.7.01.18.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	7.845.000,00	7.765.500,00
7.01.7.01.18.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	35.294.000,00	35.291.700,00
7.01.7.01.18.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	800.000,00	800.000,00
7.01.7.01.18.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	300.000,00	300.000,00
7.01.7.01.18.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	8.861.500,00	8.856.500,00
7.01.7.01.18.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	7.260.000,00	7.260.000,00
7.01.7.01.18.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00
7.01.7.01.18.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10.907.000,00	10.907.000,00
7.01.7.01.18.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	84.545.000,00	83.937.500,00
7.01.7.01.18.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	1.180.000,00	1.180.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7.01.7.01.18.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana	4.975.000,00	4.975.000,00
7.01.7.01.18.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	24.370.000,00	24.370.000,00
7.01.7.01.18.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.740.000,00	25.390.000,00
7.01.7.01.18.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	150.000,00	150.000,00
7.01.7.01.18.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	1.900.000,00	1.900.000,00
	Jumlah	773.800.960.691,00	705.487.582.023,16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. PENDAHULUAN

Instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual adalah Kebijakan Akuntansi yang dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD dan menjadi pedoman oleh pihak-pihak lain seperti fungsi perencanaan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak, mulai dari proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diimplementasikan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2018.

4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. Pendahuluan

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan akuntansi menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Basis Akruwal. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas pelaporan, sedangkan untuk setiap entitas akuntansi tidak menyajikan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Struktur dan Isi masing-masing laporan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan Aset dalam Aset Lancar dan Aset Non Lancar serta mengklasifikasikan Kewajiban menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Beban luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Ekuitas Mutasi
- 3) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 4) Jumlah Ekuitas Akhir.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan - kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. Aset

a. Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek dapat berupa: Saham, Deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Investasi Jangka pendek BLUD dan Investasi Jangka pendek lainnya.

c. Piutang

Piutang diakui saat:

- 1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang disajikan sebesar Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan piutang adalah kualitas piutang yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang lancar
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar
- 3) Kualitas Piutang Diragukan dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4) Kualitas Piutang Macet

Adapun besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Kualitas Piutang**

Nomor	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

d. Persediaan

Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Perpetual yang dinilai menggunakan Metode Pertama Keluar Pertama atau *First In First Out (FIFO)*.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Adapun untuk persediaan barang cetakan dan barang kuasi yang sudah tidak digunakan lagi, rusak dan cacat, dilakukan perhitungan kembali dan dituangkan dalam Berita Acara menurut nilai persediaannya kemudian dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta Revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

f. Aset Tetap

1) Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengakuan Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa Hewan/Ternak dan Tumbuhan serta Kontruksi dalam Pengerjaan.

2) Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan perkiraan masa manfaat sebagai berikut.

Tabel 4.2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Penyusutan terhadap Aset Tetap dilakukan pada tahun Aset Tetap tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun. Adapun untuk aset ekstrakompabel tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.

g. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset lainnya antara lain Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri Atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah Golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Adapun untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

- 1) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 3) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu kemudian menyerahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.
- 4) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah Aset *Non Moneter* yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

1) Hak Paten

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2) Aset Tak Berwujud Lainnya

a) *Software*/Sistem Informasi Manajemen

Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud (ATB) adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

b) Kajian

Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai Aset.

c) Konsultan Perencana.

Konsultan Perencana adalah hasil pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan perencana, dapat berupa gambar kerja pelaksanaan, desain bangunan, detail perencanaan bangunan, pembuatan gambar, shop drawing.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas Pemerintah Daerah.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode Garis Lurus.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

Perhitungan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Amortisasi} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Didalam penghitungan dan pencatatannya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi sedangkan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, dilakukan amortisasi.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

2. Kewajiban

a) Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas:

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Adapun Kewajiban Jangka Pendek di SKPD terdiri atas:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang di PPKD terdiri atas:

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b) Pengakuan Kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat:

- 1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- 2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- 3) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

c) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

3. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

a) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b) Ekuitas Awal

Ekuitas Awal digunakan untuk mencatat akun atas ekuitas pertama kali diterapkan. Ekuitas yaitu pada saat dilakukan restatemen atas LKPD tahun 2014 sebagai dasar nilai ekuitas awal tahun 2015.

c) Surplus/ Defisit Lo

Surplus Defisit LO pada saat periode bersangkutan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4. Pendapatan-LRA

- a) Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:
 - 1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - 2) Diterima oleh SKPD; atau
 - 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
- b) Pengukuran Pendapatan-LRA
 - 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - 3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c) Penyajian

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

5. Belanja

- a) Pengakuan Belanja
 - 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b) Pengukuran belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

6. Transfer

- a) Pengakuan Transfer
 - 1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.
 - 2) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b) Pengukuran Transfer

- 1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

c) Penilaian Transfer

- 1) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2) Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

7. Pembiayaan

a. Pengakuan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat :
 - a) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang.
 - c) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan untuk pembiayaan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
 - a) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.

b. Pengukuran Pembiayaan

- 1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah
- 2) Berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 3) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

8. Pendapatan-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan LO dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO.

Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

c. Pengukuran Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

9. Beban

a. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

10. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan tidak berulang:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

3) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

4) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	218,659,195,459.92	228,208,528,545.52	104.37	254,810,945,072.62
2. Pendapatan Transfer	1,649,511,874,749.85	1,492,055,719,343.21	90.45	1,793,714,175,165.72
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	74,496,822,620.00	72,113,517,232.00	96.80	64,535,304,701.00
Jumlah Pendapatan	1,942,667,892,829.77	1,792,377,765,120.73	92.26	2,113,060,424,939.34

Realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp1792377765120.73 atau mencapai 92.26373% dari anggarannya sebesar Rp1942667892829.77 dan menurun sebesar Rp320682659818.61 (15.17622%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp2113060424939.34 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp228,208,528,545.52**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut.

	2020			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Pendapatan Pajak Daerah	48,409,308,262.47	53,496,629,854.00	110.51	57,963,265,056.00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	17,427,643,670.00	18,734,711,662.87	107.50	35,553,531,281.25
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,874,256,511.00	16,874,256,511.63	100.00	15,068,840,811.36
d. Lain-lain PAD yang Sah	135,947,987,016.45	139,102,930,517.02	102.32	146,225,307,924.01
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	218,659,195,459.92	228,208,528,545.52	104.37	254,810,945,072.62

Realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp228208528545.520 atau 104.36722% dari anggaran sebesar Rp218659195459.92 turun sebesar Rp26602416527.1 (10.44006%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp254810945072.62.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2020 dan 2019, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah **Rp53,496,629,854.00**

Pendapatan Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020(Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Pajak Hotel	564,480,511.00	869,111,378.00	153.97	890,156,981.00
2) Pajak Restoran	2,329,468,564.14	4,377,649,091.00	187.92	6,642,007,155.00
3) Pajak Hiburan	126,407,750.33	99,578,500.00	78.78	249,013,054.00
4) Pajak Reklame	900,000,000.00	1,042,205,530.00	115.80	979,528,188.00
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5) Pajak Penerangan Jalan	13,876,000,000.00	14,121,688,863.00	101.77	15,672,134,836.00
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,132,000,000.00	1,440,371,000.00	127.24	2,188,116,200.00
7) Pajak Parkir	20,951,437.00	35,997,475.00	171.81	44,898,075.00
8) Pajak Air Tanah	410,000,000.00	460,199,483.00	112.24	434,618,757.00
9) Pajak Bumi dan Bangunan	21,050,000,000.00	22,237,725,482.00	105.64	21,435,186,683.00
10) Pajak BPHTB	8,000,000,000.00	8,812,103,052.00	110.15	9,427,605,127.00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	48,409,308,262.47	53,496,629,854.00	110.51	57,963,265,056.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp53496629854.00 atau naik 110.50897% dari anggarannya sebesar Rp48409308262.47 dan turun sebesar Rp4466635202.00 (7.70598%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp57963265056.00.

Penjelasan Pajak tidak mencapai target kurang dari 90 % atau melebihi target 110% di tahun 2020:

No.	Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2020 dan Penjelasan
(a)	Pajak Hotel	Realisasi sebesar Rp869.111.378,00 atau mencapai 153,97% dikarenakan adanya penambahan obyek pajak baru melakukan instensifikasi hotel di wilayah pantai.
(b)	Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp4.377.649.091,00 atau mencapai 187,92% karena munculnya obyek pajak baru yang berada di kawasan pantai dan realisasi dari jasa boga/katering yang bersumber dari dana APBDes dan APBN.
(c)	Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp99.578.500,00 atau mencapai 78,78% dikarenakan obyek pajak hiburan terbesar adalah wisata susur gua yang berlokasi di Goa Pindul, Goa Jomblang dan cave tubing Kali Suci dan selama Pandemi Covid-19 ada penurunan jumlah pengunjung, hal yang sama juga berlaku untuk obyek pajak diskotik/karaoke dan kolam renang.
(d)	Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.042.205.530,00 atau mencapai 115,80% dikarenakan banyaknya pemasangan reklame jenis kain secara insidentil dari beberapa produk rokok baru di toko maupun jalan di wilayah Gunungkidul, terdapat kendala dalam pendataan reklame melekat/stiker dimana petugas sulit menemukan WP yang memasang reklame tersebut.
(f)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.440.371.000,00 atau mencapai 127,24% karena adanya obyek pajak baru di wilayah Bedoyo, Ponjong yang melakukan aktifitas penambangan, juga munculnya Wajib Pajak baru dari penambangan rakyat di wilayah Candirejo, Semin. Kemudian untuk jenis pajak feldspar tidak mencapai target karena penambang untuk obyek tersebut telah tutup.
(g)	Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir pada sebesar Rp35.997.475,00 atau mencapai 171,81% dari target, dikarenakan adanya wajib pajak baru yaitu Java Parkir sehingga pendapatan pada tahun 2020 ini bisa melebihi target.
(h)	Pajak Air Tanah	Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp490.199.483,00 atau mencapai 112,24% dari target, dikarenakan adanya pendataan ulang untuk wajib pajak PDAM dimana untuk masing-masing sumur diperoleh NPA yang baru sebagai dasar perhitungan pajak dan berlaku mulai masa pajak September 2020.
(j)	Pajak BPHTB	Realisasi Pajak BPHTB sebesar Rp8.812.103.052,00 atau mencapai 110,15% dari target, dikarenakan banyak bermunculan kawasan perumahan baru yang berakibat pada bertambahnya transaksi BPHTB dan jumlah pendaftaran BPHTB dari program PTSL hampir 50% dari jumlah pendaftaran BPHTB reguler serta memperbanyak cek lapangan untuk mengetahui harga transaksi yang sebenarnya.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp53496629854.00 termasuk didalamnya Penerimaan Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp1339045965.00. Dengan perincian sebagai berikut.

No.	Jenis Penerimaan Piutang Pajak 2020	Jumlah (Rp)
1)	Piutang Pajak Hotel/Losmen	423,465.00
2)	Piutang Pajak Restoran	28,429,694.00
3)	Piutang Pajak Hiburan	50,000.00
4)	Piutang Pajak Reklame	26,580,875.00
5)	Piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	0.00
6)	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	48,696,000.00
7)	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0.00
8)	Piutang Pajak Parkir	91,250.00
9)	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	0.00
10)	Piutang PBBP2	1,234,774,681.00
	Jumlah	1,339,045,965.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Penerimaan PPB P2

No	Uraian	Ketetapan 2020 (Rp)	Realisasi s.d Th 2020 (Rp)
1.	Pokok	25,337,781,459.00	22,237,725,482.00
2.	Denda		348,849,172.00
		25,337,781,459.00	22,586,574,654.00

Realisasi PBB P2 sebesar Rp22.237.725.482,00 atau 105,64% dan pendapatan denda sebesar Rp348.849.172,00. Penerimaan PBB sedikit dari target karena pada tahun 2020 ada upaya meningkatkan upaya pemungutan dengan sistem jemput bola dengan mobil layanan pajak daerah sampai ke pelosok dusun/padukuhan, disamping ada kebijakan pengunduran jatuh tempo pembayaran PBB P 2 dari September sampai dengan 30 November 2020.

5.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah

Rp18,734,711,662.87

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 terdiri atas 16 jenis retribusi dan dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai Unit Pengelola Pendapatan, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

	2020 (Rp)		%	2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
(a) Pelayanan Kesehatan	163,800,000.00	245,171,890.00	149.68	189,072,550.00
(b) Pelayanan Persampahan	725,448,000.00	767,264,242.00	105.76	601,494,400.00
(c) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0.00	0.00	0.00	706,197,000.00
(d) Pelayanan Pasar	1,614,413,300.00	1,631,406,400.00	101.05	1,599,139,600.00
(e) Pengujian Kendaraan Bermotor	372,860,000.00	368,820,000.00	98.92	507,964,500.00
(f) Pengendalian Menara Telekomunikasi	500,000,000.00	406,961,590.00	81.39	675,754,420.00
(g) Pengujian Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya	11,459,000.00	15,746,500.00	137.42	
(h) Pemakaian Kekayaan Daerah	1,874,498,030.00	2,009,402,330.00	107.20	2,319,359,380.00
(i) Jasa Usaha Terminal	20,585,000.00	30,218,400.00	146.80	49,441,600.00
(j) Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	406,450,000.00	403,934,000.00	99.38	1,245,492,000.00
(k) Jasa Usaha Tempat Penginapan/	17,000,000.00	20,306,250.00	119.45	37,750,000.00
(l) Pesanggrahan/ Villa				
(m) Usaha Tempat Rekreasi & Olahraga	9,117,298,340.00	9,188,268,909.62	100.78	25,001,460,340.00
(n) Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha	389,100,000.00	499,584,000.00	128.39	473,008,500.00
(o) Retribusi Tempat Pelelangan	500,000,000.00	751,172,247.25	150.23	443,483,191.25
(p) Izin Mendirikan Bangunan	1,700,000,000.00	2,380,836,904.00	140.05	1,675,794,800.00
(q) Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00
(r) Izin Trayek	14,732,000.00	15,618,000.00	106.01	28,119,000.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	17,427,643,670.00	18,734,711,662.87	107.50	35,553,531,281.25

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp18734711662.87 atau 107.49997% dari anggarannya sebesar Rp17427643670.00 turun sebesar Rp16818819618.3800 atau (47.30562%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp35553531281.25.

Adapun retribusi tersebut dikelola oleh SKPD sebagai berikut.

- Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp245171890.00 dikelola SKPD yaitu :
 - Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp 245,171,890.00
- Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp767264242.00 dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu :
 - Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp 636,361,442.00
 - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp 130,902,800.00
- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.00 sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan direklas dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1631406400.00 dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yaitu :
 - Kemantren Pasar Wonosari Rp 375,324,450.00
 - Kemantren Pasar Playen Rp 332,088,700.00
 - Kemantren Pasar Paliyan Rp 129,745,150.00
 - Kemantren Pasar Semin Rp 186,248,250.00
 - Kemantren Pasar Semanu Rp 289,522,350.00
 - Kemantren Pasar Ponjong Rp 100,353,800.00
 - Kemantren Pasar Rongkop Rp 137,168,500.00
 - Kemantren Pasar Nglipar Rp 80,955,200.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp368820000.00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp406961590.00 dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2009402330.00 dikelola oleh 7 (Tujuh) SKPD yaitu :
 - a. Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 19,244,000.00
 - b. Dinas Pariwisata Rp 38,717,400.00
 - c. DPU, Perum & Kawasan Permukiman Rp 245,539,000.00
 - d. Dinas Kesehatan Rp 138,314,500.00
 - e. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rp 1,120,242,500.00
 - f. Dinas Perhubungan Rp -
 - g. Badan Keuangan Aset Daerah Rp 447,344,930.00
8. Retribusi Jasa Usaha Terminal sebesar Rp30218400.00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.
9. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Rp403934000.00 dikelola oleh SKPD yaitu :
 - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rp 403,934,000.00
10. Retribusi Jasa Usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp20306250.00 dikelola oleh Dinas Pariwisata
11. Retribusi usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp9188268909.62 dikelola oleh Dinas Pariwisata
12. Retribusi Jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp499584000.00 dikelola oleh dua SKPD yaitu :
 - a. Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 69,337,500.00
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 430,246,500.00
13. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp751172247.25 dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
14. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp2380836904.00 dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu.
15. Retribusi Ijin Trayek realisasinya sebesar Rp15618000.00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.

5.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp16,874,256,511.63

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Gunungkidul pada PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, Bank Pembangunan Daerah DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dengan realisasi TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Daerah Gunungkidul	4,447,201,654.00	4,447,201,654.00	100.00	3,972,470,854.00
(b) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPD DIY	11,640,836,825.00	11,640,836,825.32	100.00	10,485,487,739.05
(c) Perusahaan Daerah Air Minum	777,642,985.00	777,642,985.16	100.00	603,068,244.36
(d) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank (BUKP)	8,575,047.00	8,575,047.15	100.00	7,813,973.95
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	16,874,256,511.00	16,874,256,511.63	100.00	15,068,840,811.36

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp16874256511.63 atau mencapai 100.% dari anggarannya sebesar Rp16874256511. atau naik sebesar Rp1805415700.27 (11.98112%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp15068840811.36.

5.1.1.d. Lain-lain PAD yang Sah

Rp139,102,930,517.02

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Perda, dengan realisasi TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	6,048,187,000.00	6,121,547,393.00	101.21	391,243,198.00
2) Penerimaan Jasa Giro	3,545,000,000.00	3,553,513,612.00	100.24	5,072,056,264.00
3) Pendapatan Bunga deposito	5,000,000,000.00	5,803,769,403.62	116.08	13,912,964,550.96
4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	333,022,228.00	561,125,830.07	168.50	882,627,153.54
	2020 (Rp)			2019 (Rp)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	419,824,732.36	--	163,674,370.68
6) Pendapatan Denda Pajak	182,815,258.00	395,437,450.00	216.30	432,911,502.00
7) Pendapatan Denda Retribusi	7,415,260.00	25,569,980.00	344.83	44,817,113.00
8) Pendapatan dari Pengembalian	0.00	512,620,768.00	--	854,490,503.00
9) Hasil Operasi Penegakan Perda	7,890,000.00	8,550,000.00	108.37	57,675,000.00
10) Pendapatan Bunga dari Pemberian Pinjaman Penguatan Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
11) Pendapatan BLUD	114,414,383,191.24	114,862,712,544.00	100.39	123,663,708,659.00
12) Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	73,960,329.21	179,707,303.97	242.98	0.00
13) Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	293,710,000.00	291,695,000.00	99.31	166,224,227.83
14) Pendapatan dari Penjualan Penebangan Pohon	0.00	150,297,600.00	--	410,000.00
15) Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga	6,041,603,750.00	6,216,558,900.00	102.90	508,945,000.00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	135,947,987,016.45	139,102,930,517.02	102.32	146,151,747,542.01

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp139102930517.02 atau mencapai 102.3207% dari anggarannya sebesar Rp135947987016.45 atau turun sebesar Rp7048817024.989960 (4.82294%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp146151747542.01.

Secara rinci Lain-lain PAD yang sah dapat diuraikan sebagai berikut.

2020 (Rp)			
	Anggaran	Realisasi	%
1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	6,048,187,000.00	6,121,547,393.00	101.21
<i>Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai</i>	<i>40,000,000.00</i>	<i>61,193,599.00</i>	<i>152.98</i>
<i>Penjualan Kendaraan Dinas roda 2</i>	<i>200,000,000.00</i>	<i>174,176,287.00</i>	<i>87.09</i>
<i>Penjualan Kendaraan Dinas roda 4</i>	<i>120,000,000.00</i>	<i>51,066,779.00</i>	<i>42.56</i>
<i>Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan</i>	<i>220,000,000.00</i>	<i>366,923,728.00</i>	<i>166.78</i>
<i>Pelepasan Hak Atas Bangunan</i>	<i>561,125,830.07</i>	<i>5,468,187,000.00</i>	<i>974.50</i>
2) Penerimaan Jasa Giro	3,545,000,000.00	3,553,513,612.00	100.24
<i>Jasa Giro Kas Daerah</i>	<i>3,500,000,000.00</i>	<i>3,473,548,665.00</i>	<i>99.24</i>
<i>Jasa Giro Pemegang Kas</i>	<i>45,000,000.00</i>	<i>79,964,947.00</i>	<i>177.70</i>
3) Pendapatan Bunga deposito	5,000,000,000.00	5,803,769,403.62	116.08
4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	333,022,228.00	561,125,830.07	168.50
5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	419,824,732.36	--
6) Pendapatan Denda Pajak	182,815,258.00	395,437,450.00	216.30
<i>Denda Pajak Hotel</i>	<i>1,821,721.00</i>	<i>10,840,514.00</i>	<i>595.07</i>
<i>Denda Pajak Restoran</i>	<i>7,965,455.00</i>	<i>25,867,305.00</i>	<i>324.74</i>
<i>Denda Pajak Hiburan</i>	<i>35,400.00</i>	<i>910,234.00</i>	<i>2571.28</i>
<i>Denda Pajak Reklame</i>	<i>1,501,149.00</i>	<i>4,270,204.00</i>	<i>284.46</i>
<i>Denda Pajak Parkir</i>	<i>99,280.00</i>	<i>870,657.00</i>	<i>876.97</i>
<i>Denda Pajak Air Tanah</i>	<i>751,431.00</i>	<i>1,069,404.00</i>	<i>142.32</i>
<i>Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	<i>324,360.00</i>	<i>2,759,960.00</i>	<i>850.89</i>
<i>Denda PBB P2</i>	<i>170,316,462.00</i>	<i>348,849,172.00</i>	<i>204.82</i>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

7) Pendapatan Denda Retribusi	7,415,260.00	25,569,980.00	344.83
<i>Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	<i>5,791,800.00</i>	<i>23,566,600.00</i>	<i>406.90</i>
<i>Denda Retribusi Izin Trayek</i>	<i>294,360.00</i>	<i>674,280.00</i>	<i>229.07</i>
<i>Denda Sewa Tanah & Gedung</i>	<i>87,500.00</i>	<i>87,500.00</i>	<i>100.00</i>
<i>Denda Sewa Kios</i>	<i>1,241,600.00</i>	<i>1,241,600.00</i>	<i>100.00</i>
2020 (Rp)			
	Anggaran	Realisasi	%
8) Pendapatan dari Pengembalian	0.00	512,620,768.00	0.00
9) Hasil Operasi Penegakan Perda	7,890,000.00	8,550,000.00	0.00
10) Pendapatan BLUD	114,414,383,191.24	114,862,712,544.00	100.39
<i>Pendapatan Jasa Layanan</i>	<i>7,785,610,355.80</i>	<i>6,854,892,042.00</i>	<i>88.05</i>
<i>Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah</i>	<i>106,628,772,835.44</i>	<i>108,007,820,502.00</i>	<i>101.29</i>
12) Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	73,960,329.21	179,707,303.97	242.98
13) Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	293,710,000.00	291,695,000.00	99.31
14) Pendapatan dari Penjualan Penebangan Pohon	0.00	150,297,600.00	--
15) Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga	6,041,603,750.00	6,216,558,900.00	102.90
<i>Kerjasama Pemungutan Parkir-Dishub</i>	<i>1,229,234,000.00</i>	<i>1,239,616,000.00</i>	<i>100.84</i>
<i>Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>	<i>4,812,369,750.00</i>	<i>4,976,942,900.00</i>	<i>103.42</i>
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	135,947,987,016.45	139,102,930,517.02	102.32

*) Pendapatan dan Pengelolaan BUKP sebesar Rp179707303.97 merupakan dana Pembinaan dan Produksi BUKP yang di Kelola 15 (lima belas) Kecamatan terdiri dari :

1 Kecamatan/Kapnewon Ponjong	Rp	10,119,658.73
2 Kecamatan/Kapnewon Playen	Rp	8,201,560.64
3 Kecamatan/Kapnewon Semin	Rp	30,877,595.83
4 Kecamatan/Kapnewon Panggang	Rp	15,229,118.17
5 Kecamatan/Kapnewon Rongkop	Rp	10,737,803.33
6 Kecamatan/Kapnewon Nglipar	Rp	14,387,765.49
7 Kecamatan/Kapnewon Semanu	Rp	4,867,766.96
8 Kecamatan/Kapnewon Paliyan	Rp	12,843,310.87
9 Kecamatan/Kapnewon Karangmojo	Rp	8,202,698.94
10 Kecamatan/Kapnewon Ngawen	Rp	12,466,230.86
11 Kecamatan/Kapnewon Patuk	Rp	14,392,899.49
12 Kecamatan/Kapnewon Wonosari	Rp	3,494,132.98
13 Kecamatan/Kapnewon Saptosari	Rp	10,376,440.88
14 Kecamatan/Kapnewon Tepus	Rp	-
15 Kecamatan/Kapnewon Gedangsari	Rp	23,510,320.80

5.1.2 Pendapatan Transfer **Rp1,492,055,719,343.21**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan realisasi dalam TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1,254,486,746,954.00	1,233,106,659,264.00	98.30	1,323,197,557,079.00
(2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	206,260,699,000.00	65,794,904,000.00	31.90	195,111,184,000.00
(3) Transfer Pemerintah Provinsi	94,140,905,135.85	102,149,130,231.00	108.51	102,025,720,182.72
(4) Bantuan Keuangan Provinsi	94,623,523,660.00	91,005,025,848.21	96.18	173,379,713,904.00
Jumlah Pendapatan Transfer	1,649,511,874,749.85	1,492,055,719,343.21	90.45	1,793,714,175,165.72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp1492055719343.21 atau 90.45438% dari anggarannya sebesar Rp1649511874749.85 turun sebesar Rp301658455822.51 (16.81753%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1793714175165.72 secara rinci dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan **Rp1,233,106,659,264.00**

Penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1233106659264.00 dari rencana sebesar Rp1254486746954.00 atau mencapai 98.29571%, dengan perincian sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a) Dana Bagi Hasil Pajak	29,045,414,398.00	21,251,266,005.00	73.17	13,056,875,869.00
(b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3,274,226,556.00	2,160,688,954.00	65.99	2,513,027,639.00
(c) Dana Alokasi Umum	887,858,891,000.00	882,566,083,000.00	99.40	965,080,463,000.00
(d) Dana Alokasi Khusus	334,308,215,000.00	327,128,621,305.00	97.85	342,547,190,571.00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1,254,486,746,954.00	1,233,106,659,264.00	98.30	1,323,197,557,079.00

(a) Dana Bagi Hasil Pajak (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK /2020 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020), terdiri dari :

(i) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 4,253,832,601.00
(ii) Bagi Hasil Pajak Penghasilan PPh Ps. 21, Ps 25 dan Ps. 29	Rp 16,997,433,404.00
	Rp 21,251,266,005.00

(b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari :

(i) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	Rp 11,402,500.00
(ii) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Rp 788,276,289.00
(iii) Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	Rp 1,360,418,664.00
(iv) Bagi Hasil dari Sumber Daya Mineral dan Batubara	Rp 591,501.00
	Rp 2,160,688,954.00

(c) **Dana Alokasi Umum** **882,566,083,000.00**

Berdasarkan Peraturan Presdien Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 besaran realisasi DAU Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp882566083000.00

(d) **Dana Alokasi Khusus** **Rp327,128,621,305.00**

Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 besaran realisasi DAK Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

(i) Dana Alokasi Khusus Fisik reguler

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1) Bidang Pendidikan	68,215,212,000	67,502,463,161.00	98.96
2) Bidang Kesehatan	10,958,975,000	11,696,693,781.00	106.73
3) Bidang Perumahan dan Pemukima	2,772,000,000	2,772,000,000.00	100.0
Jumlah	81,946,187,000	81,971,156,942	100.0

(ii) Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1) Bidang Kesehatan dan KB	2,807,774,000.00	2,785,182,686.00	99.20
2) Bidang Sanitasi	1,004,600,000.00	1,002,299,100.00	99.77
3) Bidang Irigasi	4,578,021,000.00	3,817,260,000.00	83.38
4) Bidang Pariwisata	1,406,379,000.00	1,240,582,870.00	88.21
5) Bidang Pertanian	1,908,624,000.00	1,908,623,625.00	100.0
6) Bidang Kelautan dan Perikanan	1,077,384,000.00	942,745,500.00	87.50
Jumlah	12,782,782,000	11,696,693,781	91.5

(iii) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1) Tunjangan Profesi Guru PNSD	172,934,084,000.00	172,934,084,000.00	100.00
2) Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00	100.00
3) BOP Pendidikan Anak Usia Dini	16,300,200,000.00	15,201,224,390.00	93.26
4) BOK dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	43,673,187,000.00	39,863,564,061.00	91.28
5) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	491,010,000.00	480,025,000.00	97.76



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
6) Pelayanan Administrasi Kependudukan	2,456,815,000.00	2,403,406,499.00	97.83
7) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1,999,900,000.00	1,875,954,000.00	93.80
8) Pelayanan Kepariwisata	664,050,000.00	613,095,000.00	92.33
Jumlah	239,579,246,000	234,431,352,950	97.9

5.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya **Rp65,794,904,000.00**

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a) Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
(b) Dana Penyesuaian	206,260,699,000.00	65,794,904,000.00	31.90	195,111,184,000.00
Jumlah Pemerintah Pusat Lainnya	206,260,699,000.00	65,794,904,000.00	31.90	195,111,184,000.00

Penerimaan sebesar Rp65794904000.00 merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Penyesuaian dan DID, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Dana Desa (APBN) yang terdistribusi ke 144 desa di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2020 tidak dilaporkan karena desa merupakan entitas yang terpisah dari Pemda setelah ada otonomi desa dan transfer dana desa sudah tidak melalui RKUD namun langsung ke desa.
- 2) Dana Insentif Daerah (DID) Rp 65,794,904,000.00

5.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi **Rp102,149,130,231.00**

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94,140,905,135.85	102,149,130,231.00	108.51	102,025,720,182.72
(b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	94,140,905,135.85	102,149,130,231.00	108.51	102,025,720,182.72

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020 sebesar Rp102149130231. merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan	28,201,632,035.00	28,860,311,942.00	102.34	29,085,705,500.20
2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13,041,148,662.00	12,454,213,274.00	95.50	16,542,626,000.00
3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19,098,240,000.00	22,292,855,950.00	116.73	25,971,942,000.00
4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	78,713,700.00	114,183,801.00	145.06	93,780,243.52
5) Bagi Hasil Pajak Rokok	33,721,170,738.85	38,427,565,264.00	113.96	30,331,666,439.00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	94,140,905,135.85	102,149,130,231.00	108.51	102,025,720,182.72

(b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya **Rp0.00**

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi				Rp91,005,025,848.21
	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Bantuan Keuangan Khusus	94,623,523,660.00	91,005,025,848.21	96.18	173,379,713,904.00
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi	94,623,523,660.00	91,005,025,848.21	96.18	173,379,713,904.00

Bantuan Keuangan khusus dari Provinsi DIY adalah berupa dana keistimewaan, dana padat karya, dan BKK untuk Pemilukada

Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi terdiri atas:

1) Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Danais Tahap 1	Rp 9,550,018,585.21
2) BKK Khusus Urusan Keistimewaan (Danais) Tahap 2	Rp 67,484,422,024.00
3) BKK untuk Padat Karya Infrastruktur	Rp 429,000,000.00
4) BKK untuk Jambanisasi	Rp 354,000,000.00
5) BKK untuk untuk Pemilukada 2020	Rp 4,500,000,000.00
6) BKK untuk Padat Karya	Rp 143,000,000.00
7) BKK untuk Urusan Keistimewaan Tahap 3 Thn 2020	Rp 8,544,585,239.00
	Rp 91,005,025,848.21

5.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH **Rp72,113,517,232.00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi penerimaan sumbangan, subsidi, hibah, bantuan, dana kontijensi dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya. Sumber penerimaan dana tersebut dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun pihak lain sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Pendapatan Hibah	74,496,822,620.00	72,113,517,232.00	96.80	64,535,304,701.00
(2) Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	74,496,822,620.00	72,113,517,232.00	96.80	64,535,304,701.00

Lain lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp72113517232.00 berupa Dana Hibah dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut.

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp 8,014,514,500.00
1) Hibah untuk air minum dalam negeri/air minum perkotaan	Rp 4,980,000,000.00
2) Hibah sanitasi (SAIIG)	Rp 3,034,514,500.00
(2) Pendapatan Hibah Dana BOS	
Hibah Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri	Rp 64,099,002,732.00

5.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.1. Belanja Operasi	1,406,066,205,047.71	1,330,233,327,204.50	94.61	1,366,128,806,955.55
5.2.2. Belanja Modal	271,872,753,485.00	254,894,455,486.83	93.76	493,784,689,398.32
5.3.3. Belanja Tak Terduga	139,954,542,018.34	70,873,337,876.00	50.64	1,098,249,000.00
Jumlah Belanja	1,817,893,500,551.05	1,656,001,120,567.33	91.09	1,861,011,745,353.87

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2020 sebesar Rp1656001120567.33 atau 91.09451% dari anggarannya sebesar Rp1817893500551.05 turun sebesar Rp205010624786.54 atau 11.01608% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1861011745353.87, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.2.1. Belanja Operasi **Rp1,330,233,327,204.50**
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi tahun 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Belanja Pegawai	889,231,709,100.68	864,158,776,586.00	97.18	880,858,227,337.00
(2) Belanja Barang dan Jasa	454,487,527,256.03	405,655,775,960.50	89.26	459,764,784,618.55
(3) Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Belanja Hibah	56,892,468,691.00	56,831,342,158.00	99.89	24,455,795,000.00
(6) Belanja Bantuan Sosial	5,454,500,000.00	3,587,432,500.00	65.77	1,050,000,000.00
Jumlah Belanja Operasi	1,406,066,205,047.71	1,330,233,327,204.50	94.61	1,366,128,806,955.55

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp1330233327204.5 atau 94.60673% dari anggarannya sebesar Rp1406066205047.71 turun sebesar Rp35895479751.05 (2.62753%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1366128806955.55 Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut.

(1) Belanja Pegawai **Rp864,158,776,586.00**
Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Pegawai Langsung, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Tidak Langsung	841,791,029,150.68	820,966,741,336.00	97.53	836,964,212,921.00
2) Langsung	47,440,679,950.00	43,192,035,250.00	91.04	43,894,014,416.00
Jumlah Belanja Pegawai	889,231,709,100.68	864,158,776,586.00	97.18	880,858,227,337.00

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp864158776586. atau 97.18038% dari anggarannya sebesar Rp889231709100.68 turun sebesar Rp16699450751. (1.89582%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp880858227337.00

Terjadi penurunan sebesar 1,88% disebabkan karena tahun 2020 Belanja Pegawai untuk Belanja kursus singkat/pelatihan belanja beasiswa PNS diklasifikasikan sebagai belanja jasa (sesuai Permendagri 21/2011). Belanja pegawai menurut SKPD dirinci sebagai berikut.

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DISDIKPORA	553,175,751,059.00	538,933,321,077.00	97.43
2	DINAS KESEHATAN	66,090,561,103	63,627,096,546.00	96.27
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	26,154,610,114.00	25,295,374,013.00	96.71
4	DPUPRKP	5,894,039,607.00	5,301,385,287.00	89.94
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3,359,936,409.00	3,197,692,134.00	95.17
6	DINAS SOSIAL	1,827,463,728.00	1,813,398,877.00	99.23
7	DISNAKERTRANS	2,467,053,894.00	2,388,067,801.00	96.80
8	DP3AKBPM	4,773,718,898.00	4,119,510,510.00	86.30
9	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2,468,833,786.00	2,413,220,648.00	97.75
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,252,399,005.00	3,120,709,237.00	95.95
11	DINAS DUKCAPIL	3,746,839,000.00	3,663,308,820.00	97.77
12	DINAS PERHUBUNGAN	2,946,125,325.00	2,924,008,391.00	99.25
13	DISKOMINFO	2,251,054,764.00	2,157,074,372.00	95.83
14	DINAS KOPERASI, UKM	900,105,448.00	870,807,461.00	96.75
15	DPMPT	1,730,293,294.00	1,728,110,714.00	99.87
16	DINAS KEBUDAYAAN	2,038,693,667.00	1,844,314,905.00	90.47
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,259,212,088.00	2,210,742,284.00	97.85
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,013,681,453.00	1,985,447,578.00	98.60
19	DINAS PARIWISATA	3,644,781,770.00	3,598,592,739.00	98.73
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,172,735,464.00	11,964,922,435.00	98.29
21	DISPERINDAG	5,830,870,333.00	5,699,458,514.00	97.75
22	INSPEKTORAT DAERAH	5,945,174,585.00	5,684,511,033.00	95.62
23	BAPPEDA	3,174,090,972.00	3,131,656,957.00	98.66
24	BKAD	44,932,512,219.00	42,548,791,144.00	94.69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
25	BKPPD	72,331,848,538.00	72,242,212,670.00	99.88
26	BPBD	1,248,772,486.00	1,230,631,351.00	98.55
27	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KDH	760,344,376.00	736,518,396.00	96.87
28	SEKRETARIAT DAERAH	8,750,517,154.00	8,628,302,621.00	98.60
29	DPRD	18,181,534,700.00	17,361,802,344.00	95.49
30	SEKRETARIAT DPRD	2,970,643,310.48	2,840,329,365.00	95.61
31	BADAN KESBANGPOL	1,893,460,216.00	1,716,499,527.00	90.65
32	KECAMATAN WONOSARI	1,134,932,549.00	896,391,749.00	78.98
33	KECAMATAN PALIYAN	989,017,761.00	942,706,663.00	95.32
34	KECAMATAN PANGGANG	957,835,170.00	940,688,905.00	98.21
35	KECAMATAN TEPUS	1,027,822,178.00	1,026,817,285.00	99.90
36	KECAMATAN RONGKOP	1,138,291,440.00	1,036,674,637.00	91.07
37	KECAMATAN SEMANU	1,441,538,142.00	1,342,381,880.00	93.12
38	KECAMATAN PONJONG	1,180,634,149.00	1,162,957,196.00	98.50
39	KECAMATAN KARANGMOJO	1,051,366,107.00	1,013,757,856.00	96.42
40	KECAMATAN PLAYEN	1,250,651,615.00	1,226,220,030.00	98.05
41	KECAMATAN NGLIPAR	1,093,080,376.20	986,537,161.00	90.25
42	KECAMATAN NGAWEN	1,059,490,036.00	1,041,388,509.00	98.29
43	KECAMATAN SEMIN	1,072,289,959.00	1,048,056,614.00	97.74
44	KECAMATAN PATUK	1,143,575,980.00	1,138,606,988.00	99.57
45	KECAMATAN SAPTOSARI	1,266,651,406.00	1,231,231,726.00	97.20
46	KECAMATAN GEDANGSARI	1,254,358,902.00	1,254,045,117.00	99.97
47	KECAMATAN GIRISUBO	903,707,983.00	860,647,511.00	95.24
48	KECAMATAN TANJUNGSARI	1,016,806,531.00	1,011,910,295.00	99.52
49	KECAMATAN PURWOSARI	1,062,000,051.00	1,019,936,713.00	96.04
JUMLAH		889,231,709,100.68	864,158,776,586.00	97.18

Belanja Pegawai – Tidak Langsung meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Komunikasi Intensif DPRD, serta Insentif dan Upah Pungut, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Gaji & Tunjangan	539,329,832,349.68	530,529,792,661.00	98.37	554,339,416,236.00
2) Tambahan Penghasilan PNS	69,022,450,000.00	68,991,525,895.00	99.96	64,048,206,586.00
3) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7,215,000,000.00	7,110,000,000.00	98.54	7,120,500,000.00
4) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	186,302,460,876.00	177,002,028,568.00	95.01	191,492,413,640.00
5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah	819,349,061.00	697,029,526.00	85.07	2,615,731,177.00
6) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	278,770,804.10	257,327,618.00	92.31	1,301,262,612.00
7) Iuran Jaminan Kesehatan	36,400,178,300.00	34,241,197,471.00	94.07	16,046,682,670.00
8) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	2,422,987,759.90	2,137,839,597.00	88.23	-
Jumlah Belanja Pegawai - Tidak Langsung	841,791,029,150.68	820,966,741,336.00	97.53	836,964,212,921.00

Realisasi Belanja Pegawai – Tidak Langsung TA 2020 sebesar Rp820966741336.00 atau 97.52619% dari anggarannya sebesar Rp841791029150.68 turun sebesar Rp15997471585.00 (1.91137%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp836964212921.00.

Rincian belanja pegawai tidak langsung dapat disajikan sebagai berikut.

1) Gaji dan tunjangan.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a) Gaji Pokok/Uang Representasi	423,068,466,693.50	418,286,153,152.00	98.87	436,544,449,400.00
b) Tunjangan Keluarga	39,541,976,002.74	38,792,091,513.00	98.10	40,743,796,663.00
c) Tunjangan Jabatan	8,571,811,952.60	8,031,862,428.00	93.70	8,456,630,750.00
d) Tunjangan Fungsional	30,254,177,450.00	30,037,439,000.00	99.28	31,331,012,000.00
e) Tunjangan Fungsional Umum	5,690,249,376.75	5,422,835,600.00	95.30	5,797,910,420.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

		2020 (Rp)			2019 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
f)	Tunjangan Beras	21,170,254,656.90	19,235,114,100.00	90.86	20,242,271,356.00
g)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,941,513,626.94	1,835,402,533.00	94.53	1,915,279,730.00
h)	Pembulatan Gaji	5,935,990.25	5,512,185.00	92.86	6,408,692.00
i)	Uang Paket	86,058,000.00	84,640,500.00	98.35	85,228,500.00
j)	Tunjangan Badan Musyawarah	29,414,700.00	28,592,550.00	97.20	23,781,450.00
k)	Tunjangan Komisi	55,906,200.00	55,084,050.00	98.53	46,314,450.00
l)	Tunjangan Badan Anggaran	30,510,900.00	30,510,900.00	100.00	24,969,000.00
m)	Tunjangan Badan Kehormatan	9,317,700.00	9,317,700.00	100.00	7,764,750.00
n)	Tunjangan Pansus	44,944,200.00	8,495,550.00	18.90	12,834,675.00
o)	Tunjangan Perumahan	4,578,000,000.00	4,501,500,000.00	98.33	4,504,500,000.00
p)	Tunjangan Badan Legislatif Daerah	15,894,900.00	15,894,900.00	100.00	13,154,400.00
q)	Uang Jasa Pengabdian	12,600,000.00	1,575,000.00	12.50	392,910,000.00
r)	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252,000,000.00	252,000,000.00	100.00	197,400,000.00
s)	Tunjangan Pengamanan Sandi	34,800,000.00	31,771,000.00	91.30	32,800,000.00
t)	Tunjangan Transportasi	3,936,000,000.00	3,864,000,000.00	98.17	3,960,000,000.00
JUMLAH		539,329,832,349.68	530,529,792,661.00	98.37	554,339,416,236.00

2) Tambahan Penghasilan Pegawai

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

		2020 (Rp)			2019 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
*)	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	69,022,450,000.00	68,991,525,895.00	99.96	64,048,206,586.00
Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai		69,022,450,000.00	68,991,525,895.00	99.96	64,048,206,586.00

3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan Tunjangan Operasional kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD serta Tunjangan Reses sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

		2020 (Rp)			2019 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5,670,000,000.00	5,575,500,000.00	98.33	5,586,000,000.00
b)	Belanja Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00	600,000,000.00
c)	Tunjangan Reses	945,000,000.00	934,500,000.00	98.89	934,500,000.00
Jumlah		7,215,000,000.00	7,110,000,000.00	98.54	7,120,500,000.00

4) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

		2020 (Rp)			2019 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Tunjangan Profesi Guru PNSD	185,242,460,876.00	176,051,753,568.00	95.04	190,979,413,640.00
(2)	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,060,000,000.00	950,275,000.00	89.65	513,000,000.00
Jumlah		186,302,460,876.00	177,002,028,568.00	95.01	191,492,413,640.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dibayarkan kepada pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan pemungutan pajak negara/daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insentif Pemungutan Pajak Daerah direalisasikan hanya pada SKPD BKAD dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

Jenis Insentif	2020 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
1 Pemungutan Pajak Reklame	14,038,865.00	13,790,735.00	98.23
2 Pemungutan Pajak Air Tanah	6,474,869.00	6,474,868.00	100.00
3 Pemungutan Pajak Bumi Bangunan	339,945,105.00	267,045,543.00	78.56
4 Pemungutan Pajak Hotel	15,220,208.00	14,461,678.00	95.02
5 Pemungutan Pajak Restoran	77,948,052.00	77,185,016.00	99.02
6 Pemungutan Pajak Hiburan	2,249,735.00	1,939,191.00	86.20
7 Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	218,113,059.00	218,113,059.00	100.00
8 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20,236,550.00	16,390,978.00	81.00
9 Pemungutan Pajak Parkir	487,258.00	470,100.00	96.48
10 Pemungutan BPHTB	124,635,360.00	81,158,358.00	65.12
Jumlah	819,349,061.00	697,029,526.00	85.07

6) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dibayarkan kepada pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan pemungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

Jenis Insentif	2020 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
1 Pemungutan Retribusi Jasa Umum	131,569,418.10	114,941,170.00	87.36
2 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	147,201,386.00	142,386,448.00	96.73
Jumlah	278,770,804.10	257,327,618.00	92.31

Secara rinci Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2020 direalisasi pada SKPD adalah sebagai berikut.

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DPUPRKP	14,203,750.00	13,577,275.00
2.	Dinas Lingkugan Hidup	5,431,757.10	5,234,012.00
3.	Dinas Perhubungan	39,584,225.00	31,698,750.00
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	17,070,000.00	16,141,780.00
5.	Dinas Pariwisata	135,526,500.00	131,396,690.00
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	5,500,000.00	5,468,500.00
7.	Dinas Perindag	32,411,266.00	27,272,041.00
8.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4,735,986.00	2,231,250.00
9.	Dinas Dukcapil	-	-
10.	DPMPT	14,227,000.00	14,227,000.00
11.	Dinas Kominfo	10,080,320.00	10,080,320.00
	Jumlah	278,770,804.10	257,327,618.00

7) Iuran Jaminan Kesehatan

Iuran Jaminan Kesehatan dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1) Iuran JKN	32,895,178,300.00	30,807,954,532.00	93.65	12,478,005,593.00
(2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	885,000,000.00	858,310,736.00	96.98	892,167,950.00
(3) Iuran Jaminan Kematian	2,620,000,000.00	2,574,932,203.00	98.28	2,676,509,127.00
Jumlah	36,400,178,300.00	34,241,197,471.00	94.07	16,046,682,670.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sedangkan rincian Belanja Langsung Pegawai dapat disajikan sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Honorarium PNS	6,993,485,000.00	6,432,902,000.00	91.98	5,992,489,000.00
2. Honorarium Non PNS	27,594,810,700.00	24,002,259,000.00	86.98	19,982,122,743.00
3. Uang Lembur	463,435,000.00	410,050,000.00	88.48	552,735,000.00
4. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	0.00	294,000,000.00
5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	0.00	10,064,416,173.00
6. Honorarium Pengelola SIPKD	66,600,000.00	62,550,000.00	93.92	66,500,000.00
7. Belanja Pegawai Dana BOS	12,322,349,250.00	12,284,274,250.00	99.69	6,941,751,500.00
<i>Jumlah</i>	47,440,679,950.00	43,192,035,250.00	91.04	43,894,014,416.00
b. Belanja Barang dan Jasa				Rp405,655,775,960.50
	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	454,487,527,256.03	405,655,775,960.50	89.26	459,764,784,618.55
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	454,487,527,256.03	405,655,775,960.50	89.26	459,764,784,618.55

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp405655775960.5 atau 89.25565% dari anggaran sebesar Rp454487527256.029 turun sebesar Rp54109008658.05 (11.76885%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp459764784618.55.

Sedangkan rincian Belanja Barang dan Jasa dapat disajikan sebagai berikut.

	2020 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Bahan Pakai Habis	12,580,205,738.00	11,510,976,383.91	91.50
2. Belanja Bahan/Material	47,381,261,245.00	41,814,397,527.49	88.25
3. Belanja Jasa Kantor	155,091,376,902.03	141,727,237,594.90	91.38
4. Belanja Premi Asuransi	64,517,040,910.00	63,651,835,353.00	98.66
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,348,453,347.00	7,088,244,691.00	84.90
6. Belanja Cetak dan Penggandaan	10,202,096,262.00	8,943,004,295.00	87.66
7. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	1,589,975,600.00	1,451,166,000.00	91.27
8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	730,150,000.00	656,813,000.00	89.96
9. Belanja Sewa Alat Berat	93,000,000.00	33,000,000.00	35.48
10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,707,573,000.00	2,992,066,930.00	80.70
11. Belanja Makanan dan Minuman	25,769,808,950.00	20,527,259,861.00	79.66
12. Belanja Pakaian Dinas dan	638,217,500.00	620,602,800.00	97.24
13. Belanja Pakaian Kerja	521,110,500.00	511,738,250.00	98.20
14. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	485,345,000.00	471,633,000.00	97.17
15. Belanja Perjalanan Dinas	27,328,018,873.00	18,207,331,244.00	66.63
16. Belanja perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	5,149,728,018.00	4,345,171,015.00	84.38
17. Belanja Jasa Konsultan	530,493,000.00	501,361,600.00	94.51
18. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1,898,675,000.00	1,767,550,000.00	93.09
19. Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak	24,251,998,540.00	23,773,856,785.23	98.03
20. Belanja Bantuan Sosial Barang	965,045,000.00	953,261,952.20	98.78
21. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	11,218,814,000.00	9,772,264,500.00	87.11
22. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2,985,402,000.00	2,701,816,563.00	90.50
23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,265,792,084.00	4,046,186,382.77	94.85



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	2020 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
24. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,342,825,193.00	2,137,100,300.00	91.22
25. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	36,010,971,320.00	30,786,532,593.00	85.49
26. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5,606,149,274.00	4,391,367,339.00	78.33
27. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	278,000,000.00	272,000,000.00	97.84
Jumlah	454,487,527,256.03	405,655,775,960.50	89.26

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang Menjadi Aset Tetap

Terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang menjadi aset tetap karena memenuhi kriteria kapitaslisasi aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat dijelaskan pada SKPD sebagai berikut.

No.	Jenis barang yang dibeli	Rek Belanja	Harga (Rp)	Aset yang terbentuk
Dinas Pertanian dan Pangan			14,835,000.00	
1.	Alat Ubinan	Belanja alat-alat pertanian	4,875,000.00	Unit-unit laboratorium
2.	Rangka Timbangan	Belanja alat-alat pertanian	1,350,000.00	Alat Ukur
3.	Tas	Belanja alat-alat pertanian	1,350,000.00	Unit-unit laboratorium
4.	Timbangan Digital 3A SCALE	Belanja alat-alat pertanian	3,405,000.00	Alat Ukur
5.	Moisure tester MD 7822	Belanja alat-alat	3,855,000.00	Unit-unit laboratorium
Dinas Kominfo			99,438,000.00	
1.	Peralatan Komputer	Alat listrik dan elektronika	99,438,000.00	Peralatan Komputer
2.	Jaringan Listrik	Alat listrik dan elektronika	33,000,000.00	Jaringan Listrik
DPUPRKP			241,956,000.00	
1.	Jasa Konsultan	Belanja Jasa Konsultan Perencana	241,956,000.00	Bagunan Gedung
Dinas Perindag			322,657,221.50	
1.	Pemeliharaan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	247,617,221.50	Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.	Jasa Tenaga Harian Lepas / Upah Tenaga	Belanja Jasa THL/Upah Tenaga	75,040,000.00	Bangunan Gedung Tempat Kerja
Jumlah Total			678,886,221.50	

c. Belanja Bunga

..... **Rp0.00**

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada Pemerintah Pusat berupa Sub Loan Agreement (SLA) namun di tahun 2020 hal tersebut tidak ada. Sehingga Realisasi Belanja Bunga Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

d. Belanja Subsidi

..... **Rp0.00**

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja subsidi baik dalam TA 2020 maupun 2019.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

e. Belanja Hibah				Rp56,831,342,158.00
	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah	56,892,468,691.00	56,831,342,158.00	99.89	24,455,795,000.00
Jumlah Belanja Hibah	56,892,468,691.00	56,831,342,158.00	99.89	24,455,795,000.00

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merealisasikan Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp56831342158.00 atau 99.89256% dari anggarannya sebesar Rp56892468691.00, naik sebesar Rp32375547158.00 atau sebesar 132.38395% dari TA 2019 sebesar Rp24455795000.00.

Kenaikan belanja hibah karena adanya event pemilukada yang menguapkan biaya yang cukup besar dan perubahan klasifikasi Bantuan Keuangan Partai politik yang semula bukan pada belanja hibah.

Belanja Hibah di rinci ke dalam 1) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan 2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik, secara rinci belanja hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

a) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

	2020 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
1) Hibah Pilkada kepada KPU	29,148,118,691.00	29,148,118,691.00	100.00
2) Hibah Pilkada kepada Bawaslu	5,705,155,000.00	5,705,155,000.00	100.00
3) Hibah kepada PMI Tahun 2020	450,000,000.00	450,000,000.00	100.00
4) Hibah kepada NPC Tahun 2020	400,000,000.00	388,000,000.00	97.00
5) Hibah kepada PDM Muhammadiyah	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
6) Hibah kepada KONI Tahun 2020	1,909,818,000.00	1,860,691,467.00	97.43
7) Dana DAK Non Fisik-BOP PAUD	15,577,200,000.00	15,577,200,000.00	100.00
8) Dana DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Tahap I	1,949,500,000.00	1,949,500,000.00	100.00
9) Hibah ke Panti Asuhan Islam Playen dan Panti Asuhan Darma Putra	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
10) Hibah kepada Majelis Buddhayana Indonesia	16,300,000.00	16,300,000.00	100.00
11) Hibah ke PKBI Gunungkidul	72,365,000.00	72,365,000.00	100.00
12) Hibah kepada Kwarcab Tahun 2020	225,000,000.00	225,000,000.00	100.00
Jumlah Belanja Hibah	55,783,456,691.00	55,722,330,158.00	99.89

b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

	2020 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
1) PDIP	268,706,000.00	268,706,000.00	100.00
2) Partai Amanat Nasional	131,214,000.00	131,214,000.00	100.00
3) Partai Golongan Karya	125,821,000.00	125,821,000.00	100.00
4) Partai Demokrat	64,404,000.00	64,404,000.00	100.00
5) Partai Keadilan Sejahtera	95,832,000.00	95,832,000.00	100.00
6) Partai Kebangkitan Bangsa	106,588,000.00	106,588,000.00	100.00
7) Partai Gerakan Indonesia Raya	107,274,000.00	107,274,000.00	100.00
8) Partai Nasdem	209,173,000.00	209,173,000.00	100.00
9) Partai HANURA	-	-	0.00
Jumlah Belanja Hibah	1,109,012,000.00	1,109,012,000.00	100.00

f. Belanja Bantuan Sosial

Rp3,587,432,500.00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp5.454.500.00,00 dengan realisasi sebesar Rp3587432500.00

Belanja Bantuan Sosial tersebut penganggarannya pada PPKD realisasinya untuk diberikan kepada Badan/lembaga/organisasi swasta/kelompok masyarakat/perorangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.2.2 Belanja Modal

Rp254,894,455,486.83

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Tanah	5,327,453,700.00	5,223,253,120.00	98.04	43,883,631,085.00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	61,307,972,866.00	57,107,076,802.75	93.15	54,343,833,841.50
c. Belanja Gedung dan Bangunan	151,646,967,683.00	140,574,735,393.01	92.70	88,672,482,347.21
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49,484,562,036.00	48,086,398,631.07	97.17	116,825,871,316.94
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	164,875,600.00	145,296,800.00	88.13	460,603,120.00
f. Belanja Aset Lainnya	3,940,921,600.00	3,757,694,740.00	0.00	649,495,000.00
Jumlah Belanja Modal	271,872,753,485.00	254,894,455,486.83	93.76	304,835,916,710.65

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp254894455486.83 dari rencana sebesar Rp271872753485.00 atau mencapai 93.75506%. Dibandingkan tahun 2019 turun sebesar Rp49941461223.82 atau sebesar 16.38306% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp304835916710.65.

Realisasi belanja modal dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Belanja tanah direalisasikan hanya pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang secara rinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Tanah kantor	49,085,000.00	49,084,120.00	100.0
2 Tanah sarana kesehatan puskesmas	1,900,105,000.00	1,900,105,000.00	100.0
3 Tanah sarana pendidikan sekolah dasar	230,904,200.00	230,904,200.00	100.0
4 Tanah untuk jalan	553,126,000.00	450,282,300.00	81.4
5 Tanah untuk jaringan air	2,594,233,500.00	2,592,877,500.00	99.9
JUMLAH	5,327,453,700.00	5,223,253,120.00	98.0

- b. Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp57.107.073.202,75 direalisasikan untuk belanja modal pengadaan alat-alat yang dirinci sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Alat-alat Berat	95,520,627.00	91,605,625.00	95.9
2	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4,618,553,400.00	4,571,576,400.00	99.0
3	Alat-alat Angkutan Darat Tdk Bermotor	2,000,000.00	1,815,000.00	90.8
4	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	30,000,000.00	27,929,999.00	93.1
5	Alat-alat Bengkel	30,500,000.00	23,846,490.00	78.2
6	Peralatan Kantor	496,875,000.00	461,325,700.00	92.8
7	Perlengkapan Kantor	4,331,211,494.00	4,011,732,044.00	92.6
8	Komputer	6,802,945,473.00	6,296,639,580.00	92.6
9	Mebeulair	2,235,482,718.00	1,644,048,474.75	73.5
10	Peralatan Dapur	102,496,000.00	86,767,395.00	84.7
11	Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,600,000.00	7,020,998.00	92.4
12	Alat-alat Studio	474,160,000.00	443,213,235.00	93.5
13	Alat-alat Komunikasi	266,251,900.00	210,616,888.00	79.1
14	Alat-alat Ukur	121,160,000.00	112,710,000.00	93.0
15	Alat-alat Kedokteran	11,602,650,103.00	11,066,218,183.00	95.4
16	Alat-alat Laboratorium	8,511,564,101.00	8,125,989,608.00	95.5
17	Belanja Modal Dana BOS	37,503,782,509.35	19,515,025,585.00	52.0
18	Belanja Modal sumur BOR	220,000,000.00	218,258,800.00	99.2
19	Belanja Modal Rambu-rambu lalu lintas	185,400,000.00	181,858,398.00	98.1
20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persejataan/Keamanan	100,000.00	78,400.00	78.4
21	Belanja Modal Pengadaan Baliho	10,000,000.00	8,800,000.00	88.0
	Jumlah (Rp)	77,648,253,325.35	57,107,076,802.75	73.5

- c. Belanja peralatan dan mesin direalisasikan pada SKPD sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Dikpora	28,582,780,950.00	26,630,856,418.00	93.17
2	Dinas Kesehatan	14,039,594,894.00	12,264,286,888.75	87.35
3	RSUD	7,578,176,000.00	7,253,697,529.00	95.72
4	DPU	78,000,000.00	76,700,000.00	98.33
5	DP3AKBPM	393,950,000.00	381,740,000.00	96.90
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	33,000,000.00	32,580,000.00	98.73
7	Dinas Lingkungan Hidup	52,000,000.00	51,829,500.00	99.67
8	Disdukcapil	892,810,000.00	892,810,000.00	100
9	Dinas Perhubungan	237,900,000.00	233,446,598.00	98.13
10	Diskominfo	3,024,750,000.00	2,936,087,835.00	97.07
11	Dinas Koperasi	2,181,000.00	2,180,000.00	99.95
12	DPMPT	281,500,000.00	266,554,900.00	94.69
13	Dinas Kebudayaan	625,000.00	616,000.00	98.56
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,000,000.00	11,815,000.00	98.46
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	122,260,000.00	114,120,499.00	93.34
16	Dinas Pertanian dan Pangan	337,486,502.00	337,486,500.00	100
17	Disperindag	20,000,000.00	19,992,500.00	99.96
18	Inspektorat Daerah	130,084,220.00	130,084,220.00	100
19	Bappeda	10,000,000.00	9,999,000.00	100
20	BKAD	3,788,303,400.00	3,781,733,900.00	99.83
21	BPBD	6,000,000.00	6,000,000.00	100
22	Sekretariat Daerah	260,950,000.00	260,661,000.00	99.89
23	Sekretariat DPRD	799,643,900.00	788,523,800.00	98.61
24	Kap. Wonosari	26,576,000.00	26,550,000.00	99.90
25	Kap. Paliyan	21,500,000.00	21,500,000.00	100
26	Kap. Panggang	43,300,000.00	43,300,000.00	100
27	Kap. Tepus	26,106,000.00	26,106,000.00	100
28	Kap. Rongkop	27,480,000.00	27,450,000.00	99.89
29	Kapanewon Semanu	53,000,000.00	53,000,000.00	100.00
30	Kapanewon Ponjong	43,500,000.00	43,500,000.00	100.00
31	Kapanewon Karangmojo	58,500,000.00	58,500,000.00	100.00
32	Kapanewon Playen	55,615,000.00	55,515,000.00	99.82
33	Kapanewon Nglipar	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
34	Kapanewon Ngawen	8,700,000.00	8,700,000.00	100.00
35	Kapanewon Semin	43,000,000.00	43,000,000.00	100.00
36	Kapanewon Patuk	28,700,000.00	28,700,000.00	100.00
37	Kapanewon Saptosari	31,260,000.00	30,850,000.00	98.69
38	Kapanewon Gedangsari	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00
39	Kapanewon Girisubo	48,500,000.00	48,363,715.00	99.72
40	Kapanewon Tanjungsari	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
41	Kapanewon Purwosari	40,040,000.00	40,040,000.00	100.00
Jumlah (Rp)		61,307,972,866.00	57,107,076,802.75	93.15

- c. Belanja Gedung dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 140,574,735,393.01
Belanja Gedung dan Bangunan direalisasi untuk belanja modal sebagai berikut.

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung kantor	129,159,916,614.00	125,894,153,313.23	97.47
2	Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung gudang	33,650,000.00	-	0.00
3	Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	(3,526,159,663.21)	85,300,000.00	-2.42
4	Pengadaan konstruksi tugu peringatan	14,504,661,706.79	300,514,230.31	2.07
5	Belanja Modal pembangunan pasar	881,833,400.00	875,675,533.00	99.30
6	Belanja Modal Pagar	1,084,368,000.00	921,813,756.26	85.01
7	Belanja Modal tralis	35,000,000.00	33,454,023.00	95.58



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8	Belanja Modal Canopy/Tempat Parkir	490,866,769.00	481,223,300.00	98.04
9	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung Pelayanan Publik	19,097,266,864.00	11,511,754,329.46	60.28
10	Belanja Modal Kolam	388,678,000.00	386,789,867.75	99.51
11	Belanja modal pembangunan taman	87,588,036.00	84,057,040.00	95.97
		162,237,669,726.58	140,574,735,393.01	86.65

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Dikpora	45,842,865,350.00	43,606,158,356.02	95.12
2	Dinas Kesehatan	3,043,410,404.00	2,946,599,647.96	96.82
3	RSUD	1,785,225,000.00	1,728,740,000.00	96.84
4	DPU	7,042,789,832.00	6,634,469,031.88	94.20
5	DP3AKBPMD	118,405,691.00	118,405,691.00	100.00
6	DPTR	400,356,500.00	398,559,230.31	99.55
7	Dinas Lingkungan Hidup	1,268,050,000.00	1,126,774,180.46	88.86
8	Dinas Perhubungan	163,442,000.00	162,602,500.00	99.49
9	Dinas Koperasi	69,450,000.00	69,450,000.00	100.00
10	DPMPT	200,000,000.00	198,676,500.00	99.34
11	Dinas Kebudayaan	70,438,233,000.00	70,225,531,050.00	99.70
12	DPK	197,200,000.00	195,481,000.00	99.13
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	819,269,842.00	696,577,000.00	85.02
14	Dinas Pariwisata	1,576,143,800.00	1,376,377,870.88	87.33
15	Disperindag	1,406,795,400.00	1,395,235,198.55	99.18
16	BKAD	464,470,000.00	450,556,803.49	97.00
17	BPBD	16,315,464,864.00	8,751,831,524.46	53.64
18	Sekretariat Daerah	160,000,000.00	158,743,500.00	99.21
19	Kec. Wonosari	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
20	Kec. Paliyan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
21	Kec. Semanu	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
22	Kec. Playen	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
23	Kec. Nglipar	40,646,000.00	40,646,000.00	100.00
24	Kec. Ngawen	72,250,000.00	71,900,808.00	99.52
25	Kec. Semin	41,050,000.00	40,474,000.00	98.60
26	Kec. Patuk	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
27	Kec. Saptosari	60,000,000.00	59,495,500.00	99.16
28	Kec. Gedangsari	50,250,000.00	50,250,000.00	100.00
29	Kec. Girisubo	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00
	Jumlah (Rp)	151,646,967,683.00	140,574,735,393.01	92.70

- c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan anggaran sebesar Rp49.484.562.036,00 direalisasikan sebesar Rp48.099.670.231,07:
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan direalisasikan dengan rincian:

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BM. Pengadaan Konstruksi Jalan	11,749,905,500.00	11,470,199,000.00	97.62
2	BM. Pengadaan Konstruksi Jembatan	28,663,004,036.00	28,614,833,434.07	99.83
3	BM. Pengadaan Kons. Jaringan Air	6,977,770,000.00	6,107,842,000.00	87.53
4	Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1,846,538,036.00	1,594,686,640.00	86.36
5	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	334,932,500.00	298,837,557.00	89.22
		49,572,150,072.00	48,086,398,631.07	97.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan direalisasikan pada SKPD berikut.

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Dikpora	16,000,000.00	15,223,700.00	95.15
2	Dinas Kesehatan	267,208,500.00	232,478,557.00	87.00
3	DPUPRKP	18,677,739,000.00	17,529,504,500.00	93.85
4	Dinas Perhubungan	1,752,950,000.00	1,589,021,640.00	90.65
5	DPMPT	6,000,000.00	5,665,000.00	94.42
6	Dinas Pariwisata	47,536,500.00	47,536,500.00	100.00
7	BKAD	40,000,000.00	39,737,500.00	99.34
8	BPBD	28,663,004,036.00	28,614,833,434.07	99.83
9	Badan Kesbangpol	8,624,000.00	8,624,000.00	100.00
10	Kec. Patuk	5,500,000.00	3,773,800.00	68.61
Jumlah (Rp)		49,484,562,036.00	48,086,398,631.07	97.17

c. Belanja Aset Tetap Lainnya direalisasikan pada SKPD sebagai berikut.

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Dikpora	39,375,600.00	36,499,000.00	92.69
2	Dinas Kesehatan	18,500,000.00	1,909,100.00	10.32
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	105,000,000.00	104,888,700.00	99.89
4	Sekretariat Daerah	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
Jumlah (Rp)		164,875,600.00	145,296,800.00	88.13

d. Belanja Aset Lainnya direalisasikan pada SKPD sebagai berikut.

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	643,686,600.00	642,470,000.00	99.81
2	RSUD	75,000,000.00	58,872,000.00	78.50
3	DPU	713,632,000.00	627,935,400.00	87.99
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	100,600,000.00	100,502,600.00	99.90
5	Dinas Perhubungan	96,000,000.00	80,973,640.00	84.35
6	Diskominfo	1,143,253,000.00	1,117,352,600.00	97.73
7	DPMPT	15,000,000.00	14,696,000.00	97.97
8	Dinas Kebudayaan	202,000,000.00	188,228,000.00	93.18
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	40,000,000.00	39,820,000.00	99.55
10	Dinas Pertanian dan Pangan	37,000,000.00	36,432,000.00	98.46
11	Bappeda	236,350,000.00	235,338,200.00	99.57
12	BKAD	593,400,000.00	570,414,300.00	96.13
13	BKPPD	45,000,000.00	44,660,000.00	99.24
Jumlah (Rp)		3,940,921,600.00	3,757,694,740.00	95.35

5.2.3. Belanja Tak Terduga

.....

Rp70,873,337,876.00

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	139,954,542,018.34	70,873,337,876.00	50.64	4,918,073,465.00
Jumlah Belanja Tak Terduga	139,954,542,018.34	70,873,337,876.00	50.64	4,918,073,465.00

Belanja Tak Terduga dari rencana sebesar Rp139954542018.34 sampai dengan akhir tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merealisasikan sebesar Rp70873337876.00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020 digunakan untuk

- 1) Pembayaran kelebihan pembayaran/restitusi pajak dan retribusi sebesar 50.814.565,00 yang direalisasikan melalui PPKD ;
- 2) Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pengampu BTT pada SKPD sebagai berikut."

No	SKPD	Anggaran	Realisasi
1.	Dinas Kesehatan	24,370,821,977.76	22,972,255,671.00
2.	Dinas Sosial	14,003,660,500.00	12,643,107,488.00
3.	BPBD	10,490,255,230.00	10,274,743,558.00
4.	RSUD Wonosari	12,663,962,500.00	9,254,774,575.00
5.	RSUD Saptosari	16,086,990,330.00	15,677,642,019.00
		77,615,690,537.76	70,822,523,311.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Belanja Tak Terduga untuk penanganan covid-19 secara rinci dilaksanakan oleh 5 SKPD Pengampu BTT dengan kegiatan sebagai berikut

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	RSUD WONOSARI	12,663,962,500.00	9,254,774,575.00	73.08
1	Pembelian Alat Kesehatan	5,626,000,000.00	4,779,232,610.00	84.95
2	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	6,330,365,000.00	3,787,497,465.00	59.83
3	Bahan Habis Pakai (BHP)	76,312,500.00	75,839,500.00	99.38
4	Insentif Tenaga Kesehatan	631,285,000.00	612,205,000.00	96.98
B.	DINAS KESEHATAN	24,370,821,977.76	22,972,255,671.00	94.26
1	Promosi dan Penyehatan Lingkungan	6,410,929,489.98	6,021,964,940.00	93.93
2	Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan	7,725,205,440.00	7,496,331,437.00	97.04
3	Pelayanan Kesehatan dan Rujukan	1,335,524,500.00	840,259,649.00	62.92
4	Belanja bahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	7,943,375,012.78	7,764,483,645.00	97.75
5	Pengadaan Aerosol Suction (DID)	955,787,535.00	849,216,000.00	88.85
C.	RSUD SAPTOSARI	16,086,990,330.00	15,677,642,019.00	97.46
1	Pengadaan Alat Kesehatan	2,022,283,654.00	1,919,118,053.00	94.90
2	Pengadaan Perlengkapan Kerja	1,120,133,543.00	1,118,133,543.00	99.82
3	Prasarana	5,755,854,119.00	5,706,064,140.00	99.13
4	Perlengkapan Rumah Tangga RS dan Pegawai	455,749,064.00	391,785,318.00	85.97
5	Perlengkapan Farmasi dan Laboratorium	1,224,324,034.00	1,220,006,935.00	99.65
6	Perlengkapan Radiologi	787,000,000.00	757,000,000.00	96.19
7	Belanja Makan Minum	342,485,000.00	319,035,000.00	93.15
8	Belanja Medis Habis Pakai	1,916,988,080.00	1,818,455,734.00	94.86
9	Sarana Komunikasi	246,463,800.00	246,463,800.00	100
10	Insentif Tenaga Kesehatan	1,354,050,000.00	1,321,315,000.00	97.58
11	Belanja Pengadaan Ruang CSSD	54,340,000.00	54,340,000.00	100
12	Belanja Pengadaan Ambulance	478,100,422.80	476,800,000.00	99.73
13	Perbaikan Atap Metal	199,650,000.00	199,650,000.00	100
14	Pengadaan Ruang Dekontaminasi	129,568,613.20	129,474,496.00	99.93
D.	Dinas Sosial	14,003,660,500.00	12,643,107,488.00	90.28
1	Bantuan Tunai Bagi Pekerja Sektor Informal Yang Memiliki Dampak Sosial Resiko Covid - 19	6,921,600,000.00	6,225,600,000.00	89.94
2	Bantuan Tunai Bagi Pasien Positif, PDP, ODP dan OTG Berdasar Data dari Dinas Kesehatan	2,047,200,000.00	1,958,700,000.00	95.68
3	Bantuan Tuna Bagi Fakir Miskin Non DTKS / JPS Miskin	4,498,800,000.00	3,987,000,000.00	88.62
4	Bantuan Barang (Sembako) Bagi Keluarga yang menjalankan Isolasi Mandiri	218,200,000.00	218,200,000.00	100
5	Dukungan Operasional Petugas	317,860,500.00	253,607,488.00	79.79
E.	BPBD	10,490,255,230.00	10,274,743,558.00	97.95
1	Uang Lelah Petugas Piket Posko BPBD	55,200,000.00	55,200,000.00	100
2	Belanja APD Masker	909,100,000.00	909,090,905.00	100
3	Belanja Cairan Disinfektan	105,000,000.00	105,000,000.00	100
4	Uang Lelah Petugas Pemakaman	120,000,000.00	120,000,000.00	100
5	Kelengkapan Petugas Pemakaman	17,000,000.00	8,400,000.00	49.41
6	Uang Lelah Petugas Pemulasaran Jenazah	5,000,000.00	2,800,000.00	56.00
7	Kelengkapan Petugas Pemulasaraan	37,690,000.00	4,899,000.00	13.00
8	Belanja BBM Pemakaman	7,500,000.00	6,500,000.00	86.67
9	Pembuatan saluran pembuangan air / ruang Dekontaminasi	13,300,000.00	13,300,000.00	100
10	Kegiatan Karantina di Wanagama (Tahap I, II)	674,230,260.00	632,878,834.00	93.87
11	Uji Coba Pembukaan New Normal Destinasi Wisata (Tahap 1 dan 2)	573,951,500.00	561,285,457.00	97.79



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
12	Masker Kain Tahap II	41,810,000.00	37,290,000.00	89.19
13	Face Shield	1,700,000.00	1,700,000.00	100
14	Sosialisasi New Normal dan Peningkatan Prasarana di Pasar dalam rangka Pemulihan Ekonomi (Disperindag - DID I)	300,000,000.00	296,328,010.00	98.78
15	Penerapan Sistem Reservasi dan Pendataan Wisatawan dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Lokasi Wisata (Diskominfo - DID I)	1,074,150,000.00	1,072,470,000.00	99.84
16	Pemulihan Ekonomi di Bidang Pariwisata (Dispar - DID I)	625,850,000.00	591,531,254.00	94.52
17	Kebutuhan OPD	63,493,200.00	63,472,840.00	99.97
18	Tindak lanjut pelaksanaan PERBUP 68 / 2020 (POL-PP Tahap I)	67,567,000.00	66,841,750.00	98.93
19	Persiapan uji coba dan Sosialisasi New Normal Bidang Pariwisata Tahap 4	107,023,000.00	102,793,343.00	96.05
20	Tindak lanjut pelaksanaan PERBUP 68 / 2020 (POL-PP Tahap II)	53,927,500.00	53,918,500.00	99.98
21	Kegiatan Dinas Perhubungan	27,873,140.00	27,873,140.00	100
22	Operasional Gugus Tugas	12,242,200.00	1,345,100.00	10.99
23	Persiapan uji coba dan Sosialisasi New Normal Bidang Pariwisata Tahap 5	106,947,000.00	102,793,343.00	96.12
24	Pemenuhan Fasilitas yang mendukung Pembelajaran secara daring (Kominfo - DID I)	2,760,737,430.00	2,760,237,403.00	99.98
25	Tindak Lanjut pelaksanaan PERBUP 68 / 2020 (POL-PP Tahap III)	112,966,000.00	112,572,750.00	99.65
26	Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Covid-19 (DID II)	287,000,000.00	286,551,445.00	99.84
27	Peningkatan Prasarana di Pasar dalam rangka pemulihan ekonomi (Disperindag - DID II)	651,500,000.00	650,275,704.00	99.81
28	Pembinaan klinik konsultasi pengemasan makanan olahan (Disperindag - DID II)	18,000,000.00	18,000,000.00	100
29	Persiapan Uji Coba dan Sosialisasi New Normal Bidang Pariwisata Tahap 6	159,497,000.00	158,211,200.00	99.19
30	KOMINFO Optimalisasi Layanan Internet (Kominfo - DID II)	1,500,000,000.00	1,451,183,580.00	96.75
TOTAL		77,615,690,537.76	70,822,523,311.00	91.25

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2020 bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19 dibagi dalam 3 bidang yaitu : bidang kesehatan, bantuan sosial/jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Adapun rincian penggunaannya

No	Bidang	Anggaran	Realisasi
1.	Bidang Kesehatan	59,995,111,537.76	54,625,727,512.00
2.	Bantuan Sosial Safety Net	14,003,660,500.00	12,643,107,488.00
3.	Pemulihan Dampak Ekonomi	3,616,918,500.00	3,553,688,311.00
		77,615,690,537.76	70,822,523,311.00

5.3 PENJELASAN POS-POS TRANSFER

Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9,323,181,965.00	9,087,018,625.00	97.47	11,009,663,935.00
5.3.2 Transfer Bantuan Keuangan	250,644,138,800.00	109,968,343,800.00	43.87	260,200,882,300.00
Jumlah	259,967,320,765.00	119,055,362,425.00	45.80	271,210,546,235.00

Realisasi Transfer TA 2020 sebesar Rp119055362425.00 atau 45.79628% dari anggarannya sebesar Rp259967320765.00 turun sebesar Rp152155183810.00 (56.10224%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp271210546235.00 dapat dijelaskan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan **Rp9,087,018,625.00**

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan belanja transfer Bagi Hasil Pendapatan, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Bagi Hasil Pajak	5,801,490,500.00	5,801,490,500.00	100.00	5,166,966,500.00
b. Bagi Hasil Retribusi	3,521,691,465.00	3,285,528,125.00	93.29	5,842,697,435.00
c. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	9,323,181,965.00	9,087,018,625.00	97.47	11,009,663,935.00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 sebesar Rp9087018625.00 atau 97.46692% dari anggarannya sebesar Rp9323181965.00 turun sebesar Rp1922645310.00 atau sebesar 17.46325% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp11009663935.00.

5.3.2 Transfer Bantuan Keuangan **Rp109,968,343,800.00**

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayarkan Transfer Bantuan Keuangan, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	210,000,000.00	0.00	0.00	210,000,000.00
2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	250,434,138,800.00	109,968,343,800.00	43.91	258,917,289,300.00
3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	1,073,593,000.00
Jumlah	250,644,138,800.00	109,968,343,800.00	43.87	260,200,882,300.00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp109968343800.00 atau 43.87429% dari anggarannya sebesar Rp250644138800.00 turun sebesar Rp150232538500.00 (57.73714%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp260200882300.00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) **Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**

Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lain dengan anggaran Rp210.000.000,00 namun realisasi tidak ada Rp 0,00

2) **Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	13,381,500,000.00	13,381,500,000.00	100.00	24,058,804,300.00
b. Alokasi Dana Desa	96,586,843,800.00	96,586,843,800.00	100.00	98,806,353,900.00
c. Dana Desa (APBN)	140,465,795,000.00		0.00	136,052,131,100.00
Jumlah	250,434,138,800.00	109,968,343,800.00	43.91	258,917,289,300.00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2020 sebesar Rp109968343800.00 atau 43.91108% dari anggarannya sebesar Rp250434138800.00 turun sebesar Rp148948945500.00 atau sebesar 57.52762% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp258917289300.00

Bahwa sesuai PSAP 02 tentang LRA pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat diterima melalui rekening kasda sedangkan dana desa sejak tahun 2020 tidak melalui kas daerah sehingga perlu dikeluarkan dari LRA. Sedangkan anggaran masih muncul karena untuk mengeluarkan anggaran dana desa harus melalui mekanisme APBD sehingga sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan karena sudah melewati tahun anggaran.

3) **Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.4 PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.4.1 Penerimaan Pembiayaan	172,696,710,995.63	172,696,710,995.63	100.00	225,467,603,263.16
5.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	37,503,782,509.35	37,319,649,284.35	99.51	33,609,025,618.00
Pembiayaan Netto	135,192,928,486.28	135,377,061,711.28	100.14	191,858,577,645.16

Realisasi pembiayaan netto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) TA 2020 sebesar Rp135377061711.28 atau 100.1362% dari anggaran sebesar Rp135192928486.28 turun sebesar Rp56481515933.88 atau sebesar 29.43914% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp191858577645.16.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.4.1 Penerimaan Pembiayaan **Rp172,696,710,995.63**

Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pinjaman, dan Penerimaan Piutang dengan anggaran dan realisasi tahun 2020 serta realisasi TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	172,696,710,995.63	172,696,710,995.63	100.00	225,467,603,263.16
b. Penerimaan Kembali Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	172,696,710,995.63	172,696,710,995.63	100.00	225,467,603,263.16

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp172696710995.63 atau Rp100.% dari anggaran Rp172696710995.63, turun sebesar Rp52770892267.53 atau sebesar 23.40509% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp225467603263.16.

Penerimaan TA 2020 dari Penggunaan SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp172696710995.63 adalah seluruh SiLPA TA 2019, yang telah dilaporkan oleh Bupati Gunungkidul dan disetujui DPRD Kabupaten Gunungkidul, serta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

5.4.2 Pengeluaran Pembiayaan **Rp37,319,649,284.35**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 dan 2019 meliputi pengeluaran untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

	2020 (Rp)			2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Penyertaan Modal Daerah	37,319,649,284.35	37,319,649,284.35	100.00	21,500,000,000.00
b. Pembayaran Pokok Utang	184,133,225.00	0.00	0.00	37,645,533.00
c. Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37,503,782,509.35	37,319,649,284.35	99.51	21,537,645,533.00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp37319649284.35 atau 99.50903% dari anggarannya sebesar Rp37503782509.35, naik sebesar Rp15782003751.3500 atau 73.27636% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp21537645533.00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2020 sebesar Rp37319649284.3500 digunakan untuk penambahan Penyertaan Modal
 - Penyertaan Modal pada BPD DIY Cabang wonosari Rp. 25,000,000,000.00
 - Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul Rp. 7,319,649,284.35
 - Penyertaan Modal pada PDAM "Tirta Handayani" Rp. 5,000,000,000.00
- b. Pembayaran pokok utang sebesar Rp.00 terdiri dari :
 - Pembayaran Kelebihan Penerimaan Rp. -



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5.5. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, sebagai berikut.

Perhitungan APBD :	2020 (Rp)			2019(Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Pendapatan	1,942,667,892,829.77	1,792,377,765,120.73	92.26	2,113,060,424,939.34
b. Belanja	1,817,893,500,551.05	1,656,001,120,567.33	91.09	1,861,011,745,353.87
c. Transfer	259,967,320,765.00	119,055,362,425.00	45.80	271,210,546,235.00
Surplus (Defisit) (a - b - c)	(135,192,928,486.28)	17,321,282,128.40	(12.81)	(19,161,866,649.53)
d. Penerimaan Pembiayaan	172,696,710,995.63	172,696,710,995.63	100.00	225,467,603,263.16
e. Pengeluaran Pembiayaan	37,503,782,509.35	37,319,649,284.35	99.51	33,609,025,618.00
Pembiayaan Neto (d - e)	135,192,928,486.28	135,377,061,711.28	100.14	191,858,577,645.16
SiLPA (SiKPA) TA 2020	0.00	152,698,343,839.68		172,696,710,995.63

Perhitungan APBD TA 2020 dan 2019 menunjukkan SiLPA masing-masing sebesar Rp152698343839.68 dan Rp172696710995.63 yang berupa kas tunai, rekening giro yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Daerah dan deposito.

Adapun rincian saldo Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

RINCIAN SALDO KAS DAERAH :	2020 (Rp)	2019 (Rp)
a. Sisa Kas Tunai (1 s.d. 3) :	898,928,879.12	282,587,981.00
1) Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)	0.00	0.00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	559,130,035.00	6,520,840.00
3) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	339,798,844.12	276,067,141.00
 b. Sisa Kas di Rekening Giro BPD Yogyakarta Cab. Wonosari :	 116,946,958,784.67	 138,780,335,626.31
1) A/C 002.111.000038 : Rek. Kas Umum Daerah	115,272,989,376.84	140,071,297,570.31
DIKURANGI :		
- Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2017)	0.00	83,850,975.00
- Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2018)	0.00	1,206,899,969.00
- Sisa BKK Dana Keistimewaan (setor ke Prov DIY)	0.00	370,000.00
	0.00	1,291,120,944.00
DITAMBAH		
- Kelebihan setoran IWP	159,000.00	159,000.00
- Setoran temuan pemeriksaan BPK	1,673,810,407.83	0.00
	1,673,969,407.83	159,000.00
 c. Sisa Kas di Rekening RSUD Wonosari(BLUD) :		
1) Kas Bank BPD DIY Cab. Wonosari A/C : 002.111.000.679	6,844,699,070.36	7,414,492,557.36
2) Kas Bank BRI Wonosari A/C : 0153.01.001094.30.4	13,702,906,491.00	15,390,454,840.00
3) Kas di Bendahara Penerimaan (BLUD)	9,218,532.00	9,143,044.00
Jumlah sisa kas di BLUD	20,556,824,093.36	22,814,090,441.36
 DIKURANGI :		
1) SP2D dalam perjalanan.	-	-
 SALDO KAS RSUD PER 31 DESEMBER 2020	20,556,824,093.36	22,814,090,441.36
 d. Sisa Kas di Rekening BLUD PUSKESMAS :	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1) UPT Puskesmas Nglipar I : No. Rek. 002.111.000765	92,500,892.62	4,601,485.62
2) UPT Puskesmas Nglipar II: No. Rek. 002.111.000859	95,843,409.00	124,047,053.00
3) UPT Puskesmas Gedangsari I: No. Rek. 002.111.000847	224,338,607.00	67,933,108.00
4) UPT Puskesmas Gedangsari II: No. Rek. 002.111.000842	193,288,002.00	153,143,050.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
5) UPT Puskesmas Patuk I : No. Rek. 002.111.000763	168,644,873.97	108,132,324.97
6) UPT Puskesmas Patuk II: No. Rek. 002.111.000846	155,039,807.89	126,664,115.89
7) UPT Puskesmas Rongkop : No. Rek. 002.111.000768	371,219,707.00	235,977,826.00
8) UPT Puskesmas Giriuboo: No. Rek. 002.111.000839	220,103,586.00	209,173,210.00
9) UPT Puskesmas Ponjong I : No. Rek. 002.111.000767	241,914,154.00	82,469,213.00
10) UPT Puskesmas Ponjong II: No. Rek. 002.111.000857	115,332,655.00	43,541,526.00
11) UPT Puskesmas Wonosari I : No. Rek. 002.111.000766	427,729,239.49	368,199,423.49
12) UPT Puskesmas Wonosari II: No. Rek. 002.111.000853	260,200,382.00	246,673,570.00
13) UPT Puskesmas Karangmojo I: No. Rek. 002.111.000848	515,280,609.14	539,417,332.14
14) UPT Puskesmas Karangmojo II: No. Rek. 002.111.000855	147,843,809.00	83,994,999.00
15) UPT Puskesmas Panggang I: No. Rek. 002.111.000856	135,446,592.00	123,159,986.00
16) UPT Puskesmas Panggang II : No. Rek. 002.111.000764	146,362,957.00	156,238,071.00
17) UPT Puskesmas Purwosari: No. Rek. 002.111.000845	151,647,579.00	60,720,414.00
18) UPT Puskesmas Tepus I: No. Rek. 002.111.000849	205,967,765.00	173,853,718.00
19) UPT Puskesmas Tepus II: No. Rek. 002.111.000851	128,036,844.40	93,397,722.40
20) UPT Puskesmas Tanjungsari : No. Rek. 002.111.000844	258,506,207.00	87,843,979.00
21) UPT Puskesmas Paliyan : No. Rek. 002.111.000762	344,412,496.00	412,676,551.00
22) UPT Puskesmas Saptosari: No. Rek. 002.111.000843	801,522,912.68	547,620,489.20
23) UPT Puskesmas Ngawen I: No. Rek. 002.111.000840	265,606,020.00	180,078,024.00
24) UPT Puskesmas Ngawen II: No. Rek. 002.111.000850	36,317,774.00	70,122,824.00
25) UPT Puskesmas Semanu I : No. Rek. 002.111.000142	479,081,069.00	434,515,932.00
26) UPT Puskesmas Semanu II: No. Rek. 002.111.000858	419,648,941.00	330,014,979.00
27) UPT Puskesmas Semin I : No. Rek. 002.111.000769	153,854,160.00	25,150,446.00
28) UPT Puskesmas Semin II: No. Rek. 002.111.000852	100,339,145.00	45,438,186.00
29) UPT Puskesmas Playen I : No. Rek. 002.111.000761	190,471,241.00	41,167,563.00
30) UPT Puskesmas Playen II: No. Rek. 002.111.000841	254,798,092.34	208,680,494.25
31) RSUD Saptosari	46,112,918.00	-
Jumlah	7,347,412,447.53	5,384,647,615.96
e. Setara Kas	0.00	0.00
1) Deposito	0.00	0.00
1) BPD DIY Cabang Wonosari	0.00	0.00
2) BSM Cab. Wonosari	0.00	0.00
JUMLAH	0.00	0.00
f. Kas Lainnya	6,948,219,635.00	5,435,049,331.00
- Saldo Kas BOS	6,948,219,635.00	5,435,049,331.00
JUMLAH (a + b + c+d+e+f) :	152,698,343,839.68	172,696,710,995.63

Rincian diatas menunjukkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp152698343839.68 dan Rp172696710995.63, berupa uang tunai, deposito dan rekening giro yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Daerah. Tahun 2020 saldo kas daerah terdapat penurunan sebesar Rp19998367155.95 atau 11.58005%. Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca per tanggal tersebut.

5.6 PENJELASAN POS-POS BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 sebesar Rp1775056482992.33 atau 85.42711% dari anggarannya sebesar Rp2077860821316.05 turun sebesar (Rp357165808596.54) atau (16.75087%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2132222291588.87 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
a. Belanja Daerah	1,817,893,500,551.05	1,656,001,120,567.33	91.09	1,861,011,745,353.87
b. Transfer Daerah	259,967,320,765.00	119,055,362,425.00	45.80	271,210,546,235.00
Jumlah Belanja dan Transfer	2,077,860,821,316.05	1,775,056,482,992.33	85.43	2,132,222,291,588.87



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Klasifikasi Belanja dan Transfer Menurut Organisasi Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut.

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DISDIKPORA	699,703,276,989.00	673,837,978,495.02	96.30
2	DINAS KESEHATAN	253,123,995,782.00	224,827,310,738.14	88.82
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	104,937,744,114.00	101,147,554,242.00	96.39
4	DPUPRKP	42,162,806,257.00	39,276,828,885.11	93.16
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7,715,553,897.00	7,214,684,780.00	93.51
6	DINAS SOSIAL	3,889,634,005.00	3,772,222,453.00	96.98
7	DINAS NAKERTRANS	4,017,294,344.00	3,860,573,383.00	96.10
8	DP3AKBPMD	11,981,555,973.00	11,021,314,650.00	91.99
9	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	13,273,693,204.00	12,047,701,560.21	90.76
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9,221,803,189.00	8,679,433,243.46	94.12
11	DINAS DUKCAPIL	8,118,348,089.00	7,471,021,596.00	92.03
12	DINAS PERHUBUNGAN	19,505,302,275.00	19,003,025,817.68	97.42
13	DINAS KOMINFO	17,968,653,689.03	17,294,925,990.00	96.25
14	DINAS KOPERASI, UKM	2,072,865,448.00	1,985,204,080.00	95.77
15	DPMPT	3,288,584,444.00	3,177,651,134.00	96.63
16	DINAS KEBUDAYAAN	83,466,489,417.00	81,999,942,862.00	98.24
17	DIN. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3,694,387,964.00	3,564,728,511.00	96.49
18	DIN. KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,881,247,575.00	4,641,724,681.00	95.09
19	DINAS PARIWISATA	9,061,802,520.00	8,657,730,116.88	95.54
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	19,291,983,326.00	18,809,984,108.00	97.50
21	DISPERINDAG	12,180,535,460.00	11,641,096,523.05	95.57
22	INSPEKTORAT DAERAH	7,112,718,805.00	6,586,988,548.00	92.61
23	BAPPEDA	4,851,416,172.00	4,746,074,273.00	97.83
24	PPKD (Termasuk Transfer ke Desa)	462,268,831,474.34	250,347,474,959.00	54.16
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	54,409,434,919.00	51,633,730,250.26	94.90
26	BKPPD	74,385,326,838.00	74,181,737,218.00	99.73
27	BPBD	49,034,759,436.00	40,581,561,905.53	82.76
28	KDH DAN WKDH	760,344,376.00	736,518,396.00	96.87
29	SEKRETARIAT DAERAH	17,518,843,880.00	16,261,674,059.79	92.82
30	DPRD	18,181,534,700.00	17,361,802,344.00	95.49
31	SEKRETARIAT DPRD	25,197,544,210.48	19,588,883,976.00	77.74
32	BADAN KESBANGPOL	3,227,667,116.00	2,751,297,976.00	85.24
33	KAPANEWON WONOSARI	1,488,893,549.00	1,226,848,932.00	82.40
34	KAPANEWON PALIYAN	1,306,523,261.00	1,259,096,968.00	96.37
35	KAPANEWON PANGGANG	1,576,934,670.00	1,551,409,363.20	98.38
36	KAPANEWON TEPUS	1,409,545,478.00	1,403,386,964.00	99.56
37	KAPANEWON RONGKOP	1,476,777,940.00	1,369,775,737.00	92.75
38	KAPANEWON SEMANU	1,750,130,342.00	1,644,011,508.00	93.94
39	KAPANEWON PONJONG	1,727,328,742.00	1,706,275,090.00	98.78
40	KAPANEWON KARANGMOJO	1,411,516,107.00	1,371,957,518.00	97.20
41	KAPANEWON PLAYEN	1,857,925,815.00	1,827,474,160.00	98.36
42	KAPANEWON NGLIPAR	1,376,483,176.20	1,258,963,491.00	91.46
43	KAPANEWON NGAWEN	1,683,162,036.00	1,661,674,564.00	98.72
44	KAPANEWON SEMIN	1,464,703,459.00	1,434,587,316.00	97.94
45	KAPANEWON PATUK	1,442,625,980.00	1,432,349,200.00	99.29
46	KAPANEWON SAPTOSARI	1,567,720,406.00	1,520,178,976.00	96.97
47	KAPANEWON GEDANGSARI	1,700,684,702.00	1,699,430,417.00	99.93
48	KAPANEWON GIRISUBO	1,362,546,483.00	1,294,582,277.00	95.01
49	KAPANEWON TANJUNGSARI	1,354,665,731.00	1,333,624,515.00	98.45
50	KAPANEWON PURWOSARI	1,396,673,551.00	1,350,474,241.00	96.69
JUMLAH		2,077,860,821,316.05	1,775,056,482,992.33	85.43



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

B. Belanja dan Transfer Pemerintah Menurut Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut.

No	FUNGSI	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	PELAYANAN UMUM	710,341,586,110.00	485,399,016,869.00	68.33
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,859,895,864.00	17,192,452,165.00	96.26
2	STATISTIK	7,810,000.00	6,400,000.00	81.95
3	PERSANDIAN	100,947,825.00	96,073,825.00	95.17
4	KEARSIPAN	204,610,400.00	189,745,400.00	92.73
5	INSPEKTORAT	7,112,718,805.00	6,586,988,548.00	92.61
6	PERENCANAAN	4,602,026,172.00	4,499,334,273.00	97.77
7	KEUANGAN	516,678,266,393.00	301,981,205,209.00	58.45
8	KEPEGAWAIAN	74,385,326,838.00	74,181,737,218.00	99.73
9	PENELITIAN & PENGEMBANGAN	249,390,000.00	246,740,000.00	98.94
10	SEKRETARIAT DAERAH	18,279,188,256.00	16,998,192,456.00	92.99
11	SEKRETARIAT DPRD	43,379,078,910.00	36,950,686,320.00	85.18
12	KECAMATAN	27,354,841,428.00	26,346,101,237.00	96.31
13	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	127,485,218.00	123,360,218.00	96.76
B.	PERTAHANAN	9,967,516,700.00	8,878,932,437.00	89.08
15	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	9,967,516,700.00	8,878,932,437.21	89.08
C.	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	59,977,980,449.00	50,547,544,662.00	84.28
16	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN	7,715,553,897.00	7,214,684,780.00	93.51
17	BENCANA	49,034,759,436.00	40,581,561,906.00	82.76
18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,227,667,116.00	2,751,297,976.00	85.24
D.	EKONOMI	65,799,921,577.00	63,660,705,932.00	96.75
19	TENAGA KERJA	3,830,806,144.00	3,675,024,283.00	95.93
20	PANGAN	629,869,000.00	593,771,900.00	94.27
21	PEMBERDAY. MASYARAKAT DAN D	562,108,705.00	541,446,205.00	96.32
22	PERHUBUNGAN	19,505,302,275.00	19,003,025,818.00	97.42
23	KOPERASI, USAHA KECIL DAN ME	2,072,865,448.00	1,985,204,080.00	95.77
24	PENANAMAN MODAL	3,288,584,444.00	3,177,651,134.00	96.63
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,881,247,575.00	4,641,724,681.00	95.09
26	PERTANIAN	18,662,114,326.00	18,216,212,208.00	97.61
27	PERDAGANGAN	11,951,942,460.00	11,415,007,023.00	95.51
28	PERINDUSTRIAN	228,593,000.00	226,089,500.00	98.90
29	TRANSMIGRASI	186,488,200.00	185,549,100.00	99.50
E.	LINGKUNGAN HIDUP	12,400,494,475.00	11,724,842,148.00	94.55
30	PERTANAHAN	3,178,691,286.00	3,045,408,905.00	95.81
31	LINGKUNGAN	9,221,803,189.00	8,679,433,243.00	94.12
F.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	42,162,806,257.00	39,276,828,885.00	93.16
31	PEKERJAAN UMUM	41,710,212,057.00	38,828,863,785.00	93.09
33	PERUMAHAN RAKYAT	452,594,200.00	447,965,100.00	98.98
G.	KESEHATAN	363,905,625,896.00	331,594,543,480.00	91.12
34	KESEHATAN	358,061,739,896.00	325,974,864,980.00	91.04
35	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,843,886,000.00	5,619,678,500.00	96.16
H.	PARIWISATA DAN BUDAYA	92,528,291,937.00	90,657,672,979.00	97.98
36	KEBUDAYAAN	83,466,489,417.00	81,999,942,862.00	98.24
37	PARIWISATA	9,061,802,520.00	8,657,730,117.00	95.54
I.	PENDIDIKAN	703,193,054,553.00	677,212,961,606.00	96.31
38	PENDIDIKAN	698,350,075,129.00	672,601,559,605.00	96.31
39	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,353,201,860.00	1,236,418,890.00	91.37
40	PERPUSTAKAAN	3,489,777,564.00	3,374,983,111.00	96.71



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	FUNGSI	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
J. PERLINDUNGAN SOSIAL		17,583,543,362.00	16,103,433,994.00	91.58
41	SOSIAL	3,889,634,005.00	3,772,222,453.00	96.98
42	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,575,561,268.00	4,860,189,945.00	87.17
43	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,118,348,089.00	7,471,021,596.00	92.03
JUMLAH		2,077,860,821,316.00	1,775,056,482,992.00	85.43



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. PENJELASAN SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	172,696,710,995.63	225,467,603,263.16

Realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2020 sebesar Rp172.696.710.995,63 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp225.467.603.263,16 atau turun sebesar Rp52.770.892.267,53

2. PENJELASAN PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	172,696,710,995.63	225,467,603,263.16

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2020 sebesar Rp172.696.710.995,63 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp225.467.603.263,16 turun sebesar Rp52.770.892.267,53

3. PENJELASAN SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	152,698,343,839.68	172,696,710,995.63

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp152.698.343.839,68 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Gunungkidul dari surplus/defisit anggaran ditambah dengan pembiayaan netto, dengan perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan	1,792,377,765,120.73		
Belanja Daerah	1,656,001,120,567.33		
Belanja Transfer	119,055,362,425.00		
Surplus/Defisit		17,321,282,128.40	(1)
Penerimaan Pembiayaan	172,696,710,995.63		
Pengeluaran Pembiayaan	37,319,649,284.35		
Pembiayaan Netto		135,377,061,711.28	(2)
SilPA		152,698,343,839.68	(1) + (2)

4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk tahun 2020 tidak ada koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan uraian sebagai berikut.

ASET LANCAR Rp253,902,013,132.44

Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp253.902.013.132,44 turun sebesar Rp9.389.850.519,53 atau 3,57% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp263.291.863.651,97 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Kas dan Setara Kas	151,188,204,947.85	173,987,672,939.63
2. Investasi Jangka Pendek	-	-
3. Piutang Daerah Netto	29,163,407,183.93	35,297,892,703.76
4. Beban Dibayar Dimuka	-	-
5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
7. Persediaan	73,550,401,000.66	54,006,298,008.58
Jumlah	253,902,013,132.44	263,291,863,651.97

1. Kas dan Setara Kas Rp151,188,204,947.85

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp151.188.204.947,85 turun sebesar Rp22.799.467.991,78 atau 13,1% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp173.987.672.939,63 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bendahara BOS di masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Kas di Kas Daerah	115,272,989,376.84	140,071,297,570.31
2 Kas di Bendahara Penerimaan	339,798,844.12	285,210,185.00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	559,130,035.00	6,520,840.00
4 Kas di BLUD	27,904,236,540.89	28,189,595,013.32
5 Kas Dana BOS	6,948,219,635.00	5,435,049,331.00
6 Kas Lainnya	163,830,516.00	-
7 Setara Kas	-	-
Jumlah	151,188,204,947.85	173,987,672,939.63

1.1 Kas di Kas Daerah Rp115,272,989,376.84

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.272.989.376,84 turun sebesar Rp24.798.308.193,47 atau 17,7% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp140.071.297.570,31. Saldo Kas di Kas Daerah merupakan dana milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di PT Bank Pembangunan Daerah DIY dengan Nomor Rekening 002.111.000038 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Kas Daerah (BUD)	115,272,989,376.84	140,071,297,570.31
Jumlah	115,272,989,376.84	140,071,297,570.31

1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp339,798,844.12

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp339.798.844,12 naik sebesar Rp54.588.659,12 atau 19,14% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp285.210.185,00. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan OPD yang sampai tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke rekening kas daerah, dengan rincian:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Dinas Pariwisata	99,888,929.62	131,955,640.00
2) BKAD	231,327,747.00	144,111,001.00
3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,915,450.00	-
4) Dinas Lingkungan Hidup	1,595,880.00	-
5) RSUD Wonosari	-	9,143,044.00
6) Dinas Kelautan dan Perikanan	687,837.50	-
7) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	945,000.00	-
8) Dinas Perhubungan	1,438,000.00	-
9) Puskesmas Ponjong	-	500.00
Jumlah	339,798,844.12	285,210,185.00

1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp559,130,035.00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp559.130.035,00 naik sebesar Rp552.609.195,00 atau 8474,51% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.520.840,00. Saldo kas ini merupakan saldo kas yang masih berada di tangan bendahara pengeluaran OPD yang belum disetor ke rekening kas daerah, dan terdiri dari:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Puskesmas Ngawen II	-	90.00
2) Puskesmas Nglipar I	-	450,000.00
3) Puskesmas Paliyan	-	340,750.00
4) Puskesmas Saptosari	180,000.00	-
5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	558,581,350.00	5,730,000.00
6) Dinas Kesehatan	368,685.00	-
Jumlah	559,130,035.00	6,520,840.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1.4 Kas di BLUD

Rp27,904,236,540.89

Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.904.236.540,89 turun sebesar Rp285.358.472,43 atau 1,01% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.189.595.013,32. Saldo kas ini merupakan saldo kas yang masih berada di tangan bendahara pengeluaran BLUD yang berada di Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas-puskesmas dan RSUD, dan terdiri dari:

			31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Dinas Kesehatan				
- UPT Puskesmas Nglipar I	No. Rekening :	002.111.000765	92,500,892.62	4,601,485.62
- UPT Puskesmas Nglipar II	No. Rekening :	002.111.000859	95,843,409.00	124,047,053.00
- UPT Puskesmas Rongkop	No. Rekening :	002.111.000768	371,219,707.00	235,977,826.00
- UPT Puskesmas Ponjong I	No. Rekening :	002.111.000767	241,914,154.00	82,469,213.00
- UPT Puskesmas Ponjong II	No. Rekening :	002.111.000857	115,332,655.00	43,541,526.00
- UPT Puskesmas Wonosari I	No. Rekening :	012.111.000766	427,729,239.49	368,199,423.49
- UPT Puskesmas Wonosari II	No. Rekening :	002.111.000853	260,200,382.00	246,673,570.00
- UPT Puskesmas Paliyan	No. Rekening :	012.111.000762	344,412,496.00	412,676,551.00
- UPT Puskesmas Panggang I	No. Rekening :	002.111.000856	135,446,592.00	123,159,986.00
- UPT Puskesmas Panggang II	No. Rekening :	012.111.000764	146,362,957.00	156,238,071.00
- UPT Puskesmas Tanjungsari	No. Rekening :	002.111.000844	258,506,207.00	87,843,979.00
- UPT Puskesmas Playen I	No. Rekening :	002.111.000761	190,471,241.00	41,167,563.00
- UPT Puskesmas Playen II	No. Rekening :	002.111.000841	254,798,092.34	208,680,494.25
- UPT Puskesmas Patuk I	No. Rekening :	012.111.000763	168,644,873.97	108,132,324.97
- UPT Puskesmas Patuk II	No. Rekening :	002.111.000846	155,039,807.89	126,664,115.89
- UPT Puskesmas Saptosari	No. Rekening :	002.111.000843	801,522,912.68	547,620,489.20
- UPT Puskesmas Saptosari	No. Rekening :	003.111.000167	46,112,918.00	-
- UPT Puskesmas Purwosari	No. Rekening :	002.111.000845	151,647,579.00	60,720,414.00
- UPT Puskesmas Semin I	No. Rekening :	002.111.000769	153,854,160.00	25,150,446.00
- UPT Puskesmas Semin II	No. Rekening :	002.111.000852	100,339,145.00	45,438,186.00
- UPT Puskesmas Semanu I	No. Rekening :	002.111.000142	478,901,069.00	434,515,932.00
- UPT Puskesmas Semanu II	No. Rekening :	002.111.000858	419,828,941.00	330,014,979.00
- UPT Puskesmas GiriSubo	No. Rekening :	002.111.000839	220,103,586.00	209,173,210.00
- UPT Puskesmas Tepus I	No. Rekening :	002.111.000849	205,967,765.00	173,853,718.00
- UPT Puskesmas Tepus II	No. Rekening :	002.111.000851	128,036,844.40	93,397,722.40
- UPT Puskesmas Gedangsari I	No. Rekening :	002.111.000847	224,338,607.00	67,933,108.00
- UPT Puskesmas Gedangsari II	No. Rekening :	002.111.000842	193,288,002.00	153,143,050.00
- UPT Puskesmas Ngawen I	No. Rekening :	002.111.000840	265,606,020.00	180,078,024.00
- UPT Puskesmas Ngawen II	No. Rekening :	002.111.000850	36,317,774.00	70,122,824.00
- UPT Puskesmas Karangmojo I	No. Rekening :	002.111.000848	515,280,609.14	539,417,332.14
- UPT Puskesmas Karangmojo II	No. Rekening :	002.111.000855	147,843,809.00	83,994,999.00
Jumlah			7,347,412,447.53	5,384,647,615.96
- Salah catat STS dari Pusk. Ponjong oleh Bank BPD			-	500.00
2) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari				
a) Kas Bank BPD DIY Cab. Wonosari A/C : 002.111.000.679			6,853,917,602.36	7,414,492,557.36
b) Kas Bank BRI Cab. Wonosari A/C : 0153.01.001094.30.4			13,702,906,491.00	15,390,454,840.00
Jumlah			20,556,824,093.36	22,804,947,397.36
Jumlah Total			27,904,236,540.89	28,189,595,013.32

1.5 Kas Dana BOS

Rp6,948,219,635.00

Kas Dana BOS sebesar Rp6.948.219.635,00 merupakan saldo kas BOS yang berada di Rekening Bendahara Pengeluaran Sekolah yang merupakan sisa Dana BOS Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo tahun lalu	5,435,049,331.00
Penyesuaian saldo awal 2020	-
Pendapatan Tahun 2020	64,259,840,000.00
Belanja Tahun 2020	62,585,832,428.00
Pengembalian kas 2020	160,837,268.00
Bunga bank	-
Administrasi bank	-
Jumlah	6,948,219,635.00

1.5 Kas Lainnya

Rp163,830,516.00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp163.830.516,00 berupa donasi covid yang berasal dari masyarakat.

1.6 Setara Kas

Rp0.00

Saldo setara kas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

2. Investasi Jangka Pendek

Rp0.00

Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

3. Piutang Daerah Netto

Rp29,163,407,184

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dalam Bab XII tentang Kebijakan Akuntansi Piutang disebutkan bahwa piutang harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penggolongan piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran piutang tak tertagih
1	Lancar	0.5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Piutang Daerah Netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.163.407.183,93 turun sebesar Rp6.134.485.519,83 atau 17,38% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp35.297.892.703,76 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Piutang Daerah	36,264,230,557.83	45,638,605,887.90
2 Penyisihan Piutang Daerah	(7,100,823,373.90)	(10,340,713,184.14)
Piutang Daerah Netto	29,163,407,183.93	35,297,892,703.76

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Piutang Pajak	17,395,930,686.00	19,540,376,629.00
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(6,815,325,773.61)	(10,101,796,556.92)
Piutang Pajak Netto	10,580,604,912.39	9,438,580,072.08
2 Piutang Retribusi	824,156,434.00	439,859,376.00
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	(195,276,883.10)	(110,624,777.80)
Piutang Retribusi Netto	628,879,550.90	329,234,598.20
3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,207,331,734.83	16,874,166,149.90
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	(66,036,658.67)	(84,370,830.75)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	13,141,295,076.16	16,789,795,319.15
4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1,053,769,109.00	5,113,860,867.00
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	(5,268,845.55)	(25,569,304.34)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1,048,500,263.45	5,088,291,562.66
5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3,783,042,594.00	3,670,342,866.00
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>	(18,915,212.97)	(18,351,714.33)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3,764,127,381.03	3,651,991,151.67
Jumlah	29,163,407,183.93	35,297,892,703.76

3.1 Piutang Pajak Netto Rp10,580,604,912.39

Piutang pajak netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.580.604.912,39 naik sebesar Rp1.142.024.840,31 atau 12,1% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.438.580.072,08 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Piutang Pajak	17,395,930,686.00	19,540,376,629.00
2 Penyisihan Piutang Pajak	(6,815,325,773.61)	(10,101,796,556.92)
Piutang Pajak Netto	10,580,604,912.39	9,438,580,072.08

3.1.1 Piutang Pajak Rp17,395,930,686.00

Piutang pajak timbul akibat adanya Pendapatan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.395.930.686,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Pajak Hotel	70,000.00	423,465.00
2 Pajak Restoran	11,422,835.00	29,157,694.00
3 Pajak Hiburan	150,000.00	50,000.00
4 Pajak Reklame	41,693,718.00	40,971,966.00
5 Pajak Penerangan Jalan	-	-
6 Pajak Parkir	-	91,250.00
7 Pajak Air Bawah Tanah	4,540,540.00	8,988,227.00
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14,736,000.00	48,696,000.00
9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	17,323,317,593.00	19,411,998,027.00
	17,395,930,686.00	19,540,376,629.00

Mutasi Pajak Hotel selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	70,000.00	-	70,000.00	Lancar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2	2019	423,465.00	-	423,465.00	-	
Jumlah		423,465.00	70,000.00	423,465.00	70,000.00	

Mutasi Pajak Restoran selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	10,694,835.00	-	10,694,835.00	Lancar
2	2019	29,157,694.00	-	28,429,694.00	728,000.00	Kurang Lancar
Jumlah		29,157,694.00	10,694,835.00	28,429,694.00	11,422,835.00	

Mutasi Pajak Hiburan selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	150,000.00	-	150,000.00	Lancar
2	2019	50,000.00	-	50,000.00	-	
Jumlah		50,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	

Mutasi Pajak Reklame selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	27,302,627.00	-	27,302,627.00	Lancar
2	2019	28,855,750.00	-	26,580,875.00	2,274,875.00	Kurang Lancar
3	2018	12,116,216.00	-	-	12,116,216.00	Diragukan
Jumlah		40,971,966.00	27,302,627.00	26,580,875.00	41,693,718.00	

Mutasi Pajak Penerangan Jalan selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	-	-	-	
2	2019	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	-	-	

Mutasi Pajak Parkir selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	-	-	-	
2	2019	91,250.00	-	91,250.00	-	
Jumlah		91,250.00	-	-	-	

Mutasi Pajak Air Bawah Tanah selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	914,330.00	-	914,330.00	Lancar
2	2019	5,116,443.00	-	5,116,443.00	-	
3	2018	737,154.00	-	245,574.00	491,580.00	Diragukan
4	2017	2,999,030.00	-	-	2,999,030.00	Diragukan
5	2016	-	-	-	-	
6	2015	-	-	-	-	
7	2014	-	-	-	-	
8	2013	-	-	-	-	
9	2012	135,600.00	-	-	135,600.00	Macet
10	2011	-	-	-	-	
Jumlah		8,988,227.00	914,330.00	5,362,017.00	4,540,540.00	

Mutasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	2020	-	14,736,000.00	-	14,736,000.00	Lancar
2	2019	48,696,000.00	-	48,696,000.00	-	
Jumlah		48,696,000.00	14,736,000.00	48,696,000.00	14,736,000.00	

Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Koreksi	Saldo awal setelah koreksi	Mutasi 2020				Saldo akhir 2020 (Rp)
					Tambah (Rp)		Kurang (Rp)		
					Piutang tahun 2020	Pelunasan piutang yang sudah dihapus (Nov-Des)	Realisasi Piutang (Rp)	Penghapusan Piutang (Rp)	
1	2020	-		-	4,506,636,390.00		-	-	4,506,636,390.00
2	2019	3,971,122,521.00	3,261,165.00	3,974,383,686.00	-	-	838,269,244.00	-	3,136,114,442.00
3	2018	2,701,078,748.00	6,193,884.00	2,707,272,632.00	-	-	98,760,000.00	-	2,608,512,632.00
4	2017	2,195,472,040.00	(23,048,955.0000)	2,172,423,085.00	-	-	75,164,976.00	-	2,097,258,109.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5	2016	1,746,665,506.00	9,278,145.00	1,755,943,651.00	-	-	41,925,886.00	-	1,714,017,765.00
6	2015	1,920,754,641.00	511,008.00	1,921,265,649.00	-	-	51,990,819.00	-	1,869,274,830.00
7	2014	1,428,895,259.00	886,930.00	1,429,782,189.00	-	-	38,278,764.00	-	1,391,503,425.00
8	2013	1,370,746,028.00	58,648,605.00	1,429,394,633.00	-	6,001,335.00	26,607,486.00	1,408,788,482.00	-
9	2012	1,339,968,929.00	(114,665,246.00)	1,225,303,683.00	-	4,659,492.00	19,898,500.00	1,210,064,675.00	-
10	2011	1,265,123,029.00	15,888,655.00	1,281,011,684.00	-	2,516,120.00	17,498,631.00	1,266,029,173.00	-
11	2010	856,516,940.00	3,162,804.00	859,679,744.00	-	2,187,522.00	14,890,634.00	846,976,632.00	-
12	2009	615,654,386.00	80,477,062.00	696,131,448.00	-	2,144,297.00	11,489,741.00	686,786,004.00	-
Jumlah		19,411,998,027	40,594,057.00	19,452,592,084.00	4,506,636,390.00	17,508,766.00	1,234,774,681.00	5,418,644,966.00	17,323,317,593.00

Pada tahun 2020 terdapat penghapusan piutang pajak PBB sebesar Rp5.418.644.966,00 berdasarkan SK Bupati Gunungkidul No 476/KPTS/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020. Namun dari piutang yang telah dihapuskan tersebut terdapat pelunasan sebesar Rp17.508.766,00 pada bulan November dan Desember 2020. Koreksi saldo awal 2020 sebesar Rp40.594.057,00 disebabkan karena perbedaan saldo akhir 2019 audited dengan saldo akhir data piutang PBB P-2 riil berdasarkan aplikasi SISMIOP.

Selain piutang yang tercantum di neraca terdapat Piutang PBB P2 yang tidak tertagih dari tahun 1995-2008 senilai Rp7.672.506.031,00 dan terdapat pelunasan terhadap piutang tidak tertagih tersebut di tahun 2020 sebesar Rp91.653.721,00. Pelunasan kembali piutang yang tidak tertagih tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam pencatatan keuangan Pemda.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.1.2 Penyisihan Piutang Pajak

(Rp6,815,325,773.61)

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar (Rp6.815.325.773,61) , dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Penyisihan piutang - Pajak Hotel	350.00	2,117.33
2 Penyisihan piutang - Pajak Restoran	126,274.18	145,788.47
3 Penyisihan piutang - Pajak Hiburan	750.00	250.00
4 Penyisihan piutang - Pajak Reklame	6,422,108.64	1,355,900.35
5 Penyisihan piutang - Pajak Penerangan Jalan	-	-
6 Penyisihan piutang - Pajak Parkir	-	456.25
7 Penyisihan piutang - Pajak Air Bawah Tanah	1,885,476.65	1,734,412.61
8 Penyisihan piutang - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	73,680.00	243,480.00
9 Penyisihan piutang - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	6,806,817,134.15	10,098,314,151.91
	6,815,325,773.61	10,101,796,556.92

Berikut adalah daftar piutang dan penyisihan piutang pajak daerah berdasarkan penggolongan piutang per 31 Desember 2020.

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

No	Uraian	LANCAR (<1 tahun)	KURANG LANCAR (1-2 tahun)	DIRAGUKAN (>2-5 tahun)	MACET (>5 Tahun)	JUMLAH (Rp)
1.	Pajak Hotel	70,000.00	-	-	-	70,000.00
2.	Pajak Restoran	10,694,835.00	728,000.00	-	-	11,422,835.00
3.	Pajak Hiburan	150,000.00	-	-	-	150,000.00
4.	Pajak Reklame	27,302,627.00	2,274,875.00	12,116,216.00	-	41,693,718.00
5.	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
6.	Pajak Parkir	-	-	-	-	-
7.	Pajak Air Bawah Tanah	914,330.00	-	3,490,610.00	-	4,404,940.00
8.	Pajak Mineral bukan logam	14,736,000.00	-	-	-	14,736,000.00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4,506,636,390.00	3,136,114,442.00	6,419,788,506.00	3,260,778,255.00	17,323,317,593.00
	Jumlah	4,560,504,182.00	3,139,117,317.00	6,435,395,332.00	3,260,778,255.00	17,395,795,086.00

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

		LANCAR (<1 tahun) 0.5%	KURANG LANCAR (1-2 tahun) 10%	DIRAGUKAN (>2-5 tahun) 50%	MACET (>5 Tahun) 100%	JUMLAH (Rp)
1.	Pajak Hotel	350.00	-	-	-	350.00
2.	Pajak Restoran	53,474.18	72,800.00	-	-	126,274.18
3.	Pajak Hiburan	750.00	-	-	-	750.00
4.	Pajak Reklame	136,513.14	227,487.50	6,058,108.00	-	6,422,108.64
5.	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
6.	Pajak Parkir	-	-	-	-	-
7.	Pajak Air Bawah Tanah	4,571.65	-	1,745,305.00	135,600.00	1,885,476.65
8.	Pajak Mineral bukan logam	73,680.00	-	-	-	73,680.00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	22,533,181.95	313,611,444.20	3,209,894,253.00	3,260,778,255.00	6,806,817,134.15
	Jumlah	22,802,520.91	313,911,731.70	3,217,697,666.00	3,260,913,855.00	6,815,325,773.61

3.2 Piutang Retribusi Netto

Rp628,879,550.90

Piutang retribusi netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp628.879.550,90 naik sebesar Rp299.644.952,70 atau 91,01% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp329.234.598,20 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Piutang Retribusi	824,156,434.00	439,859,376.00
2 Penyisihan Piutang Retribusi	(195,276,883.10)	(110,624,777.80)
Piutang Retribusi Netto	628,879,550.90	329,234,598.20

3.2.1 Piutang Retribusi

Rp824,156,434.00

Piutang retribusi timbul akibat adanya Pendapatan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp824.156.434,00, dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	146,651,092.00	11,104,666.00
2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	437,390,000.00	301,421,360.00
3 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	240,115,342.00	127,333,350.00
	824,156,434.00	439,859,376.00

3.2.1.1 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Rp146,651,092.00

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan piutang retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mutasi Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi 2020		Saldo akhir 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2020	-	135,546,426.00	-	135,546,426.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2	2019	6,330,335.00	-	-	6,330,335.00
3	2018	4,774,331.00	-	-	4,774,331.00
Jumlah		11,104,666.00	135,546,426.00	-	146,651,092.00

*) Penambahan piutang 2020 terdiri dari :

1	PT Telkomsel/ belum setor	51 menara	133,055,841
2	PT XL Axiata/ belum setor	1 menara	2,490,585
			<u>135,546,426</u>

3.2.1.2 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp437,390,000.00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa penyewaan aset kepada pihak lain yaitu BPD DIY, BRI, tempat fotocopi, kantin, kios dan Gedung Serbaguna Siyono, kios depan RSUD dan sewa rumah dinas.

Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Koreksi (Rp)	Saldo setelah koreksi (Rp)	Mutasi		Saldo akhir 2020 (Rp)
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
A	Sewa Kios	80,354,500.00	(58,934,500.00)	21,420,000.00	73,350,000.00	33,550,000.00	61,220,000.00
B	Sewa Bangunan dan Lahan	199,370,860.00	(37,777,930.00)	161,592,930.00	265,080,000.00	159,582,930.00	267,090,000.00
C	Sewa Rumah Dinas	21,696,000.00	56,348,000.00	78,044,000.00	62,659,000.00	31,623,000.00	109,080,000.00
Jumlah		301,421,360.00	(40,364,430.00)	261,056,930.00	401,089,000.00	224,755,930.00	437,390,000.00

3.2.1.3 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Rp240,115,342.00

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan piutang retribusi perijinan tertentu yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Mutasi Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selama tahun 2020 sebagai berikut.

No	Tahun Pajak/Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Mutasi		Saldo akhir 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2020	-	137,039,100.00		137,039,100.00
2	2019	25,567,700.00	-	24,257,108.00	1,310,592.00
3	2018	1,223,600.00	-	-	1,223,600.00
4	2017	31,084,800.00	-	-	31,084,800.00
5	2016	35,050,450.00	-	-	35,050,450.00
6	2015	34,406,800.00	-	-	34,406,800.00
Jumlah		127,333,350.00	137,039,100.00	24,257,108.00	240,115,342.00

3.2.2 Penyisihan Piutang Retribusi

(Rp195,276,883.10)

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Kualitas Lancar : a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar : a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan : a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet : a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Saldo Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp195.276.883,10 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21,494,141.10	5,407,364.50
2. Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,186,950.00	1,507,106.80
3. Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	171,595,792.00	103,710,306.50
	195,276,883.10	110,624,777.80

Berikut adalah daftar retribusi dan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan penggolongan piutang per 31 Desember 2020.

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

No	Uraian	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH (Rp)
		(0-1 bulan)	(>1-3 bulan)	(>3-12 bulan)	(>12 bulan)	
1.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalai Menara Telekomunikasi	-	135,546,426.00	6,330,335.00	4,774,331.00	146,651,092.00
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	437,390,000.00	-	-	-	437,390,000.00
3.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	137,039,100.00	103,076,242.00	240,115,342.00
Jumlah		437,390,000.00	135,546,426.00	143,369,435.00	107,850,573.00	824,156,434.00

DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG

No	Uraian	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH (Rp)
		(0-1 bulan)	(>1-3 bulan)	(>3-12 bulan)	(>12 bulan)	
		0.5%	10%	50%	100%	
1.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalai Menara Telekomunikasi	-	13,554,642.60	3,165,167.50	4,774,331.00	21,494,141.10
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,186,950.00	-	-	-	2,186,950.00
3.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	68,519,550.00	103,076,242.00	171,595,792.00
Jumlah		2,186,950.00	13,554,642.60	71,684,717.50	107,850,573.00	195,276,883.10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		Rp13,141,295,076.16
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.141.295.076,16 turun sebesar -Rp3.648.500.242,99 atau -22% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.789.795.319,15 dengan rincian sebagai berikut.		
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,207,331,734.83	16,874,166,149.90
2 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(66,036,658.67)	(84,370,830.75)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	13,141,295,076.16	16,789,795,319.15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.3.1 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp13,207,331,734.83

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda pada Bank BPD DIY, PD BPR BDG, PDAM Tirta Handayani dan BUKP se Kabupaten Gunungkidul yang akan diterima pada tahun berikutnya dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Piutang ini secara keseluruhan akan diterima di tahun 2021.

Mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo awal 2019 (Rp) Audited	Koreksi (+) (Rp)	Mutasi		Saldo akhir 2020 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	BPD DIY	11,640,836,825.32	-	10,305,222,861.00	11,640,836,825.32	10,305,222,861.00
2	PD. BPR BDG	4,447,201,654.00	-	2,662,810,080.00	4,447,201,654.00	2,662,810,080.00
3	PDAM TIRTA HANDAYANI	777,642,985.16	-	230,097,327.35	777,642,985.16	230,097,327.35
4	BUKP	8,484,685.42	90,361.73	9,201,466.48	8,575,047.15	9,201,466.48
	Jumlah	16,874,166,149.90	90,361.73	13,207,331,734.83	16,874,256,511.63	13,207,331,734.83

Koreksi penambahan di tahun 2020 adalah karena adanya koreksi perhitungan bagian laba yang menjadi hak Pemda atas penyertaan modal pada BUKP.

3.3.2 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(Rp66,036,658.67)

Saldo penyisihan sebesar (Rp66.036.658,67) adalah saldo penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2020 kategori lancar dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. BPD DIY	51,526,114.31	58,204,184.13
2. PD. BPD BDG	13,314,050.40	22,236,008.27
3. PDAM TIRTA HANDAYANI	1,150,486.64	3,888,214.93
4. BUKP	46,007.33	42,423.43
	66,036,658.67	84,370,830.76

3.4 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto

Rp1,048,500,263.45

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.048.500.263,45 turun sebesar Rp4.039.791.299,22 atau 79% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.088.291.562,66 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1,053,769,109.00	5,113,860,867.00
2 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5,268,845.55)	(25,569,304.34)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	1,048,500,263.45	5,088,291,562.66

3.4.1 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Rp1,053,769,109.00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah adalah piutang BLUD yang dikelola oleh RSUD dan Dinas Kesehatan. Piutang BLUD adalah piutang atas klaim Jaminan Kesehatan Nasional yang belum dibayarkan sampai akhir pelaporan keuangan.

Mutasi Piutang BLUD selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No	Tahun Piutang/Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Mutasi		Saldo akhir 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Atas Klaim JKN RSUD	5,077,924,867.00	48,047,844,722.00	52,125,194,980.00	1,000,574,609.00
	- Klaim JKN (BPJS)	4,997,607,755.00	45,350,704,818.00	49,648,694,029.00	699,618,544.00
	- Klaim Jasa Raharja	29,119,974.00	1,156,950,816.00	1,181,138,369.00	4,932,421.00
	- Klaim Jampersal	44,585,371.00	1,484,007,582.00	1,252,224,865.00	276,368,088.00
	- Klaim Taspen	6,611,767.00	915,844.00	7,044,573.00	483,038.00
	- Klaim atas BPJS Ketenagakerjaan	-	55,265,662.00	36,093,144.00	19,172,518.00
2	Piutang Atas Klaim JKN DINKES	35,936,000.00	53,194,500.00	35,936,000.00	53,194,500.00
	- Piutang BLUD Puskesmas dan Dinkes	35,936,000.00	53,194,500.00	35,936,000.00	53,194,500.00
	Jumlah	5,113,860,867.00	48,101,039,222.00	52,161,130,980.00	1,053,769,109.00

3.4.2 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

(Rp5,268,845.55)

Saldo penyisihan sebesar (Rp5.268.845,55) adalah saldo penyisihan piutang BLUD per 31 Desember 2020 kategori lancar dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. RSUD	5,002,873.05	25,389,624.34
2. Dinas Kesehatan	265,972.50	179,680.00
	5,268,845.55	25,569,304.34

3.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto

Rp3,764,127,381.03

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.764.127.381,03 naik sebesar Rp112.136.229,36 atau 3,07% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.651.991.151,67 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3,783,042,594.00	3,670,342,866.00
2 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(18,915,212.97)	(18,351,714.33)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	3,764,127,381.03	3,651,991,151.67

3.5.1 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Rp3,783,042,594.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Piutang ini merupakan transfer bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah DIY yang pada saat akhir tahun 2020 belum terbayarkan, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P-AP) serta dikelola oleh SKPKD.

Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No	Tahun Piutang/Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Mutasi		Saldo akhir 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	PKB	666,911,942.00	1,908,083,901.00	666,911,942.00	1,908,083,901.00
2	BBNKB	1,331,713,274.00	555,324,978.00	1,331,713,274.00	555,324,978.00
3	PBBKB	1,652,559,419.00	1,309,725,743.00	1,652,559,419.00	1,309,725,743.00
4	P-AP	19,158,231.00	9,907,972.00	19,158,231.00	9,907,972.00
	Jumlah	3,670,342,866.00	3,783,042,594.00	3,670,342,866.00	3,783,042,594.00

3.5.2 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Rp18,915,212.97)
Saldo penyisihan sebesar (Rp18.915.212,97) adalah saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2020 kategori lancar dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. PKB	9,540,419.51	3,334,559.71
2. BBNKB	2,776,624.89	6,658,566.37
3. PBBKB	6,548,628.72	8,262,797.10
4. P-AP	49,539.86	95,791.16
	18,915,212.97	18,351,714.33

Selain dari Piutang yang telah diungkapkan di atas, terdapat juga saldo tagihan yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM.
Adapun secara rinci rincian temuan IRDA dan BPK dapat disajikan sebagai berikut.

Saldo Tagihan Yang Merupakan Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM					
No	Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Mutasi		Saldo akhir 2020
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
I	Temuan IRDA	11,565,880.00	271,539,307.48	-	283,105,187.48
1	DISDIKPORA				
	Kekurangan volume pekerjaan fisik	1,818,280.00	-	-	1,818,280.00
2	DINSOSNAKERTRANS				
	Kelebihan pembayaran honor	9,747,600.00	-	-	9,747,600.00
3	DPUPRP				
	Kelebihan pembayaran pekerjaan	-	31,120,154.13	-	31,120,154.13
4	DINAS PERHUBUNGAN				
	Kemahalan harga paket pekerjaan	-	12,248,500.00	-	12,248,500.00
5	BPBD				
	Kelebihan atas pembayaran fisik	-	228,170,653.35	-	228,170,653.35
II	Temuan BPK-RI	1,618,129,056.00	-	-	1,618,129,056.00
	Belanja DPRD dan Sek. DPRD sebesar Rp6.651.383.000,- tidak sesuai ketentuannya	662,768,400.00	-	-	662,768,400.00
	PPh 21 anggota DPRD belum dipungut dan disetor	64,175,656.00	-	-	64,175,656.00
	Anggaran & realisasi belanja DPRD dan Sek. DPRD sebesar Rp1.874.921.250,- tidak sesuai ketentuan	891,185,000.00	-	-	891,185,000.00
	JUMLAH	1,629,694,936.00	271,539,307.48	-	1,901,234,243.48

Disamping Piutang yang telah diungkapkan di atas dan saldo tagihan yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang tidak ditetapkan dengan SKTJM, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 juga mempunyai piutang yang sudah dihapuskan secara bersyarat dan dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp6.013,051.500,00 berdasarkan empat Keputusan Bupati Gunungkidul. Yaitu (1) Keputusan Bupati Gunungkidul No. 205/KPTS/2016 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang menyatakan terdapat penghapusan bersyarat terhadap piutang pajak reklame di BKAD sebesar Rp23.738.550,00, pajak mineral bukan logam di BKAD sebesar Rp12.485.900,00, dan piutang retribusi di Dishubkominfo sebesar Rp3.333.000,00. (2) Keputusan Bupati Gunungkidul No. 19/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018 tanggal 2 Januari 2018 yang menyatakan terdapat penghapusan bersyarat terhadap piutang pajak mineral bukan logam di BKAD sebesar Rp4.820.000,00. (3) Keputusan Bupati Gunungkidul No. 68/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018 tanggal 5 Maret 2018 yang menyatakan terdapat penghapusan bersyarat terhadap piutang retribusi parkir di Dishubkominfo sebesar Rp12.620.000,00. (4) Keputusan Bupati Gunungkidul No. 163/KPTS/2018 tentang Penghapusan Bersyarat Piutang Daerah TA 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan terdapat penghapusan bersyarat terhadap piutang pajak mineral bukan logam sebesar Rp14.813.000,00, pajak restoran sebesar Rp1.380.000,00, dan pajak reklame sebesar Rp12.506.500,00 di BKAD. Berdasarkan Keputusan tersebut juga dilakukan penghapusan piutang untuk piutang lain-lain PAD yang sah berupa penguatan modal industri kecil sebesar Rp15.684.150,00 di Disperindag, penguatan modal di UPPKS yang dikelola DP3AKBPMD sebesar Rp38.106.600,00, pengelolaan dana bergulir penggembukan sapi di Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp453.290.000,00, serta penghapusan piutang retribusi izin gangguan HO di Kapedal sebesar Rp19.137.600,00. Di tahun 2020 terdapat SK penghapusan No. 476/KPTS/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang penghapusan piutang PBB P2 tahun 2009-2013 di BKAD senilai Rp5.418.644.966,00. Dari piutang tersebut terdapat pelunasan sebesar Rp17.508.766,00. Meskipun telah dilakukan penghapusan bersyarat, piutang daerah ini akan tetap diusahakan penagihannya.

4. BEBAN DIBAYAR DIMUKA	Rp0.00
Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00	
5. BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	Rp0.00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00	
6. BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	Rp0.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00

7. PERSEDIAAN Rp73,550,401,000.66

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp73.550.401.000,66 naik sebesar Rp19.544.102.992,08 atau 26,57% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp54.006.298.008,58 dengan rincian sebagai berikut.

Daftar Mutasi Persediaan Tahun 2020

No	Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	297,855,769.00	31,519,201,577.00	31,350,390,306.00	466,667,040.00
2	Dinas Kesehatan	11,070,350,680.18	36,118,323,773.70	30,765,765,603.62	16,422,908,850.26
2.1	Dinas Kesehatan (BTT & Donasi Covid)	-	13,604,475,090.25	9,497,787,157.63	4,106,687,932.62
2.2	RSUD Saptosari (BTT & Donasi Covid)	-	3,183,853,297.38	1,140,500,751.57	2,043,352,545.81
3	RSUD Wonosari	3,113,229,798.38	22,717,316,286.15	22,854,785,109.47	2,975,760,975.06
3.1	RSUD Wonosari (BTT & Donasi Covid)	-	6,117,623,903.00	4,938,431,248.77	1,179,192,654.23
4	DPUPRKP	33,842,966,641.38	23,345,042,711.69	17,757,796,589.50	39,430,212,763.57
No	Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir 2020 (Rp)
5	Satpol PP	6,095,900.00	621,198,842.00	612,665,742.00	14,629,000.00
6	Dinas Sosial	41,344,310.00	266,736,721.00	286,580,531.00	21,500,500.00
6.1	Dinas Sosial (BTT & Donasi Covid)	-	289,357,488.00	289,357,488.00	-
7	DISNAKERTRANS	1,129,000.00	343,786,500.00	344,048,000.00	867,500.00
8	DP3AKBPMD	369,073,521.80	1,748,737,940.00	1,918,024,561.80	199,786,900.00
9	DISPERTARUNG	13,769,600.00	213,943,700.00	226,241,200.00	1,472,100.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	662,030,285.60	362,935,583.50	932,941,349.38	92,024,519.72
11	DISDUKCAPIL	1,905,896,967.00	2,115,215,300.00	1,564,875,929.50	2,456,236,337.50
12	Dinas Perhubungan	303,329,685.98	1,221,939,409.67	1,343,589,107.90	181,679,987.75
13	DISKOMINFO	11,234,500.00	1,334,474,821.00	545,320,221.00	800,389,100.00
14	DISKOP DAN UKM	13,349,600.00	61,447,634.95	61,270,834.95	13,526,400.00
15	DPMPT	35,571,515.00	137,737,200.00	163,818,340.00	9,490,375.00
16	Dinas Kebudayaan	1,318,000.00	1,911,994,400.00	1,852,807,900.00	60,504,500.00
17	DPK	2,079,600.00	114,218,000.00	86,303,700.00	29,993,900.00
18	DKP	142,196,500.00	483,860,880.00	430,748,880.00	195,308,500.00
19	Dinas Pariwisata	1,057,039,727.16	1,199,802,152.10	837,163,432.07	1,419,678,447.19
20	DPP	356,583,561.00	3,447,799,698.00	3,146,857,273.00	657,525,986.00
21	DISPERINDAG	238,452,552.74	804,681,769.00	879,838,338.14	163,295,983.60
22	Inspektorat Daerah	14,645,450.00	146,867,000.00	153,327,950.00	8,184,500.00
23	BAPPEDA	2,005,000.00	180,957,900.00	182,594,900.00	368,000.00
24	BKAD	389,467,795.36	517,672,014.00	602,663,899.36	304,475,910.00
25	BKPPD	2,873,000.00	70,246,750.00	71,136,750.00	1,983,000.00
26	BPBD	89,711,348.00	896,344,000.00	890,764,648.00	95,290,700.00
26.1	BPBD (BTT & Donasi Covid)	-	2,762,197,163.00	2,584,019,173.00	178,177,990.00
27	Sekretariat Daerah	10,731,800.00	810,349,195.00	812,376,465.00	8,704,530.00
28	Sekretariat DPRD	3,060,900.00	544,800,400.00	545,508,450.00	2,352,850.00
29	Badan Kesbangpol	1,434,000.00	141,218,750.00	142,377,250.00	275,500.00
30	Kapanewon Wonosari	283,000.00	172,598,462.50	172,712,462.50	169,000.00
31	Kapanewon Paliyan	94,000.00	77,499,782.50	77,507,782.50	86,000.00
32	Kapanewon Panggang	250,500.00	346,051,954.70	346,121,954.70	180,500.00
33	Kapanewon Tepus	192,500.00	82,982,647.50	82,847,147.50	328,000.00
34	Kapanewon Rongkop	944,800.00	108,294,872.50	108,065,672.50	1,174,000.00
35	Kapanewon Semanu	139,200.00	100,910,992.50	100,865,592.50	184,600.00
36	Kapanewon Ponjong	443,500.00	253,169,702.50	253,170,202.50	443,000.00
37	Kapanewon Karangmojo	262,000.00	155,511,442.50	155,453,442.50	320,000.00
38	Kapanewon Playen	803,000.00	326,145,792.50	325,853,792.50	1,095,000.00
39	Kapanewon Nglipar	359,000.00	99,069,352.50	98,413,352.50	1,015,000.00
40	Kapanewon Ngawen	24,500.00	289,631,877.50	289,631,377.50	25,000.00
41	Kapanewon Semin	1,045,000.00	140,651,947.50	140,960,947.50	736,000.00
42	Kapanewon Patuk	447,000.00	131,515,222.50	131,689,222.50	273,000.00
43	Kapanewon Saptosari	285,000.00	82,253,142.50	82,338,142.50	200,000.00
44	Kapanewon Gedangsari	165,000.00	122,941,342.50	122,988,592.50	117,750.00
45	Kapanewon Girisubo	933,500.00	119,300,872.50	119,375,500.15	858,872.35
46	Kapanewon Tanjungsari	635,500.00	72,702,792.50	72,798,792.50	539,500.00
47	Kapanewon Purwosari	164,000.00	79,170,927.50	79,184,927.50	150,000.00
	Jumlah	54,006,298,008.58	162,116,760,977.59	142,572,657,985.51	73,550,401,000.66

Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:

Rekapitulasi Persediaan per Jenis Barang Tahun 2020



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir 2020 (Rp)
1.	BARANG PAKAI HABIS	54,006,298,008.58	162,116,760,977.59	142,572,657,985.51	73,550,401,000.66
1.1	BAHAN	2,757,148,226.03	9,491,675,872.31	8,987,072,056.47	3,261,752,041.87
1.1.1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-
1.1.2	Bahan Kimia	2,577,072,275.03	6,969,338,119.31	6,505,010,453.47	3,041,399,940.87
1.1.3	Bahan Peledak	-	-	-	-
1.1.4	Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-
1.1.5	Bahan Baku	-	-	-	-
1.1.6	Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-
1.1.6	Barang Dalam Proses	-	-	-	-
1.1.6	Bahan/Bibit Tanaman	4,850,000.00	81,850,000.00	86,700,000.00	-
1.1.6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2,481,200.00	42,496,450.00	43,096,050.00	1,881,600.00
1.1.6	Isi Tabung Gas Oksigen	4,112,000.00	144,204,750.00	141,338,750.00	6,978,000.00
1.1.6	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	162,906,751.00	65,865,500.00	49,167,000.00	179,605,251.00
1.1.6	Bahan Lainnya	5,726,000.00	2,187,921,053.00	2,161,759,803.00	31,887,250.00
1.2	SUKU CADANG	1,414,168,210.00	1,163,199,830.20	2,006,704,090.20	570,663,950.00
1.2.1	Suku Cadang Alat Besar	1,030,008,400.00	174,872,000.00	660,397,950.00	544,482,450.00
1.2.2	Suku Cadang Alat Pertanian	720,000.00	35,065,878.00	35,785,878.00	-
1.2.3	Bantuan Sosial Barang individu/ keluarga/masyarakat	383,439,810.00	953,261,952.20	1,310,520,262.20	26,181,500.00
1.3	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	5,616,272,435.76	37,473,827,287.68	33,453,595,344.99	9,636,504,378.45
1.3.1	Alat Tulis Kantor	3,345,759,569.10	11,013,214,302.55	10,629,611,969.76	3,729,361,901.89
1.3.2	Kertas Dan Kover	262,494,425.36	4,289,645,428.50	4,151,273,538.86	400,866,315.00
1.3.3	Bahan Cetak	-	-	-	-
1.3.4	Benda Pos	13,629,000.00	442,071,000.00	442,448,000.00	13,252,000.00
1.3.5	Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-
1.3.6	Bahan Komputer	1,359,506,523.00	2,703,744,877.00	2,389,997,150.00	1,673,254,250.00
No.	Uraian	Saldo akhir 2019 (Rp) Audited	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir 2020 (Rp)
1.3.7	Perabot Kantor	365,823,993.95	12,606,154,449.63	10,332,107,797.33	2,639,870,646.25
1.3.8	Alat Listrik	199,455,352.00	3,776,598,792.00	2,927,807,314.01	1,048,246,829.99
1.3.9	Perlengkapan Dinas	36,883,632.00	1,603,974,095.00	1,594,957,727.00	45,900,000.00
1.3.10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-
1.3.11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	-	-
1.3.12	Suvenir/Cinder Mata	-	441,965,800.00	439,593,450.00	2,372,350.00
1.3.13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32,719,940.35	596,458,543.00	545,798,398.03	83,380,085.32
1.4	OBAT- OBATAN	9,276,675,350.36	64,361,885,592.31	53,866,000,219.88	19,772,560,722.79
1.4.1	Obat	9,276,675,350.36	64,361,885,592.31	53,866,000,219.88	19,772,560,722.79
1.5	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	33,097,824,641.38	46,007,176,544.09	40,230,329,811.90	38,874,671,373.57
1.5.1	Dijual/Diiseraahkan Kepada Masyarakat	33,097,824,641.38	46,007,176,544.09	40,230,329,811.90	38,874,671,373.57
1.6	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-
1.6.1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-J	-	-	-	-
1.6.2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-J	-	-	-	-
1.7	NATURA DAN PAKAN	1,844,209,145.05	3,618,995,851.00	4,028,956,462.07	1,434,248,533.98
1.7.1	Natura	1,844,209,145.05	3,502,711,851.00	3,971,642,962.07	1,375,278,033.98
1.7.2	Pakan	-	116,284,000.00	57,313,500.00	58,970,500.00
1.7.3	Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-	-
1.8	PERSEDIAAN PENELITIAN	-	-	-	-
1.8.1	Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	-
1.8.2	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-	-
1.8.3	Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-	-
1.8.4	Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-	-
1.9	PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-	-	-
1.9.1	Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-
1.9.2	Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-
2	BARANG TAK PAKAI HABIS	-	-	-	-
2.1	KOMPONEN	-	-	-	-
2.1.1	Komponen Jembatan Baja	-	-	-	-
2.1.2	Komponen Jembatan Pratekan	-	-	-	-
2.1.3	Komponen Peralatan	-	-	-	-
2.1.4	Komponen Rambu-Rambu	-	-	-	-
2.1.5	Attchment	-	-	-	-
2.1.6	Komponen Lainnya	-	-	-	-
2.2	PIPA	-	-	-	-
2.2.1	Pipa Air Besi Tuang	-	-	-	-
2.2.2	Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-	-
2.2.3	Pipa Baja	-	-	-	-
2.2.4	Pipa Beton Pratekan	-	-	-	-
2.2.5	Pipa Fiber Glass	-	-	-	-
2.2.6	Pipa Plastik PVC	-	-	-	-
2.2.7	Pipa Lainnya	-	-	-	-
3	BARANG BEKAS DIPAKAI	-	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.1	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKA	-	-	-	-
3.1.1	Komponen Bekas	-	-	-	-
3.1.2	Pipa Bekas	-	-	-	-
3.1.3	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-	-

8. INVESTASI JANGKA PANJANG **Rp304,620,148,429.08**
Investasi Jangka panjang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan penjelasan sebagai berikut.

8.1. INVESTASI NON PERMANEN **Rp0.00**
Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00

8.2. INVESTASI PERMANEN **Rp304,620,148,429.08**
8.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD **Rp304,620,148,429.08**

Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan/atau Peraturan Bupati Gunungkidul.

Metode ekuitas digunakan untuk mencatat pengakuan penyertaan modal Pemda pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul dan PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG). Sedangkan metode biaya masih digunakan untuk menilai investasi atas penyertaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Bank BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), karena prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah relatif kecil. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Nama BUMD	Jumlah Modal yang disertakan sampai dengan awal tahun 2020 (Rp)	Koreksi (+)(-) ekuitas	Penyertaan Modal 2020 (Rp)	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun 2020 (Rp)
BPD DIY	91,300,000,000.00	-	25,000,000,000.00	116,300,000,000.00
PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul	112,586,093,933.00	2,292,895,549.23	7,339,649,284.00	122,218,638,766.23
PDAM TIRTA HANDAYANI	58,825,661,083.34	(5,791,227,715.49)	13,057,733,000.00	66,092,166,367.85
BUKP se-Kabupaten Gunungkidul	9,343,295.00	-	-	9,343,295.00
Jumlah	262,721,098,311.34	(3,498,332,166.26)	45,397,382,284.00	304,620,148,429.08

Koreksi penambahan dan pengurangan ekuitas adalah perubahan ekuitas BUMD selama tahun berjalan. Melalui Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan bentuk badan hukum dari PD BPR Bank Daerah GK menjadi PT BPR Bank Daerah GK (Perseroda), per Agustus 2020 PD BPR BDG berubah menjadi PT BPR BDG GK dengan komposisi kepemilikan modal Pemda paling sedikit 99,99% dan Koperasi Pegawai BDG Sejahtera paling banyak 0,01%.

Penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp45.377.382.284,00 terdiri dari modal dalam bentuk uang sebesar Rp.37.319.649.284,35 dan dalam bentuk hibah barang sebesar Rp8.057.733.000,00.

8.2.1. Investasi Permanen Lainnya **Rp0.00**
Investasi Permanen Lainnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

9. ASET TETAP **Rp 2,476,028,497,588.77**

Jumlah di bawah ini merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2020 dengan rincian saldo untuk setiap jenis aset tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 :

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	651,748,142,052.00	633,523,669,052.00
Peralatan dan Mesin	578,367,665,238.46	500,275,520,488.19
Gedung dan Bangunan	1,077,203,399,495.33	1,017,600,966,763.75
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,250,493,150,442.39	1,189,455,918,454.63
Aset Tetap Lainnya	74,336,963,706.90	48,008,889,388.14
Konstruksi Dalam Pengerjaan	136,005,637,084.74	55,026,013,591.97
Akumulasi Penyusutan	(1,292,126,460,431.05)	(1,109,434,009,100.66)
Jumlah Aset Tetap	2,476,028,497,588.77	2,334,456,968,638.02

Nilai aset tetap disajikan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	300,000
2.2	Alat-alat Angkutan	300,000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	150,000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	150,000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	150,000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300,000
2.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	300,000
2.8	Alat-alat Laboratorium	300,000
2.9	Alat Persenjataan	300,000
2.10	Komputer	150,000
2.11	Alat Eksplorasi	1,000,000
2.12	Alat Pengeboran	1,000,000
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1,000,000
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1,000,000
2.15	Alat Keselamatan Kerja	1,000,000
2.16	Alat Peraga	1,000,000
2.17	Peralatan Proses/Produksi	1,000,000
2.18	Rambu-rambu	5,000,000
2.19	Peralatan Olahraga	100,000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	5,000,000
3.2	Bangunan Monumen	5,000,000
3.3	Bangunan Menara	5,000,000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5,000,000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	50,000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	100,000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1
5.4	Biota Perairan	1
5.5	Tanaman	1
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	1
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Masa manfaat untuk setiap unit aset tetap berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut.

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	10
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat SAR	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>21% s.d 40%	2
		>51%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Eletronika	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1

Senjata Sinar	Overhaul	>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Komputer Unit	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Produksi	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat SAR	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6

Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/ Produksi	Overhaul	>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 60%	5
		>60%	10
Jembatan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	3
		>10%	5
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	<i>Renovasi</i>	>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air Kotor	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Air Kotor	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pertahanan	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Gas	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pengaman	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	1
		>45%	3
Instalasi Lain	<i>Renovasi</i>	>30% s.d 45%	1
		>45%	3
Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	10
URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	5
		>45%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Alat Musik	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2

Saldo aset tetap tahun 2019 Audited sebesar Rp3.443.890.977.738,68 kemudian pada tahun 2020 terdapat penyesuaian saldo awal aset tetap berupa reklasifikasi sehingga terdapat penambahan dari hasil penyesuaian sebesar Rp10.348.980.943,59 dan pengurangan dari hasil penyesuaian sebesar Rp10.348.980.943,59 sehingga saldo awal aset tetap 2020 setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp3.443.890.977.738,68.

Daftar Mutasi Hasil Penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap 2020 berdasarkan Klasifikasi

Aset Tetap	Saldo Audited 2019 (Rp)	Mutasi Tambah Hasil Penyesuaian 2020 (Rp)	Mutasi Kurang Hasil Penyesuaian 2020 (Rp)	Saldo Awal Hasil Penyesuaian 2020 (Rp)
Tanah	633,523,669,052.00	0.00	0.00	633,523,669,052.00
Peralatan dan Mesin	500,275,520,488.19	9,880,095,311.59	0.00	510,155,615,799.78
Gedung dan Bangunan	1,017,600,966,763.75		5,302,395,319.99	1,012,298,571,443.76
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,189,455,918,454.63	468,885,632.00	0.00	1,189,924,804,086.63
Aset Tetap Lainnya	48,008,889,388.14	0.00	5,046,585,623.60	42,962,303,764.54
Konstruksi Dalam Pengerjaan	55,026,013,591.97	0.00	0.00	55,026,013,591.97
Jumlah	3,443,890,977,738.68	10,348,980,943.59	10,348,980,943.59	3,443,890,977,738.68

Penyesuaian atas saldo audited 2019 tersebut terdapat pada 10 OPD dikarenakan adanya perubahan mapping kode barang dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri No. 108 Tahun 2016 sehingga terjadi reklasifikasi antar kelompok rekening aset tetap, berikut ini daftar OPD yang terdampak perubahan mapping tersebut.

Daftar Penyesuaian Saldo Awal Peralatan Dan Mesin berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Saldo Audited 2019 (Rp)	Penyesuaian Mapping (Saldo Audited - Saldo Awal) (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	177,983,710,765.30	(4,944,678,623.60)	182,928,389,388.90
2	DINAS KESEHATAN	82,296,307,828.92	(17,140,000.00)	82,313,447,828.92
3	DPUPRKP	16,307,112,690.26	-	16,307,112,690.26
4	SATPOL PP	2,948,878,996.00	(10,175,000.00)	2,959,053,996.00
5	DINAS PERHUBUNGAN	10,572,515,992.11	(3,436,058,146.00)	14,008,574,138.11
6	DPMPT	2,090,627,221.00	(55,637,000.00)	2,146,264,221.00
7	DINAS PARIWISATA	5,074,290,750.06	(1,402,797,541.99)	6,477,088,292.05
8	DISPERINDAG	6,245,758,965.61	-	6,245,758,965.61
9	BKPPD	3,105,484,927.00	(12,474,000.00)	3,117,958,927.00
10	KAPANEWON PANGGANG	683,398,073.00	(1,135,000.00)	684,533,073.00
TOTAL		307,308,086,209.26	(9,880,095,311.59)	317,188,181,520.85

Daftar Penyesuaian Saldo Awal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Saldo Audited 2019 (Rp)	Penyesuaian Mapping (Saldo Audited - Saldo Awal) (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	497,875,403,664.92	-	497,875,403,664.92
2	DINAS KESEHATAN	89,158,105,398.99	24,858,000.00	89,133,247,398.99
3	DPUPRKP	49,404,150,355.09	331,349,000.00	49,072,801,355.09
4	SATPOL PP	-	-	-
5	DINAS PERHUBUNGAN	29,149,409,535.04	3,430,712,146.00	25,718,697,389.04
6	DPMPT	5,066,882,750.00	-	5,066,882,750.00
7	DINAS PARIWISATA	26,049,227,648.85	1,402,797,541.99	24,646,430,106.86
8	DISPERINDAG	85,817,245,929.63	112,678,632.00	85,704,567,297.63
9	BKPPD	9,527,171,742.65	-	9,527,171,742.65
10	KAPANEWON PANGGANG	880,230,400.00	-	880,230,400.00
TOTAL		792,927,827,425.17	5,302,395,319.99	787,625,432,105.18

Daftar Penyesuaian Saldo Awal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Saldo Audited 2019 (Rp)	Penyesuaian Mapping (Saldo Audited - Saldo Awal) (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	22,948,639,928.61	-	22,948,639,928.61
2	DINAS KESEHATAN	2,441,727,878.80	(24,858,000.00)	2,466,585,878.80
3	DPUPRKP	1,078,359,692,067.92	(331,349,000.00)	1,078,691,041,067.92
4	SATPOL PP	-	-	-
5	DINAS PERHUBUNGAN	33,298,353,956.94	-	33,298,353,956.94



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6	DPMPT	200,000.00	-	200,000.00
7	DINAS PARIWISATA	22,353,928,277.15	-	22,353,928,277.15
No	Nama OPD	Saldo Audited 2019 (Rp)	Penyesuaian Mapping (Saldo Audited - Saldo Awal) (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian 2020 (Rp)
9	BKPPD	12,215,000.00	-	12,215,000.00
10	KAPANEWON PANGGANG	16,970,000.00	-	16,970,000.00
TOTAL		1,162,042,997,579.13	(468,885,632.00)	1,162,511,883,211.13

Daftar Penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD

No	Nama OPD	Saldo Audited 2019 (Rp)	Penyesuaian Mapping (Saldo Audited - Saldo Awal) (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	28,565,702,332.04	4,944,678,623.60	23,621,023,708.44
2	DINAS KESEHATAN	3,835,524,519.94	17,140,000.00	3,818,384,519.94
3	DPUPRKP	5,962,699,294.00	-	5,962,699,294.00
4	SATPOL PP	70,529,350.00	10,175,000.00	60,354,350.00
5	DINAS PERHUBUNGAN	26,555,700.00	5,346,000.00	21,209,700.00
6	DPMPT	57,742,700.00	55,637,000.00	2,105,700.00
7	DINAS PARIWISATA	2,050,926,600.00	-	2,050,926,600.00
8	DISPERINDAG	9,517,200.00	-	9,517,200.00
9	BKPPD	32,165,800.00	12,474,000.00	19,691,800.00
10	KAPANEWON PANGGANG	1,135,000.00	1,135,000.00	-
TOTAL		40,612,498,495.98	5,046,585,623.60	35,565,912,872.38

Saldo aset tetap setelah hasil penyesuaian sebesar Rp3.443.890.977.738,68 kemudian pada tahun 2020 terdapat penambahan Rp483.386.043.474,1 dan pengurangan sebesar Rp159.122.063.192,96 sehingga saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp3.768.154.958.019,82 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.292.126.460.431,05 dan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.476.028.497.588,77.

Daftar Mutasi Aset Tetap 2020 berdasarkan Klasifikasi

Aset Tetap	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
Tanah	633,523,669,052.00	18,303,473,000.00	79,000,000.00	651,748,142,052.00
Peralatan dan Mesin	510,155,615,799.78	130,346,263,426.21	62,134,213,987.53	578,367,665,238.46
Gedung dan Bangunan	1,012,298,571,443.76	76,351,690,333.14	11,446,862,281.57	1,077,203,399,495.33
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,189,924,804,086.63	89,638,749,678.70	29,070,403,322.94	1,250,493,150,442.39
Aset Tetap Lainnya	42,962,303,764.54	41,232,641,195.64	9,857,981,253.28	74,336,963,706.90
Konstruksi Dalam Pengerjaan	55,026,013,591.97	127,513,225,840.41	46,533,602,347.64	136,005,637,084.74
Sub Jumlah	3,443,890,977,738.68	483,386,043,474.10	159,122,063,192.96	3,768,154,958,019.82
Akumulasi Penyusutan	(1,109,434,009,100.66)			(1,292,126,460,431.05)
Jumlah	2,334,456,968,638.02			2,476,028,497,588.77

Daftar Mutasi Aset Tetap 2020 berdasarkan Klasifikasi Obyek

Aset Tetap	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
TANAH	633,523,669,052.00	18,303,473,000.00	79,000,000.00	651,748,142,052.00
Tanah	633,523,669,052.00	18,303,473,000.00	79,000,000.00	651,748,142,052.00
PERALATAN & MESIN	510,155,615,799.78	130,346,263,426.21	62,134,213,987.53	578,367,665,238.46
Alat Besar	16,416,503,910.00	1,743,683,417.76	1,030,661,854.00	17,129,525,473.76
Alat Angkutan	94,269,126,305.57	13,668,926,507.86	9,429,411,247.86	98,508,641,565.57
Alat Bengkel dan Alat Ukur	13,116,070,243.06	2,687,395,139.38	920,196,093.38	14,883,269,289.06
Alat Pertanian	3,967,406,216.47	623,027,967.68	634,467,514.00	3,955,966,670.15
Alat Kantor & Rumah Tangga	134,939,167,763.05	32,163,385,622.06	11,976,136,687.14	155,126,416,697.97
Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar	17,139,634,355.24	3,763,890,268.47	1,089,652,374.50	19,813,872,249.21
Alat Kedokteran & Kesehatan	71,411,613,872.07	43,537,593,494.51	29,264,306,647.00	85,684,900,719.58
Alat Laboratorium	34,654,147,474.13	14,185,425,830.54	6,127,677,736.96	42,711,895,567.71
Alat Persenjataan	269,292,250.00	63,680,114.92	0.00	332,972,364.92
Komputer	114,092,558,098.60	16,795,448,637.21	1,649,084,832.69	129,238,921,903.12
Alat Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Pengeboran	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Produksi, Pengolahan, dan	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Keselamatan Kerja	0.00	110,602,568.84	0.00	110,602,568.84
Alat Peraga	0.00	0.00	0.00	0.00
Peralatan Proses/Produksi	0.00	26,229,874.00	0.00	26,229,874.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rambu-Rambu	4,833,509,687.99	211,958,398.00	0.00	5,045,468,085.99
Peralatan Olahraga	5,046,585,623.60	765,015,584.98	12,619,000.00	5,798,982,208.58
Aset Tetap	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
Bangunan Gedung	954,579,480,103.92	72,903,336,501.87	10,015,197,580.17	1,017,467,619,025.62
Monumen	5,271,010,981.58	0.00	75,680,000.00	5,195,330,981.58
Bangunan Menara	0.00	0.00	0.00	0.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	52,448,080,358.26	3,448,353,831.27	1,355,984,701.40	54,540,449,488.13
JALAN, JARINGAN, & IRIGASI	1,189,924,804,086.63	89,638,749,678.70	29,070,403,322.94	1,250,493,150,442.39
Jalan dan Jembatan	969,373,459,655.68	55,519,769,925.86	15,782,355,967.49	1,009,110,873,614.05
Bangunan Air	140,476,407,978.56	12,562,804,635.09	3,406,234,372.45	149,632,978,241.20
Instalasi	31,959,242,580.80	6,822,727,174.75	979,229,007.00	37,802,740,748.55
Jaringan	48,115,693,871.59	14,733,447,943.00	8,902,583,976.00	53,946,557,838.59
ASET TETAP LAINNYA	42,962,303,764.54	41,232,641,195.64	9,857,981,253.28	74,336,963,706.90
Bahan Perpustakaan	14,017,938,816.95	1,381,979,397.69	2,900,000.00	15,397,018,214.64
Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	11,085,725,195.39	1,289,380,529.30	503,282.00	12,374,602,442.69
Hewan	192,312,500.00	0.00	0.00	192,312,500.00
Biota Perairan	0.00	0.00	0.00	0.00
Tanaman	1,117,327,557.50	7,776,000.01	0.00	1,125,103,557.51
Barang Koleksi Non Budaya	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Tetap Dalam Renovasi	16,548,999,694.70	38,553,505,268.64	9,854,577,971.28	45,247,926,992.06
KONS. DLM Pengerjaan	55,026,013,591.97	127,513,225,840.41	46,533,602,347.64	136,005,637,084.74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	55,026,013,591.97	127,513,225,840.41	46,533,602,347.64	136,005,637,084.74
Jumlah	3,443,890,977,738.68	483,386,043,474.10	159,122,063,192.96	3,768,154,958,019.82

Rekapitulasi atas rincian mutasi Aset Tetap selama Tahun 2020 berdasarkan OPD adalah sebagai berikut.

Daftar Mutasi Aset Tetap 2020 berdasarkan OPD

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	742,548,769,664.87	71,552,183,946.00	4,648,958,693.04	809,451,994,917.83
2	DINAS KESEHATAN	178,928,875,626.65	54,965,784,406.77	24,215,142,766.79	209,679,517,266.63
3	RSUD WONOSARI	125,393,257,090.88	30,322,611,756.88	16,422,017,350.88	139,293,851,496.88
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	13,965,877,659.27	13,965,877,659.27	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	4,854,232,610.00	4,854,232,610.00	-
6	DPUPRPK	1,442,647,951,150.69	85,276,557,688.75	15,026,166,762.22	1,512,898,342,077.22
7	SATPOL PP	3,019,408,346.00	296,190,600.00	19,538,000.00	3,296,060,946.00
8	DINAS SOSIAL	5,195,930,257.31	73,126,000.00	19,965,000.00	5,249,091,257.31
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	10,004,571,799.00	680,610,000.00	412,730,000.00	10,272,451,799.00
11	DP3AKBPMD	18,208,968,827.92	555,090,691.00	415,309,554.68	18,348,749,964.24
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	202,913,434,769.95	5,277,532,200.00	7,000,000.00	208,183,966,969.95
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32,466,023,365.83	2,965,705,413.30	78,650,500.00	35,353,078,279.13
14	DISDUKCAPIL	9,103,584,940.33	1,286,272,200.00	89,352,000.00	10,300,505,140.33
15	DINAS PERHUBUNGAN	73,256,835,184.09	3,642,513,438.00	-	76,899,348,622.09
16	DISKOMINFO	11,902,011,098.00	3,595,165,555.00	85,900,000.00	15,411,276,653.00
17	DISKOP UKM	6,407,172,703.70	76,414,000.00	5,000,000.00	6,478,586,703.70
18	DPMPPT	7,215,452,671.00	483,695,400.00	15,180,000.00	7,683,968,071.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	44,654,183,743.53	96,935,603,701.56	-	141,589,787,445.09
20	DPK	9,619,438,187.99	734,646,572.21	81,076,646.43	10,273,008,113.77
21	DKP	21,620,793,314.00	963,221,339.00	111,919,840.00	22,472,094,813.00
22	DINAS PARIWISATA	55,528,373,276.06	3,239,551,104.88	50,634,000.00	58,717,290,380.94
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	42,109,744,510.70	460,970,500.00	-	42,570,715,010.70
24	DISPERINDAG	103,844,520,064.95	11,544,378,148.25	8,223,844,751.09	107,165,053,462.11
25	INSPEKTORAT DAERAH	6,521,142,507.54	411,278,279.00	37,686,119.00	6,894,734,667.54
26	BAPPEDA	4,521,940,410.50	131,317,000.00	53,170,000.00	4,600,087,410.50
27	BKAD	33,838,824,253.26	6,453,759,380.68	7,681,625,733.99	32,610,957,899.95
28	BKPPD	12,702,164,029.65	307,412,350.00	24,462,350.00	12,985,114,029.65
29	BPBD	28,967,580,262.78	75,583,872,853.29	57,468,469,739.31	47,082,983,376.76
30	BPBD (BTT)	-	2,653,692,193.00	2,653,692,193.00	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	151,000,151,583.16	1,206,797,462.00	1,423,316,266.00	150,783,632,779.16
32	SEKRETARIAT DPRD	13,914,918,255.86	1,119,489,100.00	223,190,000.00	14,811,217,355.86
33	BAKESBANGPOL	2,953,461,411.89	9,408,000.00	-	2,962,869,411.89
34	KAPANEWON WONOSARI	5,581,997,315.00	81,993,080.24	6,925,000.00	5,657,065,395.24
35	KAPANEWON PALIYAN	1,752,021,842.61	77,344,080.28	39,600,000.00	1,789,765,922.89
36	KAPANEWON PANGGANG	1,581,733,473.00	40,689,080.28	145,000.00	1,622,277,553.28



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

37	KAPANEWON TEPUS	2,605,838,829.84	26,820,580.28	4,970,500.00	2,627,688,910.12
38	KAPANEWON RONGKOP	2,353,990,275.04	48,081,080.28	-	2,402,071,355.32
39	KAPANEWON SEMANU	2,441,138,508.33	101,281,080.28	33,650,000.00	2,508,769,588.61
40	KAPANEWON PONJONG	1,680,269,547.28	186,216,237.54	138,972,157.26	1,727,513,627.56
No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
42	KAPANEWON PLAYEN	1,441,170,087.00	101,146,080.28	201,264,000.00	1,341,052,167.28
43	KAPANEWON NGLIPAR	1,929,269,111.47	88,943,080.28	31,553,000.00	1,986,659,191.75
44	KAPANEWON NGAWEN	2,053,715,306.10	101,231,888.28	-	2,154,947,194.38
45	KAPANEWON SEMIN	3,400,672,750.92	104,105,080.28	-	3,504,777,831.20
46	KAPANEWON PATUK	2,925,263,360.00	77,104,880.28	14,000,000.00	2,988,368,240.28
47	KAPANEWON SAPTOSARI	2,880,064,587.53	94,089,580.28	-	2,974,154,167.81
48	KAPANEWON GEDANGSARI	1,559,424,015.00	201,874,080.28	95,680,000.00	1,665,618,095.28
49	KAPANEWON GIRISUBO	4,076,915,246.65	59,307,795.28	-	4,136,223,041.93
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	1,389,123,926.95	23,631,080.28	-	1,412,755,007.23
51	KAPANEWON PURWOSARI	1,776,800,213.89	43,784,080.28	-	1,820,584,294.17
Jumlah		3,443,890,977,738.68	483,386,043,474.10	159,122,063,192.96	3,768,154,958,019.82

Pada tahun 2020 terdapat belanja tidak terduga pada beberapa Perangkat Daerah yang menghasilkan aset tetap sehingga mempengaruhi nilai aset tetap per 31 Desember 2020 diantaranya pada OPD sebagai berikut.

Daftar Mutasi Aset Tetap 2020 OPD Pengampu BTT

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	178,928,875,626.65	54,965,784,406.77	24,215,142,766.79	209,679,517,266.63
	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	13,965,877,659.27	13,965,877,659.27	-
	TOTAL DINKES	178,928,875,626.65	68,931,662,066.04	38,181,020,426.06	209,679,517,266.63
2	RSUD WONOSARI	125,393,257,090.88	30,322,611,756.88	16,422,017,350.88	139,293,851,496.88
	RSUD WONOSARI (BTT)	-	4,854,232,610.00	4,854,232,610.00	-
	TOTAL RSUD WONOSARI	125,393,257,090.88	35,176,844,366.88	21,276,249,960.88	139,293,851,496.88
3	DINAS SOSIAL	5,195,930,257.31	73,126,000.00	19,965,000.00	5,249,091,257.31
	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
	TOTAL DINAS SOSIAL	5,195,930,257.31	73,126,000.00	19,965,000.00	5,249,091,257.31
4	BPBD	28,967,580,262.78	75,583,872,853.29	57,468,469,739.31	47,082,983,376.76
	BPBD (BTT)	-	2,653,692,193.00	2,653,692,193.00	-
	TOTAL BPBD	28,967,580,262.78	78,237,565,046.29	60,122,161,932.31	47,082,983,376.76

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 507/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Belanja Tak Terduga pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 bahwasanya penetapan status barang milik daerah hasil belanja tak terduga yang wajib dilakukan pengelolaannya oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku sehingga barang milik daerah dalam hal ini aset tetap pada OPD Pengampu BTT kemudian dimutasikan ke OPD (Reguler) selaku Pengguna Barang.

Pada tahun 2020 terdapat Penambahan Aset Tetap, diantaranya berasal dari:

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2020	Rp	276,789,253,272.80
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	64,269,540,469.52
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	29,315,770,740.00
- Koreksi pencatatan dan Lainnya	Rp	113,011,478,991.78

Koreksi Pencatatan dan Lainnya merupakan koreksi atas aset yang belum tercatat, koreksi barang, reklasifikasi dari aset lainnya serta peningkatan nilai dari Aset Tetap Renovasi..

Penambahan aset tetap yang berasal dari Hibah/Hadiah/Perolehan lain terdapat pada 26 OPD sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Disdikpora	680,884,780.00	Hibah dari pihak ketiga, Komite Sekolah, dan CSR
2	Dinas Kesehatan	700,000.00	Dari Fakultas Teknik UGM berupa Alat Rumah Tangga-Wastafel
3	RSUD Wonosari (BTT)	75,000,000.00	Hibah dari Rumah Salman sebesar Rp50.000.000,00 berupa alat kedokteran dan UI Depok sebesar Rp25.000.000,00 berupa alat kedokteran
4	DPUPRKP	12,103,469,060.00	Terdiri dari: 6,506,962,730.00 : Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil - SPAM IKK Gading (IPA) GK IKK AM 13P-1



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

			3,214,238,680.00 : Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil - Optimalisasi SPAM MBR Bribin GK MBR AM 13p-2(Kaligoro-R4)
			281,245,700.00 : Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil - SPAM TPI Pantai Drini, Ds. Banjarejo, Kc. Tanjungsari, GK KKP AM 13-1
			214,071,450.00 : Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil - Bantuan Teknis PDAM GK IKK Banpro AM 13-1
			1,886,950,500.00 : Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil - SPAM Terdampak Bencana Kawasan Semanu (Sistem Bribin)`
No	Uraian	Nilai	Keterangan
5	Dinas Perhubungan	1,934,859,600.00	Dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berupa instalasi pembangkit listrik
6	Dinas Kebudayaan	26,582,877,800.00	Hibah dari Pemerintah DIY berupa Tanah sebesar Rp13.238.093.300,00, Barang Bercorak Kesenian-Gamelan sebesar Rp345.684.000,00 serta Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp12.999.100.500,00
7	Dinas Pariwisata	917,150,000.00	Hibah dari Pemerintah DIY berupa Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp30.100.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp887.050.000,00
8	BPBD (BTT)	11,200,000.00	Hibah dari donasi dari kelompok masyarakat berupa alat rumah tangga sebesar Rp5.200.000,00 dan alat kesehatan umum Rp6.000.000,00
9	Kapanewon Wonosari	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
10	Kapanewon Paliyan	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
11	Kapanewon Panggang	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
12	Kapanewon Tepus	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
13	Kapanewon Rongkop	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
14	Kapanewon Semanu	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
15	Kapanewon Ponjong	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
16	Kapanewon Karangmojo	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
17	Kapanewon Playen	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
18	Kapanewon Nglipar	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
19	Kapanewon Ngawen	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
20	Kapanewon Semin	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
21	Kapanewon Patuk	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
22	Kapanewon Saptosari	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
23	Kapanewon Gedangsari	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
24	Kapanewon Girisubo	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
25	Kapanewon Tanjungsari	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
26	Kapanewon Purwosari	485,000.00	Hibah dari KPU berupa Alat Kedokteran - Thermogun
Total		42,314,871,240.00	

Berikut ini daftar Penambahan Aset Tetap berdasarkan Klasifikasi

Aset Tetap	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
Tanah	4,980,379,700.00	65,000,000.00	13,238,093,300.00	20,000,000.00
Peralatan dan Mesin	68,635,463,300.99	38,309,843,885.90	645,762,000.00	22,755,194,239.32
Gedung dan Bangunan	17,475,574,508.20	2,018,002,351.01	989,443,000.00	55,868,670,473.93
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23,748,009,909.98	17,679,025,330.19	14,084,487,660.00	34,127,226,778.53
Aset Tetap Lainnya	34,436,600,013.22	6,197,668,902.42	357,984,780.00	240,387,500.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	127,513,225,840.41	0.00	0.00	0.00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap	276,789,253,272.80	64,269,540,469.52	29,315,770,740.00	113,011,478,991.78
	483,386,043,474.10			

Penambahan Aset Tetap berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	62,595,116,642.02	6,697,736,201.88	680,884,780.00	1,578,446,322.10
2	DINAS KESEHATAN	15,885,892,180.71	27,784,594,695.67	700,000.00	11,294,597,530.39
3	RSUD WONOSARI	9,136,250,039.00	4,869,072,610.00	-	16,317,289,107.88
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	13,965,877,659.27	-	-	0.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

5	RSUD WONOSARI (BTT)	4,779,232,610.00	-	75,000,000.00	0.00
6	DPUPRKP	23,928,598,331.88	16,085,563,588.11	12,103,469,060.00	33,158,926,708.76
7	SATPOL PP	-	292,282,600.00	-	3,908,000.00
8	DINAS SOSIAL	-	53,161,000.00	-	19,965,000.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	0.00
No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
11	DP3AKBPM	500,145,691.00	2,500,000.00	-	52,445,000.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	5,269,748,200.00	784,000.00	-	7,000,000.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,116,054,180.46	1,787,450,732.84	-	62,200,500.00
14	DISDUKCAPIL	895,700,000.00	214,934,000.00	-	175,638,200.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,579,639,838.00	128,014,000.00	1,934,859,600.00	0.00
16	DISKOMINFO	3,057,525,835.00	537,639,720.00	-	0.00
17	DISKOP UKM	75,630,000.00	784,000.00	-	0.00
18	DPMPT	465,231,400.00	3,284,000.00	-	15,180,000.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	83,277,247,550.00	74,578,851.56	13,583,777,300.00	0.00
20	DPK	301,318,500.00	352,251,425.78	-	81,076,646.43
21	DKP	850,517,499.00	784,000.00	-	111,919,840.00
22	DINAS PARIWISATA	1,305,967,870.88	1,016,433,234.00	917,150,000.00	0.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	352,196,500.00	108,774,000.00	-	0.00
24	DISPERINDAG	1,367,984,420.05	687,661,014.00	-	9,488,732,714.20
25	INSPEKTORAT DAERAH	130,084,220.00	265,843,000.00	-	15,351,059.00
26	BAPPEDA	9,999,000.00	121,318,000.00	-	0.00
27	BKAD	3,924,314,331.00	1,179,818,554.68	-	1,349,626,495.00
28	BKPPD	-	282,950,000.00	-	24,462,350.00
29	BPBD	37,372,664,958.53	268,272,000.00	-	37,942,935,894.76
30	BPBD (BTT)	2,642,492,193.00	-	11,200,000.00	0.00
31	SEKRETARIAT DAERAH	262,661,000.00	642,779,496.00	-	301,356,966.00
32	SEKRETARIAT DPRD	788,523,800.00	330,965,300.00	-	0.00
33	BAKESBANGPOL	8,624,000.00	784,000.00	-	0.00
34	KAPANEWON WONOSARI	37,550,000.00	37,033,080.24	485,000.00	6,925,000.00
35	KAPANEWON PALIYAN	34,000,000.00	3,259,080.28	485,000.00	39,600,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	36,800,000.00	3,259,080.28	485,000.00	145,000.00
37	KAPANEWON TEPUS	18,106,000.00	3,259,080.28	485,000.00	4,970,500.00
38	KAPANEWON RONGKOP	27,450,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
39	KAPANEWON SEMANU	56,000,000.00	20,146,080.28	485,000.00	24,650,000.00
40	KAPANEWON PONJONG	43,500,000.00	3,259,080.28	485,000.00	138,972,157.26
41	KAPANEWON KARANGMOJO	58,500,000.00	3,259,080.28	485,000.00	241,195,000.00
42	KAPANEWON PLAYEN	80,515,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	53,646,000.00	3,259,080.28	485,000.00	31,553,000.00
44	KAPANEWON NGAWEN	80,600,808.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
45	KAPANEWON SEMIN	83,474,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
46	KAPANEWON PATUK	42,473,800.00	20,146,080.28	485,000.00	14,000,000.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	90,345,500.00	3,259,080.28	485,000.00	0.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	102,450,000.00	3,259,080.28	485,000.00	95,680,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	55,563,715.00	3,259,080.28	485,000.00	0.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	3,000,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	40,040,000.00	3,259,080.28	485,000.00	0.00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap		276,789,253,272.80	64,269,540,469.52	29,315,770,740.00	113,011,478,991.78
		483,386,043,474.10			

Sedangkan Pengurangan Aset Tetap pada tahun 2020, antara lain terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	16,801,794,437.66
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	64,269,540,469.52
- Koreksi pencatatan dan Penurunan Nilai	Rp	78,050,728,285.78

Mekanisme hibah aset tetap dan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat adalah melalui proses reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya, sedangkan penurunan nilai terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berikut ini daftar Pengurangan Aset Tetap berdasarkan Klasifikasi:

Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
Tanah	14,000,000.00	65,000,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin	2,394,091,871.31	38,309,843,885.90	21,430,278,230.32
Gedung dan Bangunan	4,320,144,939.60	2,018,002,351.01	5,108,714,990.96
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10,073,557,626.75	17,679,025,330.19	1,317,820,366.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	6,197,668,902.42	3,660,312,350.86
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	46,533,602,347.64
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap	16,801,794,437.66	64,269,540,469.52	78,050,728,285.78
		159,122,063,192.96	

Pengurangan Aset Tetap berdasarkan OPD, sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	180,806,000.00	2,993,283,600.94	1,474,869,092.10
2	DINAS KESEHATAN	0.00	12,920,545,236.40	11,294,597,530.39
3	RSUD WONOSARI	39,728,243.00	65,000,000.00	16,317,289,107.88
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	0.00	13,965,877,659.27	0.00
No	Uraian	Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
6	DPUPRKP	9,832,284,885.46	138,283,000.00	5,055,598,876.76
7	SATPOL PP	0.00	15,630,000.00	3,908,000.00
8	DINAS SOSIAL	0.00	0.00	19,965,000.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	0.00	0.00	0.00
10	DISNAKERTRANS	0.00	0.00	412,730,000.00
11	DP3AKBPM	0.00	362,864,554.68	52,445,000.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	0.00	0.00	7,000,000.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0.00	16,450,000.00	62,200,500.00
14	DISDUKCAPIL	0.00	14,993,000.00	74,359,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	0.00	0.00	0.00
16	DISKOMINFO	0.00	85,900,000.00	0.00
17	DISKOP UKM	0.00	5,000,000.00	0.00
18	DPMP	0.00	0.00	15,180,000.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	0.00	0.00	0.00
20	DPK	0.00	0.00	81,076,646.43
21	DKP	0.00	0.00	111,919,840.00
22	DINAS PARIWISATA	0.00	16,450,000.00	34,184,000.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	0.00	0.00	0.00
24	DISPERINDAG	4,179,347,680.89	1,228,514,800.00	2,815,982,270.20
25	INSPEKTORAT DAERAH	0.00	22,335,060.00	15,351,059.00
26	BAPPEDA	0.00	53,170,000.00	0.00
27	BKAD	1,993,187,128.31	4,338,812,110.68	1,349,626,495.00
28	BKPPD	0.00	0.00	24,462,350.00
29	BPBD	0.00	19,525,533,844.55	37,942,935,894.76
30	BPBD (BTT)	0.00	2,653,692,193.00	0.00
31	SEKRETARIAT DAERAH	361,176,500.00	760,782,800.00	301,356,966.00
32	SEKRETARIAT DPRD	0.00	223,190,000.00	0.00
33	BAKESBANGPOL	0.00	0.00	0.00
34	KAPANEWON WONOSARI	0.00	0.00	6,925,000.00
35	KAPANEWON PALIYAN	0.00	0.00	39,600,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	0.00	0.00	145,000.00
37	KAPANEWON TEPUS	0.00	0.00	4,970,500.00
38	KAPANEWON RONGKOP	0.00	0.00	0.00
39	KAPANEWON SEMANU	0.00	9,000,000.00	24,650,000.00
40	KAPANEWON PONJONG	0.00	0.00	138,972,157.26
41	KAPANEWON KARANGMOJO	0.00	0.00	241,195,000.00
42	KAPANEWON PLAYEN	201,264,000.00	0.00	0.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	0.00	0.00	31,553,000.00
44	KAPANEWON NGAWEN	0.00	0.00	0.00
45	KAPANEWON SEMIN	0.00	0.00	0.00
46	KAPANEWON PATUK	14,000,000.00	0.00	0.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	0.00	0.00	0.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	0.00	0.00	95,680,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	0.00	0.00	0.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	0.00	0.00	0.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	0.00	0.00	0.00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap		16,801,794,437.66	64,269,540,469.52	78,050,728,285.78
		159,122,063,192.96		

A. TANAH Rp 651,748,142,052.00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

a. Pada tahun 2020 terdapat Penambahan aset Tanah sebesar Rp18.303.473.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dari APBD 2020	Rp	4,980,379,700.00
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	65,000,000.00
- Hibah	Rp	13,238,093,300.00
- Koreksi pencatatan	Rp	20,000,000.00

Penambahan tanah yang berasal dari hibah sebesar Rp13.238.093.300,00 terdapat pada Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan berasal Pemerintah DIY berupa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja yang dipergunakan sebagai lokasi Taman Budaya.

Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp65.000.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah

b. Pada tahun 2020 terdapat Pengurangan aset Tanah sebesar Rp79.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Reklas Ke Aset Lainnya	Rp	14,000,000.00
- Mutasi Keluar Antar OPD	Rp	65,000,000.00
- Koreksi pencatatan	Rp	0.00

Terdapat 1 bidang Tanah pada OPD Sekretariat Daerah yang direklas ke aset lainnya karena merupakan aset tanah kemitraan dengan pihak ketiga yang digunakan untuk Pom Bensin Kranon sebesar Rp14.000.000,00 serta mutasi keluar antar OPD sebesar Rp65.000.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari berupa tanah bangunan rumah negara senilai Rp45.000.000,00 dan tanah bangunan rumah fasilitas tempat tinggal lainnya sebesar Rp20.000.000,00 ke Sekretariat Daerah.

Jenis Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

NO.	URAIAN	BIDANG	NILAI
1	Tanah Lapangan Parkir	10	17,655,043,193.00
2	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1	900,000,000.00
3	Tanah Untuk Jalan	1,729	480,048,004,056.00
4	Tanah Untuk Bangunan Air	7	3,140,929,674.00
5	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	65	13,980,417,077.00
6	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	3	407,889,915.00
7	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	4	962,525,710.00
8	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	24	1,005,740,000.00
9	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	59	16,219,549,679.00
10	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	270	116,126,627,748.00
11	Tanah Kering	8	742,519,000.00
12	Tanah Hutan	1	558,896,000.00
JUMLAH		2,181	651,748,142,052.00

Daftar Mutasi Tanah 2020

No	Uraian	Saldo Audited 2019 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	15,101,112,974.00	-	-	15,101,112,974.00
2	DINAS KESEHATAN	1,197,210,000.00	-	-	1,197,210,000.00
3	RSUD WONOSARI	482,390,000.00	-	65,000,000.00	417,390,000.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	-	-	
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	
6	DPUPRKP	284,995,736,667.00	-	-	284,995,736,667.00
7	SATPOL PP	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	200,400,000.00	-	-	200,400,000.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	871,400,000.00	-	-	871,400,000.00
11	DP3AKBPMD	2,835,000.00	-	-	2,835,000.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	199,313,655,857.00	4,980,379,700.00	-	204,294,035,557.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	908,286,145.00	-	-	908,286,145.00
14	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	210,000,000.00	-	-	210,000,000.00
16	DISKOMINFO	-	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-	-
18	DPMPT	-	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	13,238,093,300.00	-	13,238,093,300.00
20	DPK	23,800,000.00	-	-	23,800,000.00
21	DKP	1,602,035,000.00	-	-	1,602,035,000.00
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	1,507,267,000.00	-	-	1,507,267,000.00
24	DISPERINDAG	9,160,727,500.00	20,000,000.00	-	9,180,727,500.00
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-

26	BAPPEDA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
27	BKAD	3,995,774,000.00	-	-	3,995,774,000.00
28	BKPPD	25,126,560.00	-	-	25,126,560.00
29	BPBD	-	-	-	-
30	BPBD (BTT)	-	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	112,626,222,049.00	65,000,000.00	14,000,000.00	112,677,222,049.00
32	SEKRETARIAT DPRD	184,575,000.00	-	-	184,575,000.00
33	BAKESBANGPOL	569,181,600.00	-	-	569,181,600.00
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
38	KAPANEWON RONGKOP	76,250,000.00	-	-	76,250,000.00
39	KAPANEWON SEMANU	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
40	KAPANEWON PONJONG	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	-
42	KAPANEWON PLAYEN	75,750,000.00	-	-	75,750,000.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	134,840,700.00	-	-	134,840,700.00
44	KAPANEWON NGAWEN	71,568,000.00	-	-	71,568,000.00
No	Uraian	Saldo Audited 2019 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	-
Jumlah		633,523,669,052.00	18,303,473,000.00	79,000,000.00	651,748,142,052.00

Penambahan Tanah berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	-
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	-	-	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	-
6	DPUPRKP	-	-	-	-
7	SATPOL PP	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	-	-
11	DP3AKBPM	-	-	-	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	4,980,379,700.00	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
14	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-	-
18	DPMPPT	-	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	13,238,093,300.00	-
20	DPK	-	-	-	-
21	DKP	-	-	-	-
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	-
24	DISPERINDAG	-	-	-	20,000,000
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-	-
27	BKAD	-	-	-	-
28	BKPPD	-	-	-	-
29	BPBD	-	-	-	-
30	BPBD (BTT)	-	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	65,000,000.00	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-	-
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-	-
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-	-
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-	-
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	-
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-	-
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	-
Jumlah Mutasi Tambah Tanah		4,980,379,700.00	65,000,000.00	13,238,093,300.00	20,000,000.00
		18,303,473,000.00			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengurangan Tanah berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	RSUD WONOSARI	-	65,000,000.00	-
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	-	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-
6	DPUPRKP	-	-	-
7	SATPOL PP	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	-
11	DP3AKBPMD	-	-	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
14	DISDUKCAPIL	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-
18	DPMPT	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-
20	DPK	-	-	-
21	DKP	-	-	-
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-
24	DISPERINDAG	-	-	-
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-
27	BKAD	-	-	-
28	BKPPD	-	-	-
29	BPBD	-	-	-
30	BPBD (BTT)	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	14,000,000.00	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang Tanah		14,000,000.00	65,000,000.00	0.00
		79,000,000.00		

B. PERALATAN DAN MESIN **Rp 578,367,665,238.46**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai peralatan dan mesin tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp427.063.679.172,46 sehingga nilai buku peralatan dan mesin menjadi sebesar Rp151.303.986.066,00. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- a. **Penambahan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 sebesar Rp130.346.263.426,21 dengan rincian sebagai berikut.**
 - Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2020 Rp 68,635,463,300.99
 - Mutasi masuk antar OPD Rp 38,309,843,885.90
 - Hibah/Hadiah/Perolehan Lain Rp 645,762,000.00
 - Koreksi pencatatan Rp 22,755,194,239.32



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 sebesar Rp62.134.213.987,53 dengan rincian sebagai berikut.		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	2,394,091,871.31
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	38,309,843,885.90
- Koreksi pencatatan	Rp	21,430,278,230.32

Berikut ini rincian per jenis peralatan dan mesin beserta dengan mutasinya:

Rincian Per Jenis Peralatan dan Mesin 2020

Aset Tetap	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
PERALATAN & MESIN				
Alat Besar	16,416,503,910.00	1,743,683,417.76	1,030,661,854.00	17,129,525,473.76
Alat Angkutan	94,269,126,305.57	13,668,926,507.86	9,429,411,247.86	98,508,641,565.57
Alat Bengkel dan Alat Ukur	13,116,070,243.06	2,687,395,139.38	920,196,093.38	14,883,269,289.06
Alat Pertanian	3,967,406,216.47	623,027,967.68	634,467,514.00	3,955,966,670.15
Alat Kantor & Rumah Tangga	134,939,167,763.05	32,163,385,622.06	11,976,136,687.14	155,126,416,697.97
Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar	17,139,634,355.24	3,763,890,268.47	1,089,652,374.50	19,813,872,249.21
Alat Kedokteran & Kesehatan	71,411,613,872.07	43,537,593,494.51	29,264,306,647.00	85,684,900,719.58
Alat Laboratorium	34,654,147,474.13	14,185,425,830.54	6,127,677,736.96	42,711,895,567.71
Alat Persenjataan	269,292,250.00	63,680,114.92	0.00	332,972,364.92
Komputer	114,092,558,098.60	16,795,448,637.21	1,649,084,832.69	129,238,921,903.12
Alat Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Pengeboran	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Produksi, Pengolahan, dan	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Alat Keselamatan Kerja	0.00	110,602,568.84	0.00	110,602,568.84
Alat Peraga	0.00	0.00	0.00	0.00
Peralatan Proses/Produksi	0.00	26,229,874.00	0.00	26,229,874.00
Rambu-Rambu	4,833,509,687.99	211,958,398.00	0.00	5,045,468,085.99
Peralatan Olahraga	5,046,585,623.60	765,015,584.98	12,619,000.00	5,798,982,208.58
Jumlah	510,155,615,799.78	130,346,263,426.21	62,134,213,987.53	578,367,665,238.46

Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin 2020

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	182,928,389,388.90	20,831,706,772.48	7,982,500.00	203,752,113,661.38
2	DINAS KESEHATAN	82,313,447,828.92	48,748,862,000.30	24,030,936,766.79	107,031,373,062.43
3	RSUD WONOSARI	60,853,073,251.00	20,450,442,838.00	8,436,282,432.00	72,867,233,657.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	11,276,562,857.76	11,276,562,857.76	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	4,854,232,610.00	4,854,232,610.00	-
6	DPUPRKP	16,307,112,690.26	1,558,079,014.72	138,283,000.00	17,726,908,704.98
7	SATPOL PP	2,959,053,996.00	296,190,600.00	19,538,000.00	3,235,706,596.00
8	DINAS SOSIAL	1,665,215,576.00	73,126,000.00	19,965,000.00	1,718,376,576.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	3,118,175,622.00	680,610,000.00	412,730,000.00	3,386,055,622.00
11	DP3AKBPMD	7,540,618,357.92	436,685,000.00	203,659,554.68	7,773,643,803.24
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	2,060,715,383.00	40,364,000.00	7,000,000.00	2,094,079,383.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10,820,329,403.50	1,144,654,800.00	78,650,500.00	11,886,333,703.50
14	DISDUKCAPIL	4,837,251,190.33	1,009,163,200.00	23,893,000.00	5,822,521,390.33
15	DINAS PERHUBUNGAN	14,008,574,138.11	360,990,598.00	-	14,369,564,736.11
16	DISKOMINFO	11,197,585,698.00	3,562,165,555.00	85,900,000.00	14,673,851,253.00
17	DISKOP UKM	1,254,320,187.00	2,964,000.00	5,000,000.00	1,252,284,187.00
18	DPMPT	2,146,264,221.00	292,636,400.00	15,180,000.00	2,423,720,621.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	1,233,559,443.53	127,194,851.56	-	1,360,754,295.09
20	DPK	3,807,010,432.00	491,793,072.21	80,573,364.43	4,218,230,139.78
21	DKP	8,081,879,049.00	238,432,339.00	111,919,840.00	8,208,391,548.00
22	DINAS PARIWISATA	6,477,088,292.05	1,046,533,234.00	16,450,000.00	7,507,171,526.05
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	12,900,166,006.37	353,764,500.00	-	13,253,930,506.37
24	DISPERINDAG	6,245,758,965.61	992,318,369.50	1,862,467,202.50	5,375,610,132.61
25	INSPEKTORAT DAERAH	2,223,552,903.16	411,278,279.00	37,686,119.00	2,597,145,063.16
26	BAPPEDA	2,812,878,160.78	131,317,000.00	53,170,000.00	2,891,025,160.78
27	BKAD	13,285,153,103.62	5,316,656,949.68	6,689,233,733.99	11,912,576,319.31
28	BKPPD	3,117,958,927.00	307,412,350.00	24,462,350.00	3,400,908,927.00
29	BPBD	7,720,675,859.38	274,272,000.00	70,316,377.38	7,924,631,482.00
30	BPBD (BTT)	-	2,100,478,979.00	2,100,478,979.00	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	16,034,593,385.00	907,860,496.00	1,177,379,300.00	15,765,074,581.00
32	SEKRETARIAT DPRD	8,020,334,268.00	1,119,489,100.00	223,190,000.00	8,916,633,368.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
34	KAPANEWON WONOSARI	1,014,675,815.00	70,993,080.24	6,925,000.00	1,078,743,895.24
35	KAPANEWON PALIYAN	752,082,522.89	25,944,080.28	3,200,000.00	774,826,603.17
36	KAPANEWON PANGGANG	684,533,073.00	40,689,080.28	145,000.00	725,077,153.28
37	KAPANEWON TEPUS	788,272,329.84	26,820,580.28	4,970,500.00	810,122,410.12
38	KAPANEWON RONGKOP	661,253,433.89	48,081,080.28	-	709,334,514.17
39	KAPANEWON SEMANU	673,287,536.00	73,631,080.28	9,000,000.00	737,918,616.28
40	KAPANEWON PONJONG	705,552,800.00	47,594,080.28	350,000.00	752,796,880.28
41	KAPANEWON KARANGMOJO	641,744,900.34	78,244,080.28	16,000,000.00	703,988,980.62
42	KAPANEWON PLAYEN	644,695,587.00	76,146,080.28	-	720,841,667.28
43	KAPANEWON NGLIPAR	565,054,042.00	23,244,080.28	6,500,000.00	581,798,122.28
44	KAPANEWON NGAWEN	725,762,894.00	29,331,080.28	-	755,093,974.28
45	KAPANEWON SEMIN	729,768,537.00	63,631,080.28	-	793,399,617.28
46	KAPANEWON PATUK	802,365,160.00	63,331,080.28	14,000,000.00	851,696,240.28
47	KAPANEWON SAPTOSARI	649,945,550.60	54,094,080.28	-	704,039,630.88
48	KAPANEWON GEDANGSARI	871,821,015.00	65,944,080.28	10,000,000.00	927,765,095.28
49	KAPANEWON GIRISUBO	752,088,752.00	52,107,795.28	-	804,196,547.28
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	628,143,797.00	23,631,080.28	-	651,774,877.28
51	KAPANEWON PURWOSARI	800,232,088.89	43,784,080.28	-	844,016,169.17
Jumlah		510,155,615,799.78	130,346,263,426.21	62,134,213,987.53	578,367,665,238.46

Penambahan Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	19,583,306,772.48	727,134,000.00	520,032,000.00	1,234,000.00
2	DINAS KESEHATAN	12,541,290,575.75	25,095,279,894.16	700,000.00	11,111,591,530.39
3	RSUD WONOSARI	7,184,816,039.00	4,869,072,610.00	-	8,396,554,189.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	11,276,562,857.76	-	-	0.00
5	RSUD WONOSARI (BTT)	4,779,232,610.00	-	75,000,000.00	0.00
6	DPUPRKP	76,700,000.00	359,703,654.72	-	1,121,675,360.00
7	SATPOL PP	-	292,282,600.00	-	3,908,000.00
8	DINAS SOSIAL	-	53,161,000.00	-	19,965,000.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	0.00
10	DISNAKERTRANS	-	267,880,000.00	-	412,730,000.00
11	DP3AKBPMD	381,740,000.00	2,500,000.00	-	52,445,000.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	32,580,000.00	784,000.00	-	7,000,000.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39,060,000.00	1,043,394,300.00	-	62,200,500.00
14	DISDUKCAPIL	895,700,000.00	3,284,000.00	-	110,179,200.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	235,976,598.00	125,014,000.00	-	0.00
16	DISKOMINFO	3,024,525,835.00	537,639,720.00	-	0.00
17	DISKOP UKM	2,180,000.00	784,000.00	-	0.00
18	DPMPPT	274,172,400.00	3,284,000.00	-	15,180,000.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	52,616,000.00	74,578,851.56	-	0.00
20	DPK	58,465,000.00	352,251,425.78	-	81,076,646.43
21	DKP	125,728,499.00	784,000.00	-	111,919,840.00
22	DINAS PARIWISATA	-	1,016,433,234.00	30,100,000.00	0.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	352,196,500.00	1,568,000.00	-	0.00
24	DISPERINDAG	28,688,000.00	244,653,800.00	-	718,976,569.50
25	INSPEKTORAT DAERAH	130,084,220.00	265,843,000.00	-	15,351,059.00
26	BAPPEDA	9,999,000.00	121,318,000.00	-	0.00
27	BKAD	3,779,603,900.00	1,179,818,554.68	-	357,234,495.00
28	BKPPD	-	282,950,000.00	-	24,462,350.00
29	BPBD	6,000,000.00	268,272,000.00	-	0.00
30	BPBD (BTT)	2,089,278,979.00	-	11,200,000.00	0.00
31	SEKRETARIAT DAERAH	260,661,000.00	577,779,496.00	-	69,420,000.00
32	SEKRETARIAT DPRD	788,523,800.00	330,965,300.00	-	0.00
33	BAKESBANGPOL	-	784,000.00	-	0.00
34	KAPANEWON WONOSARI	26,550,000.00	37,033,080.24	485,000.00	6,925,000.00
35	KAPANEWON PALIYAN	19,000,000.00	3,259,080.28	485,000.00	3,200,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	36,800,000.00	3,259,080.28	485,000.00	145,000.00
37	KAPANEWON TEPUS	18,106,000.00	3,259,080.28	485,000.00	4,970,500.00
38	KAPANEWON RONGKOP	27,450,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
39	KAPANEWON SEMANU	53,000,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
40	KAPANEWON PONJONG	43,500,000.00	3,259,080.28	485,000.00	350,000.00
41	KAPANEWON KARANGMOJO	58,500,000.00	3,259,080.28	485,000.00	16,000,000.00
42	KAPANEWON PLAYEN	55,515,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	13,000,000.00	3,259,080.28	485,000.00	6,500,000.00
44	KAPANEWON NGAWEN	8,700,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
45	KAPANEWON SEMIN	43,000,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
46	KAPANEWON PATUK	28,700,000.00	20,146,080.28	485,000.00	14,000,000.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
48	KAPANEWON GEDANGSARI	52,200,000.00	3,259,080.28	485,000.00	10,000,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	48,363,715.00	3,259,080.28	485,000.00	0.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	3,000,000.00	20,146,080.28	485,000.00	0.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	40,040,000.00	3,259,080.28	485,000.00	0.00
Jumlah Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin		68,635,463,300.99	38,309,843,885.90	645,762,000.00	22,755,194,239.32
		130,346,263,426.21			

Pengurangan Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	7,982,500.00	-
2	DINAS KESEHATAN	-	12,920,545,236.40	11,110,391,530.39
3	RSUD WONOSARI	39,728,243.00	-	8,396,554,189.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	11,276,562,857.76	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	4,854,232,610.00	-
6	DPUPRKP	-	138,283,000.00	-
7	SATPOL PP	-	15,630,000.00	3,908,000.00
8	DINAS SOSIAL	-	-	19,965,000.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	412,730,000.00
11	DP3AKBPM	-	151,214,554.68	52,445,000.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	7,000,000.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	16,450,000.00	62,200,500.00
14	DISDUKCAPIL	-	14,993,000.00	8,900,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	85,900,000.00	-
17	DISKOP UKM	-	5,000,000.00	-
18	DPMPT	-	-	15,180,000.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-
20	DPK	-	-	80,573,364.43
21	DKP	-	-	111,919,840.00
22	DINAS PARIWISATA	-	16,450,000.00	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-
24	DISPERINDAG	-	1,228,514,800.00	633,952,402.50
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	22,335,060.00	15,351,059.00
26	BAPPEDA	-	53,170,000.00	-
27	BKAD	1,993,187,128.31	4,338,812,110.68	357,234,495.00
28	BKPPD	-	-	24,462,350.00
29	BPBD	-	70,316,377.38	-
30	BPBD (BTT)	-	2,100,478,979.00	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	347,176,500.00	760,782,800.00	69,420,000.00
32	SEKRETARIAT DPRD	-	223,190,000.00	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	6,925,000.00
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	3,200,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	145,000.00
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	4,970,500.00
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	9,000,000.00	-
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	350,000.00
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	16,000,000.00
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	6,500,000.00
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	14,000,000.00	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	10,000,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin		2,394,091,871.31	38,309,843,885.90	21,430,278,230.32
		62,134,213,987.53		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

C. GEDUNG DAN BANGUNAN Rp 1,077,203,399,495.33

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai gedung dan bangunan tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp234.850.997.307,13 sehingga nilai buku gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp842.352.402.188,20. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

a. **Penambahan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp76.351.690.333,14 dengan rincian sebagai berikut.**

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2020	Rp	17,475,574,508.20
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	2,018,002,351.01
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	989,443,000.00
- Koreksi pencatatan	Rp	55,868,670,473.93

b. **Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp11.446.862.281,57 dengan rincian sebagai berikut.**

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	4,320,144,939.60
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	2,018,002,351.01
- Koreksi pencatatan	Rp	5,108,714,990.96

Berikut ini rincian per jenis Gedung dan Bangunan beserta dengan mutasinya.

Rincian Per Jenis Gedung dan Bangunan 2020

Aset Tetap	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
GEDUNG DAN BANGUNAN				
Bangunan Gedung	954,579,480,103.92	72,903,336,501.87	10,015,197,580.17	1,017,467,619,025.62
Monumen	5,271,010,981.58	0.00	75,680,000.00	5,195,330,981.58
Bangunan Menara	0.00	0.00	0.00	0.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	52,448,080,358.26	3,448,353,831.27	1,355,984,701.40	54,540,449,488.13
Jumlah	1,012,298,571,443.76	76,351,690,333.14	11,446,862,281.57	1,077,203,399,495.33

Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	497,875,403,664.92	14,385,748,454.77	782,213,073.91	511,478,939,045.78
2	DINAS KESEHATAN	89,133,247,398.99	960,281,075.96	181,306,000.00	89,912,222,474.95
3	RSUD WONOSARI	56,479,821,301.00	7,183,853,152.88	883,799,700.00	62,779,874,753.88
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	28,495,233.00	28,495,233.00	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	-
6	DPUPRKP	49,072,801,355.09	29,251,923,521.61	2,007,300.00	78,322,717,576.70
7	SATPOL PP	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	3,276,320,881.31	-	-	3,276,320,881.31
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	5,620,814,177.00	-	-	5,620,814,177.00
11	DP3AKBPMD	10,517,884,470.00	118,405,691.00	211,650,000.00	10,424,640,161.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	1,537,063,529.95	256,788,500.00	-	1,793,852,029.95
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17,083,715,204.33	951,675,049.04	-	18,035,390,253.37
14	DISDUKCAPIL	4,252,980,250.00	277,109,000.00	65,459,000.00	4,464,630,250.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	25,718,697,389.04	8,967,000.00	-	25,727,664,389.04
16	DISKOMINFO	193,511,000.00	-	-	193,511,000.00
17	DISKOP UKM	4,920,896,218.04	73,450,000.00	-	4,994,346,218.04
18	DPMPT	5,066,882,750.00	-	-	5,066,882,750.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	282,450,000.00	-	-	282,450,000.00
20	DPK	4,652,183,872.75	-	-	4,652,183,872.75
21	DKP	10,300,187,140.00	586,990,000.00	-	10,887,177,140.00
22	DINAS PARIWISATA	24,646,430,106.86	2,193,017,870.88	34,184,000.00	26,805,263,977.74
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	25,373,859,638.20	-	-	25,373,859,638.20
24	DISPERINDAG	85,704,567,297.63	9,377,615,232.75	6,140,284,807.30	88,941,897,723.08
25	INSPEKTORAT DAERAH	4,280,806,278.38	-	-	4,280,806,278.38
26	BAPPEDA	1,698,860,549.72	-	-	1,698,860,549.72
27	BKAD	15,942,746,894.64	989,480,931.00	992,392,000.00	15,939,835,825.64
28	BKPPD	9,527,171,742.65	-	-	9,527,171,742.65
29	BPBD	2,241,266,044.10	8,625,886,188.99	1,156,270,044.10	9,710,882,188.99
30	BPBD (BTT)	-	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	22,029,285,975.16	231,936,966.00	231,936,966.00	22,029,285,975.16
32	SEKRETARIAT DPRD	5,506,242,187.86	-	-	5,506,242,187.86



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

33	BAKESBANGPOL	1,075,790,230.00	-	-	1,075,790,230.00
No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
35	KAPANEWON PALIYAN	923,249,819.72	51,400,000.00	36,400,000.00	938,249,819.72
36	KAPANEWON PANGGANG	880,230,400.00	-	-	880,230,400.00
37	KAPANEWON TEPUS	1,769,994,000.00	-	-	1,769,994,000.00
38	KAPANEWON RONGKOP	1,598,784,741.15	-	-	1,598,784,741.15
39	KAPANEWON SEMANU	1,665,614,972.33	27,650,000.00	24,650,000.00	1,668,614,972.33
40	KAPANEWON PONJONG	958,226,747.28	138,622,157.26	138,622,157.26	958,226,747.28
41	KAPANEWON KARANGMOJO	798,171,133.64	225,195,000.00	225,195,000.00	798,171,133.64
42	KAPANEWON PLAYEN	673,052,000.00	25,000,000.00	201,264,000.00	496,788,000.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	1,219,839,269.47	65,699,000.00	25,053,000.00	1,260,485,269.47
44	KAPANEWON NGAWEN	1,239,964,412.10	71,900,808.00	-	1,311,865,220.10
45	KAPANEWON SEMIN	2,568,445,713.92	40,474,000.00	-	2,608,919,713.92
46	KAPANEWON PATUK	2,115,773,000.00	10,000,000.00	-	2,125,773,000.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	2,192,683,936.93	39,995,500.00	-	2,232,679,436.93
48	KAPANEWON GEDANGSARI	657,033,000.00	135,930,000.00	85,680,000.00	707,283,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	3,263,703,494.65	7,200,000.00	-	3,270,903,494.65
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	751,702,629.95	-	-	751,702,629.95
51	KAPANEWON PURWOSARI	965,669,125.00	-	-	965,669,125.00
Jumlah		1,012,298,571,443.76	76,351,690,333.14	11,446,862,281.57	1,077,203,399,495.33

Penambahan Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/ Perolehan lain(Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	11,510,015,514.85	1,243,174,147.82	102,393,000.00	1,530,165,792.10
2	DINAS KESEHATAN	750,479,842.96	28,495,233.00	-	181,306,000.00
3	RSUD WONOSARI	567,667,000.00	-	-	6,616,186,152.88
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	28,495,233.00	-	-	0.00
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	0.00
6	DPUPRKP	-	450,367,649.61	-	28,801,555,872.00
7	SATPOL PP	-	-	-	0.00
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	0.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	0.00
10	DISNAKERTRANS	-	-	-	0.00
11	DP3AKBPMD	118,405,691.00	-	-	0.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	256,788,500.00	-	-	0.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	867,359,728.46	84,315,320.58	-	0.00
14	DISDUKCAPIL	-	211,650,000.00	-	65,459,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	8,967,000.00	-	-	0.00
16	DISKOMINFO	-	-	-	0.00
17	DISKOP UKM	73,450,000.00	-	-	0.00
18	DPMPT	-	-	-	0.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-	0.00
20	DPK	-	-	-	0.00
21	DKP	586,990,000.00	-	-	0.00
22	DINAS PARIWISATA	1,305,967,870.88	-	887,050,000.00	0.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0.00
24	DISPERINDAG	981,548,888.05	-	-	8,396,066,344.70
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0.00
26	BAPPEDA	-	-	-	0.00
27	BKAD	104,972,931.00	-	-	884,508,000.00
28	BKPPD	-	-	-	0.00
29	BPBD	-	-	-	8,625,886,188.99
30	BPBD (BTT)	-	-	-	0.00
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	231,936,966.00
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0.00
33	BAKESBANGPOL	-	-	-	0.00
34	KAPANEWON WONOSARI	11,000,000.00	-	-	0.00
35	KAPANEWON PALIYAN	15,000,000.00	-	-	36,400,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	0.00
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-	0.00
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-	0.00
39	KAPANEWON SEMANU	3,000,000.00	-	-	24,650,000.00
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-	138,622,157.26
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	225,195,000.00
42	KAPANEWON PLAYEN	25,000,000.00	-	-	0.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	40,646,000.00	-	-	25,053,000.00
44	KAPANEWON NGAWEN	71,900,808.00	-	-	0.00
45	KAPANEWON SEMIN	40,474,000.00	-	-	0.00
46	KAPANEWON PATUK	10,000,000.00	-	-	0.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	39,995,500.00	-	-	0.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	50,250,000.00	-	-	85,680,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	7,200,000.00	-	-	0.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	0.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	0.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jumlah Mutasi Tambah Gedung Bangunan	17,475,574,508.20	2,018,002,351.01	989,443,000.00	55,868,670,473.93
	76,351,690,333.14			

Pengurangan Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	160,626,000.00	621,587,073.91	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	181,306,000.00
3	RSUD WONOSARI	-	-	883,799,700.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	28,495,233.00	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-
6	DPUPRKP	-	-	2,007,300.00
7	SATPOL PP	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	-
11	DP3AKBPMD	-	211,650,000.00	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
14	DISDUKCAPIL	-	-	65,459,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-
18	DPMPT	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-
20	DPK	-	-	-
21	DKP	-	-	-
22	DINAS PARIWISATA	-	-	34,184,000.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-
24	DISPERINDAG	3,958,254,939.60	-	2,182,029,867.70
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-
27	BKAD	-	-	992,392,000.00
28	BKPPD	-	-	-
29	BPBD	-	1,156,270,044.10	-
30	BPBD (BTT)	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	231,936,966.00
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	36,400,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	24,650,000.00
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	138,622,157.26
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	225,195,000.00
42	KAPANEWON PLAYEN	201,264,000.00	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	25,053,000.00
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	85,680,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang Gedung Bangunan		4,320,144,939.60	2,018,002,351.01	5,108,714,990.96
		11,446,862,281.57		

D. JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI **Rp 1,250,493,150,442.39**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Atas nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut telah dilakukan penyusutan dan diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp630.211.783.951,46 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan, dan Irigasi menjadi sebesar Rp620.281.366.490,93. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- a. **Penambahan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2020 sebesar Rp89.638.749.678,70 dengan rincian sebagai berikut.**
- | | | |
|--|----|-------------------|
| - Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2020 | Rp | 23,748,009,909.98 |
| - Mutasi masuk antar OPD | Rp | 17,679,025,330.19 |
| - Hibah/Hadiah/Perolehan lain | Rp | 14,084,487,660.00 |
| - Koreksi pencatatan | Rp | 34,127,226,778.53 |
- b. **Pengurangan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2020 sebesar Rp29.070.403.322,94 dengan rincian sebagai berikut.**
- | | | |
|---------------------------------|----|-------------------|
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya | Rp | 10,073,557,626.75 |
| - Mutasi keluar antar OPD | Rp | 17,679,025,330.19 |
| - Koreksi pencatatan | Rp | 1,317,820,366.00 |

Berikut ini rincian per jenis Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan mutasinya:

Rincian Per Jenis Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2020

Aset Tetap	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
JALAN, JARINGAN, & IRIGASI	1,189,924,804,086.63	89,638,749,678.70	29,070,403,322.94	1,250,493,150,442.39
Jalan dan Jembatan	969,373,459,655.68	55,519,769,925.86	15,782,355,967.49	1,009,110,873,614.05
Bangunan Air	140,476,407,978.56	12,562,804,635.09	3,406,234,372.45	149,632,978,241.20
Instalasi	31,959,242,580.80	6,822,727,174.75	979,229,007.00	37,802,740,748.55
Jaringan	48,115,693,871.59	14,733,447,943.00	8,902,583,976.00	53,946,557,838.59
Jumlah	1,189,924,804,086.63	89,638,749,678.70	29,070,403,322.94	1,250,493,150,442.39

Daftar Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2020

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	22,948,639,928.61	4,137,285,387.79	909,024,934.93	26,176,900,381.47
2	DINAS KESEHATAN	2,466,585,878.80	1,375,376,184.05	-	3,841,962,062.85
3	RSUD WONOSARI	3,109,618,098.00	1,304,548,766.00	1,304,548,766.00	3,109,618,098.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	1,072,438,827.05	1,072,438,827.05	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	-
6	DPUPRKP	1,078,691,041,067.92	46,184,257,343.78	9,845,556,485.46	1,115,029,741,926.24
7	SATPOL PP	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	48,518,000.00	-	-	48,518,000.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	392,859,000.00	-	-	392,859,000.00
11	DP3AKBPMD	147,631,000.00	-	-	147,631,000.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,573,930,313.00	869,375,564.26	-	3,443,305,877.26
14	DISDUKCAPIL	11,885,000.00	-	-	11,885,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	33,298,353,956.94	3,272,555,840.00	-	36,570,909,796.94
16	DISKOMINFO	196,499,400.00	33,000,000.00	-	229,499,400.00
17	DISKOP UKM	231,956,298.66	-	-	231,956,298.66
18	DPMPT	200,000.00	-	-	200,000.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	28,745,000.00	-	-	28,745,000.00
20	DPK	134,491,522.00	-	-	134,491,522.00
21	DKP	1,635,621,625.00	97,979,000.00	-	1,733,600,625.00
22	DINAS PARIWISATA	22,353,928,277.15	-	-	22,353,928,277.15
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	2,046,684,508.63	107,206,000.00	-	2,153,890,508.63
24	DISPERINDAG	2,723,949,101.71	1,154,444,546.00	221,092,741.29	3,657,300,906.42
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-	-
27	BKAD	390,666,400.00	147,621,500.00	-	538,287,900.00
28	BKPPD	12,215,000.00	-	-	12,215,000.00
29	BPBD	15,170,028,354.21	29,317,049,705.77	15,164,528,354.21	29,322,549,705.77
30	BPBD (BTT)	-	553,213,214.00	553,213,214.00	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	206,116,162.00	-	-	206,116,162.00
32	SEKRETARIAT DPRD	120,829,000.00	-	-	120,829,000.00
33	BAKESBANGPOL	31,364,194.00	8,624,000.00	-	39,988,194.00
34	KAPANEWON WONOSARI	522,776,000.00	-	-	522,776,000.00
35	KAPANEWON PALIYAN	21,689,500.00	-	-	21,689,500.00
36	KAPANEWON PANGGANG	16,970,000.00	-	-	16,970,000.00
37	KAPANEWON TEPUS	7,572,500.00	-	-	7,572,500.00
38	KAPANEWON RONGKOP	17,702,100.00	-	-	17,702,100.00
39	KAPANEWON SEMANU	72,236,000.00	-	-	72,236,000.00
40	KAPANEWON PONJONG	10,990,000.00	-	-	10,990,000.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

41	KAPANEWON KARANGMOJO	12,170,000.00	-	-	12,170,000.00
No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
43	KAPANEWON NGLIPAR	9,385,100.00	-	-	9,385,100.00
44	KAPANEWON NGAWEN	16,420,000.00	-	-	16,420,000.00
45	KAPANEWON SEMIN	102,433,500.00	-	-	102,433,500.00
46	KAPANEWON PATUK	4,125,200.00	3,773,800.00	-	7,899,000.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	16,435,100.00	-	-	16,435,100.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	30,570,000.00	-	-	30,570,000.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	21,123,000.00	-	-	21,123,000.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	9,277,500.00	-	-	9,277,500.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	10,899,000.00	-	-	10,899,000.00
Jumlah		1,189,924,804,086.63	89,638,749,678.70	29,070,403,322.94	1,250,493,150,442.39

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	2,277,909,987.93	1,777,689,869.86	46,159,000.00	35,526,530.00
2	DINAS KESEHATAN	301,237,357.00	1,072,438,827.05	-	1,700,000.00
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	1,304,548,766.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	1,072,438,827.05	-	-	0.00
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	0.00
6	DPUPRKP	17,458,018,000.00	13,615,942,307.02	12,103,469,060.00	3,006,827,976.76
7	SATPOL PP	-	-	-	0.00
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	0.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	0.00
10	DISNAKERTRANS	-	-	-	0.00
11	DP3AKBPM	-	-	-	0.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-	0.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	209,634,452.00	659,741,112.26	-	0.00
14	DISDUKCAPIL	-	-	-	0.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,334,696,240.00	3,000,000.00	1,934,859,600.00	0.00
16	DISKOMINFO	33,000,000.00	-	-	0.00
17	DISKOP UKM	-	-	-	0.00
18	DPMPT	-	-	-	0.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-	0.00
20	DPK	-	-	-	0.00
21	DKP	97,979,000.00	-	-	0.00
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	107,206,000.00	-	0.00
24	DISPERINDAG	357,747,532.00	443,007,214.00	-	353,689,800.00
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0.00
26	BAPPEDA	-	-	-	0.00
27	BKAD	39,737,500.00	-	-	107,884,000.00
28	BKPPD	-	-	-	0.00
29	BPBD	-	-	-	29,317,049,705.77
30	BPBD (BTT)	553,213,214.00	-	-	0.00
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0.00
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0.00
33	BAKESBANGPOL	8,624,000.00	-	-	0.00
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-	0.00
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-	0.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	0.00
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-	0.00
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-	0.00
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-	0.00
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-	0.00
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	0.00
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-	0.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-	0.00
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-	0.00
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-	0.00
46	KAPANEWON PATUK	3,773,800.00	-	-	0.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-	0.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-	0.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-	0.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	0.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	0.00
Jumlah Mutasi Tambah Jalan, Jaringan, dan Irigasi		23,748,009,909.98	17,679,025,330.19	14,084,487,660.00	34,127,226,778.53
		89,638,749,678.70			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengurangan Jalan, Jaringan, dan Irigasi berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	20,180,000.00	888,844,934.93	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	RSUD WONOSARI	-	-	1,304,548,766.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	1,072,438,827.05	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-
6	DPUPRKP	9,832,284,885.46	-	13,271,600.00
7	SATPOL PP	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	-
11	DP3AKBPM	-	-	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
No	Uraian	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
14	DISDUKCAPIL	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-
18	DPMPT	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-
20	DPK	-	-	-
21	DKP	-	-	-
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-
24	DISPERINDAG	221,092,741.29	-	-
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-
27	BKAD	-	-	-
28	BKPPD	-	-	-
29	BPBD	-	15,164,528,354.21	-
30	BPBD (BTT)	-	553,213,214.00	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang Jalan, Jaringan, dan Irigasi		10,073,557,626.75	17,679,025,330.19	1,317,820,366.00
		29,070,403,322.94		

E. ASET TETAP LAINNYA Rp 74,336,963,706.90

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- a. Penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp41.232.641.195,64 dengan rincian sebagai berikut.
- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2020
- Rp 34,436,600,013.22



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Mutasi masuk antar OPD	Rp	6,197,668,902.42
- Hibah/Hadiah/Perolehan lain	Rp	357,984,780.00
- Koreksi pencatatan	Rp	240,387,500.00
b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp9.857.981.253,28 dengan rincian sebagai berikut.		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	0.00
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	6,197,668,902.42
- Koreksi pencatatan	Rp	3,660,312,350.86

Berikut ini rincian per jenis Aset Tetap Lainnya beserta dengan mutasinya:

Rincian Per Jenis Aset Tetap Lainnya 2020

Aset Tetap	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
ASET TETAP LAINNYA				
Bahan Perpustakaan	14,017,938,816.95	1,381,979,397.69	2,900,000.00	15,397,018,214.64
Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	11,085,725,195.39	1,289,380,529.30	503,282.00	12,374,602,442.69
Hewan	192,312,500.00	0.00	0.00	192,312,500.00
Biota Perairan	0.00	0.00	0.00	0.00
Tanaman	1,117,327,557.50	7,776,000.01	0.00	1,125,103,557.51
Barang Koleksi Non Budaya	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Tetap Dalam Renovasi	16,548,999,694.70	38,553,505,268.64	9,854,577,971.28	45,247,926,992.06
Jumlah	42,962,303,764.54	41,232,641,195.64	9,857,981,253.28	74,336,963,706.90

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya 2020

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	23,621,023,708.44	32,197,443,330.96	2,949,738,184.20	52,868,728,855.20
2	DINAS KESEHATAN	3,818,384,519.94	3,881,265,146.46	2,900,000.00	7,696,749,666.40
3	RSUD WONOSARI	46,144,988.00	-	-	46,144,988.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	1,588,380,741.46	1,588,380,741.46	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	-
6	DPUPRKP	5,962,699,294.00	2,892,966,476.76	2,182,039,976.76	6,673,625,794.00
7	SATPOL PP	60,354,350.00	-	-	60,354,350.00
8	DINAS SOSIAL	5,475,800.00	-	-	5,475,800.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	1,323,000.00	-	-	1,323,000.00
11	DP3AKBPMD	-	-	-	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,079,762,300.00	-	-	1,079,762,300.00
14	DISDUKCAPIL	1,468,500.00	-	-	1,468,500.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	21,209,700.00	-	-	21,209,700.00
16	DISKOMINFO	314,415,000.00	-	-	314,415,000.00
17	DISKOP UKM	-	-	-	-
18	DPMPT	2,105,700.00	191,059,000.00	-	193,164,700.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	962,727,173.56	345,684,000.00	-	1,308,411,173.56
20	DPK	1,001,952,361.24	94,022,500.00	503,282.00	1,095,471,579.24
21	DKP	1,070,500.00	39,820,000.00	-	40,890,500.00
22	DINAS PARIWISATA	2,050,926,600.00	-	-	2,050,926,600.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	218,616,357.50	-	-	218,616,357.50
24	DISPERINDAG	9,517,200.00	-	-	9,517,200.00
25	INSPEKTORAT DAERAH	16,783,326.00	-	-	16,783,326.00
26	BAPPEDA	9,201,700.00	-	-	9,201,700.00
27	BKAD	224,483,855.00	-	-	224,483,855.00
28	BKPPD	19,691,800.00	-	-	19,691,800.00
29	BPBD	3,134,419,068.86	-	3,134,419,068.86	-
30	BPBD (BTT)	-	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	103,934,012.00	2,000,000.00	-	105,934,012.00
32	SEKRETARIAT DPRD	82,937,800.00	-	-	82,937,800.00
33	BAKESBANGPOL	183,525,150.00	-	-	183,525,150.00
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-	-
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-	-
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	-
No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	150,000.00	-	-	150,000.00
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	-
Jumlah		42,962,303,764.54	41,232,641,195.64	9,857,981,253.28	74,336,963,706.90

Penambahan Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	29,223,884,366.76	2,949,738,184.20	12,300,780.00	11,520,000.00
2	DINAS KESEHATAN	2,292,884,405.00	1,588,380,741.46	-	0.00
3	RSUD WONOSARI	-	-	-	0.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	1,588,380,741.46	-	-	0.00
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	0.00
6	DPUPRKP	1,004,549,000.00	1,659,549,976.76	-	228,867,500.00
7	SATPOL PP	-	-	-	0.00
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	0.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	0.00
10	DISNAKERTRANS	-	-	-	0.00
11	DP3AKBPMD	-	-	-	0.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-	0.00
14	DISDUKCAPIL	-	-	-	0.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0.00
16	DISKOMINFO	-	-	-	0.00
17	DISKOP UKM	-	-	-	0.00
18	DPMPT	191,059,000.00	-	-	0.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	345,684,000.00	0.00
20	DPK	94,022,500.00	-	-	0.00
21	DKP	39,820,000.00	-	-	0.00
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0.00
24	DISPERINDAG	-	-	-	0.00
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0.00
26	BAPPEDA	-	-	-	0.00
27	BKAD	-	-	-	0.00
28	BKPPD	-	-	-	0.00
29	BPBD	-	-	-	0.00
30	BPBD (BTT)	-	-	-	0.00
31	SEKRETARIAT DAERAH	2,000,000.00	-	-	0.00
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0.00
33	BAKESBANGPOL	-	-	-	0.00
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-	0.00
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-	0.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	0.00
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-	0.00
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-	0.00
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-	0.00
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-	0.00
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	0.00
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-	0.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-	0.00
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-	0.00
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-	0.00
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-	0.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-	0.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-	0.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-	0.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	0.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	0.00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya		34,436,600,013.22	6,197,668,902.42	357,984,780.00	240,387,500.00
		41,232,641,195.64			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	1,474,869,092.10	1,474,869,092.10
2	DINAS KESEHATAN	-	-	2,900,000.00
3	RSUD WONOSARI	-	-	-
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	1,588,380,741.46	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-
6	DPUPRKP	-	-	2,182,039,976.76
7	SATPOL PP	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	-
11	DP3AKBPMD	-	-	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
14	DISDUKCAPIL	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-
18	DPMPT	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-
20	DPK	-	-	503,282.00
21	DKP	-	-	-
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-
24	DISPERINDAG	-	-	-
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-
27	BKAD	-	-	-
28	BKPPD	-	-	-
29	BPBD	-	3,134,419,068.86	-
30	BPBD (BTT)	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya		0.00	6,197,668,902.42	3,660,312,350.86
		9,857,981,253.28		

5.A.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp 136,005,637,084.74**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bahwasanya Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Terdapat beberapa catatan untuk pengungkapan yang meliputi :

- a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020 sebesar **Rp127.513.225.840,41** dengan rincian sebagai berikut.

- Realisasi belanja aset tetap yang berasal dr APBD 2020

Rp127,513,225,840.41

- Hibah/Hadiah/Perolehan lain

Rp0.00
- b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020 sebesar **Rp46.533.602.347,64** dengan rincian sebagai berikut.

- Mutasi keluar antar OPD

Rp0.00

- Koreksi pencatatan

Rp46,533,602,347.64



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Berikut ini rincian per jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta dengan mutasinya:

Rincian Per Jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan 2020

NO.	Perangkat Daerah	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	DISDIKPORA	DED Pembangunan lapangan voli indoor - DIKPORA GK	2018	29,510,000.00
		DED Gedung Kesenian - DIKPORA GK	2018	44,690,000.00
2	RSUD WONOSARI	DED Gedung VK	2020	73,590,000.00
3	DPUPRKP	Buku DED Jln Alternatif ke Gununggambur	2014	48,424,000.00
		Gedung RS Bedoyo	2019	4,714,537,145.00
		Belanja Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Masterplan Kantor DINKES	2015	50,101,000.00
		RS Ngoro-oro	2019	1,911,363,374.00
		Konsultan perencana DED review Jl. Kemadang - Pantai Sepanjang	2016	49,412,000.00
		DED Jalan Kemadang - Pantai Sepanjang	2013	49,467,000.00
		Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2019	3,326,306,889.30
4	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	Pembangunan Taman Budaya Gunungkidul	2019	125,371,333,676.44
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DED Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten	2020	148,831,000.00
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	DED Balai Penyuluhan Pertanian (BP2KP)	2016	33,451,000.00
		DED Balai Penyuluhan Pertanian (BP2KP)	2015	29,700,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DED pada 8 Sekolah Dasar di Kabupaten Gunungkidul	2020	74,195,000.00
		DED SRI GETHUK	2020	50,725,000.00

Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
1	DISDIKPORA	74,200,000.00	-	-	74,200,000.00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
3	RSUD WONOSARI	4,422,209,452.88	1,383,767,000.00	5,732,386,452.88	73,590,000.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	-	-	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	-
6	DPUPRKP	7,618,560,076.42	5,389,331,331.88	2,858,280,000.00	10,149,611,408.30
7	SATPOL PP	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	-	-
11	DP3AKBPMD	-	-	-	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
14	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-	-
18	DPMPT	-	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	42,146,702,126.44	83,224,631,550.00	-	125,371,333,676.44
20	DPK	-	148,831,000.00	-	148,831,000.00
21	DKP	-	-	-	-
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	63,151,000.00	-	-	63,151,000.00
24	DISPERINDAG	-	-	-	-
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-	-
27	BKAD	-	-	-	-
28	BKPPD	-	-	-	-
29	BPBD	701,190,936.23	37,366,664,958.53	37,942,935,894.76	124,920,000.00
30	BPBD (BTT)	-	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-	-
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-	-
No	Uraian	Saldo Awal 2020 (Rp)	Mutasi Tambah 2020 (Rp)	Mutasi Kurang 2020 (Rp)	Saldo Akhir 2020 (Rp)
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	-
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-	-
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	-
Jumlah		55,026,013,591.97	127,513,225,840.41	46,533,602,347.64	136,005,637,084.74

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Belanja 2020 (Rp)	Mutasi Masuk Antar OPD (Rp)	Hibah/Hadiah/Perolehan lain (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-	0.00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	0.00
3	RSUD WONOSARI	1,383,767,000.00	-	-	0.00
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	-	-	0.00
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-	0.00
6	DPUPRKP	5,389,331,331.88	-	-	0.00
7	SATPOL PP	-	-	-	0.00
8	DINAS SOSIAL	-	-	-	0.00
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-	0.00
10	DISNAKERTRANS	-	-	-	0.00
11	DP3AKBPMD	-	-	-	0.00
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-	0.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0.00
14	DISDUKCAPIL	-	-	-	0.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	0.00
16	DISKOMINFO	-	-	-	0.00
17	DISKOP UKM	-	-	-	0.00
18	DPMPT	-	-	-	0.00
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	70,225,531,050.00	-	12,999,100,500.00	0.00
20	DPK	148,831,000.00	-	-	0.00
21	DKP	-	-	-	0.00
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-	0.00
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-	0.00
24	DISPERINDAG	-	-	-	0.00
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	0.00
26	BAPPEDA	-	-	-	0.00
27	BKAD	-	-	-	0.00
28	BKPPD	-	-	-	0.00
29	BPBD	37,366,664,958.53	-	-	0.00
30	BPBD (BTT)	-	-	-	0.00
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	0.00
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	0.00
33	BAKESBANGPOL	-	-	-	0.00
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-	0.00
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-	0.00
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-	0.00
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-	0.00
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-	0.00
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-	0.00
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-	0.00
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-	0.00
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-	0.00
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-	0.00
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-	0.00
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-	0.00
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-	0.00
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-	0.00
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-	0.00
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-	0.00
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-	0.00
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-	0.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jumlah Mutasi Tambah KDP	114,514,125,340.41	0.00	12,999,100,500.00	0.00
	127,513,225,840.41			

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD, sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap Rusak Berat/Reklas Ke Aset Lainnya (Rp)	Mutasi Keluar Antar OPD (Rp)	Koreksi Pencatatan (Rp)
1	DISDIKPORA	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	RSUD WONOSARI	-	-	5,732,386,452.88
4	DINAS KESEHATAN (BTT)	-	-	-
5	RSUD WONOSARI (BTT)	-	-	-
6	DPUPRKP	-	-	2,858,280,000.00
7	SATPOL PP	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	-	-
9	DINAS SOSIAL (BTT)	-	-	-
10	DISNAKERTRANS	-	-	-
11	DP3AKBPMD	-	-	-
12	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
14	DISDUKCAPIL	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
16	DISKOMINFO	-	-	-
17	DISKOP UKM	-	-	-
18	DPMPT	-	-	-
19	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	-	-	-
20	DPK	-	-	-
21	DKP	-	-	-
22	DINAS PARIWISATA	-	-	-
23	DINAS PERTANIAN & PANGAN	-	-	-
24	DISPERINDAG	-	-	-
25	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
26	BAPPEDA	-	-	-
27	BKAD	-	-	-
28	BKPPD	-	-	-
29	BPBD	-	-	37,942,935,894.76
30	BPBD (BTT)	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
33	BAKESBANGPOL	-	-	-
34	KAPANEWON WONOSARI	-	-	-
35	KAPANEWON PALIYAN	-	-	-
36	KAPANEWON PANGGANG	-	-	-
37	KAPANEWON TEPUS	-	-	-
38	KAPANEWON RONGKOP	-	-	-
39	KAPANEWON SEMANU	-	-	-
40	KAPANEWON PONJONG	-	-	-
41	KAPANEWON KARANGMOJO	-	-	-
42	KAPANEWON PLAYEN	-	-	-
43	KAPANEWON NGLIPAR	-	-	-
44	KAPANEWON NGAWEN	-	-	-
45	KAPANEWON SEMIN	-	-	-
46	KAPANEWON PATUK	-	-	-
47	KAPANEWON SAPTOSARI	-	-	-
48	KAPANEWON GEDANGSARI	-	-	-
49	KAPANEWON GIRISUBO	-	-	-
50	KAPANEWON TANJUNGSARI	-	-	-
51	KAPANEWON PURWOSARI	-	-	-
Jumlah Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan		0.00	0.00	46,533,602,347.64
		46,533,602,347.64		

d. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp55.026.013.591,97 Pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah sebesar Rp127.513.225.840,41 dan mutasi kurang sebesar Rp46.533.602.347,64 sehingga Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp136.005.637.084,74 dengan penjelasan sebagai berikut.

Mutasi tambah sebesar Rp114.514.125.340,41 merupakan penambahan dari realisasi Belanja Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

No	Perangkat Daerah	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Peningkatan Nilai Belanja Modal	Peningkatan Nilai Belanja Non Modal	Hibah
1	Disdikpora	-	-	-	-	-
2	RSUD Wonosari	73,590,000.00	-	1,197,222,000.00	112,955,000.00	-
3	Dinkes (BTT)	-	-	-	-	-
4	DPUPRKP	-	-	5,389,331,331.88	-	-
5	Dinas Kebudayaan/ Kundha Kabudayan	-	-	70,225,531,050.00	-	12,999,100,500.00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	148,831,000.00	-	-	-	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	124,920,000.00	-	37,241,744,958.53	-	-
Sub Jumlah		347,341,000.00	-	114,053,829,340.41	112,955,000.00	12,999,100,500.00
Jumlah		127,513,225,840.41				

AKUMULASI PENYUSUTAN 1,292,126,460,431.05

Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan dengan basis akrual Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melakukan perhitungan penyusutan atas saldo aset tetap. Penyusutan pertama kali atas aset tetap didasarkan pada data saldo aset tetap yang telah diaudited oleh BPK RI. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus terhadap aset tetap berupa:

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan nilai residu aset tetap serta dilakukan sejak tahun diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan berikut akumulasi penyusutannya dan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

Tatacara penghitungan penyusutan aset tetap dengan tetap memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat aset tetap sebagai akibat adanya perbaikan atau renovasi, tabel penambahan masa manfaat aset tetap akibat perbaikan terdapat pada Peraturan Bupati Gunungkidul No. 97 Tahun 2020. Berikut ini daftar akumulasi penyusutan aset tetap:

Uraian	Nilai Aset Tetap 2020 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap 2020 (Rp)
Peralatan dan Mesin	578,367,665,238.46	427,063,679,172.46	151,303,986,066.00
Gedung dan Bangunan	1,077,203,399,495.33	234,850,997,307.13	842,352,402,188.20
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,250,493,150,442.39	630,211,783,951.46	620,281,366,490.93
Jumlah	2,906,064,215,176.18	1,292,126,460,431.05	1,613,937,754,745.13

Daftar akumulasi penyusutan aset tetap berdasarkan OPD

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2020
1	DISDIKPORA	162,077,510,557.09	147,570,422,891.02	5,450,886,507.56	315,098,819,955.67
2	DINAS KESEHATAN	64,757,789,469.48	13,936,381,232.42	647,745,388.66	79,341,916,090.56
3	RSUD WONOSARI	45,886,809,703.26	7,137,054,165.99	865,200,985.01	53,889,064,854.26
4	DPUPRKP	11,990,253,360.69	7,072,650,757.69	605,181,134,632.16	624,244,038,750.54
5	SATPOL PP	2,323,183,456.43	-	-	2,323,183,456.43
6	DINAS SOSIAL	1,006,867,688.20	425,966,415.11	4,851,800.00	1,437,685,903.31
7	DISNAKERTRANS	2,968,519,677.40	854,088,460.62	34,086,288.46	3,856,694,426.48
8	DP3AKBPMD	6,360,554,112.69	983,547,284.15	18,487,366.64	7,362,588,763.48
9	DIPERTARUNG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA	1,675,078,561.62	257,947,250.64	500,000.00	1,933,525,812.26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9,154,278,962.85	1,630,779,240.07	440,604,389.93	11,225,662,592.85
11	DISDUKCAPIL	4,327,688,766.04	455,949,539.59	6,536,750.00	4,790,175,055.63
12	DINAS PERHUBUNGAN	13,194,051,291.18	6,134,591,560.10	7,132,069,534.31	26,460,712,385.59
13	DISKOMINFO	8,439,146,178.71	63,193,201.35	20,474,940.00	8,522,814,320.06
14	DISKOP UKM	869,851,438.94	338,740,007.43	19,275,998.26	1,227,867,444.63
15	DPMPT	1,587,392,025.70	472,430,440.68	140,000.00	2,059,962,466.38
16	DINAS KEBUDAYAAN/KUNDHA KABUDAYAN	1,111,128,252.23	68,985,000.00	9,688,750.00	1,189,802,002.23
17	DPK	3,655,671,529.81	893,599,765.07	17,707,600.84	4,566,978,895.72
18	DKP	7,481,008,913.47	2,081,969,413.39	589,825,904.86	10,152,804,231.72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2020
19	DINAS PARIWISATA	5,086,014,605.09	3,724,960,702.41	7,351,621,511.29	16,162,596,818.79
20	DINAS PERTANIAN & PANGAN	11,996,015,343.14	3,694,785,883.26	596,219,211.02	16,287,020,437.42
21	DISPERINDAG	3,387,770,794.30	20,443,514,332.55	901,333,536.84	24,732,618,663.69
22	INSPEKTORAT DAERAH	2,017,565,002.03	618,977,270.67	-	2,636,542,272.70
23	BAPPEDA	2,186,499,453.64	605,115,115.66	-	2,791,614,569.30
24	BKAD	10,735,960,280.03	2,950,310,494.20	87,747,784.39	13,774,018,558.62
25	BKPPD	2,744,134,690.59	1,101,508,079.50	10,017,962.78	3,855,660,732.87
26	BPBD	6,912,622,613.35	374,402,643.78	587,899,230.47	7,874,924,487.60
27	SEKRETARIAT DAERAH	12,775,470,292.89	4,481,304,750.72	40,725,432.40	17,297,500,476.01
28	KEPALA DAERAH & WKDH	-	-	-	-
29	DPRD	-	-	-	-
30	SEKRETARIAT DPRD	7,765,265,913.68	1,269,051,185.23	13,881,400.00	9,048,198,498.91
31	BAKESBANGPOL	876,347,323.17	326,310,429.74	9,564,547.92	1,212,222,300.83
32	KAPANEWON WONOSARI	871,635,881.04	323,452,954.79	73,466,550.00	1,268,555,385.83
33	KAPANEWON PALIYAN	690,204,181.81	135,239,114.17	6,553,063.59	831,996,359.57
34	KAPANEWON PANGGANG	612,512,189.06	123,090,613.24	5,292,500.00	740,895,302.30
35	KAPANEWON TEPUS	725,599,474.48	198,501,184.21	5,533,750.00	929,634,408.69
36	KAPANEWON RONGKOP	596,886,921.38	349,702,783.54	10,394,209.16	956,983,914.08
37	KAPANEWON SEMANU	599,325,421.83	226,679,901.96	10,524,850.00	836,530,173.79
38	KAPANEWON PONJONG	648,234,958.92	214,106,092.48	6,898,749.97	869,239,801.37
39	KAPANEWON KARANGMOJO	531,478,968.98	455,517,235.99	4,411,000.00	991,407,204.97
40	KAPANEWON PLAYEN	546,596,531.63	58,215,852.90	8,585,208.41	613,397,592.94
41	KAPANEWON NGLIPAR	498,881,960.64	325,171,035.87	2,346,275.00	826,399,271.51
42	KAPANEWON NGAWEN	667,326,771.97	381,381,393.43	6,962,750.00	1,055,670,915.40
43	KAPANEWON SEMIN	636,555,714.63	332,212,073.28	11,634,975.00	980,402,762.91
44	KAPANEWON PATUK	741,541,036.29	601,984,886.06	700,233.75	1,344,226,156.10
45	KAPANEWON SAPTOSARI	560,029,915.24	280,937,895.22	4,108,775.00	845,076,585.46
46	KAPANEWON GEDANGSARI	780,737,231.06	119,558,052.58	5,512,500.00	905,807,783.64
47	KAPANEWON GIRISUBO	679,437,939.64	319,480,215.31	2,296,650.00	1,001,214,804.95
48	KAPANEWON TANJUNGSARI	588,235,282.63	158,044,379.06	4,519,807.78	750,799,469.47
49	KAPANEWON PURWOSARI	738,008,533.53	279,184,130.00	3,814,650.00	1,021,007,313.53
Jumlah Akumulasi Penyusutan		427,063,679,172.46	234,850,997,307.13	630,211,783,951.46	1,292,126,460,431.05

Selain itu, terdapat Aset Tetap yang digunsausahkan kepada pihak lain, antara lain sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Sewa Rumah Dinas	42,454,000.00
2	Sewa Tanah untuk Reklame	18,150,000.00
3	Sewa Tanah Lainnya	257,265,930.00
4	Sewa Gedung Olahraga	129,475,000.00
	JUMLAH	447,344,930.00

Terdapat pula aset tetap berupa tanah, kendaraan, dan bangunan gedung yang dipinjam pakaikan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama Aset	Nomor Polisi	Jangka Waktu (tahun)	Peminjam	Nomor Berita Acara
1	Kendaraan Roda Empat	AB 1019 ID	5	Kodim 0730 Gunungkidul	024/1335/BA-PP/2017
2	Kendaraan Roda Empat	AB 1145 HD	4	PMI Gunungkidul	024/1333/BA-PP/2017
3	Kendaraan Roda Empat	AB 1799 D	-	BAWASLU	028/3085/BA-PP/X/2017
4	Kendaraan Roda Empat	AB 1004 ID	-	KONI Gunungkidul	028/3086/BA-PP/X/2017
5	Kendaraan Roda Empat	AB 5 D	5	Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II	027/1622/BA-PP/VII/2019
6	Kendaraan Roda Empat	AB 80 D	5	Pengadilan Agama Kab. Gunungkidul	028/738/BA-PP/III/2020
7	Kendaraan Roda Empat	AB 711 BD	3	KPU Kab Gunungkidul	028/1523/BA-PP/III/2018
8	Kendaraan Roda Dua	AB 6238 SD	5	POS Angkatan Laut Sadeng	028/02/BA.PP/IX/2019
9	Gedung Bekas SD Mulo I		5	Desa Mulo	028/3416/UM
10	Peralatan dan Alat Rumah Tangga		3	KPU Kab Gunungkidul	028/1523/BA-PP/III/2018
11	Gedung		5	BAWASLU	011/0989
12	Tanah dan Bangunan		5	DESA WONOSARI	028/3523
13	Bangunan Gedung Bekas SD Negeri Petir III		5	DESA PETIR	032/2481



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

14	Bangunan Bekas Puskesmas Wonosari I		5	DESA KARANGREJEK	640/2765
----	-------------------------------------	--	---	------------------	----------

ASET TETAP EKSTRAKOMPTABEL **59,257,045,728.80**

Selain saldo aset tetap yang disajikan pada Neraca, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki aset tetap yang nilai per unitnya di bawah minimal kapitalisasi sebagai aset tetap yang disajikan dalam neraca, dan dicatat secara ekstrakomptabel.

Saldo awal 2020 senilai Rp52.463.952.966,45 mutasi Tambah 2020 sebesar Rp7.673.618.938,59 dan mutasi Kurang 2020 senilai Rp880.526.176,24 sehingga saldo Akhir 2020 sebesar Rp59.257.045.728,80

Rincian besarnya saldo awal 2020, mutasi Tambah 2020, mutasi Kurang 2020 dan saldo Akhir 2020, sebagai berikut :

Daftar Aset Tetap Ekstrakomptabel					
No	Uraian	Saldo Awal 2020	Mutasi Tambah 2020	Mutasi Kurang 2020	Saldo Akhir 2020
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	17,238,056,079.93	2,100,183,974.12	790,614,765.24	18,547,625,288.81
3	Gedung dan Bangunan	2,727,397,354.83	444,080,337.31	85,916,700.00	3,085,560,992.14
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82,088,360.00	3,916,896.00	2,604,711.00	83,400,545.00
5	Aset Tetap Lainnya	32,416,411,171.69	5,125,437,731.16	1,390,000.00	37,540,458,902.85
6	KDP	-	-	-	-
	Jumlah	52,463,952,966.45	7,673,618,938.59	880,526,176.24	59,257,045,728.80

Adapun pengelompokan Aset Tetap Ekstrakomptabel per akun/ KIB adalah sebagai berikut :

- a. Tanah** **0.00**
Tidak ada aset tanah yang dicatat secara ekstrakomptabel, semua dicatat secara intrakomptabel dan tersaji dalam Neraca baik Laporan Keuangan OPD maupun LKPD
- b. Peralatan dan Mesin** **18,547,625,288.81**
Saldo awal 2020 Peralatan dan Mesin yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp17.238.056.079,93 kemudian pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakompt sebesar Rp2.100.183.974,12 dan mutasi kurang sebesar Rp790.614.765,24 sehingga saldo Akhir 2020 aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp18.547.625.288,81.
- c. Gedung dan Bangunan** **3,085,560,992.14**
Saldo awal 2020 Gedung dan Bangunan yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp2.727.397.354,83 kemudian pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakompt sebesar Rp444.080.337,31 dan mutasi kurang sebesar Rp85.916.700,00 sehingga saldo Akhir 2020 aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp3.085.560.992,14.
- d. Jalan Irigasi dan Jaringan** **83,400,545.00**
Saldo awal 2020 Jalan Irigasi dan Jaringan yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp0,00 kemudian pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakompt sebesar Rp3.916.896,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 sehingga saldo Akhir 2020 aset ekstrakomptabel Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp83.400.545,00.
- e. Aset Tetap Lainnya** **37,540,458,902.85**
Saldo awal 2020 Aset Tetap Lainnya yang tercatat secara ekstrakomptabel senilai Rp32.416.411.171,69 kemudian pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah atas aset tetap ekstrakompt sebesar Rp5.125.437.731,16 dan mutasi kurang sebesar Rp1.390.000,00 sehingga saldo Akhir 2020 aset ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.540.458.902,85.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan** **0.00**
Tidak ada aset konstruksi dalam pengerjaan yang dicatat secara ekstrakomptabel, semua dicatat secara intrakomptabel dan tersaji dalam Neraca baik Laporan Keuangan OPD maupun LKPD.

ASET DALAM PENGUASAAN **27,874,513,114.00**

Selain Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel diatas, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki Aset Dalam Penguasaan, yang saldo akhir per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp27.874.513.114,00.

Aset dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdapat pada OPD sebagai berikut.

- Dinas Kesehatan**
Saldo Aset Dalam Penguasaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.010.204.168,00.
- Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari**
Saldo Aset Dalam Penguasaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.267.908.802,00.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman**
Saldo Aset Dalam Penguasaan pada DPUPRKP per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.250.000,00.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
Saldo Aset Dalam Penguasaan pada DP3AKBPMD per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.798.540,00.
- Dinas Sosial**
Saldo Aset Dalam Penguasaan pada Dinas Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.398.970.258,00.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel pada BPBD per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.412.804.481,00.
- Dinas Lingkungan Hidup**
Saldo Aset Dalam Penguasaan pada DLH per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.688.179.890,00.
- Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan**
Saldo Aset Dalam Penguasaan pada Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.396.975,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

10. DANA CADANGAN **Rp0.00**
Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada Dana Cadangan

11. ASET LAINNYA **Rp170,731,173,685.44**
Aset lainnya Tahun 2020 terdiri dari tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
Sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Akun tagihan jangka panjang tidak dipunyai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan akun aset lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Daftar Aset Lainnya		
Uraian	2019 Audited (Rp)	2020 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	188,750,000.00	2,071,075,160.00
Aset Tak Berwujud	37,540,568,962.76	43,885,772,860.76
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(15,367,878,633.16)	(18,891,247,676.02)
Aset Lain-lain	148,434,930,223.39	143,665,573,340.70
Jumlah	170,796,370,552.99	170,731,173,685.44

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga **Rp2,071,075,160.00**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:
1. Penyewaan aset kepada PT Sinar Sukses Sentosa untuk pembuatan tiwul instan dari BKAD 188,750,000.00
2. Aset tetap berupa kendaraan bermotor yang dipinjam-pakaikan ke Polres, Kejaksaan dll dari BKAD 1,521,148,660.00
3. Aset tetap berupa kendaraan bermotor yang dipinjam-pakaikan ke Polres, Kejaksaan dll dari Sekretariat Daerah 347,176,500.00
4. Aset tetap berupa tanah yang disewakan kepada pihak ketiga dari Sekretaraiaat Daerah 14,000,000.00
Total **2,071,075,160.00**

2. Aset Tak Berwujud **Rp43,885,772,860.76**
Aset Tak Berwujud terdiri dari hak paten dan aset tak berwujud lainnya berupa Software/Sistem Informasi Manajemen, Kajian, dan Konsultan Perencana. Rincian aset tak berwujud per OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2020 (Rp)
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	9,310,335,048.64
2. DINAS KESEHATAN	1,450,497,640.00
3. RSUD WONOSARI	732,511,996.00
4. DPUPRP	7,083,739,255.68
5. DP3AKBPMD	22,726,000.00
6. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1,718,074,720.00
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	771,729,400.00
8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	795,000,000.00
9. DINAS PERHUBUNGAN	1,034,121,540.00
10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,953,130,100.00
11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	63,091,600.00
12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	985,675,000.00
13. DINAS KEBUDAYAAN	262,115,000.00
14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	227,867,500.00
15. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356,351,000.00
16. DINAS PARIWISATA	4,488,573,600.00
17. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,197,314,500.00
18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	906,427,894.44
19. INSPEKTORAT DAERAH	88,041,500.00
20. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,468,254,766.00
21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,248,742,300.00
22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	364,593,500.00
23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	142,503,000.00
24. SEKRETARIAT DAERAH	164,102,000.00
25. SEKRETARIAT DPRD	50,254,000.00
JUMLAH	43,885,772,860.76



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

-Rp18,891,247,676.02

Penghitungan masa manfaat Aset Tak Berwujud didasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan pada tahun Aset Tak Berwujud tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan Amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, menggunakan metode garis lurus untuk menghitung Amortisasi Aset Tak Berwujud yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud tanggal 12 Nopember 2015.

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life) dan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life). Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life) tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga yang dikelola hanya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life). Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Adapun jenis dan masa manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dalam tabel V.54.

Metode amortisasi Aset Tak Berwujud diterapkan dengan menggunakan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Jadi perhitungannya harga perolehan dibagi masa manfaat dan diperoleh nilai amortisasi per tahun. Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud yang dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasikan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Ketentuan mengenai penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

KODE AKUN	URAIAN	MASA MANFAAT
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.1.5.3	ASET TAK BERWUJUD	
1.5.1.5.3.4	HAK PATEN	20
1.5.1.5.3.5	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	
1.5.3.5.1	SOFTWARE/SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	10
1.5.1.5.3.5	KAJIAN	5
1.5.1.5.3.5	KONSULTAN PERENCANA	10

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2020 (Rp)
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3,852,269,606.91
2. DINAS KESEHATAN	367,878,149.40
3. RSUD WONOSARI	493,952,296.80
4. DPUPRP	2,051,730,227.84
5. DP3AKBPMD	4,545,200.00
6. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	386,139,972.00
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	257,207,280.00
8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	795,000,000.00
9. DINAS PERHUBUNGAN	230,774,954.00
10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	405,181,960.00
11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	14,965,720.00
12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	671,294,028.89
13. DINAS KEBUDAYAAN	33,600,200.00
14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	102,045,750.00
15. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	211,810,400.00
16. DINAS PARIWISATA	2,944,069,590.00
17. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	664,403,925.00
18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	211,690,478.88
19. INSPEKTORAT DAERAH	74,350,550.00
20. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,021,054,642.85
21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,808,217,456.45
22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	161,324,687.00
23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	61,986,000.00
24. SEKRETARIAT DAERAH	55,703,800.00
25. SEKRETARIAT DPRD	10,050,800.00
JUMLAH	18,891,247,676.02



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sehingga Aset Tak Berwujud Netto per 31 Desember 2020 per OPD adalah sebagai berikut :

	Tahun 2020 (Rp)
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5,458,065,441.73
2. DINAS KESEHATAN	1,082,619,490.60
3. RSUD WONOSARI	238,559,699.20
4. DPUPRP	5,032,009,027.84
5. DP3AKBPMD	18,180,800.00
6. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1,331,934,748.00
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	514,522,120.00
8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0.00
9. DINAS PERHUBUNGAN	803,346,586.00
10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,547,948,140.00
11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	48,125,880.00
12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	314,380,971.11
13. DINAS KEBUDAYAAN	228,514,800.00
14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	125,821,750.00
15. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	144,540,600.00
16. DINAS PARIWISATA	1,544,504,010.00
17. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	532,910,575.00
18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	694,737,415.56
19. INSPEKTORAT DAERAH	13,690,950.00
20. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,447,200,123.15
21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,440,524,843.55
22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	203,268,813.00
23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80,517,000.00
24. SEKRETARIAT DAERAH	108,398,200.00
25. SEKRETARIAT DPRD	40,203,200.00
JUMLAH	24,994,525,184.74

4. Aset Lain-lain

Rp143,665,573,340.70

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan ATB. Diantaranya adalah piutang yang tidak tertagih dan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dikarenakan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. PPKD

Saldo awal PPKD sebesar Rp75.775.000,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutasi tambah maupun kurang di tahun 2020. Aset lain-lain PPKD terdiri dari penggaduh sapi banpres tahun 1988, 1992, 1993, 1999 dan penggaduh kambing 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Penggaduh Sapi Banpres Th 1988, 1992, 1993, 1999, dan Penggaduh Kambing 1992 :	Tahun 2020 (Rp)
Kapanewon Gririsubo:	
Penggaduh Sapi Banpres	1,300,000.00
Kapanewon Purwosari:	
Penggaduh Sapi Banpres	1,200,000.00
Kapanewon Patuk:	
- Penggaduh Sapi Banpres	3,200,000.00
- Penggaduh Kambing	875,000.00
Kapanewon Semin:	
Penggaduh Sapi Banpres	6,400,000.00
Kapanewon Ngawen:	
Penggaduh Sapi Banpres	12,400,000.00
Kapanewon Nglipar:	
Penggaduh Sapi Banpres	2,400,000.00
Kapanewon Panggang:	
Penggaduh Sapi Banpres	9,200,000.00
Kapanewon Wonosari:	
Penggaduh Sapi Banpres	38,800,000.00
JUMLAH	Rp75,775,000.00

b. DINKES

Kehilangan karena pencurian uang **Rp15,080,125.00**

c. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

Kekurangan setor pendapatan **Rp17,607,420.00**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

d. Reklasifikasi dari aset tetap yang rusak berat (RB) Rp143,557,110,795.70

	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung dan bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Total
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	45,101,559,743.25	24,982,458,213.67	1,115,417,130.71	4,037,133,383.82	75,236,568,471.45
DINAS KESEHATAN	-	9,273,323,011.37	5,038,138,900.00	11,375,600.00	7,465,733.34	14,330,303,244.71
RSUD	-	1,352,325,611.00	-	1,999,593,853.00	-	3,351,919,464.00
DPUPRKP	-	379,175,886.00	42,055,105.00	4,936,336,634.58	214,120.00	5,357,781,745.58
POL PP	-	12,842,115.00	-	-	-	12,842,115.00
NAKERTRANS	-	411,331,498.00	122,520,000.00	-	269,500.00	534,120,998.00
DP3AKBPM	-	-	-	-	-	-
DISPERTARUNG	-	10,360,520.00	-	-	-	10,360,520.00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	322,640,993.00	595,377,010.70	3,649,625.00	38,348,900.00	960,016,528.70
DINAS DUKCAPIL	-	1,376,156,609.67	-	400,000.00	962,000.00	1,377,518,609.67
DINAS PERHUBUNGAN	-	2,671,121,133.00	195,161,000.00	2,645,313,067.06	-	5,511,595,200.06
DISKOMINFO	-	1,043,624,310.00	-	-	-	1,043,624,310.00
DISKOP-UKM	-	-	-	-	-	-
DPMP	-	58,563,586.00	-	10,000,000.00	-	68,563,586.00
DISBUD	-	2,423,250.00	-	-	-	2,423,250.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	6,713,636.00	10,037,000.00	-	98,642,265.73	115,392,901.73
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	910,717,922.00	1,874,186,015.00	60,899,000.00	-	2,845,802,937.00
DINAS PARIWISATA	-	261,494,074.15	91,806,971.00	605,763,397.76	13,927,300.00	972,991,742.91
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	777,453,966.91	135,145,200.00	3,097,500.00	11,664,642.50	927,361,309.41
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	56,543,784.00	21,050,494,815.91	164,629,771.00	-	21,271,668,370.91
INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
BAPPEDA	-	351,129,554.00	-	-	-	351,129,554.00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	6,290,061,657.24	25,731,125.00	-	5,378,200.00	6,321,170,982.24
BKPPD	-	384,689,163.00	-	-	13,765,200.00	398,454,363.00
BPBD	-	75,717,500.00	-	-	-	75,717,500.00
SEKRETARIAT DAERAH	-	1,313,524,034.00	-	1,500,000.00	31,064,440.00	1,346,088,474.00
SEKRETARIAT DPRD	-	177,554,575.00	-	-	-	177,554,575.00
BAKESBANGPOL	-	3,277,777.00	-	-	-	3,277,777.00
KAP. WONOSARI	-	20,451,537.00	-	-	1,000,000.00	21,451,537.00
KAP. PALIYAN	-	22,814,664.11	-	-	-	22,814,664.11
KAP. PANGGANG	-	23,526,250.00	184,660,000.00	-	-	208,186,250.00
KAP. TEPUS	-	72,152,857.16	-	-	-	72,152,857.16
KAP. RONGKOP	-	29,285,000.00	-	-	-	29,285,000.00
KAP. SEMANU	-	45,072,334.00	-	-	400,000.00	45,472,334.00
KAP. PONJONG	-	18,386,875.00	-	-	1,750,000.00	20,136,875.00
KAP. KARANGMOJO	-	64,777,166.66	-	-	-	64,777,166.66
KAP. PLAYEN	-	33,217,500.00	-	-	-	33,217,500.00
KAP. NGLIPAR	-	37,655,375.00	-	-	-	37,655,375.00
KAP. NGAWEN	-	2,850,000.00	-	-	-	2,850,000.00
KAP. SEMIN	-	17,286,000.00	-	-	-	17,286,000.00
KAP. PATUK	-	57,955,250.00	10,000,000.00	-	-	67,955,250.00
KAP. SAPTOSARI	-	125,283,858.29	-	-	-	125,283,858.29
KAP. GEDANGSARI	-	3,110,000.00	-	-	-	3,110,000.00
KAP. GIRISUBO	-	66,220,200.0	-	-	-	66,220,200.00
KAP. TANJUNGSARI	-	63,073,400.00	-	-	100,000.00	63,173,400.00
KAP. PURWOSARI	-	51,833,998.11	-	-	-	51,833,998.11
Total	-	73,379,278,174.92	54,357,771,356.28	11,557,975,579.11	4,262,085,685.39	143,557,110,795.70

12. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp12,098,423,244.65

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp0.00

Utang PFK yang terjadi di 2016 sebesar Rp1.290.750.944,00 yang terjadi karena BKAD mengajukan kompensasi pajak atas selisih kenaikan PTKP, hal tersebut sdh diselesaikan tahun 2020 oleh masing2 bendahara OPD dan BUD. Pembayaran utang tersebut sudah difasilitasi tata cara pembayaran ke kas negara oleh KPP Pratama.

2. Pendapatan Diterima di Muka Rp1,228,573,726.74

Pendapatan Diterima di Muka adalah utang atas kontribusi perjanjian penyewaan aset pemerintah daerah yang telah dibayar dimuka tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa sewa los dan kios pasar sebesar Rp1.121.477.865,74, BKAD berupa Sewa Tanah dan Ruangan sebesar Rp102.910.450,00 dan pada Dinas Pariwisata berupa Sewa Los dan Kios di Lokasi Obyek Wisata sebesar Rp4.185.411,00.

3. Utang Belanja **Rp10,633,686,177.91**

3.1 Utang Belanja Pegawai **Rp944,763,265.00**

Utang Belanja Pegawai merupakan perhitungan insentif pegawai triwulan empat yang akan dibayarkan di tahun berikutnya yang berada di BKAD sebesar Rp926.763.265,00 dan DLH sebesar Rp18.000.000,00. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai tahun 2020 sebesar Rp944.763.265,00.

3.1 Utang Belanja Barang dan Jasa **Rp9,513,448,912.91**

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban rutin akhir tahun yang dibayarkan tahun berikutnya. Saldo per 31 Desember 2020 per jenis utang belanja dengan rincian sebagai berikut.

a.	Listrik	1,228,002,228.00
b.	Telpon	11,923,216.00
c.	Air	36,995,600.00
d.	Obat-Obatan	643,018,552.00
e.	Bahan Kimia	89,177,082.00
f.	Makan Minum Rapat	7,575,000.00
g.	Makan Minum Harian Pegawai	12,834,500.00
h.	Makan Minum Pasien	951,000.00
i.	Pemeriksaan/ Pengujian Bahan	86,746,000.00
j.	Pemeliharaan perlatan kantor	-
k.	Pemeliharaan perlengkapan kantor	-
l.	Jasa Pelayanan Medik	7,214,088,906.91
l.	Pengolahan Limbah Medis	72,107,178.00
m.	Bahan Logistik/peralatan bencana	4,050,000.00
n.	Pajak Kendaraan Bermotor	-
o.	Sewa Alat Kedokteran/kesehatan	42,000,000.00
p.	Olie, BBM	100,000.00
q.	Tenaga Harian Lepas	-
r.	Jasa Pungutan Retribusi	63,879,650.00
s.	Jasa Kebersihan	

Rp9,513,448,912.91

3.2 Utang Belanja Modal **Rp175,474,000.00**

Utang Belanja Modal merupakan nilai tagihan sebesar 20% terhadap pekerjaan konsultan perencana gedung yang belum dilelangkan dan tagihan sebesar 10% terhadap pekerjaan konsultan pengawas konstruksi yang belum dibayarkan oleh OPD. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara paragraf 3 (biaya perencanaan teknis) dan paragraf 4 (biaya pengawasan teknis). Daftar Utang Belanja Modal per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

No	Nama Instansi	DAFTAR UTANG BELANJA MODAL 2020				Total
		Utang Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Utang Belanja Modal Bangunan Air	Utang Belanja Aset Tetap dalam Renovasi	Utang Belanja Aset Tak Berwujud	
1	RSUD WONOSARI	-	-	-	14,718,000.00	14,718,000.00
2	DPUPRKP	49,763,400.00	45,664,000.00	9,948,000.00	55,380,600.00	160,756,000.00
	Total	49,763,400.00	45,664,000.00	9,948,000.00	70,098,600.00	175,474,000.00

4. Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp236,163,340.00**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa pada akhir tahun yang dibayarkan tahun berikutnya. Utang bagi hasil pajak daerah dikelola oleh DP3ABPMD dan utang bagi hasil retribusi daerah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Saldo per 31 Desember 2020 per jenis utang jangka pendek lainnya rincian adalah sebagai berikut.

a.	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah	-
b.	Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah	236,163,340.00

Rp236,163,340.00

13. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG **Rp0.00**

Saldo awal Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Selama tahun 2020 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang sehingga saldo akhir per 31 Desember 2020 tetap sebesar Rp0,00.

14. EKUITAS **Rp3,193,183,409,591.08**

Ekuitas Akhir pada tahun 2020 sebesar Rp3.193.183.409.591,08 berasal dari Ekuitas Awal LKPD Audited 2019, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	3,012,909,029,339.29
Surplus/Defisit - LO	175,483,187,841.33
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	4,791,192,410.46
Ekuitas Akhir	3,193,183,409,591.08



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut.

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO.

1. PENDAPATAN

Rp1,851,032,804,210.68

Pendapatan LO merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 adalah pendapatan yang sudah menjadi hak yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2020 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Gunungkidul kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Realisasi Pendapatan - LO

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	51,285,056,746.00	59,317,330,124.00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19,188,790,551.54	35,419,475,605.77
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,207,331,734.83	16,874,166,149.90
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	128,948,179,475.64	146,936,478,507.01
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	212,629,358,508.01	258,547,450,386.68
2	Pendapatan Transfer		
2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	21,251,266,005.00	13,056,875,869.00
2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,160,688,954.00	2,513,027,639.00
2.1.3	Dana Alokasi Umum	882,566,083,000.00	965,080,463,000.00
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	327,128,621,305.00	342,547,190,571.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,233,106,659,264.00	1,323,197,557,079.00
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
2.2.1	Dana Penyesuaian	0.00	136,052,137,000.00
2.2.2	Dana Insentif Daerah	65,794,904,000.00	59,059,047,000.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	65,794,904,000.00	195,111,184,000.00
2.3	Transfer Pemerintah Propinsi		
2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil pajak	102,261,829,959.00	105,696,063,048.72
2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	0.00	0.00
2.3.3	Bantuan Keuangan	91,005,025,848.21	173,379,713,904.00
	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	193,266,855,807.21	279,075,776,952.72
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
3.1	Pendapatan Hibah	146,235,026,631.46	116,244,827,464.55
3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	146,235,026,631.46	116,244,827,464.55
	Jumlah Pendapatan	1,851,032,804,210.68	2,172,176,795,882.95

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1851032804210.68, mrnurun sebesar Rp321143991672.27 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2172176795882.95 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. 1. Pendapatan Asli Daerah

Rp212,629,358,508.01



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Rp51,285,056,746.00

Pendapatan Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, dan BPHTB dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No	Nama Pajak Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	868,757,913.00	890,580,446.00
2	Pajak Restoran	4,359,914,232.00	6,671,164,849.00
3	Pajak Hiburan	99,678,500.00	249,063,054.00
4	Pajak Reklame	1,042,927,282.00	973,192,213.00
5	Pajak Penerangan Jalan	14,121,688,863.00	14,388,256,012.00
6	Pajak Parkir	35,906,225.00	44,989,325.00
7	Pajak Air Tanah	455,751,796.00	437,335,974.00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,406,411,000.00	2,236,812,200.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,081,917,883.00	23,998,330,924.00
10	BPHTB	8,812,103,052.00	9,427,605,127.00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		51,285,056,746.00	59,317,330,124.00

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp51285056746.00, menurun sebesar Rp8032273378.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp59317330124.00 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Pajak Hotel

Rp868,757,913.00

Pendapatan Pajak Hotel meliputi Pajak Hotel, Losmen, Pesanggrahan dan Kost dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Hotel

No	Nama Pajak Hotel	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	773,739,795.00	714,890,324.00
2	Pajak Losmen	90,345,125.00	170,760,951.00
3	Pajak Pesanggrahan	3,457,993.00	3,014,171.00
4	Pajak Kost	1,215,000.00	1,915,000.00
Jumlah Pendapatan Pajak Hotel		868,757,913.00	890,580,446.00

Pendapatan Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp868757913.00, menurun sebesar Rp21822533.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp890580446.00.

2. Pajak Restoran

Rp4,359,914,232.00

Pendapatan Pajak Restoran meliputi Pajak Katering dan Rumah Makan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Restoran

No	Nama Pajak Restoran	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pajak Restoran	212,422,059.00	185,518,035.00
2	Pajak Katering	3,139,873,449.00	5,725,565,322.00
3	Pajak Rumah Makan	1,007,618,724.00	760,081,492.00
Jumlah Pendapatan Restoran		4,359,914,232.00	6,671,164,849.00

Pendapatan Pajak Restoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4359914232.00, menurun sebesar Rp2311250617. dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6671164849.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Pajak Hiburan

Rp99,678,500.00

Pendapatan Pajak Hiburan meliputi balap kendaraan bermotor, pusat kebugaran, kolam renang/kendaraan wisata, karaoke, permainan anak-anak/jenis hiburan, pertandingan olahraga, pameran dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Hiburan

No	Nama Pajak Hiburan	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	140,000.00	1,700,000.00
2	Permainan Ketangkasan	67,276,500.00	186,895,054.00
3	Pusat Kebugaran	180,000.00	180,000.00
4	Permainan anak-anak/Jenis Hiburan	0.00	50,000.00
5	Karaoke	32,082,000.00	60,238,000.00
Jumlah Pendapatan Pajak Hiburan		99,678,500.00	249,063,054.00

Pendapatan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp99678500.00, menurun sebesar Rp149384554. dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp249063054.00.

4. Pajak Reklame

Rp1,042,927,282.00

Pendapatan Pajak Reklame meliputi reklame papan/*billboard/videotron/megatron*, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame *neon box*, reklame baliho, reklame bando, reklame *shopsign* dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Reklame

No	Nama Pajak Reklame	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> Reklame <i>Neon Box</i> , Reklame Baliho, Reklame Bando, Reklame <i>Shopsign</i>	889,071,569.00	896,631,351.00
2	Reklame Kain	153,230,713.00	75,529,862.00
3	Reklame Melekat/Stiker	85,000.00	1,031,000.00
4	Reklame Neonbox	540,000.00	0.00
Jumlah Pendapatan Pajak Reklame		1,042,927,282.00	973,192,213.00

Pendapatan Pajak Reklame Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1042927282.00, meningkat sebesar Rp69735069. dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp973192213.00.

5. Pajak Penerangan Jalan

Rp14,121,688,863.00

Pada tahun anggaran 2020, Pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

No	Nama Pajak Penerangan Jalan	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	14,121,688,863.00	14,388,256,012.00
Jumlah Pendapatan Pajak Penerangan Jalan		14,121,688,863.00	14,388,256,012.00

Pendapatan Pajak Penerangan jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14121688863.00, menurun sebesar Rp266567149.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14388256012.00.

6. Pajak Parkir

Rp35,906,225.00

Adapun pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Parkir pada tahun 2020 berasal dari pajak parkir dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Pendapatan Pajak Parkir

No	Nama Pajak Parkir	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pajak Parkir	35,906,225.00	44,989,325.00
Jumlah Pendapatan Pajak Parkir		35,906,225.00	44,989,325.00

Pendapatan Pajak Parkir Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp35906225.00, menurun sebesar Rp9083100.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp44989325.00.

7. Pajak Air Tanah Rp455,751,796.00

Pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Air Tanah

No	Nama Pajak Air Tanah	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	455,751,796.00	437,335,974.00
Jumlah Pendapatan Pajak Air Tanah		455,751,796.00	437,335,974.00

Pendapatan Pajak Air Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp455751796.00, meningkat sebesar Rp18415822.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp437335974.00.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1,406,411,000.00

Adapun Pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Batu Kapur	1,344,020,000.00	2,218,428,200.00
2	Kaolin	7,068,000.00	3,060,000.00
3	Mineral bukan logam dan lainnya	55,323,000.00	15,324,000.00
Jumlah Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		1,406,411,000.00	2,236,812,200.00

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1406411000.00, menurun sebesar Rp830401200.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2236812200.00.

9. Pajak Bumi dan Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Rp20,081,917,883.00

Pendapatan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan PBB P2

No	Nama PBB P2	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	20,081,917,883.00	23,998,330,924.00
Jumlah Pendapatan PBB P2		20,081,917,883.00	23,998,330,924.00

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20081917883.00, menurun sebesar Rp3916413041.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23998330924.00.

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp8,812,103,052.00

Adapun Pendapatan pajak yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan BPHTB

No	Nama Pajak BPHTB	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	BPHTB - Pemindahan Hak	8,812,103,052.00	9,427,605,127.00
Jumlah Pendapatan Pajak BPHTB		8,812,103,052.00	9,427,605,127.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8812103052.00, menurun sebesar Rp615502075.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9427605127.00.

1. 1. 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp19,188,790,551.54

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah meliputi Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Nama Retribusi Daerah	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum		
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	245,171,890.00	189,072,550.00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	767,264,242.00	601,494,400.00
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0.00	706,197,000.00
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	1,631,406,400.00	1,599,139,600.00
e.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15,746,500.00	0.00
f.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	368,820,000.00	507,964,500.00
g.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	542,508,016.00	682,084,755.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Umum		3,570,917,048.00	4,285,952,805.00
2.	Retribusi Jasa Usaha		
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,215,507,802.29	2,271,293,909.52
b.	Retribusi Tempat Pelelangan	751,172,247.25	443,483,191.25
c.	Retribusi Terminal	30,218,400.00	49,441,600.00
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	403,934,000.00	1,245,492,000.00
e.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	20,306,250.00	37,750,000.00
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9,187,913,908.00	25,001,460,340.00
g.	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	499,584,000.00	473,008,500.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha		13,108,636,607.54	29,521,929,540.77
3.	Retribusi Perijinan Tertentu		
a.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2,493,618,896.00	1,583,474,260.00
b.	Retribusi Ijin Trayek	15,618,000.00	28,119,000.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu		2,509,236,896.00	1,611,593,260.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		19,188,790,551.54	35,419,475,605.77

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19188790551.54, menurun sebesar Rp16230685054.23 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35419475605.77 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di rincian sebagai berikut.

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp245,171,890.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah yang meliputi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Retribusi Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan rincain sebagai berikut.

RincianRetribusi Pelayanan Kesehatan

No	Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (PKL) pada Dinas Kesehatan	245,171,890.00	189,072,550.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan		245,171,890.00	189,072,550.00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp245171890.00, meningkat sebesar Rp56099340.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp189072550.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan **Rp767,264,242.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	636,361,442.00	380,577,000.00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	130,902,800.00	220,917,400.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		767,264,242.00	601,494,400.00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp767264242.00, meningkat sebesar Rp165769842.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp601494400.00.

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum **Rp0.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	706,197,000.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		0.00	706,197,000.00

Pada Tahun 2020 tidak ada realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan karena sesuai anggarannya di tahun ini diakui sebagai Pendapatan dari Kerjasama Pemungutan Parkir.

d. Retribusi Pelayanan Pasar **Rp1,631,406,400.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pelayanan Pasar

No	Nama Kemantren Pasar	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Wonosari	375,324,450.00	437,693,900.00
2	Playen	332,088,700.00	280,095,300.00
3	Paliyan	129,745,150.00	103,237,600.00
4	Semin	186,248,250.00	189,561,800.00
5	Semanu	289,522,350.00	311,939,100.00
6	Ponjong	100,353,800.00	89,268,000.00
7	Rongkop	137,168,500.00	113,905,600.00
8	Nglipar	80,955,200.00	73,438,300.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar		1,631,406,400.00	1,599,139,600.00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1631406400.00, meningkat sebesar Rp32266800.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1599139600.00.

e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang **Rp15,746,500.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

No	Nama Kemantren Pasar	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Perindustrian dan Perdagangan	15,746,500.00	-
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar		15,746,500.00	0.00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15746500.00, meningkat sebesar Rp15746500.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor **Rp368,820,000.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	368,820,000.00	507,964,500.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		368,820,000.00	507,964,500.00

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp368820000.00, menurun sebesar Rp139144500.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp507964500.00.

g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi **Rp542,508,016.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Komunikasi dan Informasi dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informasi	542,508,016.00	682,084,755.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		542,508,016.00	682,084,755.00

Pendapatan Pengendalian Menara Telekomunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp542508016.00, menurun sebesar Rp139576739.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp682084755.00.

2. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di rincian sebagai berikut.

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp2,215,507,802.29**

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, BKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	138,314,500.00	187,434,500.00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	245,539,000.00	460,460,000.00
3	Dinas Pariwisata	39,301,406.00	36,110,716.00
7	Dinas Perhubungan	0.00	2,598,400.00
6	Dinas Pertanian dan Pangan	19,244,000.00	37,710,000.00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,188,200,512.96	985,057,793.52
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	584,908,383.33	561,922,500.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		2,215,507,802.29	2,271,293,909.52

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2215507802.29, menurun sebesar Rp55786107.23 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2271293909.52.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

b. Retribusi Tempat Pelelangan

Rp751,172,247.25

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan merupakan penerimaan retribusi pelelangan ikan yang dikelola di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Tempat Pelelangan

No	Nama Tempat Pelelangan Ikan	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	TPI Sadeng	316,705,355.00	205,722,892.50
2	TPI Nampu- Wedi Ombo	2,514,930.00	1,953,770.00
3	TPI Siung	21,796,550.00	12,473,652.50
4	TPI Ngandong - Sundak	16,348,950.00	9,968,887.50
5	TPI Drini	73,369,012.50	36,152,268.75
6	TPI Baron	116,083,893.75	60,520,675.00
7	TPI Ngrenehan	149,045,125.00	69,878,350.00
8	TPI Gesing	55,308,431.00	46,812,695.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan		751,172,247.25	443,483,191.25

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp751172247.25, meningkat sebesar Rp307689056.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp443483191.25.

c. Retribusi Terminal

Rp30,218,400.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Terminal

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	30,218,400.00	49,441,600.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Terminal		30,218,400.00	49,441,600.00

Pendapatan Retribusi Terminal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30218400.00, menurun sebesar Rp19223200. dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49441600.00.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rp403,934,000.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	716,182,000.00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	403,934,000.00	529,310,000.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir		403,934,000.00	1,245,492,000.00

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp403934000.00, menurun sebesar Rp841558000.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1245492000.00.

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Rp20,306,250.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No	Nama Penginapan	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Penginapan Kukup	20,306,250.00	37,750,000.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan		20,306,250.00	37,750,000.00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20306250.00, menurun sebesar Rp17443750.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp37750000.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Rp9,187,913,908.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

No	Nama Pos Tempat Rekreasi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pos Baron	3,836,157,000.00	6,945,241,000.00
2	Pos Baron Malam	0.00	1,186,170,000.00
3	Pos Ngestirejo	0.00	258,400,000.00
4	Pos Sepanjang, Kemadang	0.00	10,117,500.00
5	Pos JJLS	3,055,114,500.00	4,958,473,985.00
6	Pos JJLS Malam	0.00	1,084,140,000.00
7	Pos Tepus	714,818,000.00	1,670,917,000.00
8	Pos Tepus Malam	0.00	583,803,500.00
9	Pos Wediombo	291,748,500.00	613,863,000.00
10	Pos Wediombo Malam	0.00	147,793,500.00
11	Pos Balong	0.00	8,433,000.00
12	Pos Ngrenahan	218,925,000.00	409,279,500.00
13	Pos Ngrenahan Malam	0.00	53,842,500.00
14	Pos Pulegundes	702,373,000.00	1,321,697,000.00
15	Pos Pulegundes Malam	0.00	535,648,000.00
16	Pos Siung	258,156,000.00	469,179,000.00
17	Pos Siung Malam	0.00	89,325,000.00
18	Pos Gunung Gambar	2,167,200.00	7,520,800.00
19	Gua Cerme	2,178,400.00	8,332,800.00
20	Pos Nglangeran	0.00	226,214,000.00
21	Pos Bleberan	0.00	133,550,000.00
22	Pos Kalisuci	0.00	34,335,000.00
23	Pos Bejiharjo	0.00	1,289,634,500.00
24	Retribusi Kios Baron	10,279,750.00	13,947,250.00
25	Retribusi Los Baron	9,330,000.00	14,074,600.00
26	Retribusi Kios Kukup	4,726,000.00	6,859,500.00
27	Retribusi Los Kukup	3,456,000.00	5,328,000.00
28	Pos Pantai Ngedan	0.00	40,324,500.00
29	Pos Watu Gupit (Giri Jati)	0.00	782,388,000.00
30	Pos Watu Gupit (Giri Cahyo)	0.00	304,218,000.00
31	Pos Banjarejo	0.00	85,977,000.00
32	Pos Sriten	0.00	143,117,500.00
33	Pos Retribusi Timang (Purwodadi)	0.00	192,199,500.00
34	Pos Retribusi Gesing (Girikarto)	0.00	1,089,477,000.00
35	Pos Retribusi Green Village	0.00	24,875,200.00
36	Pos Retribusi Gunung Gentong	0.00	4,832,800.00
37	Pos Retribusi Wonosadi	0.00	17,371,200.00
38	Hasil Uji Coba E-Tiketing	31,048.00	0.00
39	Premi Asuransi Jasa Raharja	78,453,510.00	230,559,705.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		9,187,913,908.00	25,001,460,340.00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9187913908.00, meningkat sebesar Rp15813546432.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25001460340.00.

Pada Tahun 2020 pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Desa dicatat direkening Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga-Pendapatan dari Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

g. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah **Rp499,584,000.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan dengan perincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Produk Usaha Daerah

No	Nama SKPD Pengelola Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Pertanian dan Pangan	69,337,500.00	87,600,000.00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	430,246,500.00	385,408,500.00
Jumlah Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah		499,584,000.00	473,008,500.00

Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp499584000.00, meningkat sebesar Rp26575500.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp473008500.00.

3. Retribusi Perijinan Tertentu

Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di rincian sebagai berikut.

a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan **Rp2,493,618,896.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan penerimaan retribusi yang dikelola oleh DPMPPT dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

No	Retribusi IMB	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Retribusi IMB Reklame	750,000.00	9,600,000.00
2	Retribusi IMB Tower	37,851,000.00	89,653,500.00
3	Retribusi IMB Bangunan	2,455,017,896.00	1,484,220,760.00
Jumlah Pendapatan Retribusi IMB		2,493,618,896.00	1,583,474,260.00

Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2493618896.00 dengan rincian realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.380.836.904,00 (Retribusi IMB Reklame sebanyak 1 buah, Retribusi IMB Tower sebanyak 6 buah, Retribusi IMB Bangunan sebanyak 1.137 buah).

Penambahan piutang tahun 2020 sebesar 137.039.100,00 (Retribusi IMB sebanyak 1 buah) dan pelunasan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp24.257.108,00 (Retribusi IMB sebanyak 5 buah), meningkat sebesar Rp910144636.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1583474260.00.

b. Retribusi Ijin Trayek **Rp15,618,000.00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Trayek merupakan penerimaan retribusi yang dikelola di Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Retribusi Ijin Trayek

No	Nama Retribusi	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	15,618,000.00	28,119,000.00
Jumlah Retribusi Ijin Trayek		15,618,000.00	28,119,000.00

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15618000.00, menurun sebesar Rp12501000.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp28119000.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. 1. 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp13,207,331,734.83

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	BANK BPD DIY	10,305,222,861.00	11,640,836,825.32
2	Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Gunungkidul	2,662,810,080.00	4,447,201,654.00
3	Perusahaan Daerah Air Minum	230,097,327.35	777,642,985.16
4	BUKP	9,201,466.48	8,484,685.42
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		13,207,331,734.83	16,874,166,149.90

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13207331734.83, menurun sebesar Rp3666834415.07 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16874166149.90.

1. 1. 4. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp128,948,179,475.64

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda, Pendapatan dari Pemusnahan Arsip, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan BLUD serta Lain-lain PAD Sah lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	3,553,513,612.00	5,072,056,264.00
2	Pendapatan Bunga	5,803,769,403.62	13,912,964,550.96
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	561,125,830.07	882,627,153.54
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	419,824,732.36	163,674,370.68
5	Pendapatan Denda Pajak	395,437,450.00	432,911,502.00
6	Pendapatan Denda Retribusi	317,264,980.00	553,762,113.00
7	Pendapatan dari Pengembalian	512,620,768.00	854,490,503.00
8	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	8,550,000.00	57,675,000.00
9	Pendapatan dari Pemusnahan Arsip	0.00	410,000.00
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0.00	0.00
11	Pendapatan BLUD	110,802,620,786.00	124,766,122,440.00
12	Lain-lain PAD Sah lainnya	356,538,011.97	239,784,609.83
13	Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga	6,216,913,901.62	0.00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		128,948,179,475.64	146,936,478,507.01

Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp128948179475.64, menurun sebesar Rp17988299031.37 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp146936478507.01.

1. Penerimaan Jasa Giro

Rp3,553,513,612.00

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro kas daerah dan jasa giro bendahara dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	3,473,548,665.00	5,031,051,334.00
2	Jasa Giro Bendahara	79,964,947.00	41,004,930.00
Jumlah Penerimaan Jasa Giro		3,553,513,612.00	5,072,056,264.00

Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3553513612.00, menurun sebesar Rp1518542652.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5072056264.00.

2. Pendapatan Bunga

Rp5,803,769,403.62

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan pendapatan bunga deposito dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rincian Pendapatan Bunga

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Bunga Deposito	5,803,769,403.62	13,912,964,550.96
Jumlah Pendapatan Bunga		5,803,769,403.62	13,912,964,550.96

Pendapatan Bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5803769403.62, menurun sebesar Rp8109195147.34 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13912964550.96.

3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah **Rp561,125,830.07**

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan tuntutan ganti kerugian daerah berupa Temuan Inspektorat Daerah, Inspektorat provinsi dan BPK RI.

4. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan **Rp419,824,732.36**

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan selama Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	419,824,732.36	163,674,370.68
Jumlah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		419,824,732.36	163,674,370.68

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp419824732.36, meningkat sebesar Rp256150361.68 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp163674370.68.

5. Pendapatan Denda Pajak **Rp395,437,450.00**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak merupakan Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah dan Pendapatan Denda Pajak PBB, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10,840,514.00	365,268.00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	25,867,305.00	20,946,488.00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	910,234.00	3,298,146.00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4,270,204.00	8,677,885.00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	870,657.00	341,950.00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1,069,404.00	540,364.00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,759,960.00	22,941,692.00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	348,849,172.00	375,799,709.00
Jumlah Pendapatan Denda Pajak		395,437,450.00	432,911,502.00

Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp395437450.00, menurun sebesar Rp37474052.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp432911502.00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6. Pendapatan Denda Retribusi

Rp317,264,980.00

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Denda Retribusi

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	291,695,000.00	508,945,000.00
2	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	23,566,600.00	35,251,200.00
3	Pendapatan Denda Pemakaian Kekayaan Daerah	1,329,100.00	7,405,833.00
4	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	674,280.00	2,160,080.00
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi		317,264,980.00	553,762,113.00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp317264980.00, menurun sebesar Rp236497133.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp553762113.00.

7. Pendapatan dari Pengembalian

Rp512,620,768.00

Realisasi Pendapatan dari pengembalian pada tahun anggaran 2020 berasal dari Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Sisa UP/GU/TU/LS untuk Penyetoran atas Belanja Tahun Berjalan maupun Tahun Sebelumnya	512,620,768.00	854,490,503.00
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian		512,620,768.00	854,490,503.00

Pendapatan dari Pengembalian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp512620768.00, menurun sebesar Rp341869735.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp854490503.00.

8. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

Rp8,550,000.00

Realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda pada tahun anggaran 2020 berasal dari hasil operasi atas penegakan Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	8,550,000.00	57,675,000.00
Jumlah Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda		8,550,000.00	57,675,000.00

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8550000.00, menurun sebesar Rp49125000.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp57675000.00.

9. Pendapatan dari Pemusnahan Arsip

Rp0.00

Tahun 2020 tidak ada realisasi Pendapatan dari Pemusnahan Arsip Daerah.

Rincian Pendapatan dari Pemusnahan Arsip

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan dari Pemusnahan Arsip	0.00	410,000.00
Jumlah Pendapatan dari Pemusnahan Arsip		0.00	410,000.00

10. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Rp0.00

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berasal dari Sewa Aset Daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

11. Pendapatan BLUD

Rp110,802,620,786.00

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan BLUD berasal dari Jasa pelayanan umum di UPT. Puskesmas dan jasa layanan umum di RSUD, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan BLUD

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan BLUD di UPT Puskesmas	47,659,916,721.00	49,287,375,320.00
2	Pendapatan BLUD di RSUD	63,142,704,065.00	75,478,747,120.00
Jumlah Pedapatan BLUD		110,802,620,786.00	124,766,122,440.00

Pendapatan BLUD Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp110802620786.00, menurun sebesar Rp13963501654.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp124766122440.00.

12. Lain-lain PAD Sah lainnya

Rp356,538,011.97

Realisasi Lain-lain PAD Sah Lainnya berasal dari Dana Pembinaan dan Jasa Produksi di BUKP dan Pendapatan dari Penjualan Penebangan Pohon, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Lain-lain PAD Sah lainnya

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Dana Pembinaan dan Jasa Produksi BUKP	179,707,303.97	166,224,227.83
2	Pendapatan dari Penjualan Penebangan Pohon	150,297,600.00	73,560,382.00
3	Pendapatan Lainnya	26,533,108.00	0.00
Jumlah Pedapatan BLUD		356,538,011.97	239,784,609.83

Pendapatan Lain-lain PAD Sah lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp356538011.97, meningkat sebesar Rp116753402.14 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp239784609.83.

Pada Tahun 2020 terdapat reklasifikasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp26.533.108,00 menjadi pendapatan Lain-lain PAD Sah Lainnya-LO karena nilai tersebut merupakan pelunasan piutang yang sudah dihapuskan sebesar Rp17.508.766,00; lebih bayar pembayaran PBB Tahun 2020 sebesar Rp6.363.762,00 dan lebih bayar pelunasan piutang Tahun 2019 sebesar Rp2.660.580,00. Pendapatan tersebut tercatat pada pendapatan pajak daerah namun pendapatan tersebut sebetulnya bukan merupakan pendapatan pajak daerah sehingga pada pendapatan LO diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.

13. Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga

Rp6,216,913,901.62

Realisasi Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga berasal dari Kerja sama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (DESA) di Dinas Pariwisata dan Kerjasama Pemungutan Parkir di Dinas Perhubungan.

Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan dari Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4,977,297,901.62	0.00
	- Pos Baron Malam	848,378,500.00	0.00
	- Pos Ngestirejo	243,713,000.00	0.00
	- Pos Sepanjang, Kemadang	4,218,000.00	0.00
	- Pos JJLS Malam	716,252,500.00	0.00
	- Pos Tepus Malam	343,320,500.00	0.00
	- Pos Wediombo Malam	71,095,500.00	0.00
	- Pos Balong	2,574,000.00	0.00
	- Pos Ngrenehan Malam	38,160,000.00	0.00
	- Pos Pulegundes Malam	296,371,500.00	0.00
	- Pos Siung malam	53,604,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Nglanggeran	128,582,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Bleberan	71,014,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Kalisuci	6,277,500.00	0.00
	- Pos Retribusi Bejiharjo	331,816,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Ngedan	22,896,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Watu Gupit (Girijati)	503,896,500.00	0.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
	- Pos Retribusi Watu Gupit (Gircahyo)	226,620,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Sriten	23,598,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Banjarejo	278,730,000.00	0.00
	- Pos Retribusi GVG Mertelu	2,338,000.00	0.00
	- Pos Retribusi Gunung Gentong	263,200.00	0.00
	- Pos Retribusi Wonosadi	1,332,800.00	0.00
	- Pos Retribusi Timang Purwodadi	45,688,500.00	0.00
	- Pos Retribusi Gesing Girikarto	664,335,000.00	0.00
	- Premi Asuransi Jasa Raharja	51,867,900.00	0.00
2	Pendapatan dari Kerjasama Pemungutan Parkir	1,239,616,000.00	0.00
Jumlah Pedapatan BLUD		6,216,913,901.62	-

1. 2. Pendapatan Transfer

Rp1,492,168,419,071.21

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	21,251,266,005.00	13,056,875,869.00
1.1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4,253,832,601.00	4,617,316,669.00
1.1.2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	16,997,433,404.00	8,439,559,200.00
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2,160,688,954.00	2,513,027,639.00
1.2.1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	11,402,500.00	7,000,200.00
1.2.3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	788,276,289.00	590,155,800.00
1.2.4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,360,418,664.00	1,915,871,639.00
1.2.5	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara	591,501.00	0.00
1.3	Dana Alokasi Umum	882,566,083,000.00	965,080,463,000.00
1.4	Dana Alokasi Khusus	327,128,621,305.00	342,547,190,571.00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1,233,106,659,264.00	1,323,197,557,079.00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
2.1	Dana Penyesuaian (Dana Desa)	0.00	136,052,137,000.00
2.2	Dana Insentif Daerah	65,794,904,000.00	59,059,047,000.00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		65,794,904,000.00	59,059,047,000.00
3	Transfer Pemerintah Propinsi		
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	102,261,829,959.00	105,696,063,048.72
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		102,261,829,959.00	105,696,063,048.72
4	Bantuan Keuangan		
4.1	Bantuan Keuangan Provinsi	91,005,025,848.21	173,379,713,904.00
Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan		91,005,025,848.21	173,379,713,904.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1,492,168,419,071.21	1,661,332,381,031.72

Pendapatan Transfer Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1492168419071.21, menurun sebesar Rp169163961960.51 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1661332381031.72.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Rp146,235,026,631.46

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 berasal dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah - LO

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	146,235,026,631.46	116,244,827,464.55
2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
Jumlah Lain-lain yang sah		146,235,026,631.46	116,244,827,464.55

Pendapatan Transfer Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp146235026631.46, meningkat sebesar Rp29990199166.91 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp116244827464.55.

1. Pendapatan Hibah

Rp146,235,026,631.46

Pendapatan Hibah pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Hibah

No	Nama SKPD	Sumber	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Disdikpora	Total:	1,450,671,821.00	4,426,348,580.00
		Pihak ke Tiga, Komite & CSR	730,884,780.00	
		Hibah APBN	719,787,041.00	
2	Dinkes	Total:	7,327,211,596.46	4,333,745,735.55
		UGM	700,000.00	
		Pihak Ketiga	2,528,488,961.00	
		Kemenkes & Provinsi DIY	4,798,022,635.46	
3	RSUD	Total:	2,256,556,563.00	53,286,600.00
		Kementrian Kesehatan	29,707,102.00	
		Dinkes Provinsi	311,004,061.00	
		UI Depok	25,000,000.00	
		Rumah Salman	50,000,000.00	
		Kelompok Masyarakat	1,840,845,400.00	
4	DPUPRKP	Pemerintah Pusat	30,184,322,805.00	193,772,000.00
5	DP3AKBPMD	BKKBN	932,693,440.00	1,223,652,780.00
6	DISHUB	Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi	1,934,859,600.00	250,000,000.00
7	DISBUD	PEMDA DIY	27,258,877,800.00	69,320,000.00
8	DISPAR	PEMDA DIY	917,150,000.00	4,819,255,000.00
9	BPBD	Total:	1,850,920,774.00	0.00
		Kementrian Kesehatan	710,914,000.00	
		Kelompok Masyarakat	1,140,006,774.00	
10	PPKD	Pemerintah Pusat:	72,113,517,232.00	0.00
		-Sanitasi	3,034,514,500.00	
		-Hibah Air minum Perkotaan	4,980,000,000.00	
		-Dana Bos pada Satuan Pendidikan Negeri	64,099,002,732.00	
11	KAP. WONOSARI	KPU Gunungkidul	485,000.00	4,550,000.00
12	KAP. PALIYAN	KPU Gunungkidul	485,000.00	3,243,888,000.00
13	KAP. PANGGANG	KPU Gunungkidul	485,000.00	20,985,143,294.00
14	KAP. TEPUS	KPU Gunungkidul	485,000.00	8,890,960,774.00
15	KAP. RONGKOP	KPU Gunungkidul	485,000.00	737,145,000.00
16	KAP. SEMANU	KPU Gunungkidul	485,000.00	2,459,429,000.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama SKPD	Sumber	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
17	KAP. PONJONG	KPU Gunungkidul	485,000.00	10,176,000.00
18	KAP. KARANGMOJO	KPU Gunungkidul	485,000.00	2,200,000.00
19	KAP. PLAYEN	KPU Gunungkidul	485,000.00	2,100,000.00
20	KAP. NGLIPAR	KPU Gunungkidul	485,000.00	4,550,000.00
21	KAP. NGAWEN	KPU Gunungkidul	485,000.00	64,535,304,701.00
22	KAP. SEMIN	KPU Gunungkidul	485,000.00	0.00
23	KAP. SAPTOSARI	KPU Gunungkidul	485,000.00	0.00
24	KAP. GEDANGSARI	KPU Gunungkidul	485,000.00	0.00
25	KAP. GIRISUBO	KPU Gunungkidul	485,000.00	0.00
26	KAP. TANJUNGSARI	KPU Gunungkidul	485,000.00	0.00
27	KAP. PURWOSARI	KPU Gunungkidul	485,000.00	0.00
Jumlah Lain-lain pendapatan hibah			146,235,026,631.46	116,244,827,464.55

Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp146235026631.46, meningkat sebesar Rp29990199166.91 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp116244827464.55.

2. Pendapatan Dana Darurat

Rp0.00

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ada pendapatan dana darurat

2. BEBAN

Rp1,639,238,899,549.55

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020.

Beban terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Pegawai	865,240,727,351.00	844,934,518,564.00
2	Beban Persediaan	113,112,262,885.43	148,413,623,212.81
3	Beban Jasa	259,920,980,121.78	307,922,044,163.20
4	Beban Pemeliharaan	28,480,914,639.42	27,064,491,099.27
5	Beban Perjalanan Dinas	18,426,261,244.00	42,597,013,669.00
6	Beban Bunga	0.00	0.00
7	Beban Subsidi	0.00	0.00
8	Beban Hibah	56,831,342,158.00	30,896,785,650.00
9	Beban Bantuan Sosial	3,587,432,500.00	1,050,000,000.00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	173,200,583,618.38	167,982,211,673.63
11	Beban Penyisihan Piutang	2,519,641,641.54	2,004,334,967.89
12	Beban Kerugian Investasi Non Permanen	0.00	0.00
13	Beban Transfer	117,918,753,390.00	272,008,828,185.00
14	Beban Penghapusan Aset	0.00	0.00
15	Beban Dana BOS	0.00	0.00
Jumlah Beban		1,639,238,899,549.55	1,844,873,851,184.80

Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1639238899549.55, menurun sebesar Rp205634951635.25 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1844873851184.80 dengan penjelasan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1.1. Beban Pegawai

Rp865,240,727,351.00

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Beban tersebut dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	742,707,518,700.00	770,245,850,689.00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	68,991,525,895.00	64,048,206,586.00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	6,175,500,000.00	6,188,650,000.00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	990,073,478.00	2,615,731,177.00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	265,247,298.00	1,284,425,112.00
6	Uang Lembur	410,050,000.00	551,655,000.00
7	Beban pegawai Dana BOS	12,284,274,250.00	0.00
8	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	2,758,476,730.00	0.00
9	Beban Honorarium Non Pegawai	11,100,000.00	0.00
10	Beban Jasa Honorarium PNS	7,546,752,000.00	0.00
11	Honorarium Non PNS	23,100,209,000.00	0.00
Jumlah Beban Pegawai		865,240,727,351.00	844,934,518,564.00

Beban Pegawai Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp865240727351.00, meningkat sebesar Rp20306208787.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp844934518564.00.

2.1.2. Beban Persediaan

Rp113,112,262,885.43

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 per obyek beban adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Persediaan per Obyek Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	11,999,167,025.72	19,850,192,405.80
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	40,459,492,376.09	43,645,654,941.51
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	620,602,800.00	2,701,065,530.00
4	Beban Pakaian Kerja	547,721,882.00	9,553,504,060.37
5	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	426,633,000.00	70,733,759,725.13
6	Beban Persediaan Cetak	5,129,174,756.92	0.00
7	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,500,764,000.00	0.00
8	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37,335,372,311.50	0.00
9	Beban Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,310,520,262.20	0.00
10	Beban Persediaan BOS	13,782,814,471.00	0.00
Jumlah Beban Persediaan		113,112,262,885.43	146,484,176,662.81

Beban Persediaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp113112262885.43, menurun sebesar Rp33371913777.38 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp146484176662.81.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1.3. Beban Jasa

Rp259,920,980,121.78

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Jasa Tahun 2020 per obyek beban adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Jasa per Obyek Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Dokumen/administrasi tender	3,900,000.00	7,400,000.00
2	Beban Dokumentasi	461,830,000.00	302,529,716.00
3	Beban Dekorasi	291,630,800.00	907,878,089.00
4	Beban Jasa bahan baku bangunan	1,413,098,939.97	7,249,622,092.20
5	Beban Jasa Hadiah lomba/Cinderamata	0.00	1,602,265,975.00
6	Beban Jasa Papan Nama	291,469,000.00	217,006,101.00
7	Beban Jasa Perlengkapan Upacara	43,871,000.00	197,598,851.00
8	Beban Persediaan Gordin	0.00	53,819,672.00
9	Beban Jasa Belanja Kotak Obat/Saran/Surat	3,796,800.00	1,995,000.00
10	Beban Jasa gas medis	3,960,000.00	0.00
11	Beban Jasa Kantor	138,601,411,445.81	129,798,247,832.00
12	Beban Premi Asuransi	63,651,835,353.00	40,788,004,917.00
13	Beban Jasa Penggandaan	3,328,695,587.00	13,791,959,514.00
14	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,444,916,000.00	3,933,736,280.00
15	Beban Sewa Sarana Mobilitas	656,813,000.00	2,311,798,600.00
16	Beban Sewa Alat Berat	33,000,000.00	56,152,530.00
17	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,072,566,930.00	4,061,052,800.00
18	Beban Makanan dan Minuman	18,637,281,681.00	41,509,172,824.00
19	Beban Jasa Konsultasi	225,997,500.00	201,812,700.00
20	Beban Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0.00	2,457,599,000.00
21	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	4,391,367,339.00	10,064,416,173.00
22	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9,777,664,500.00	18,915,004,500.00
23	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	2,724,099,707.00	3,652,265,897.00
24	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	272,000,000.00	294,000,000.00
25	Beban Jasa Honorarium PNS	0.00	5,252,959,000.00
26	Honorarium Non PNS	0.00	13,336,009,600.00
27	Beban Honorarium Non Pegawai	0.00	6,957,736,500.00
28	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,767,325,000.00	0.00
29	Beban Jasa BOS	8,822,449,539.00	0.00
Jumlah Beban Jasa		259,920,980,121.78	307,922,044,163.20

Beban Jasa Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp259920980121.78, menurun sebesar Rp48001064041.420 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp307922044163.20.

2.1.3. Beban Pemeliharaan

Rp28,480,914,639.42

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 sebesar Rp27.064.491.099,27 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 terdiri atas:

Rincian Beban Pemeliharaan per Obyek Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban pemeliharaan perlatan kantor	2,632,195,244.00	3,799,919,123.00
2	Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	1,393,763,971.00	1,406,242,457.00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,999,954,750.42	5,186,725,466.27
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3,275,390,000.00	6,458,870,270.00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100,882,900.00	97,118,900.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
6	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	-	977,379,890.00
7	Beban Jasa Service	2,196,654,514.00	3,067,573,512.00
8	Beban Penggantian Suku Cadang	17,922,500.00	-
9	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,441,363,127.00	5,598,532,181.00
10	Beban Jasa KIR	2,924,800.00	3,520,100.00
11	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	448,524,250.00	468,609,200.00
12	Beban Pemeliharaan BOS	7,971,338,583.00	-
Jumlah Beban Pemeliharaan		28,480,914,639.42	27,064,491,099.27

Beban Pemeliharaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp28480914639.42, meningkat sebesar Rp1416423540.15 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp27064491099.27.

2.1.4. Beban Perjalanan Dinas

Rp18,426,261,244.00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 per obyek beban adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per Obyek Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,289,520,000.00	11,926,911,000.00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,231,451,244.00	28,017,192,669.00
3	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2,695,360,000.00	2,652,910,000.00
4	Beban Perjalanan Dinas BOS	209,930,000.00	0.00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		18,426,261,244.00	42,597,013,669.00

Beban Perjalanan Dinas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18426261244.00, menurun sebesar Rp24170752425.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp42597013669.00.

2.1.5. Beban Hibah

Rp56,831,342,158.00

Realisasi Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 merupakan Beban Hibah kepada Pemerintah dan Beban Hibah yang diberikan kepada Kelompok Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Hibah per Obyek Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	0.00	6,440,990,650.00
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	56,831,342,158.00	24,455,795,000.00
Jumlah Beban Hibah		56,831,342,158.00	30,896,785,650.00

Beban Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp56831342158.00, meningkat sebesar Rp25934556508.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp30896785650.00.

2.1.6. Beban Bantuan Sosial

Rp3,587,432,500.00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun dirinci sebagai berikut.

Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial	3,587,432,500.00	1,050,000,000.00
Jumlah Beban Hibah		3,587,432,500.00	1,050,000,000.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Beban Bantuan Sosial Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3587432500.00, meningkat sebesar Rp2537432500.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1050000000.00.

2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp173,200,583,618.38

Realisasi Beban Penyusutan terdiri dari Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap		
1.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70,515,406,782.77	63,903,019,502.14
1.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22,669,161,492.28	21,375,716,582.62
1.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	76,444,977,650.47	79,010,075,013.31
1.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap		169,629,545,925.52	164,288,811,098.07
No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
2	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	3,571,037,692.86	3,693,400,575.56
Jumlah Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		3,571,037,692.86	3,693,400,575.56
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		173,200,583,618.38	167,982,211,673.63

2.01.10 Beban Penyisihan Piutang Rp2,519,641,641.54

Beban Lain-lain berupa realisasi Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2,342,818,133.90	1,872,077,174.33
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	86,611,771.60	4,043,456.00
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	66,036,658.67	84,370,830.75
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	5,259,864.40	25,491,792.48
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	18,915,212.97	18,351,714.33
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		2,519,641,641.54	2,004,334,967.89

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2519641641.54, meningkat sebesar Rp515306673.65 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2004334967.89.

2.01.11 Beban Transfer Rp117,918,753,390.00

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Transfer per Obyek Beban

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5,801,490,500.00	5,796,327,000.00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	2,148,919,090.00	6,011,618,885.00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	210,000,000.00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	109,968,343,800.00	258,917,289,300.00
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik)	0.00	1,073,593,000.00
Jumlah Beban Transfer		117,918,753,390.00	272,008,828,185.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp117918753390.00, menurun sebesar Rp154090074795.00 dibandingkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp272008828185.00.

3. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasional Rp211,793,904,661.13

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 mengalami Surplus, merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus/Defisit dari Operasi

PENDAPATAN	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
PAD	212,629,358,508.01	258,547,450,386.68
Transfer Dana Perimbangan	1,492,168,419,071.21	1,797,384,518,031.72
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	146,235,026,631.46	116,244,827,464.55
JUMLAH PENDAPATAN	1,851,032,804,210.68	2,172,176,795,882.95
BEBAN		
Beban	1,639,238,899,549.55	1,844,873,851,184.80
JUMLAH BEBAN	1,639,238,899,549.55	1,844,873,851,184.80
JUMLAH SURPLUS DARI OPERASIONAL	211,793,904,661.13	327,302,944,698.15

4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp6,121,547,393.00

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 mengalami Defisit dari kegiatan non operasional, merupakan selisih antara Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	6,121,547,393.00	391,243,198.00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
5	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional		6,121,547,393.00	391,243,198.00

4.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar Rp6,121,547,393.00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 merupakan penerimaan yang berasal dari selisih Nilai Buku Aset Tetap yang dijual dengan nilai pembayaran yang diterima.

4.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0.00

Surplus Penyelesaian Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020.

4.3. Defisit Penjualan Aset Non Lancar Rp0.00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 merupakan penerimaan yang berasal dari selisih Nilai Buku Aset Tetap yang dijual dengan nilai pembayaran yang diterima berasal dari penjualan bangunan.

4.4. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0.00

Defisit Penyelesaian Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 tidak ada penyelesaian kewajiban jangka panjang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

4.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0.00

Tidak ada kegiatan non operasional lainnya di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020, sehingga Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

5. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp217,915,452,054.13

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih antara jumlah Surplus/Defisit dari Operasi dan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Surplus dari Operasi	211,793,904,661.13	327,302,944,698.15
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	6,121,547,393.00	391,243,198.00
Surplus Sebelum Pos Luar Biasa		217,915,452,054.13	327,694,187,896.15

6. Pos Luar Biasa (42,432,264,212.80)

Pos Luar Biasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pos Luar Biasa

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00
2	Beban Luar Biasa	42,432,264,212.80	1,098,249,000.00
Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(42,432,264,213)	1,098,249,000.00

Terjadinya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi penyajian Pos Laporan Keuangan, dimulai dengan *refocusing* dan realokasi anggaran yang mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan covid 19 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Selanjutnya hasil *refocusing* dialokasikan dalam Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid-19, kemudian sesuai dengan PSAP 12 tentang Laporan Operasional bahwa belanja tak terduga LRA pada Laporan Operasional disajikan dalam Pos Luar Biasa dalam Beban Luar Biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik yaitu: kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

6.1. Pendapatan Luar Biasa Rp0.00

Tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

6.2. Beban Luar Biasa 42,432,264,212.80

Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 merupakan beban dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh 5 Pengampu BTT. Selanjutnya dari 5 pengampu BTT tersebut dan terdapat mutasi persediaan ke 32 SKPD yang dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Luar Biasa

No	Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	18,123,990,465.88
2	Rumah Sakit Umum Daerah	3,499,750,087.00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	35,083,792.00
4	Dinas Sosial	12,643,107,488.00
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	450,000.00
6	Dinas Lingkungan Hidup	138,128,133.50
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,560,000.00
8	Dinas Perhubungan	12,598,659.67
9	Dinas komunikasi dan informatika	3,647,621.00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,997,634.95
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2,000,000.00
12	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	1,185,800.00
13	Dinas Pariwisata	461,665,281.05



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Perangkat Daerah	Realisasi 2020 (Rp)
14	Disnas Perindustrian dan Perdagangan	41,830,200.00
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5,284,350.00
16	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	6,267,600.00
17	Badan Penanggulangan Bencana daerah	6,457,076,109.75
18	Sekretariat Daerah	6,294,200.00
19	Kapanewon Wonosari	97,551,462.50
20	Kapanewon Paliyan	43,425,782.50
21	Kapanewon Panggang	36,114,152.50
22	Kapanewon Tepus	40,760,147.50
23	Kapanewon Rongkop	45,895,872.50
24	Kapanewon Semanu	51,127,592.50
25	Kapanewon Ponjong	68,486,852.50
26	Kapanewon Karangmojo	67,735,942.50
27	Kapanewon Playen	75,709,392.50
28	Kapanewon Nglipar	41,927,602.50
29	Kapanewon Ngawen	38,863,877.50
30	Kapanewon Semin	63,834,947.50
31	Kapanewon Patuk	62,295,222.50
32	Kapanewon Saptosari	47,188,142.50
33	Kapanewon Gedangsari	47,242,142.50
34	Kapanewon Girisubo	45,643,872.50
35	Kapanewon Tanjungsari	31,955,792.50
36	Kapanewon Purwosari	32,773,427.50
Jumlah		42,381,449,647.80

7. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp175,483,187,841.33

Surplus Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 berasal dari Surplus Sebelum Pos Luar Biasa dikurangi dengan Pos Luar Biasa sehingga Surplus Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Surplus/Defisit LO

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Audited 2019 (Rp)
1	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	217,915,452,054.13	327,694,187,896.15
2	Pos Luar Biasa	(42,432,264,212.80)	(1,098,249,000.00)
Surplus/ Defisit LO		175,483,187,841.33	326,595,938,896.15

Surplus LO terjadi karena banyak dari beban luar biasa dilakukan reklas menjadi Aset dan persediaan dan aset ekstrakomtabel.

Surplus tersebut akan menambah Ekuitas per 31 Desember 2020.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

E. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **Rp3,193,183,409,591.08**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal laporan.

1. **Ekuitas Awal Rp3,012,909,029,339.29**

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.012.909.029.339,29 merupakan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 dengan rincian per 1 Januari 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Ekuitas Awal Perangkat Daerah Per 1 Januari 2020

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Awal 2020 (Rp)	Ekuitas Awal 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	553,539,217,489.67	623,600,683,528.13
2	Dinas Kesehatan	145,937,873,972.17	128,247,740,632.27
3	Rumah Sakit Umum Daerah	108,903,307,243.54	84,278,241,147.17
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	945,467,993,483.24	920,023,985,790.50
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1,149,533,311.54	956,326,839.99
6	Dinas Sosial	4,180,815,489.17	736,770,083.79
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,046,394,942.41	6,865,172,237.34
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,845,047,074.86	5,839,245,019.92
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	202,830,563,986.17	84,064,471,108.69
10	Dinas Lingkungan Hidup	25,497,103,953.15	19,240,225,654.31
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,431,505,132.91	7,900,193,624.59
12	Dinas Perhubungan	57,313,180,597.82	52,133,438,034.95
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,427,776,768.23	3,383,137,017.12
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5,535,565,497.50	1,224,027,259.57
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	6,252,060,636.91	5,929,571,038.56
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	43,814,578,586.74	695,137,727.45
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,166,760,012.73	6,163,405,952.90
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	15,397,006,293.93	15,733,572,348.90
19	Dinas Pariwisata	47,723,049,278.04	39,733,267,801.76
20	Dinas Pertanian dan Pangan	30,173,822,092.48	29,289,805,479.32
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	107,043,519,383.51	100,728,467,853.70
22	Inspektorat Daerah	4,254,977,543.83	4,338,227,552.89
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,087,212,758.05	4,843,673,224.12
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	403,856,638,714.32	435,632,612,643.18
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50,211,366,201.40	72,411,369,954.92
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	9,993,522,475.26	9,730,961,088.97
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22,531,705,075.98	2,708,570,789.57
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	0
29	Sekretariat Daerah	136,028,460,200.26	133,840,898,253.35
30	DPRD	0.00	0
31	Sekretariat DPRD	6,561,726,463.98	7,179,166,690.13
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,917,126,212.23	1,970,185,418.99
33	Kapanewon Wonosari	4,576,122,138.15	322,842,703.19
34	Kapanewon Paliyan	1,008,343,357.00	1,049,657,665.55
35	Kapanewon Panggang	1,119,665,035.81	1,011,641,568.57
36	Kapanewon Tepus	1,833,753,133.19	366,475,686.02
37	Kapanewon Rongkop	1,514,768,258.55	1,509,699,475.22
38	Kapanewon Semanu	1,756,212,232.71	894,740,621.58
39	Kapanewon Ponjong	905,413,890.68	897,606,377.09
40	Kapanewon Karangmojo	626,743,401.01	837,911,375.99
41	Kapanewon Playen	843,507,741.70	755,059,598.00
42	Kapanewon Nglipar	1,207,572,195.61	1,184,616,466.34
43	Kapanewon Ngawen	1,139,612,884.22	1,079,835,157.14
44	Kapanewon Semin	2,572,287,273.07	1,636,753,324.20
45	Kapanewon Patuk	1,745,438,859.80	1,769,808,084.74
46	Kapanewon Saptosari	2,278,155,993.15	2,075,158,651.49
47	Kapanewon Gedangsari	746,212,684.47	594,508,772.08
48	Kapanewon Girisubo	3,277,597,269.15	1,436,390,253.56
49	Kapanewon Tanjungsari	759,252,429.79	639,089,215.17
50	Kapanewon Purwosari	878,959,689.20	897,279,814.58
Jumlah		3,012,909,029,339.29	2,828,381,626,607.56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2. Surplus/Defisit - LO..... **Rp175,483,187,841.33**

Surplus/Defisit -LO adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit -LO Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 sebesar Rp175.483.187.841,33, dengan rincian per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Surplus/Defisit LO Perangkat Daerah Per 31 Desember 2020

No	Nama Perangkat Daerah	Surplus/Defisit-LO 2020 (Rp)	Surplus/Defisit-LO 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(639,352,111,654.94)	(674,290,221,145.2)
2	Dinas Kesehatan	(191,675,097,416.53)	(148,348,127,512.8)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(39,309,154,416.65)	(27,212,298,226.8)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(73,620,126,265.47)	(84,175,555,772.6)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(7,520,602,524.56)	(8,220,605,977.6)
6	Dinas Sosial	(16,821,180,396.2)	(6,014,535,530.5)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(4,220,413,526.85)	(6,610,071,333.5)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(10,080,987,876.3)	(11,349,748,624.5)
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/ Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	(6,770,406,442.38)	(12,896,578,237.5)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(9,085,753,751.40)	(9,579,018,046.0)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6,739,855,780.04)	(6,902,886,369.7)
12	Dinas Perhubungan	(16,709,727,022.88)	(367,196,053.4)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(14,673,897,015.19)	(10,913,188,528.3)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2,180,968,578.38)	(2,690,572,103.1)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	(906,569,121.01)	(2,448,292,192.4)
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	14,915,666,558.12	(15,605,216,532.7)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3,656,266,592.15)	(4,465,847,897.2)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3,364,583,623.40)	(6,151,321,945.7)
19	Dinas Pariwisata	3,778,491,494.76	11,095,361,960.9
20	Dinas Pertanian dan Pangan	(19,323,446,642.51)	(27,049,191,155.8)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(9,461,950,584.47)	(7,758,936,896.2)
22	Inspektorat Daerah	(6,767,151,717.99)	(5,686,449,915.6)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(5,353,205,309.70)	(6,738,707,180.1)
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1,385,874,678,477.24	1,563,288,598,833.4
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30,547,316,217.61	34,478,349,273.2
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(74,732,731,228.48)	(76,089,411,303.7)
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10,463,751,804.35)	(14,400,231,267.5)
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(736,518,396.00)	(759,772,896.0)
29	Sekretariat Daerah	(17,555,035,449.88)	(20,630,460,241.6)
30	DPRD	(17,361,802,344.00)	(18,207,260,657.0)
31	Sekretariat DPRD	(19,820,495,492.9)	(29,440,734,481.9)
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2,894,581,284.50)	(4,064,925,103.8)
33	Kapanewon Wonosari	(1,561,795,098.48)	(2,101,810,352.0)
34	Kapanewon Paliyan	(1,347,626,594.35)	(1,742,003,410.6)
35	Kapanewon Panggang	(1,627,191,964.81)	(1,912,939,292.8)
36	Kapanewon Tepus	(1,516,801,717.09)	(1,649,361,633.8)
37	Kapanewon Rongkop	(1,494,203,855.09)	(1,630,283,623.7)
38	Kapanewon Semanu	(1,759,399,744.67)	(2,291,903,336.7)
39	Kapanewon Ponjong	(1,829,805,470.27)	(1,975,492,590.4)
40	Kapanewon Karangmojo	(1,489,356,865.84)	(1,799,639,718.0)
41	Kapanewon Playen	(1,938,423,763.81)	(1,904,549,070.3)
42	Kapanewon Nglipar	(1,329,357,614.15)	(1,891,584,262.2)
43	Kapanewon Ngawen	(1,744,704,453.59)	(2,026,119,645.3)
44	Kapanewon Semin	(1,571,336,298.56)	(1,715,041,954.1)
45	Kapanewon Patuk	(1,575,052,891.40)	(1,800,571,515.9)
46	Kapanewon Saptosari	(1,610,482,751.29)	(1,924,547,983.3)
47	Kapanewon Gedangsari	(1,749,184,937.61)	(1,761,575,966.6)
48	Kapanewon Girisubo	(1,471,468,675.29)	(1,438,523,633.4)
49	Kapanewon Tanjungsari	(1,431,494,491.81)	(1,912,694,044.4)
50	Kapanewon Purwosari	(1,426,905,459.23)	(1,720,366,009.4)
Jumlah		175,483,187,841.33	326,595,938,896.15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar..... 4,791,192,410.46

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.791.192.410,46 merupakan penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited 2019 dan tahun 2020, dengan rincian per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2020**

No	Nama Perangkat Daerah	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2020 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(8,703,603,472.39)	(113,673,951,807.76)
2	Dinas Kesehatan	38,562,345,963.84	(1,356,790,186.400)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8,999,299,092.53	(187,938,792.700)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	27,425,400,161.79	(30,617,253,677.270)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	156,435,377.59	409,594,857.140
6	Dinas Sosial	12,696,268,488.00	3,235,627,782.840
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	262,852,499.96	424,080,469.580
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1,585,602,922.80)	4,555,067,304.480
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/ Kundha Niti Mandala Sarta	(516,667,250.31)	(35,965,850.000)
10	Dinas Lingkungan Hidup	1,210,055,836.49	3,446,526,968.790
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	461,910,000.00	62,840,640.000
12	Dinas Perhubungan	(1,908,026,005.31)	(2,094,482,461.780)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(257,557,748.20)	265,395,821.420
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(29,448,715.05)	3,488,067,173.320
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	(60,368,352.17)	(61,652,690.300)
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	(43,300,832.00)	(9,224,733,773.560)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(106,122,445.80)	(15,077,590.000)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,834,000.00	(42,806,870.000)
19	Dinas Pariwisata	675,118,537.19	985,028,803.220
20	Dinas Pertanian dan Pangan	(937,518,355.28)	(139,879,113.040)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(2,491,697,333.34)	(3,327,382,251.960)
22	Inspektorat Daerah	200,055,249.00	(73,236,194.500)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	121,318,000.00	320,724,500.000
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(66,298,323,511.13)	(4,520,638,122.130)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8,005,492,682.05	(8,890,227,932.330)
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	285,743,600.00	330,371,680.000
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(12,849,228,139.00)	522,553,999.990
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	-
29	Sekretariat Daerah	542,689,198.98	3,646,645,452.530
30	DPRD	0.00	-
31	Sekretariat DPRD	(359,045,525.150)	102,125,944.280
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(21,432,335.67)	48,888,800.000
33	Kapanewon Wonosari	166,334,542.74	4,442,509,095.920
34	Kapanewon Paliyan	60,184,862.78	16,220,575.000
35	Kapanewon Panggang	45,488,232.78	131,600,384.000
36	Kapanewon Tepus	49,116,888.49	1,532,607,590.000
37	Kapanewon Rongkop	84,291,952.78	16,496,000.000
38	Kapanewon Semanu	73,773,672.78	914,094,176.800
39	Kapanewon Ponjong	96,745,932.78	59,543,630.000
40	Kapanewon Karangmojo	78,495,022.78	(187,804,500.000)
41	Kapanewon Playen	29,268,136.45	(285,000.000)
42	Kapanewon Nglipar	61,576,682.78	38,488,000.000
43	Kapanewon Ngawen	45,440,462.35	2,079,500.000
44	Kapanewon Semin	106,731,027.78	962,068,080.000
45	Kapanewon Patuk	107,926,302.78	17,696,000.000
46	Kapanewon Saptosari	66,447,222.78	233,687,200.000
47	Kapanewon Gedangsari	66,501,222.78	115,981,040.000
48	Kapanewon Girisubo	99,860,120.47	1,911,126,820.000
49	Kapanewon Tanjungsari	63,601,872.78	165,332,360.000
50	Kapanewon Purwosari	47,532,507.78	(21,500,000.000)
Jumlah		4,791,192,410.46	(142,068,536,164.420)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 karena adanya penyesuaian-penyesuaian mengenai:

No	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2020 (Rp)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2019 (Rp)
1	Penyesuaian Kas	(73,474,747.85)	(108,655,618.00)
2	Penyesuaian Setara Kas	0.00	0.00
3	Penyesuaian Piutang	5,759,851,440.51	341,590,653.88
5	Penyesuaian Persediaan	13,657,369,589.81	(487,334,833.57)
6	Penyesuaian Aset Tetap	12,296,303,565.36	(123,322,008,267.60)
7	Penyesuaian Aset Tak Berwujud	1,031,549,738.00	922,349,944.95
8	Penyesuaian Aset Lain-lain	(5,125,288,053.69)	(8,050,485,153.89)
9	Penyesuaian Utang PFK	0.00	0.00
10	Penyesuaian Utang Belanja	0.00	122,764,467.00
11	Penyesuaian Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
12	Penyesuaian Penyertaan Modal	4,579,400,833.39	(12,552,482,632.13)
13	Penyesuaian Pendapatan	(769,787,041.00)	0.00
14	Penyesuaian Beban	(26,564,732,914.07)	325,725,274.94
15	Penyesuaian Utang Bunga	0.00	0.00
Jumlah		4,791,192,410.46	(142,808,536,164.42)

4. Ekuitas Akhir **Rp3,193,183,409,591.08**

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.193.183.409.591,08 berasal dari penjumlahan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2020

URAIAN	2020	2019
Ekuitas Awal	Rp3,012,909,029,339.29	Rp2,828,381,626,607.56
Surplus/Defisit - LO	Rp175,483,187,841.33	Rp326,595,938,896.15
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp4,791,192,410.46	(Rp142,068,536,164.42)
Ekuitas Akhir	Rp3,193,183,409,591.08	Rp3,012,909,029,339.29

Adapun rincian Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Ekuitas Akhir Perangkat Daerah Per 31 Desember 2020

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Akhir 2020 (Rp)	Ekuitas Akhir 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	582,435,356,821.34	553,539,217,489.67
2	Dinas Kesehatan	171,833,104,713.19	145,937,873,972.17
3	Rumah Sakit Umum Daerah	110,263,685,490.42	108,903,307,243.54
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	938,305,502,264.67	945,467,993,483.24
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1,000,050,944.57	1,149,533,311.54
6	Dinas Sosial	3,828,126,034.00	4,180,815,489.17
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,502,258,648.52	7,046,394,942.41
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,199,770,925.76	11,845,047,074.86
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/ Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	207,591,191,853.69	202,830,563,986.17
10	Dinas Lingkungan Hidup	25,666,073,719.70	25,497,103,953.15
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,332,885,948.87	8,431,505,132.91
12	Dinas Perhubungan	56,021,378,107.31	57,313,180,597.82
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,384,286,404.84	8,427,776,768.23
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5,310,352,284.07	5,535,565,497.50
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	6,081,937,393.73	6,252,060,636.91
16	Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan	140,686,887,174.86	43,814,578,586.74
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,969,099,485.78	6,166,760,012.73
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	15,498,250,441.78	15,397,006,293.93
19	Dinas Pariwisata	46,578,087,256.87	47,723,049,278.04
20	Dinas Pertanian dan Pangan	28,389,887,812.69	30,173,822,092.48
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	103,432,651,238.75	107,043,519,383.51
22	Inspektorat Daerah	4,274,869,622.84	4,254,977,543.83
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,601,399,721.35	6,087,212,758.05
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	423,496,876,846.95	403,856,638,714.32
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	51,959,167,608.67	50,211,366,201.40
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	9,728,272,064.78	9,993,522,475.26
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39,800,287,038.16	22,531,705,075.98
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	0.00
29	Sekretariat Daerah	135,277,788,009.15	136,028,460,200.26
30	DPRD	0.00	0.00
31	Sekretariat DPRD	5,971,069,421.95	6,561,726,463.98



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama Perangkat Daerah	Ekuitas Akhir 2020 (Rp)	Ekuitas Akhir 2019 (Rp)
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,752,410,568.06	1,917,126,212.23
33	Kapanewon Wonosari	4,407,510,514.41	4,576,122,138.15
34	Kapanewon Paliyan	979,998,593.43	1,008,343,357.00
35	Kapanewon Panggang	1,089,370,666.98	1,119,665,035.81
36	Kapanewon Tepus	1,769,455,268.59	1,833,753,133.19
37	Kapanewon Rongkop	1,474,632,093.24	1,514,768,258.55
38	Kapanewon Semanu	1,714,597,668.82	1,756,212,232.71
39	Kapanewon Ponjong	878,629,443.19	905,413,890.68
40	Kapanewon Karangmojo	587,839,075.95	626,743,401.01
41	Kapanewon Playen	761,826,274.34	843,507,741.70
42	Kapanewon Nglipar	1,198,754,755.24	1,207,572,195.61
43	Kapanewon Ngawen	1,102,023,456.98	1,139,612,884.22
44	Kapanewon Semin	2,542,269,318.29	2,572,287,273.07
45	Kapanewon Patuk	1,710,661,471.18	1,745,438,859.80
46	Kapanewon Saptosari	2,254,299,440.64	2,278,155,993.15
47	Kapanewon Gedangsari	762,959,386.64	746,212,684.47
48	Kapanewon Girisubo	3,200,570,991.33	3,277,597,269.15
49	Kapanewon Tanjungsari	724,984,325.76	759,252,429.79
50	Kapanewon Purwosari	850,060,978.75	878,959,689.20
Jumlah		3,193,183,409,591.08	3,012,909,029,339.29



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

F. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran.

Arus Kas dalam Laporan Arus Kas dibedakan dalam 4 jenis Arus yaitu Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1. Arus Masuk Kas		Rp1,785,952,320,961.25
Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari penerimaan :		
	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
a. Penerimaan Pajak Daerah	53,300,849,183.00	57,819,154,055.00
b. Penerimaan Retribusi Daerah	18,626,595,567.37	35,421,575,141.25
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg. Dipisahkan	16,874,256,511.63	15,068,840,811.36
d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132,981,383,124.04	145,824,921,682.01
e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	21,251,266,005.00	13,056,875,869.00
f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,160,688,954.00	2,513,027,639.00
g. Penerimaan Dana Alokasi Umum	882,566,083,000.00	965,080,463,000.00
h. Penerimaan Dana Alokasi khusus	327,128,621,305.00	342,547,190,571.00
i. Penerimaan Dana Otonomi Daerah	0.00	0.00
j. Penerimaan Dana Penyesuaian	0.00	136,052,137,000.00
k. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil pajak	102,149,130,231.00	102,025,720,182.72
l. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00
m. Penerimaan Bantuan Keuangan	91,005,025,848.21	173,379,713,904.00
n. Penerimaan Hibah	72,113,517,232.00	64,535,304,701.00
o. Penerimaan Dana Insentif Daerah	65,794,904,000.00	59,059,047,000.00
p. Penerimaan Dana Darurat	0.00	0.00
q. Penerimaan Lainnya	0.00	0.00
r. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00
JUMLAH	1,785,952,320,961.25	2,112,383,971,556.34
1.2. Arus Keluar Kas		Rp1,520,162,027,505.50
Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari :		
	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
a. Pembayaran Pegawai	864,289,809,086.00	880,858,227,337.00
b. Pembayaran Barang	405,524,743,460.50	459,764,784,618.55
c. Pembayaran Bunga	0.00	0.00
d. Pembayaran Subsidi	0.00	0.00
e. Pembayaran Hibah	56,831,342,158.00	24,455,795,000.00
f. Pembayaran Bantuan Sosial	3,587,432,500.00	1,050,000,000.00
g. Pembayaran Bantuan Keuangan	109,968,343,800.00	260,200,882,300.00
h. Pembayaran Tidak Terduga	70,873,337,876.00	1,098,249,000.00
i. Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5,801,490,500.00	5,166,966,500.00
j. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3,285,528,125.00	5,842,697,435.00
k. Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00
l. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0.00	0.00
JUMLAH	1,520,162,027,505.50	1,638,437,602,190.55
1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (Jumlah 1.1 - 1.2)		Rp265,790,293,455.75



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas Investasi adalah perolehan atau pelepasan investasi jangka panjang - (aktiva tetap + penyertaan modal pemerintah daerah)

2.1. Arus Masuk Kas **Rp6,121,547,393.00**

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari :

	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>
a. Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00
b. Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	286,436,665.00	80,205,698.00
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5,835,110,728.00	311,037,500.00
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
g. Penjualan Aset lainnya	0.00	0.00
h. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0.00	0.00
JUMLAH	6,121,547,393.00	391,243,198.00

2.2. Arus Keluar Kas **Rp292,214,104,771.18**

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari Belanja Modal selama tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut.

	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>
a. Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
b. Perolehan Tanah	5,223,253,120.00	123,999,928,350.00
c. Perolehan Peralatan dan Mesin	57,107,076,802.75	88,224,734,163.90
d. Perolehan Gedung dan Bangunan	140,574,735,393.01	158,352,591,834.18
e. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,086,398,631.07	106,091,380,314.24
f. Perolehan Aset tetap Lainnya	145,296,800.00	8,140,304,746.00
g. Perolehan Aset Lainnya	3,757,694,740.00	8,975,749,990.00
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	37,319,649,284.35	33,500,000,000.00
i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0.00	0.00
JUMLAH	292,214,104,771.18	527,284,689,398.32

2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi **(Rp286,092,557,378.18)**
(Jumlah 2.1 - 2.2)

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana dari hutang, penerimaan kembali pinjaman, pembayaran pokok pinjaman dan pemberian pinjaman.

3.1. Arus Masuk Kas **Rp0.00**

Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari :

	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>
a. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
b. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
c. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
d. Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
e. Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00
f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
g. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
h. Penerimaan Kembali Pinjaman Pemerintah Daerah	0.00	0.00
JUMLAH	0.00	0.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

3.2. Arus Keluar Kas		Rp0.00
	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
d. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
e. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
f. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	109,025,618.00
g. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
h. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
i. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH	0.00	109,025,618.00

3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp0.00
(Jumlah 3.1 - 3.2)	

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris dengan rincian arus masuk dan keluar kas sebagai berikut.

4.1. Arus Masuk KasRp144,337,139,263.00

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari :

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	133,842,139,263.00	132,866,416,718.43
BOSNAS	0.00	0.00
BOSNAS Sekolah Swasta dan SLB	0.00	0.00
Hibah Pihak Ketiga (CSR)	0.00	0.00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta	0.00	0.00
Uang Persediaan	10,495,000,000.00	7,395,000,000.00
JUMLAH	144,337,139,263.00	140,261,416,718.43

Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp133842139263.00 terdiri dari :

No.	URAIAN	Dipotong/Dipungut (Rp)
1.	Potongan PPh 21	33,271,965,382.00
2.	Potongan PPh 22	1,366,215,888.00
3.	Potongan PPh 23	1,145,239,763.00
4.	Potongan PPh 4 (2)	3,575,271,724.00
5.	Potongan PPN	25,552,664,379.00
6.	Taperum	498,727,000.00
7.	Iuran Wajib Pegawai	35,538,157,606.00
8.	Jaminan Kesehatan	32,893,897,521.00
	JUMLAH	133,842,139,263.00

Sedangkan Uang Persediaan selama tahun 2020 sebesar Rp10495000000.00 merupakan penerbitan SP2D UP untuk SKPD sebagai berikut :

1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp1,200,000,000.00
2.	DINAS KESEHATAN	
	Rutin	Rp500,000,000.00
	DAK Non Fisik	Rp500,000,000.00
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp0.00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp250,000,000.00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp200,000,000.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

6. DINAS SOSIAL	Rp150,000,000.00
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp150,000,000.00
8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Rutin	Rp300,000,000.00
DAK Non Fisik	Rp250,000,000.00
9. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Rp200,000,000.00
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp350,000,000.00
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rutin	Rp150,000,000.00
DAK Non Fisik	Rp100,000,000.00
12. DINAS PERHUBUNGAN	Rp300,000,000.00
13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp150,000,000.00
14. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp150,000,000.00
15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Rp150,000,000.00
16. DINAS KEBUDAYAAN	Rp50,000,000.00
17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp150,000,000.00
18. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp150,000,000.00
19. DINAS PARIWISATA	
Rutin	Rp400,000,000.00
DAK Non Fisik	Rp100,000,000.00
20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rp300,000,000.00
21. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp300,000,000.00
22. INSPEKTORAT DAERAH	Rp125,000,000.00
23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp150,000,000.00
25. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp350,000,000.00
26. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Rp250,000,000.00
27. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp200,000,000.00
29. SEKRETARIAT DAERAH	Rp1,000,000,000.00
30. SEKRETARIAT DPRD	Rp1,000,000,000.00
32. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp200,000,000.00
33. KECAMATAN WONOSARI	Rp40,000,000.00
34. KECAMATAN PALIYAN	Rp40,000,000.00
35. KECAMATAN PANGGANG	Rp40,000,000.00
36. KECAMATAN TEPUS	Rp40,000,000.00
37. KECAMATAN RONGKOP	Rp40,000,000.00
38. KECAMATAN SEMANU	Rp40,000,000.00
39. KECAMATAN PONJONG	Rp40,000,000.00
40. KECAMATAN KARANGMOJO	Rp40,000,000.00
41. KECAMATAN PLAYEN	Rp40,000,000.00
42. KECAMATAN NGLIPAR	Rp40,000,000.00
43. KECAMATAN NGAWEN	Rp40,000,000.00
44. KECAMATAN SEMIN	Rp40,000,000.00
45. KECAMATAN PATUK	Rp40,000,000.00
46. KECAMATAN SAPTOSARI	Rp40,000,000.00
47. KECAMATAN GEDANGSARI	Rp40,000,000.00
48. KECAMATAN GIRISUBO	Rp40,000,000.00
49. KECAMATAN TANJUNGSARI	Rp40,000,000.00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

50. KECAMATAN PURWOSARI	Rp40,000,000.00
JUMLAH	Rp 10,495,000,000.00

4.2. Arus Keluar Kas Rp145,627,890,207.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	135,132,890,207.00	132,866,416,718.43
Hibah Pihak Ketiga (CSR)	0.00	0.00
Hibah APBN untuk Sekolah Negeri dan Swasta	0.00	0.00
Uang Persediaan	10,495,000,000.00	7,395,000,000.00
JUMLAH	145,627,890,207.00	140,261,416,718.43

4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp1,290,750,944.00)

Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp135132890207. terdiri dari :

No.	URAIAN	Disetor (Rp)
1.	Potongan PPh 21	34,562,716,326.00
2.	Potongan PPh 22	1,366,215,888.00
3.	Potongan PPh 23	1,145,239,763.00
4.	Potongan PPh 4 (2)	3,575,271,724.00
5.	Potongan PPN	25,552,664,379.00
6.	Taperum	498,727,000.00
7.	Iuran Wajib Pegawai	35,538,157,606.00
8.	Jaminan Kesehatan	32,893,897,521.00
	Jumlah	135,132,890,207.00

Selisih antara Pemungutan PFK dengan penyetoran PFK terdapat pada penyetoran PPh 21 yaitu sebesar Rp1.290.750.944,00 yang merupakan kewajiban utang PFK dengan rincian sebagai berikut.

-	Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2016)	83,850,975.00
-	Utang PFK (PPh Ps. 21 Tahun 2017)	1,206,899,969.00

Hal tersebut sudah dilunasi/diselesaikan pada tahun 2020

Saldo akhir kas sebesar Rp151024533431.85 , dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(21,593,014,866.43)	(53,056,102,452.53)
Saldo Awal Kas di BUD	173,987,461,939.63	226,758,354,207.16
Saldo Akhir Kas Daerah + Kas di Bend. Pengeluaran	150,684,734,587.73	173,702,251,754.63
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	339,798,844.12	285,210,185.00
SALDO AKHIR KAS	151,024,533,431.85	173,987,461,939.63

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
Saldo Akhir Kas di BUD	115,272,989,376.84	140,071,297,570.31
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	559,130,035.00	6,520,840.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	339,798,844.12	285,210,185.00
Setara Kas	0.00	0.00
Saldo Akhis Kas BOS	6,948,219,635.00	5,435,049,331.00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Wonosari	20,556,824,093.36	22,804,947,397.36
Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	7,347,412,447.53	5,384,647,615.96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sisa BKK DANAIS (setor ke Prov DIY-Jan 2020)	0.00	-370,000.00
Kelebihan setor IWP TA. 2017 ke Kas Negara	159,000.00	159,000.00
Jumlah	151,024,533,431.85	173,987,461,939.63

Saldo akhir kas di BUD No. Rekening A/C 002.111.000038 sebesar Rp115.272.989.376,84, belum termasuk di dalamnya Kelebihan setor IWP TA.2017 diakibatkan karena adanya selisih bayar antar aplikasi SIM gaji Taspen dengan SIPKD per SKPD sebesar Rp159.000,00. BKAD telah menyurat ke KPPN Wonosari dan DJPK terkait dengan hal tersebut, akan tetapi sd tahun 2020 tidak ada surat balasan.

Untuk Utang PFK sebesar Rp. 1.290.750.944,00 merupakan pengajuan kompensasi pajak atas selisih kenaikan PTKP tahun 2016, Pembayaran utang PFK (PPh 21) tersebut telah diselesaikan pembarayannya ke Kas Negara koordinasi KPP Pratama Wonosari.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2020

Sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan SAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 58, maka pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian laporan keuangan sebelumnya.

6.1. Informasi Tambahan

6.1.1. Dana Non APBD yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

a. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Program yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan dan urusan bersama Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.375.128.696,00 atau terserap 79,17% yaitu Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri/ Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan yang dibangun/ direvitalisasi berupa pembangunan Pasar Munggi, Semanu. Selain itu juga ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp355.390.000,00 terealisasi Rp320.400.000,00 atau terserap 90,15% yaitu Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja berupa padat karya dan pendampingan wirausaha Tenaga Kerja Mandiri untuk 100 (seratus) orang.

b. Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan pada Kabupaten Gunungkidul berasal dari Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020.

Program yang dilaksanakan melalui 4 (empat) urusan yaitu urusan tata ruang, urusan pertanahan, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Keistimewaan (Danais) sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Laporan Realisasi Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/	Anggaran	Realisasi		Ket.
			(Rp)	(%)	
	URUSAN TATA RUANG	634.322.500	633.157.100	99,82	
	Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan				
1	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Karst Gunung Sewu	634.322.500	633.157.100	99,82	
	URUSAN PERTANAHAN	4.789.091.637	4.141.816.867,21	86,48	
	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				
2	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.049.495.637	3.590.266.367	94,23	
	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				
3	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin Penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten	565.696.000	378.820.500	66,97	
4	Penanganan Keberatan dan sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	153.900.000	153.150.000	99,51	
	Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Pertanahan				
5	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	20.000.000	19.580.000	97,90	
	URUSAN KEBUDAYAAN	81.273.171.500	80.256.552.526	98,75	
	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman				
6	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	517.425.000	505.149.000	97,63	
7	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	385.965.000	341.511.000	88,48	
8	Pengembangan dan Pengelolaan Permuseuman	132.568.000	112.688.000	85,00	
	Program Pelestarian Cagar Budaya				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/	Anggaran	Realisasi		Ket.
			(Rp)	(%)	
	dan Warisan Budaya				
9	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.000.000.000	1.838.576.000	91,93	
	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
10	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.773.045.000	1.718.838.000	96,94	
11	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	268.000.000	266.360.000	99,39	
12	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Kebudayaan	23.300.000	23.300.000	100,00	
13	Penghargaan Seniman dan Budayawan	330.000.000	326.440.000	98,92	
14	Festival Kebudayaan Yogyakarta	63.700.000	54.000.000	84,77	
15	Gelar Budaya Jogja	1.371.233.000	1.350.088.000	98,46	
16	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	211.227.500	182.277.000	86,29	
17	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	2.980.000.000	2.760.370.600	92,63	
18	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	590.520.000	585.724.000	99,19	
19	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	352.000.000	225.617.000	64,10	
	Program Pengelolaan Taman Budaya				
20	Pengelolaan Dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten	70.470.733.000	70.261.766.300	99,70	
	URUSAN : KELEMBAGAAN	1.213.190.900	1.194.625.900	98,47	
	Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				
21	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul	106.541.000	106.541.000	100,00	
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				
22	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Gunungkidul	159.474.000	159.474.000	100,00	
23	Pendampingan Penerapan	658.265.000	645.025.000	100,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/	Anggaran	Realisasi		Ket.
			(Rp)	(%)	
	Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan				
24	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan	215.575.400	210.250.400	98,00	
25	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli Gunungkidul	73.335.500	73.335.500	100,00	
	JUMLAH TOTAL	87.909.776.537,00	86.226.152.393,21	98,08	

c. Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

Bantuan Keuangan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/ non pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan dan Bantuan Keuangan sebesar Rp5.672.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.417.000.000,00 atau terserap 96% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bantuan Keuangan sebagai berikut.

Laporan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	600.000.000	345.000.000	255.000.000	Pembangunan Jamban Sehat di Kapanewon Gedangsari, rencana untuk 200 unit, terealisasi 115 unit atau 57,50%, hal ini terjadi karena setelah dilakukan verifikasi, yang berhak menerima bantuan sejumlah 115 KK., sebagian calon penerima bantuan yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
					tidak lolos verifikasi disebabkan KK yang bersangkutan sudah meninggal, pindah domisili, sudah punya jamban & perberbedaan nama.
2.	Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi	572.000.000	572.000.000	-	Padat Karya Infrastruktur (Corblok jalan) 4 lokasi : 1. Wangon, Serut, Gedangsari 2. Palar, Umbulrejo, Ponjong 3. Sladi, Umbulrejo, Ponjong 4. Tepus, Pundungsari, Semin Waktu pelaksanaan mundur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada triwulan IV. Disamping itu bersamaan dengan musim hujan dan masa tanam bagi warga masyarakat.
3.	KPU Kab. Gunungkidul	4.500.000.000	4.500.000.000	-	Bantuan Keuangan Pemilukada
JUMLAH		5.672.000.000	5.417.000.000	255.000.000	Total serapan sebesar 96,00%

6.1.2. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2020 menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp76.213.990.000,00 yang terdiri dari BOS Reguler Rp70.093.990.000,00, BOS Afirmasi Rp480.000.000,00 dan BOS Kinerja Rp5.640.000.000,00. Adapun realisasi Tahun 2020 sebesar Rp74.408.081.616,00 yang terdiri dari BOS Reguler Rp68.406.936.710,00, BOS Afirmasi Rp648.389.452,00 dan BOS Kinerja Rp5.352.755.454,00. Sedangkan jika dialirkan dari saldo akhir 2019 yang menjadi saldo awal 2020 sebesar Rp6.213.657.496,00 ditambah penerimaan Tahun 2020 Rp76.213.990.000,00 dikurangi realisasi tahun berjalan Rp74.408.081.616,00 dikurangi pengembalian Rp160.837.268,00, ditambah Jasa Giro Rp661.000,00 dikurangi biaya administrasi bank Rp148.149,00, sehingga saldo akhir 2020 menjadi Rp7.859.242.136,00.

Dari total anggaran tersebut sebesar Rp12.732.758.165,00 diperuntukkan dan dikelola oleh sekolah swasta baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jika dialirkan dari tahun sebelumnya, saldo awal Rp778.608.165,00, penerimaan tahun berjalan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Rp11.954.150.000,00, dengan realisasi Rp11.822.249.188,00 dengan rincian SD Swasta realisasi Rp5.767.185.515,00 dan SMP Swasta Rp46.055.063.673,00. Adapun saldo akhir 2020 yang dikelola sekolah swasta total sebesar Rp911.022.501,00 saldo SD swasta sebesar Rp396.069.635,00 dan SMP swasta sebesar Rp514.952.866,00. Sampai dengan saat laporan ini disusun, rincian nama sekolah dan besaran saldo akhir sekolah swasta, belum kami dapatkan informasinya.

Dari realisasi Dana BOS Tahun Anggaran 2020 terdapat saldo kas sebesar Rp7.859.242.136,00 yang terdiri dari Sekolah Negeri sebesar Rp6.948.219.635,00 dan sekolah swasta sebesar Rp911.022.501,00.

Adapun aliran Dana BOS 2020 secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut.

SATDIK	Saldo awal	Penerimaan	Realisasi	Pengembalian (STS)	Jasa Giro	Biaya Adm	Saldo Akhir
REGULER :							
SD Negeri	1.566.151.492	38.653.200.000	38.032.424.985	100.837.268	-	-	2.086.089.239
SMP Negeri	3.574.787.667	21.166.640.000	20.101.833.301	-	-	-	4.639.594.366
	5.140.939.159	59.819.840.000	58.134.258.286	100.837.268	-	-	6.725.683.605
SD Swasta	284.061.626	5.458.680.000	5.372.432.875	-	661.673	148.149	370.822.275
SMP Swasta	494.546.539	4.815.470.000	4.900.245.549	-	-	-	409.770.990
	778.608.165	10.274.150.000	10.272.678.424	-	661.673	148.149	780.593.265
JML Reguler	5.919.547.324	70.093.990.000	68.406.936.710	100.837.268	661.673	148.149	7.506.276.870
AFIRMASI:							
SD Negeri	57.933.000	300.000.000	331.640.674	-	-	-	26.292.326
SD Swasta		120.000.000	115.951.270	-	-	-	4.048.730
	57.933.000	420.000.000	447.591.944	-	-	-	30.341.056
SMP Negeri	140.797.508	-	140.797.508	-	-	-	-
SMP Swasta		60.000.000	60.000.000	-	-	-	-
	140.797.508	60.000.000	200.797.508	-	-	-	-
Jml Afirmasi	198.730.508	480.000.000	648.389.452	-	-	-	30.341.056
KINERJA :							
SD Negeri	92.415.664	3.360.000.000	3.257.114.093	60.000.000	-	-	135.301.571
SD Swasta		300.000.000	278.801.370	-	-	-	21.198.630
	92.415.664	3.660.000.000	3.535.915.463	60.000.000	-	-	156.500.201
SMP Negeri	2.964.000	780.000.000	722.021.867	-	-	-	60.942.133
SMP Swasta		1.200.000.000	1.094.818.124	-	-	-	105.181.876
	2.964.000	1.980.000.000	1.816.839.991	-	-	-	166.124.009
Jml Kinerja	95.379.664	5.640.000.000	5.352.755.454	60.000.000	-	-	322.624.210
TOTAL	6.213.657.496	76.213.990.000	74.408.081.616	160.837.268	661.673	148.149	7.859.242.136

Adapun daftar saldo kas Dana BOS per 31 Desember 2020 pada sekolah negeri sebesar Rp6.948.219.635,00 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Daftar Rincian Saldo Kas Dana Bos Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020

BOS REGULER

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Keterangan
	Kapanewon Girisubo 16 Sekolah		
1	SD Balong	10.483.500,00	
2	SD Jepitu I	2.729.400,00	
3	SD Nglindur	2.308.000,00	
4	SD Rongkop	47.750,00	
5	SD Tileng I	998.353,00	
6	SD Tileng II	10.000,00	
7	SD Pucung	11.500,00	
8	SD Songbanyu I	2.257.500,00	
9	SD Songbanyu II	296.000,00	
10	SD Kandri	4.417.650,00	
11	SD Balong III	729.530,00	
12	SD Jepitu III	21.390,00	
13	SD Tileng III	8.689.800,00	
14	SD Wotawati	4.596.454,00	
15	SD Joho	195.000,00	
16	SD Gabugan	105.000,00	
	Kapanewon Karangmojo 34 Sekolah		
17	SD Karangmojo IV	1.835.100,00	
18	SD Karangmojo II	4.465.628,00	
19	SD Karangmojo V	10.743.971,00	
20	SD Ngawis	1.061.295,00	
21	SD Ngagel	9.625,00	
22	SD Karangmojo III	4.398.500,00	
23	SD Karangmojo I	1.059.942,00	
24	SD Gedangan	3.273.844,00	
25	SD Gedangan I	5.868.404,00	
26	SD Pangkah	5.251.210,00	
27	SD Karangwetan	156.913,00	
28	SD Candi II	105.582,00	
29	SD Candi I	12.750.272,00	
30	SD Candi Baru I	1.048.710,00	
31	SD Candi Baru II	5.220.963,00	
32	SD Sokoliman I	20.183.314,00	
33	SD Karanganom I	5.352.055,00	
34	SD Karanganom II	111.400,00	
35	SD Wiladeg	8.947.682,00	
36	SD Bendungan II	5.072.652,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

37	SD Bendungan III	10.299.840,00	
38	SD Bendungan I	7.809.595,00	
39	SD Grogol I	503.855,00	
40	SD Grogol IV	7.266.400,00	
41	SD Gelaran I	13.746.300,00	
42	SD Gelaran II	387.300,00	
43	SD Banyubening III	4.502.100,00	
44	SD Banyubening I	10.785.800,00	
45	SD Gelaran III	10.824.045,00	
46	SD Pengkol	298.040,00	
47	SD Slametan	38.568.385,00	
48	SD Karangduwet I	790.000,00	
49	SD Karangduwet III	208.890,00	
50	SD Jetis	2.303.500,00	
	Kapanewon Paliyan 14 Sekolah		
51	SD Paliyan II	2.665.337,00	
52	SD Paliyan IV	10.428.197,00	
53	SD Paliyan I	2.552.961,00	
54	SD Paliyan V	6.122.010,00	
55	SD Giring	1.362.841,00	
56	SD Paliyan III	2.075.095,00	
57	SD Pelemgede	229.879,00	
58	SD Trowono I	2.237.546,00	
59	SD Karangasem	1.126.747,00	
60	SD Mulusan	4.841.541,00	
61	SD Sodo	2.405.210,00	
62	SD Pampang I	2.499.383,00	
63	SD Pampang II	1.388.999,00	
64	SD Karangmojo II	1.722.864,00	
	Kapanewon Panggang 20 Sekolah		
65	SD Panggang III	5.613.467,00	
66	SD Panggang II	14.752.966,00	
67	SD Banyumeneng	23.513.207,00	
68	SD Bibal	297.175,00	
69	SD Legundi I	13.760.475,00	
70	SD Girimulyo	6.160.636,00	
71	SD Wiloso II	3.201.535,00	
72	SD Wiloso I	12.130.414,00	
73	SD Girisekar	27.677.253,00	
74	SD Girikarto	48.763.493,00	
75	SD Sawah	7.465.476,00	
76	SD Panggang I	21.383.255,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

77	SD Legundi II	8.211.042,00	
78	SD Pejaten	4.902.969,00	
79	SD Sawah III	1.865.516,00	
80	SD Girisuko	9.993.938,00	
81	SD Temuireng II	2.615.020,00	
82	SD Turunan	5.047.795,00	
83	SD Pacar	9.952.047,00	
84	SD Temuireng I	14.208.919,00	
	Kapanewon Patuk 23 Sekolah		
85	SD Bunder I	8.742.150,00	
86	SD Bunder II	5.667.272,00	
87	SD Bunder III	1.381.008,00	
88	SD Sendangsari	20.654.598,00	
89	SD Nglegi I	847.168,00	
90	SD Nglegi II	22.341.946,00	
91	SD Klepu	2.403.418,00	
92	SD Terbah II	531.180,00	
93	SD Sidomulyo	5.293.054,00	
94	SD Panjatan	250.200,00	
95	SD Baran	4.987.472,00	
96	SD Pugeran	596.235,00	
97	SD Beji	198.400,00	
98	SD Terbah I	9.131.196,00	
99	SD Belang	3.418.800,00	
100	SD Patuk I	3.994.010,00	
101	SD Patuk II	715.500,00	
102	SD Doga	5.095.680,00	
103	SD Sokasari	10.845.937,00	
104	SD Ngoro-oro	2.420.922,00	
105	SD Nglanggeran	3.764.154,00	
106	SD Pengkok	5.320.239,00	
107	SD Waduk	8.169.745,00	
	Kapanewon Playen 29 Sekolah		
108	SD Playen I	1.079.140,00	
109	SD Playen VI	2.422.286,00	
110	SD Playen IV	1.146.414,00	
111	SD Ngunut	506.101,00	
112	SD Playen III	2.498.120,00	
113	SD Bleberan	398.785,00	
114	SD Sawahan	4.712.400,00	
115	SD Dengok II	649.535,00	
116	SD Siyono I	34.414.800,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

117	SD Mendongan	4.677.469,00	
118	SD Siyono III	4.592.934,00	
119	SD Weroharjo	3.411.082,00	
120	SD Logandeng	115.680,00	
121	SD Plembon	11.807.205,00	
122	SD Gading Asri	23.390,00	
123	SD Dengok I	536.054,00	
124	SD Ngleri	15.437.550,00	
125	SD Teguhan	2.878.035,00	
126	SD Banaran I	3.217.570,00	
127	SD Banaran III	158.900,00	
128	SD Getas I	3.764.820,00	
129	SD Getas II	187.560,00	
130	SD Wonolagi	124.502,00	
131	SD Playen V	3.914.104,00	
132	SD Bulu	11.715.160,00	
133	SD Plembutan I	1.029.340,00	
134	SD Plembutan Asri	3.468.070,00	
135	SD Banyusoco I	2.957.514,00	
136	SD Banyusoco II	574.044,00	
	Kapanewon Ponjong 33 Sekolah		
137	SD Sendang	479.765,00	
138	SD Sawahan	3.656.465,00	
139	SD Sawur	1.292.428,00	
140	SD Bedoyo	24.286.495,00	
141	SD Tambakromo I	3.007.634,00	
142	SD Tambakromo II	668.612,00	
143	SD Tambakromo III	11.686.284,00	
144	SD Jatisari	103.789,00	
145	SD Surodadi I	2.141.600,00	
146	SD Kenteng I	3.972.900,00	
147	SD Kenteng II	1.970.460,00	
148	SD Klumpit	528.101,00	
149	SD Karangasem	1.765.549,00	
150	SD Tegalrejo	7.303.039,00	
151	SD Trengguno	359.750,00	
152	SD Tegalrejo Baru	5.427.836,00	
153	SD Asemulung	608,00	
154	SD Ngabean	4.747.898,00	
155	SD Surubendo	1.193.518,00	
156	SD Nongkosepet	9.422.546,00	
157	SD Gombang I	1.080.159,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

158	SD Gombang II	1.961.792,00	
159	SD Ponjong I	9.111.644,00	
160	SD Ponjong IV	98.810,00	
161	SD Mendak	2.161.593,00	
162	SD Umbulrejo	683.379,00	
163	SD Ponjong II	166.500,00	
164	SD Ponjong III	9.513.888,00	
165	SD Genjahan II	281.076,00	
166	SD Sumbergiri	176.870,00	
167	SD Genjahan III	1.303.923,00	
168	SD Surodadi II	898.540,00	
169	SD Sunggingan	50.000,00	
	Kapanewon Rongkop 21 Sekolah		
170	SD Bohol	879.950,00	
171	SD Pakel I	11.750,00	
172	SD Pakel II	293.340,00	
173	SD Botodayakan	4.901.737,00	
174	SD Yuyang	32.062,00	
175	SD Petir I	33.898.332,00	
176	SD Petir II	15.373.971,00	
177	SD Pucanganom I	375.325,00	
178	SD Pucanganom II	5.018.000,00	
179	SD Baran I	1.123.100,00	
180	SD Kerdonmiri I	2.504.249,00	
181	SD Baran II	2.614.330,00	
182	SD Kerdonmiri II	2.287.412,00	
183	SD Karangwuni I	14.627.541,00	
184	SD Melikan	727.375,00	
185	SD Kenteng	3.420.197,00	
186	SD Banombo	106.500,00	
187	SD Karangwuni II	1.148.180,00	
188	SD Kropak	146.193,00	
189	SD Cabe	4.130,00	
190	SD Kendal	2.924.716,00	
	Kapanewon Tepus 21 Sekolah		
191	SD Tepus I	5.968.437,00	
192	SD Tepus II	7.755.714,00	
193	SD Sumberwungu II	1.514.249,00	
194	SD Bantalwatu	310.733,00	
195	SD Gupakan II	80.981,00	
196	SD Giripanggung	2.560.857,00	
197	SD Banjarsari	372.944,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

198	SD Sumberwungu I	830.836,00	
199	SD Ploso	3.353.792,00	
200	SD Widoro	8.831.502,00	
201	SD Gupakan I	728.210,00	
202	SD Sidoharjo	1.319.080,00	
203	SD Puleireng	7.454.995,00	
204	SD Bintaos	23.386.723,00	
205	SD Pudak	32.970.365,00	
206	SD Purwodadi	1.032.972,00	
207	SD Belik	3.957.459,00	
208	SD Gesing	1.017.565,00	
209	SD Kropak	11.011.311,00	
210	SD Purwodadi I	104.069,00	
211	SD Tepus IV	768.625,00	
	Kapanewon Gedangsari 24 Sekolah		
212	SD Prengguk I	1.309.514,00	
213	SD Prengguk II	1.331.200,00	
214	SD Tegalrejo	14.600.100,00	
215	SD Tengkluk	8.143.736,00	
216	SD Gupit	5.541.170,00	
217	SD Candi	4.660.863,00	
218	SD Gedangan I	436.000,00	
219	SD Gedangan II	11.034.530,00	
220	SD Hargomulyo I	71.974,00	
221	SD Hargomulyo II	1.758.350,00	
222	SD Ngalang-alang Ombo	340.860,00	
223	SD Serut	2.120.834,00	
224	SD Serut Baru	3.125.000,00	
225	SD Watugajah	988.260,00	
226	SD Mertelu	14.555.134,00	
227	SD Mertelu Baru	825.020,00	
228	SD Guyangan	3.747.920,00	
229	SD Ngalang I	3.368.544,00	
230	SD Ngalang II	12.563.972,00	
231	SD Karanganyar	18.434.100,00	
232	SD Buyutan	21.819.000,00	
233	SD Sampang	7.023.950,00	
234	SD Kedung Bolong	2.343.980,00	
235	SD Pondok	18.175.152,00	
	Kapanewon Ngawen 19 Sekolah		
236	SD Bendo	2.663.709,00	
237	SD Daguran	960.100,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

238	SD Watusigar I	10.816.024,00	
239	SD Watusigar II	772.619,00	
240	SD Ngawen I	1.291.392,00	
241	SD Ngawen II	2.583.600,00	
242	SD Ngawen III	774.600,00	
243	SD Pagerjurang	112.598,00	
244	SD Ngampon	1.242.920,00	
245	SD Purwareja	2.005.600,00	
246	SD Jurangjero	1.070.490,00	
247	SD Gunung Gambar	392.500,00	
248	SD Sambeng II	46.023,00	
249	SD Tobong	940.547,00	
250	SD Sambirejo	634.053,00	
251	SD Ngawen IV	3.453.176,00	
252	SD Beji	2.465.635,00	
253	SD Tancep I	665.000,00	
254	SD Tancep II	156.000,00	
	Kapanewon Nglipar 20 Sekolah		
255	SD Gentungan	76.405,00	
256	SD Sendowo I	8.746.400,00	
257	SD Katongan II	4.524.857,00	
258	SD Gajasari	3.341.934,00	
259	SD Nglipar I	6.222.709,00	
260	SD Nglipar II	995.429,00	
261	SD Kwarasan	7.154.300,00	
262	SD Sumberjo	215.140,00	
263	SD Sigerung	4.777.215,00	
264	SD Natah	30.590.166,00	
265	SD Gentungan III	542.165,00	
266	SD Pilangrejo	13.181.572,00	
267	SD Sendowo III	57.031,00	
268	SD Glompong	4.995.616,00	
269	SD Sendowo II	213.751,00	
270	SD Karangsari	3.063.160,00	
271	SD Katongan III	198.900,00	
272	SD Klayar	1.135.257,00	
273	SD Candi III	3.384.504,00	
274	SD Katongan I	579.440,00	
	Kapanewon Purwosari 13 Sekolah		
275	SD Giriasih	3.085.250,00	
276	SD Nanas	5.108.096,00	
277	SD Petoyan II	8.647.537,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

278	SD Petoyan I	1.707.820,00	
279	SD Giripurwo	9.322.216,00	
280	SD Giritirto	156.020,00	
281	SD Klampok	9.789.584,00	
282	SD Karangnongko I	6.014.520,00	
283	SD Karangnongko III	115.004,00	
284	SD Karangtengah II	5.816.388,00	
285	SD Karangtengah I	1.567.400,00	
286	SD Giricahyo	1.679.558,00	
287	SD Karangnongko II	9.229.442,00	
	Kapanewon Saptosari 18 Sekolah		
288	SD Jetis I	2.762.995,00	
289	SD Trowono II	719.950,00	
290	SD Planjan II	4.253.691,00	
291	SD Kepek I	2.322.656,00	
292	SD Kepek II	15.647.435,00	
293	SD Monggol II	1.850.740,00	
294	SD Pucung	831.351,00	
295	SD Trowono III	1.289.629,00	
296	SD Planjan I	14.037.816,00	
297	SD Monggol I	8.619.938,00	
298	SD Kanigoro I	7.158.163,00	
299	SD Kanigoro II	2.762.393,00	
300	SD Gedangklutuk	22.190.946,00	
301	SD Ngloro	462.067,00	
302	SD Sawah	35.277.259,00	
303	SD Bibis	15.438.726,00	
304	SD Jetis II	1.893.153,00	
305	SD Krambilsawit	36.766,00	
	Kapanewon Semanu 30 Sekolah		
306	SD Ngeposari	535.772,00	
307	SD Ngeposari II	10.107.140,00	
308	SD Jragum	2.086.220,00	
309	SD Tunggak nongko	2.319.563,00	
310	SD Semanu	2.676.400,00	
311	SD Semanu III	21.406.600,00	
312	SD Semanu IV	3.074.061,00	
313	SD Pragak	3.760.304,00	
314	SD Mijahan I	772,00	
315	SD Mijahan II	399.587,00	
316	SD Kuwon	9.050.150,00	
317	SD Jetis	4.491.484,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

318	SD Gunungkunir I	1.111.837,00	
319	SD Gunungkunir II	1.102.365,00	
320	SD Cuwelo I	673.612,00	
321	SD Cuwelo II	1.012.692,00	
322	SD Jati	879.720,00	
323	SD Plebengan	4.568.700,00	
324	SD Dayakan II	3.700.100,00	
325	SD Ngenep	4.830.153,00	
326	SD Srengeng	14.516.229,00	
327	SD Kwangen	14.804.222,00	
328	SD Dadapayu I	173.416,00	
329	SD Pacarejo II	27.750,00	
330	SD Dadapayu II	195.557,00	
331	SD Gunungsari	6.586.480,00	
332	SD Dengok	191.689,00	
333	SD Nitikan	4.576.709,00	
334	SD Jasem	323.674,00	
335	SD Wediwutah	5.318,00	
	Kapanewon Semin 28 Sekolah		
336	SD Semin II	21.201.017,00	
337	SD Semin IV	165.880,00	
338	SD Sumberejo	4.328.100,00	
339	SD Bulurejo II	1.253.417,00	
340	SD Semin I	437.601,00	
341	SD Payaman II	4.801.415,00	
342	SD Karang Sari	80.486,00	
343	SD Semin III	907.687,00	
344	SD Rejosari III	19.209.034,00	
345	SD Keringan	3.045.780,00	
346	SD Rejosari II	2.364.781,00	
347	SD Ngadipiro	4.436.044,00	
348	SD Sumber	896.050,00	
349	SD Candirejo I	2.297.713,00	
350	SD Candirejo II	2.312.900,00	
351	SD Ngentak	1.365.961,00	
352	SD Widoro	319.435,00	
353	SD Logantung I	11.169.905,00	
354	SD Logantung II	3.111.710,00	
355	SD Bendung II	116.789,00	
356	SD Prebutan	550.000,00	
357	SD Tambran I	1.290.600,00	
358	SD Tambran II	875.260,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

359	SD Bendung I	181.278,00	
360	SD Klampok	28.909,00	
361	SD Ngepoh	10.326.370,00	
362	SD Sedono	6.309.280,00	
363	SD Bulurejo I	431.095,00	
	Kapanewon Tanjungsari 15 Sekolah		
364	SD Rejosari	5.982.572,00	
365	SD Kemadang	3.321.737,00	
366	SD Kanigoro	2.717.398,00	
367	SD Gebang	720.000,00	
368	SD Kemiri I	671.446,00	
369	SD Panggang	112.625,00	
370	SD Jaten	1.135.480,00	
371	SD Kemiri II	3.821.454,00	
372	SD Ngestiharjo	14.423.884,00	
373	SD Banjarharjo	413,00	
374	SD Gatak	619.522,00	
375	SD Hargosari	3.130.500,00	
376	SD Mendang	1.525.450,00	
377	SD Mentel I	2.020.204,00	
378	SD Mentel II	150.000,00	
	Kapanewon Wonosari 30 Sekolah		
379	SD Karangrejek II	444.721,00	
380	SD Wonosari VI	338.198,00	
381	SD Piyaman I	673.312,00	
382	SD Wonosari II	19.935.445,00	
383	SD Wonosari IV	2.321.479,00	
384	SD Wonosari I	7.012.879,00	
385	SD Karangtengah III	6.267.923,00	
386	SD Karangtengah Baru	38.155.474,00	
387	SD Piyaman II	7.692.567,00	
388	SD Gari III	21.783.963,00	
389	SD Jeruksari	1.836.148,00	
390	SD Piyaman III	4.146.545,00	
391	SD Wonosari Baru	37.242.000,00	
392	SD Duwet	2.061.180,00	
393	SD Jambe	3.337.270,00	
394	SD Soka	85.949,00	
395	SD Gari I	4.221.646,00	
396	SD Baleharjo	264.347,00	
397	SD Kamal	5.446.890,00	
398	SD Kajar	1.353.717,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

399	SD Karangtengah IV	7.596.243,00	
400	SD Seneng	309.420,00	
401	SD Siraman I	8.925.337,00	
402	SD Siraman II	12.784.244,00	
403	SD Siraman III	5.146.741,00	
404	SD Karangrejek I	11.584.498,00	
405	SD Mulo II	17.203.970,00	
406	SD Mulo Baru	2.219.060,00	
407	SD Selang	10.451.705,00	
408	SD Singkar	2.009.446,00	
	SMP 61 Sekolah		
409	SMP 1 GIRISUBO	68.402.251,00	
410	SMP 2 GIRISUBO	23.008.444,00	
411	SMP 3 GIRISUBO	5.114.924,00	
412	SMP 1 PALIYAN	172.615.958,00	
413	SMP 2 PALIYAN	58.029.427,00	
414	SMP 1 PANGGANG	129.541.693,00	
415	SMP 2 PANGGANG	62.183.480,00	
416	SMP 3 PANGGANG	5.235.484,00	
417	SMP 4 PANGGANG	24.307.083,00	
418	SMP 5 PANGGANG	7.401.239,00	
419	SMP 1 PLAYEN	210.383.324,00	
420	SMP 2 PLAYEN	289.445.798,00	
421	SMP 3 PLAYEN	73.643.311,00	
422	SMP 4 PLAYEN	83.606.201,00	
423	SMP 1 PURWOSARI	78.415.252,00	
424	SMP 2 PURWOSARI	20.081.325,00	
425	SMP 1 RONGKOP	34.097.469,00	
426	SMP 2 RONGKOP	7.285.700,00	
427	SMP 1 SAPTOSARI	15.030.495,00	
428	SMP 2 SAPTOSARI	35.582.950,00	
429	SMP 3 SAPTOSARI	26.562.844,00	
430	SMP 1 TANJUNGSARI	65.973.978,00	
431	SMP 2 TANJUNGSARI	31.026.442,00	
432	SMP 3 TANJUNGSARI	27.473.768,00	
433	SMP 1 TEPUS	63.388.983,00	
434	SMP 2 TEPUS	9.061.881,00	
435	SMP 3 TEPUS	20.917.887,00	
436	SMP 1 GEDANGSARI	161.751.005,00	
437	SMP 2 GEDANGSARI	95.481.901,00	
438	SMP 3 GEDANGSARI	64.481.996,00	
439	SMP 1 KARANGMOJO	142.749.182,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

440	SMP 2 KARANGMOJO	124.122.458,00	
441	SMP 3 KARANGMOJO	60.351.067,00	
442	SMP 1 NGAWEN	232.557.840,00	
443	SMP 3 NGAWEN	21.595.032,00	
444	SMP 4 NGAWEN	38.087.843,00	
445	SMP 5 NGAWEN	2.404.355,00	
446	SMP 1 NGLIPAR	193.962.453,00	
447	SMP 2 NGLIPAR	130.924.518,00	
448	SMP 3 NGLIPAR	9.534.928,00	
449	SMP 4 NGLIPAR	20.305.055,00	
450	SMP 1 PATUK	76.030.667,00	
451	SMP 2 PATUK	38.831.013,00	
452	SMP 3 PATUK	30.301.028,00	
453	SMP N 4 PATUK	43.571.678,00	
454	SMP 5 PATUK	3.775.826,00	
455	SMP 1 PONJONG	246.844.247,00	
456	SMP 2 PONJONG	79.658.105,00	
457	SMP 3 PONJONG	83.085.539,00	
458	SMP 4 PONJONG	25.581.500,00	
459	SMP 1 SEMANU	127.436.990,00	
460	SMP 2 SEMANU	30.430.000,00	
461	SMP 3 SEMANU	239.316.564,00	
462	SMP 1 SEMIN	22.928.765,00	
463	SMP 2 SEMIN	53.957.300,00	
464	SMP 3 SEMIN	6.604.655,00	
465	SMP 4 SEMIN	3.904.300,00	
466	SMP 1 WONOSARI	196.934.209,00	
467	SMP 2 WONOSARI	106.433.311,00	
468	SMP 3 WONOSARI	118.462.336,00	
469	SMP 4 WONOSARI	159.379.109,00	
	Jumlah BOS Reguler	6.725.683.605,00	

BOS AFIRMASI

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Keterangan
1	SD Pakel I	25.000,00	Rongkop
2	SD Sendowo II	1.655.000,00	Nglipar
3	SD Pucung	2.160.000,00	Girisubo
4	SD Tileng III	2.160.000,00	Girisubo
5	SD Kenteng	1.080.000,00	Rongkop
6	SD Candi	3.573.096,00	Gedangsari
7	SD Sigerung	15.639.230,00	Nglipar
	Jumlah BOS Afirmasi	26.292.326,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BOS KINERJA

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Keterangan
1	SD Songbanyu I	2.160.000,00	Girisubo
2	SD Songbanyu II	1.080.000,00	Girisubo
3	SD Kandri	2.160.000,00	Girisubo
4	SD Balong III	2.160.000,00	Girisubo
5	SD Jepitu III	2.635.000,00	Girisubo
6	SD Joho	2.160.000,00	Girisubo
7	SD Gabugan	1.080.000,00	Girisubo
8	SD Terbah II	10.089.000,00	Patuk
9	SD Pugeran	2.160.000,00	Patuk
10	SD Doga	2.160.000,00	Patuk
11	SD Nglanggeran	2.160.000,00	Patuk
12	SD Bohol	2.160.000,00	Rongkop
13	SD Botodayakan	2.160.000,00	Rongkop
14	SD Yuyang	1.170.310,00	Rongkop
15	SD Petir II	2.160.000,00	Rongkop
16	SD Pucanganom I	2.160.000,00	Rongkop
17	SD Pucanganom II	1.080.000,00	Rongkop
18	SD Banombo	2.160.000,00	Rongkop
19	SD Cabe	1.280.000,00	Rongkop
20	SD Tepus II	2.160.000,00	Tepus
21	SD Sumberwungu II	2.160.000,00	Tepus
22	SD Bantalwatu	2.160.000,00	Tepus
23	SD Gupakan II	2.190.440,00	Tepus
24	SD Giripanggung	2.160.000,00	Tepus
25	SD Banjarsari	2.160.000,00	Tepus
26	SD Sumberwungu I	2.330.000,00	Tepus
27	SD Ploso	2.560.000,00	Tepus
28	SD Gupakan I	2.170.000,00	Tepus
29	SD Purwodadi	2.160.000,00	Tepus
30	SD Gesing	2.160.000,00	Tepus
31	SD Kropak	2.268.000,00	Tepus
32	SD Buyutan	4.995.000,00	Gedangsari
33	SD Prengguk I	2.160.000,00	Gedangsari
34	SD Prengguk II	2.160.000,00	Gedangsari
35	SD Tegalrejo	2.168.310,00	Gedangsari
36	SD Tengklik	2.160.000,00	Gedangsari
37	SD Gupit	2.669.800,00	Gedangsari
38	SD Ngalang-alang Ombo	1.487.090,00	Gedangsari



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

39	SD Serut	1.664.542,00	Gedangsari
40	SD Serut Baru	3.682.670,00	Gedangsari
41	SD Mertelu	2.160.000,00	Gedangsari
42	SD Mertelu Baru	2.666.010,00	Gedangsari
43	SD Guyangan	2.160.000,00	Gedangsari
44	SD Ngalang I	7.696.000,00	Gedangsari
45	SD Sampang	2.160.000,00	Gedangsari
46	SD Kedung Bolong	2.160.000,00	Gedangsari
47	SD Pondok	2.160.000,00	Gedangsari
48	SD Sambeng I	187.304,00	Ngawen
49	SD Sambeng II	418.400,00	Ngawen
50	SD Tobong	1.705.851,00	Ngawen
51	SD Sambirejo	2.218.407,00	Ngawen
52	SD Glompong	2.259.105,00	Nglipar
53	SD Kanigoro II	5.007.720,00	Saptosari
54	SD Ngentak	254.852,00	Semin
55	SD Kanigoro	50.000,00	Tanjungsari
56	SD Jaten	2.160.000,00	Tanjungsari
57	SD Gatak	2.239.240,00	Tanjungsari
58	SD Mendang	3.518.520,00	Tanjungsari
59	SMP 3 Girisubo	2.160.003,00	Girisubo
60	SMP 5 Panggang	2.469.100,00	Panggang
61	SMP 3 Saptosari	14.719.610,00	Saptosari
62	SMP 2 Tepus	2.160.000,00	Tepus
63	SMP 3 Tepus	2.310.000,00	Tepus
64	SMP 2 Gedangsari	2.360.000,00	Gedangsari
65	SMP 3 Nglipar	2.160.500,00	Nglipar
66	SMP 4 Nglipar	2.184.000,00	Nglipar
67	SMP 4 Patuk	2.209.000,00	Patuk
68	SMP 5 Patuk	27.737.420,00	Patuk
69	SMP 1 Wonosari	472.500,00	Wonosari
	Jumlah BOS Kinerja	196.243.704,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Secara ringkas saldo kas dana BOS per 31 Desember 2020 yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

SEKOLAH NEGERI				
	REGULER	6.725.683.605,00	469	sekolah
	AFIRMASI	26.292.326,00	7	sekolah
	KINERJA	196.243.704,00	69	sekolah
	TOTAL SEKOLAH NEGERI	6.948.219.635,00	545	sekolah
SEKOLAH SWASTA				
	REGULER	780.593.265,00		
	AFIRMASI	4.048.730,00		
	KINERJA	126.380.506,00		
	TOTAL SEKOLAH SWASTA	911.022.501,00		
	TOTAL	7.859.242.136,00		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan ini merupakan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020.

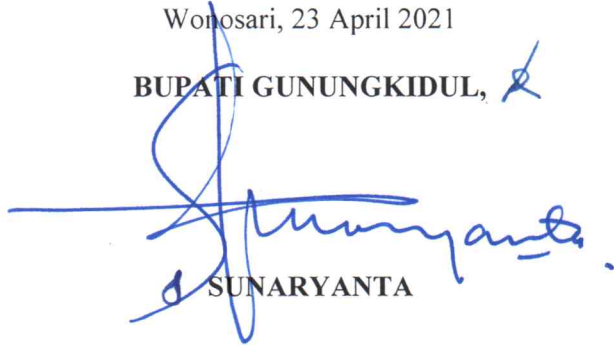
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 secara lengkap terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2015.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 yang kami sajikan masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk periode yang akan datang, dan semoga Allah S.W.T selalu memberikan petunjuk-Nya. Amin.

Wonosari, 23 April 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL, 


SUNARYANTA